

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Sektor perikanan menyediakan 15 persen protein hewani berkualitas tinggi termasuk asam lemak omega-3, mineral, dan vitamin dari total protein di seluruh dunia. Produksi perikanan mencapai 223,2 juta ton, dengan 185,4 juta ton hewan air dan 37,8 juta ton ganggang. Untuk pertama kalinya, produksi perikanan budi daya melampaui produksi perikanan tangkap dengan 94,4 juta ton (51 %). Indonesia menjadi penghasil produk perikanan terbesar ke-3 (7 %) di bawah India (8 %), dan Tiongkok (36 %) (FAO, 2024).

Diperkirakan 61,8 juta orang berusaha dan bekerja di sektor produksi perikanan, sebagian besar dalam skala kecil. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sasaran, transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan investasi yang bertanggung jawab guna mendorong perikanan budi daya berkelanjutan. Forum global utama seperti Konferensi Tingkat Tinggi Sistem Pangan Perserikatan Bangsa Bangsa dan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim menyampaikan bahwa potensi perikanan berkontribusi pada ketahanan pangan, penyediaan nutrisi dan pengurangan kemiskinan (FAO, 2024).

Tiongkok telah menjadi produsen budi daya ikan terbesar dunia sejak tahun 2002 (FAO, 2022). Produksi budi daya ikannya telah mencapai 52,24 juta metrik ton (MMT) pada tahun 2020, didominasi oleh budi daya ikan di darat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan budi daya ikan yang ramah lingkungan, menguntungkan dan berkelanjutan melalui pembudidayaan beragam jenis ikan air tawar, penggunaan benih ikan unggul varietas utama budi daya ikan di Tiongkok yaitu ikan Mas dan ikan Nila, pengembangan berbagai sistem budi daya ikan, pengembangan preferensi pasar baru, formulasi pakan yang tepat,

peningkatan kesehatan dan kualitas daging ikan, penurunan mortalitas, dan mengurangi biaya penyakit serta obat-obatan (Hua et al., 2024).

Kebijakan budi daya ikan yang ramah lingkungan, menguntungkan dan berkelanjutan di Tiongkok tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan perusahaan penyedia pakan. Pemerintah Tiongkok memberikan dukungan finansial bagi banyak penelitian dasar dan terapan tentang pembudidayaan ikan untuk mengembangkan teknologi dan pengetahuan baru yang dapat diterapkan pada industri pembudidayaan ikan. Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan membangun sistem penyuluhan perikanan pembudidayaan ikan yang komprehensif pada tahun 1990. Sistem penyuluhan perikanan milik negara memiliki lima tingkatan, yaitu tingkat nasional, provinsi, kota, kabupaten, dan kota kecil, sementara lembaga penelitian, universitas, organisasi sosial, dan perusahaan perikanan budi daya merupakan kontributor penting bagi pengembangan teknis. Ada tiga model penyuluhan perikanan budi daya utama, yaitu program penyuluhan perikanan teknis, zona demonstrasi, dan konsultasi teknis. Selanjutnya, pasar juga merupakan salah satu faktor penting yang mendorong peningkatan produksi ikan air tawar di Tiongkok. Tiongkok telah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas produk perikanan budi daya dan meningkatkan pasokan pasar guna memenuhi permintaan nasional dan internasional. Misalnya, ikan mas untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan ikan nila untuk diekspor ke Amerika Serikat dan negara-negara Eropa (Hua et al., 2024).

Selanjutnya dalam rangka merespon kebijakan Pemerintah Tiongkok yang mengeluarkan undang-undang perlindungan lingkungan yang mengurangi area budi daya ikan mas secara signifikan, dan adanya perubahan preferensi konsumsi ikan dalam negeri seiring meningkatnya daya beli, pembudi daya ikan Tiongkok mendiversifikasi produksi mereka untuk memenuhi permintaan lokal melalui upaya budi daya ikan sistem polikultur. Beberapa pembudi daya ikan juga melakukan *de-intensifikasi* dengan mengurangi input pakan komersial dan kembali ke metode budi daya pakan alami yang lebih tradisional untuk

mengoptimalkan keseimbangan antara biaya produksi dan tenaga kerja, serta mengelola risiko mereka secara lebih efektif (Newton R., et al., 2021).

Sementara itu, India menjadi produsen budi daya terbesar ke-3 di dunia dengan mengembangkan ikan mas melalui *Indian Major Carps*. India sukses mengoptimalkan sistem budi daya polikultur *Indian major carps* (rohu, catla, mrigal) spesies sejenis ikan nilam, mas, dan tawes dengan manajemen kolam sederhana tapi efektif. Penelitian berbasis wilayah menunjukkan sistem budi daya polikultur meningkatkan hasil per hektar dan efisiensi penggunaan pakan serta lahan, didukung banyak inovasi teknologi “murah” berbasis komunitas seperti desa sentra pembenihan ikan, dan pelatihan teknis pembenihan ikan (Manam & Quraishi, 2024).

Selanjutnya Vietnam yang kini menjadi salah satu pengeksportir hasil perikanan terbesar di dunia, ikan patin dan udang merupakan produk ekspor utama. Ekspor ikan patin dari Vietnam kini mencapai 91 persen dari seluruh perdagangan ikan pangasius di dunia. Untuk memenuhi persyaratan standar Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE), Direktorat Perikanan Vietnam memutuskan untuk menetapkan dan mengadopsi Praktik Pertanian Baik Vietnam (VietGAP). Standar ini berfungsi sebagai jembatan yang mengarahkan pengusaha dan pembudi daya ikan patin Vietnam menuju sertifikasi standar internasional lainnya seperti Praktik Pertanian Baik Global (GlobalGAP), Dewan Pengelolaan Akuakultur (ASC), dan lainnya seperti Safe Quality Food (SQF) 1000 (Nguyen & Curtis M. Jolly, 2020).

Kebijakan VietGAP mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam berkolaborasi dalam rantai nilai dengan Departemen Penjaminan Mutu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat internasional, Asosiasi Patin Vietnam, Asosiasi Eksportir Makanan Laut Vietnam, lembaga permodalan, dan Pusat Promosi Perdagangan di tingkat Provinsi dan Nasional. Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan bertanggung jawab atas penerbitan semua peraturan di bidang keamanan dan kualitas produk, perlindungan lingkungan,

pengembangan dan perlindungan sumber daya perikanan, penggunaan dan produksi obat-obatan hewan, serta pelatihan tentang keamanan dan kualitas pangan. Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyebarluaskan peraturan tersebut ke departemen-departemen terkait lainnya, otoritas manajemen tingkat bawah, perusahaan pengolahan dan eksportir, dan para pembudi daya ikan. Direktorat Penjaminan Mutu Perikanan Nasional dan Kedokteran Hewan mendukung industri ini dalam bentuk pengecekan, pengendalian, dan mensertifikasi pakan, benih ikan, dan pengolahan ikan. LSM internasional memainkan peran penting dalam memastikan bahwa para pelaku rantai nilai menyadari dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan kualitas makanan. Asosiasi Patin Vietnam mempromosikan ikan patin. Universitas menyediakan informasi penelitian dan penyuluhan perikanan. Asosiasi Eksportir Makanan Laut menyediakan informasi kepada pengolah dan eksportir, pelatihan tentang kualitas dan persyaratan keselamatan serta formulir dan mengusulkan kebijakan (Nguyen & Curtis M. Jolly, 2020).

Vietnam dipresentasikan sebagai contoh negara yang menerapkan kebijakan pemerintah proaktif yang mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yaitu pembudi daya ikan, pelaku industri, pengekspor, dan lembaga sertifikasi untuk praktik keberlanjutan. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama antar sektor untuk mendorong keberlanjutan dan kepercayaan pasar global.

Praktik kolaborasi di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan perikanan budi daya tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh kualitas *collaborative governance*. Model kolaborasi yang efektif umumnya ditandai oleh keterlibatan aktif pemerintah sebagai fasilitator, peran strategis sektor swasta sebagai penggerak investasi dan inovasi, serta partisipasi komunitas pembudi daya ikan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, jejaring regional dan lintas negara berperan penting dalam mempercepat transfer pengetahuan, harmonisasi kebijakan, dan peningkatan standar keberlanjutan.

Tabel 1. 1 Perbandingan Praktik *Collaborative Governance* Perikanan Budi Daya Global

Negara	Aktor Utama	Bentuk Kolaborasi	Dampak Utama
China	Pemerintah pusat & daerah, industri, komunitas pembudi daya ikan	Perencanaan terintegrasi (aquapark), regulasi nasional, dukungan infrastruktur dan teknologi	Skala produksi besar, efisiensi sistem budi daya, pengendalian lingkungan
Vietnam	Pemerintah, pembudi daya ikan, industri pengolahan, eksportir	Kolaborasi rantai nilai, sertifikasi, kemitraan pasar	Daya saing ekspor tinggi, peningkatan standar keberlanjutan
India	Pemerintah daerah, lembaga riset, koperasi pembudi daya ikan, dan swasta	<i>Community-based aquaculture</i> , Koperasi perikanan (<i>fisheries cooperatives</i>), <i>Self-Help Groups</i> (SHGs)	Sistem <i>carp polyculture</i> (rohu–catla–mrigal) berbasis kelompok

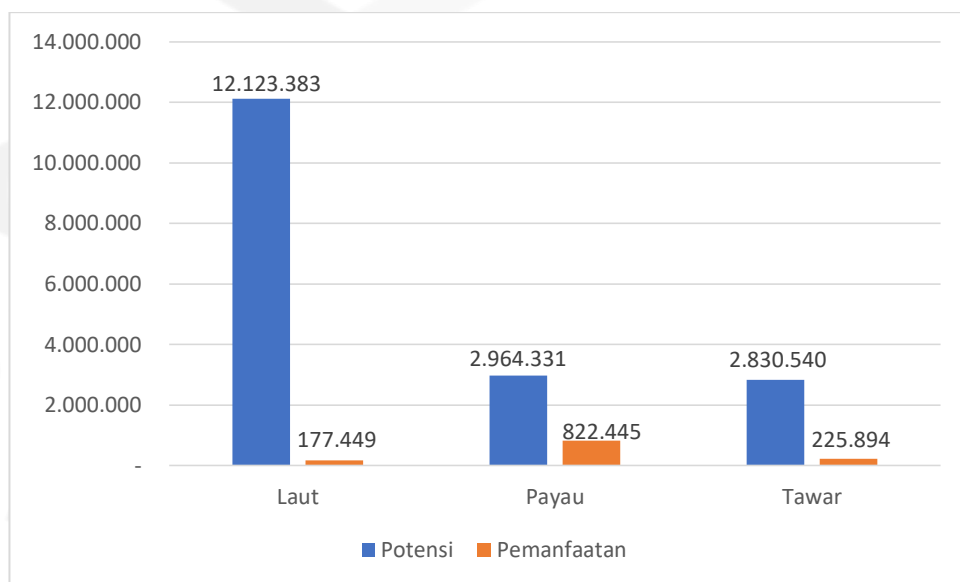
Sumber: Diolah Penulis (2024)

Indonesia sebagai penghasil produk perikanan budi daya terbesar ke-2 di dunia telah mengembangkan berbagai bentuk kolaborasi dalam pengelolaan perikanan budi daya melalui keterlibatan pemerintah, pembudi daya ikan, sektor swasta, dan lembaga pendukung. Namun, kolaborasi tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam suatu kerangka *collaborative governance* yang matang. Bentuk kolaborasi di Indonesia misalnya antara pemerintah dengan pembudi daya ikan. Pemerintah sebagai fasilitator kebijakan dan pemberi bantuan, pembudi daya ikan sebagai pelaksana utama. Ini mencerminkan kolaborasi struktural, namun masih bersifat *top-down*. Kolaborasi juga terjadi antara pemerintah dengan swasta, contohnya kemitraan budi daya ikan dan udang melalui sistem inti-plasma, penyediaan benih, pakan, dan *offtaker*, serta skema *corporate sosial responsibility* perusahaan perikanan. Peran perguruan tinggi dan lembaga riset terlihat dari adanya transfer teknologi, seperti sistem budi daya bioflok, *recirculating aquaculture system*, dan penggunaan probiotik, pendampingan desa perikanan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Ini adalah modal kolaboratif penting, tetapi sering tidak terintegrasi dengan kebijakan

jangka panjang. Tantangan utama penerapan *collaborative governance* dalam perikanan budi daya di Indonesia diantaranya ego sektoral, koordinasi anggaran, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Padahal, Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lahan perikanan budi daya sebesar 17,91 juta hektar, yang terdiri dari 2,83 juta hektar (15,8 %) untuk budi daya air tawar, 2,96 juta hektar (16,5 %) untuk budi daya air payau, dan 12,12 juta hektar (67,7 %) untuk budi daya laut. Namun, pemanfaatan lahan tersebut baru mencapai 6,84 %, yang mencakup 225,894 hektar untuk budi daya air tawar, 822.445 hektar untuk budi daya air payau, dan 177.449 hektar untuk budi daya laut (Pusdatin KKP, 2024). Potensi lahan perikanan budi daya dan pemanfaatannya disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Potensi dan Pemanfaatan Lahan Perikanan Budi Daya



Sumber: Pusdatin KKP (2024)

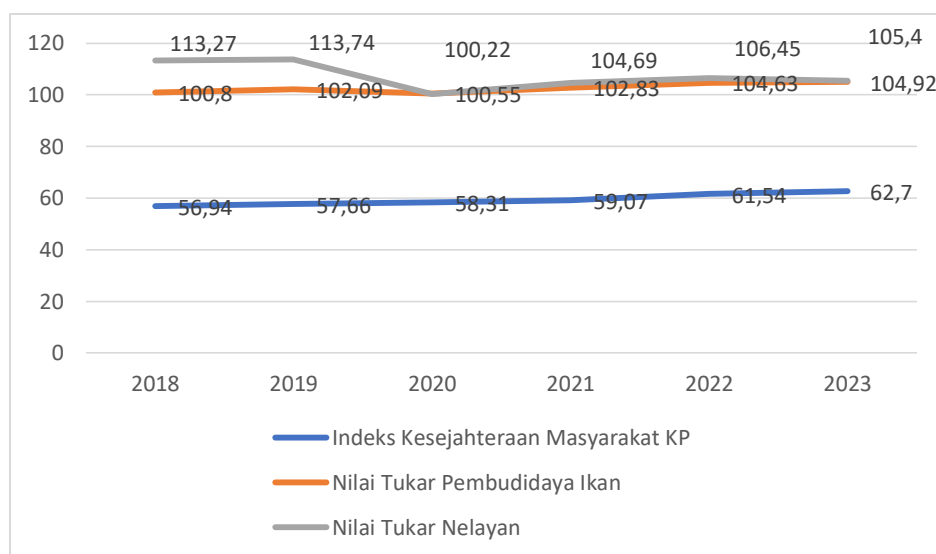
Berdasarkan hasil validasi nasional tahun 2022, jumlah pembudi daya ikan merupakan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dengan populasi terbanyak, yaitu 1.355.913 orang dari total pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan sejumlah 3.066.605 orang (Pusdatin KKP, (2024)). Pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan lainnya merupakan nelayan 1.321.314 orang, pemasar

ikan 275.458 orang, pengolah ikan 87.477 orang, petambak garam 22.430 orang, dan pemasar antar pelabuhan 4.013 orang. .

Potensi lahan perikanan budi daya yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Pusdatin KKP (2024), Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) baru mencapai 62,7 dari skala 0 sampai 100. IKMKP merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan, yang didasarkan pada dua variabel utama, yaitu aspek ekonomi dan sosial. Pada dimensi ekonomi, indikator yang digunakan mencakup Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Usaha Pembudi Daya Ikan (NTUPi), Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), serta Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Adapun pada dimensi sosial dan kelembagaan, indikator yang digunakan meliputi berbagai upaya dalam membangun serta mengembangkan kelembagaan usaha di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan jumlah kelompok pelaku usaha yang mengalami kenaikan kelas, serta jumlah kelompok yang memperoleh layanan penyuluhan perikanan.

Dalam lima tahun terakhir, Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPi) mengalami kenaikan, tetapi tidak signifikan. Tahun 2018 sebesar 100,8 meningkat pada tahun 2023 menjadi 104,92. Hal ini menggambarkan bahwa kenaikan harga pada hasil produksi lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsi, sehingga daya beli pelaku usaha di sektor perikanan budi daya cenderung lebih kuat dibandingkan pelaku usaha pada sektor lain yang produknya dibeli oleh pembudi daya ikan. Meskipun demikian, nilai NTPi masih berada di bawah NTN yang mencapai 105,4. Pola pertumbuhan NTPi dibandingkan dengan NTN dan IKMKP selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan



Sumber: Pusdatin KKP (2024)

Berdasarkan data BPS tahun 2018, tercatat bahwa sekitar 20–48 persen nelayan dan 10–30 persen pembudi daya ikan masih berada dalam kondisi miskin. Sementara itu, analisis data Survei Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2017 oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad, Prof. Dr. Zuzy Anna, menunjukkan bahwa 11,34% tenaga kerja di sektor perikanan termasuk dalam kategori miskin. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan sektor jasa restoran (5,56%), konstruksi bangunan (9,86%), maupun pengelolaan sampah (9,62%) (<https://www.unpad.ac.id/>).

Menurut BPS (2024), rumah tangga miskin umumnya memiliki beberapa ciri, antara lain tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang sebagian besar (64,01%) hanya tamat Sekolah Dasar atau bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar, sebanyak 12,07% tidak memiliki pekerjaan, 48,86% bekerja di sektor pertanian termasuk perikanan, 46,33% menjalankan usaha sendiri, serta rata-rata berusia di atas 50 tahun. Sementara itu, Bappenas (2021) melaporkan bahwa sekitar 14 juta penduduk miskin merupakan petani gurem, buruh tani, dan pekerja informal di sektor pertanian, termasuk perikanan.

Mengacu pada publikasi KKP (2020) serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya, antara lain:

1. Ketersediaan dan distribusi induk serta benih unggul yang masih terbatas;
2. Tingginya harga pakan yang menyebabkan biaya produksi kurang efisien;
3. Permasalahan penyakit ikan yang belum tertangani secara optimal;
4. Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu diperkuat;
5. Keterbatasan dan ketidaklayakan infrastruktur pendukung, seperti balai benih, jaringan irigasi, listrik, akses jalan produksi, laboratorium kesehatan ikan, dan fasilitas kultur jaringan;
6. Adanya ketidaksinkronan regulasi, baik di dalam sektor perikanan maupun antar sektor terkait;
7. Proses perizinan yang dinilai masih berbelit dan kompleks;
8. Lembaga pembudi daya ikan yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria perbankan (*bankable*); dan
9. Akses pembudi daya ikan terhadap sumber permodalan yang masih terbatas.

Beberapa permasalahan tersebut menyebabkan pembudi daya ikan kesulitan untuk mengembangkan usaha dan terlepas dari jurang kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan beberapa kebijakan, program dan kegiatan. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budi Daya; dan
6. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas.

Beberapa kebijakan di atas mengatur tentang upaya KKP dalam mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan guna mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya pembudi daya ikan. Kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan dilakukan melalui pemberian bantuan pemerintah, penyediaan modal usaha, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan perikanan, penumbuhkembangan kelembagaan pelaku usaha, dan fasilitasi kemitraan usaha.

Dalam pelaksanaan bantuan pemerintah, berbagai prasarana dan sarana produksi perikanan budi daya disalurkan kepada para pembudi daya ikan, antara lain calon induk, benih ikan, pakan mandiri, teknologi bioflok, excavator, bibit rumput laut, rehabilitasi jaringan irigasi, paket mina padi, maggot, serta pakan alami (KKP, 2022). Jenis-jenis bantuan yang telah diberikan KKP kepada pembudi daya ikan selama periode 2019–2022 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jenis Bantuan Pemerintah Bidang Perikanan Budi Daya

NO	TAHUN		JENIS BANTUAN PEMERINTAH	JUMLAH	SATUAN	PENERIMA (Kelompok)
1	2019	1	Mesin Pakan Mandiri	55	unit	55
2	2020	1	Benih Ikan	73.563.425	ekor	696
		2	Benih rumput laut	20.000	kg	9
		3	Induk	118.385	ekor	266
		4	Bantuan Keramba Jaring Apung Budidaya Laut	359	paket	101
		5	Bioflok	41	paket	25
		6	Excavator	11	unit	11
		7	Kluster Sentra Usaha Perikanan Budidaya di UPT	17	paket	17
		8	Minapadi	100	paket	15
		9	Pakan Mandiri UPT	196.165	kg	178
		10	Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP)	50	paket	20
		11	Restocking	7.200.300	ekor	74
3	2021	1	Budikdamber	323	paket	224
		2	Bibit Rumput Laut	96.413	kg	66
		3	Kebun Rumput Laut	30	paket	30
		4	Excavator	29	unit	29
		5	Ikan Kosumsi	243	paket	192
		6	Ikan hias air laut	44	paket	32
		7	Benih ikan laut	7.385.525	ekor	365
		8	Calon induk ikan laut	4.391	ekor	20
		9	Bantuan Keramba Jaring Apung Budidaya Laut	150	unit	48
		10	Bioflok Lele	225	unit	217
		11	Pakan alami	5	paket	5
		12	Bioflok Nila	28	paket	24
		13	Minapadi Nila	100	hektar	14
		14	Mesin pakan ikan (tenggelam)	42	paket	42
		15	Bantuan benih ikan payau	145.644.895	ekor	454
		16	Calon induk ikan payau	254.491	ekor	30
		17	Pakan mandiri	777.030	kg	577
		18	Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP)	55	paket	46
		19	Ikan hias air tawar	21	paket	14
		20	UPR/HSRT	3	unit	3
		21	Benih ikan air tawar	48.201.453	ekor	1.489
		22	Calon induk ikan air tawar	214.354	ekor	489
		23	Budidaya udang	98	paket	66
4	2022	1	Benih ikan air tawar	20.752.481	ekor	627
		2	Benih ikan air payau	73.963.532	ekor	176
		3	Benih ikan air laut	3.141.290	ekor	208
		4	Restocking Benih Laut	1.730.625	ekor	42
		5	Calon Induk Ikan Tawar	61.492	ekor	162
		6	Calon Induk Udang	10.750	ekor	2
		7	Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP)	65	paket	57
		8	Kincir	63	unit	63
		9	Excavator	20	unit	20
		10	Kebun bibit rumput laut	30	paket	26
		11	Bioflok	270	paket	26
		12	UPR/HSRT	13	unit	13
		13	Mesin Pakan	160	unit	160

Sumber: KKP (2023)

Hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas dan strategis KKP pada Tahun Anggaran 2020 khususnya terkait 16 jenis bantuan pemerintah yang dilakukan pada 5 provinsi, 20 kabupaten/kota, dan melibatkan 716 kelompok penerima, menunjukkan bahwa

capaian efektivitas baru mencapai 87,68%. Untuk bantuan pemerintah di sektor perikanan budi daya, capaian tersebut berada pada angka 86,80%. Pada Tahun Anggaran 2022, tingkat efektivitas tersebut bahkan mengalami penurunan menjadi 80,91%.

Inspektorat Jenderal KKP (2023) dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat permasalahan dalam penyaluran bantuan pemerintah, yaitu:

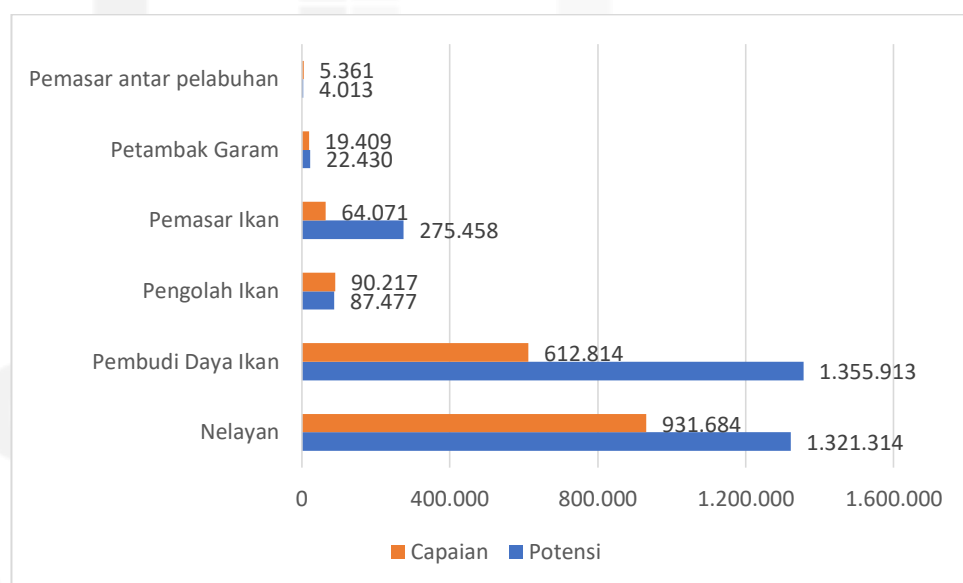
Permasalahan dalam penyaluran bantuan pemerintah antara lain berupa bantuan yang tidak dapat dioperasionalkan, kelompok penerima yang tidak mendapatkan manfaat nyata dari barang bantuan, serta penerima yang belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka, termasuk mengenai pelaporan. Selain itu, belum tampak adanya peningkatan kondisi usaha setelah bantuan diberikan. Berbagai masalah tersebut muncul karena jenis bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima, kesiapan penerima dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang diberikan masih rendah, tidak adanya pelatihan terkait pemanfaatan bantuan, serta kurangnya pendampingan dalam proses penggunaan bantuan pemerintah.

Temuan di atas merupakan salah satu fakta yang menunjukkan bahwa *collaborative governance* belum berjalan optimal dalam penyaluran bantuan pemerintah yang merupakan salah satu strategi KKP dalam pemberdayaan pembudi daya ikan. KKP kurang melibatkan pembudi daya ikan sebagai calon penerima bantuan dalam perencanaan untuk menentukan jenis dan spesifikasi bantuan yang akan diberikan. Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan belum optimal dalam mempersiapkan calon penerima bantuan, dan pendampingan pasca mendapatkan bantuan pemerintah.

Selanjutnya, salah satu persyaratan pembudi daya ikan untuk mendapatkan program pemberdayaan adalah memiliki kartu identitas sebagai pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disebut Kusuka. Dari 1.355.913 orang pembudi daya ikan, yang telah memiliki Kusuka baru mencapai 612.814 orang (45,2 %). Capaian tersebut jauh tertinggal dibanding pelaku usaha lainnya seperti nelayan 931.684 orang dari 1.321.314 orang (70,51 %), pengolah ikan 90.217 orang dari 87.477 orang (103,13 %), petambak garam 19.409 orang

dari 22.430 orang (86,53 %), dan pemasar antar pelabuhan 5.361 orang dari 4.013 orang (133,59 %). Hal tersebut menunjukkan bahwa *collaborative governance* belum optimal dilakukan oleh KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota, organisasi asosiasi perikanan budi daya, pembudi daya ikan, serta stakeholder lainnya. Data potensi dan capaian pendataan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1. 3 Data Potensi dan Capaian Pendataan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan



Sumber: Pusdatin KKP (2024)

Kebijakan KKP lainnya dalam upaya pemberdayaan pembudi daya ikan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budi daya dan Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas. Kampung Perikanan Budi daya merupakan suatu kawasan yang bertumpu pada komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal, dengan memadukan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya usaha budi daya ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kawasan ini juga berfungsi menjaga kelestarian sumber daya ikan

serta dikelola oleh masyarakat, sehingga mampu menghasilkan produksi yang teratur dan berkesinambungan. Sedangkan Desa Perikanan Cerdas merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang mencakup seluruh rantai dari hulu hingga hilir dengan fokus pada penerapan teknologi informasi, komunikasi, dan manajemen yang berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kedua kebijakan tersebut menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Pendekatan tematik berfokus pada penentuan tema prioritas dalam jangka waktu perencanaan, yaitu perikanan budi daya. Sedangkan holistik mengacu pada perencanaan komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan induk, pembenihan ikan, pendederan ikan, pembesaran ikan, pasca panen dan pengolahan ikan, pembuatan pakan ikan, proses pemasaran, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan. Integratif menekankan pada keterpaduan antara berbagai kementerian/lembaga dan sumber pendanaan, seperti Pemerintah (KKP, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota), Bisnis (lembaga permodalan/perbankan, produsen pakan, penyedia teknologi informasi, pabrik es), akademisi/ perguruan tinggi, masyarakat, dan media. Spasial mengacu pada penjabaran program dalam konteks wilayah tertentu dan keterkaitannya.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budi daya menetapkan Kabupaten Banyumas menjadi salah satu lokasi Kampung Perikanan Budi Daya. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 521 Tahun 2022 tentang Lokasi Desa Perikanan Cerdas Tahun 2022, Kabupaten Banyumas juga ditetapkan menjadi lokasi *pilot project* Desa Perikanan Cerdas.

Kabupaten Banyumas merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak nomor 2 se- Provinsi Jawa Tengah, yaitu 216,5 ribu jiwa (12,53 %). Kabupaten Banyumas memiliki kolam air tenang seluas 469,5 Ha, terdiri dari kolam pembesaran 424,5 Ha, dan kolam pembenihan 45 Ha. Sementara itu luas

lahan sawah yang dapat dijadikan usaha mina padi 63.581 Ha (Diskannak Banyumas, 2024). Kabupaten Banyumas juga memiliki 18.508 Rumah Tangga Perikanan budi daya kolam dan 105 Rumah Tangga Perikanan budi daya mina padi, ke-empat terbanyak di Provinsi Jawa Tengah dengan produksi 11.513 Ton (BPS, 2024).

KKP melakukan pendekatan *collaborative governance* dalam pemberdayaan pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas dengan menggandeng para pemangku kepentingan. Untuk di internal KKP upaya kolaboratif dilakukan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, serta Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Kementerian/Lembaga lain yang diajak adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Kementerian Pariwisata. Unsur Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pekerjaan Umum), dan Pemerintah Desa Panembangan. Sektor bisnis adalah PT Bank Negara Indonesia, Bank Indonesia dan PT Telkom Indonesia. Unsur Akademisi terdiri dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Amikom Purwokerto, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Unsur dari masyarakat adalah pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta para pemuda. Selanjutnya, unsur media yang terlibat adalah Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA. Aktor yang terlibat dalam upaya *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Pemangku Kepentingan Eksisting dalam Pemberdayaan Masyarakat Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Banyumas

NO	UNSUR	AKTOR
1	Akademisi	Polteknik Ahli Usaha Perikanan
		Universitas Jenderal Soedirman
		Universitas Amikom
		Universitas Muhammadiyah
		Universitas Prasetya Mulya
2	Bisnis	PT Bank Negara Indonesia
		PT Telekom Indonesia
		Bank Indonesia
3	Komunitas	Kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan)
		Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar)
		Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
		Karang Taruna
4	Pemerintah	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
		Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pemerintah Daerah Banyumas
		Pemerintah Desa Panembangan
5	Media	Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas fokus pada peningkatan kompetensi, peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan tenaga kerja serta kesempatan berusaha. Kegiatan usaha dari hulu sampai hilir, mulai dari pembenihan, pendederan, pembesaran, pengolahan, pemasaran, penyediaan pakan mandiri, dan penyediaan pakan alami. Kegiatan pembenihan dan pendederan dilakukan di kolam air

tenang seluas 5 Ha. Sedangkan kegiatan pembesaran dilakukan di sawah bersamaan dengan padi yang disebut mina padi seluas 25 Ha.

Selain usaha budi daya ikan, pemberdayaan juga dilakukan dalam upaya penguatan kelembagaan pelaku usaha dan digitalisasi usaha serta pelayanan publik masyarakat desa. Para aktor *collaborative governance* melakukan pelatihan, memberikan bantuan pemerintah, memfasilitasi akses permodalan, dan pendampingan. Jenis dan jumlah bantuan pemerintah yang diberikan KKP kepada pembudi daya ikan Banyumas dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Jenis dan Jumlah Bantuan Pemerintah

No	Jenis Bantuan	2019	2021	2022	2023	Jumlah	Satuan
1	Benih ikan air tawar	139.000	200.000	507.500	-	846.500	Ekor
2	Calon induk ikan air tawar	2.125	5.250	1.390	-	8.765	Ekor
3	Bioflok	-	1	2	-	3	Paket
4	Mesin pakan	-	-	2	-	2	Paket
5	Budi daya ikan dalam ember	-	7	-	-	7	Paket
6	Bantuan pakan	-	13.000	-	-	13.000	Kg
7	Premi asuransi	2.860	-	-	-	2.860	Orang
8	Sarana Pasca Panen				1	1	Unit

Sumber: Biro Perencanaan KKP (2023)

Namun demikian, kegiatan usaha pembesaran ikan sistem mina padi yang direncanakan akan dilakukan pengembangan usaha pada siklus produksi ke-2 dari 25 Ha menuju 100 Ha, justru mengalami penurunan menjadi 5 Ha saja. Begitu juga dengan siklus tanaman padinya, yang direncanakan akan dilakukan perubahan dari dua kali musim tanam per tahun menjadi tiga kali musim tanam per tahun belum dapat dilakukan. Dampaknya, peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan serta penyerapan tenaga kerja sebagaimana yang menjadi tujuan dari program Kampung Perikanan Budi Daya dan Desa Perikanan Cerdas tidak tercapai. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, salah satu

penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman pembudi daya ikan terhadap program Kampung Perikanan Budi Daya dan Desa Perikanan Cerdas, adanya kepercayaan pembudi daya ikan mina padi terhadap *pranata mangsa*, serta dukungan dari beberapa aktor yang kurang maksimal dalam pendampingan program pemberdayaan pembudi daya ikan tersebut.

Proses digitalisasi usaha dan pelayanan publik masyarakat di Desa Panembangan yang menjadi *pilot project* juga tidak tercapai. Padahal, proses digitalisasi merupakan upaya untuk pengembangan pemasaran produk hasil budi daya ikan dan aneka olahan berbahan baku ikan yang dihasilkan oleh pembudi daya ikan dan pengolah ikan. Usia pembudi daya ikan yang mayoritas di atas 46 tahun dan pendidikan pembudi daya ikan yang mayoritas hanya lulusan Sekolah Dasar menjadi salah satu faktor penyebab kurang suksesnya program digitalisasi. Selain itu, budaya sosial masyarakat desa yang menjadikan proses pengurusan administrasi kependudukan sebagai wahana mempererat silaturahmi dengan aparat desa dan sesama warga lainnya merupakan faktor yang menyebabkan digitalisasi pelayanan publik kurang diminati masyarakat.

Banyaknya aktor *collaborative governance* dalam pemberdayaan pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas menyebabkan kurang optimalnya peran para aktor. Padahal peran para aktor sudah diwadahi dalam perjanjian kerja sama. Sebagai contoh, dalam pembentukan dan pendampingan koperasi yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Koperasi melalui peran petugas pendamping koperasi atau penyuluh koperasi, justru yang lebih berperan adalah penyuluh perikanan. Begitu juga dalam inisiasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menjadi ranah dari Kementerian Pariwisata, justru dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Jumlah capaian pendataan Kusuka pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas baru mencapai 6.321 dari 18.613 Rumah Tangga Perikanan (33,96 %) (Kusuka KKP, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa sinergi dan kolaborasi antara petugas enumerator, dan validator di Kabupaten Banyumas belum terjalin dengan baik. Petugas enumerator terdiri dari penyuluh perikanan, dan pegawai

dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota. Sedangkan validator terdiri dari pegawai dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota, dan pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang menangani data.

Gambaran permasalahan yang terjadi pada studi kasus *collaborative governance* dalam pemberdayaan pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas berdampak pada pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”, serta upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, penyediaan nutrisi dan pengurangan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran. Asta Cita tersebut yaitu Asta Cita kedua yang berbunyi “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”, Asta Cita Ketiga “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”, dan Asta Cita keenam “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan kebaharuan dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di suatu kawasan. Melalui pendekatan *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, permasalahan yang dihadapi dapat terpecahkan serta peluang dan potensi sumber daya perikanan dapat dioptimalkan, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan dapat tercapai. Oleh karena itu, judul disertasi yang diusulkan adalah “Model *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Banyumas”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas melalui pemberian bantuan pemerintah, penyediaan modal usaha, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan perikanan, penumbuhkembangan kelembagaan pelaku usaha, dan fasilitasi kemitraan usaha belum efektif;
2. Keterlibatan banyak aktor dalam *collaborative governance* pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas tidak efektif;
3. Model eksisting *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas belum optimal.
4. Nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, khususnya pembudi daya ikan masih rendah, padahal Indonesia memiliki potensi lahan perikanan budi daya perikanan yang besar;

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian (*problem question*) sebagai berikut:

1. Mengapa *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas belum optimal?
2. Bagaimana model pengembangan *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan permasalahan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua tujuan penelitian, yaitu:

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas belum optimal.

2. Memberikan solusi terkait model pengembangan *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini difokuskan pada konteks pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas;
2. Penelitian ini akan membahas implementasi *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas melalui pendekatan teori Ansell dan Gash;
3. Penelitian ini akan mengevaluasi peran para aktor yang terlibat dalam implementasi *collaborative governance* pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas.
4. Penelitian ini akan membahas pengembangan model *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan pembudi daya ikan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat untuk sejumlah pihak, diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi pembangunan, dengan memperkaya konsep-konsep terkait kebijakan *collaborative governance* dalam konteks pemberdayaan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman serta memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan kebijakan, berbagai kendala yang muncul, dan model alternatif yang ditawarkan untuk memperkuat *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian berkenaan dengan *collaborative governance* dalam pemberdayaan pembudi daya ikan belum banyak dilakukan, baik di Indonesia maupun di dunia. Berikut beberapa penelitian yang mirip dan berhubungan dengan *collaborative governance* dalam pemberdayaan pembudi daya ikan yang dapat digunakan sebagai referensi, data dukung, maupun pembanding.

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif *Collaborative Governance* (Studi Kasus Kelompok Budi daya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo) oleh Nopriyono dan Suswanta dalam Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Volume 1 No 1 September 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperdalam peran masing-masing pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan masyarakat berdasarkan perspektif *collaborative governance*, serta menganalisis bentuk kolaborasi yang terbangun antar aktor selama proses tersebut berlangsung.

Pendekatan teori yang digunakan mengacu pada Ansell & Gash (2007), yang mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola pemerintahan yang melibatkan partisipasi langsung para pihak di luar pemerintah, berorientasi pada konsensus dan musyawarah, serta dilakukan dalam proses pengambilan keputusan kolektif untuk merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan dan program publik. Dalam model ini, proses kolaboratif mencakup elemen dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, serta terciptanya pemahaman bersama di antara lembaga-lembaga terkait.

Ansell dan Gash juga menegaskan bahwa proses kolaborasi yang efektif harus memenuhi empat komponen utama, yaitu: 1) *Starting condition* (kondisi awal); 2) *Facilitative leadership* (kepemimpinan yang bersifat fasilitatif); 3)

Institutional design (desain kelembagaan), dan 4) *Collaborative process* (proses kolaboratif). Pada tahap proses kolaboratif, terdapat sejumlah fase yang perlu dilalui, yaitu: a) dialog tatap muka; b) pembangunan kepercayaan; c) komitmen terhadap proses; d) penciptaan pemahaman bersama, dan e) munculnya hasil sementara (*intermediate outcomes*) sebagai bagian dari dinamika kolaborasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa Hargomulyo, kelompok pembudi daya ikan Mina Bayu Lestari, serta pengepul Ikan Gurame sebagai aktor swasta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* telah terjalin antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa Hargomulyo, kelompok pembudi daya ikan Mina Bayu Lestari, dan pengepul sebagai aktor swasta. Implementasi kolaborasi mencakup seluruh komponen, mulai dari kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, hingga proses kolaboratif, dan telah menghasilkan capaian sementara berupa peningkatan signifikan dalam produksi ikan gurame serta peningkatan kondisi ekonomi anggota kelompok.

Namun demikian, meskipun kolaborasi berjalan cukup baik dan menghasilkan dampak positif, dari sudut pandang *collaborative governance* proses ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh keterlibatan aktor swasta yang belum dominan. Pengepul sebagai pihak swasta hanya terlibat pada tahap penjualan hasil produksi, sementara perannya dalam keseluruhan proses kolaborasi masih relatif terbatas.

2. *Collaborative Governance* dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Tunagrahita melalui Budi Daya Ikan Lele Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo oleh Solikhin dan Rahaju dalam Jurnal PUBLIKA [Vol. 7 No. 7 \(2019\)](#).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menggambarkan proses *collaborative governance* dalam upaya pemberdayaan penyandang tunagrahita melalui kegiatan budi daya Ikan Lele di Desa Karangpatihan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian didasarkan pada teori proses *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007:228), yang mencakup lima komponen, yaitu *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pemberdayaan penyandang tunagrahita yang melibatkan Pemerintah Desa Karangpatihan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, serta tokoh masyarakat berjalan cukup baik. Para pemangku kepentingan mampu melaksanakan peran masing-masing meskipun program budi daya ikan lele pada akhirnya dihentikan. Dari lima indikator yang dikaji, ditemukan dua komponen yang belum optimal, yaitu *face-to-face dialogue* dan *commitment to the process*. Dialog langsung antarpihak belum berlangsung efektif, terlihat dari dominasi Pemerintah Desa dalam pertemuan serta tidak terlibatnya pengepul lele dalam diskusi. Pada aspek komitmen terhadap proses, sebagian pengurus KSM Rumah Harapan juga dinilai belum menunjukkan komitmen yang kuat. Hambatan utama yang menyebabkan penghentian program adalah ketidaktepatan pemilihan kegiatan pemberdayaan, karena budi daya Ikan Lele membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang tidak mudah dipenuhi oleh penyandang tunagrahita.

3. *Analyzing the Role of the Quadruple Helix in Improving MSME Management Performance* oleh Bernadin D. Mardiatmi, Yudi N. Supriadi, Maria A. Wikantari, Dahlia Br. Pinem, dan Nani Ariani (Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel model *Quadruple Helix* dapat meningkatkan kinerja manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di era normal baru. Penelitian ini menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk desain kuantitatif. Penelitian ini mencakup sampel 100 UMKM dari Provinsi Banten, Indonesia.

Teori konsep *Quadruple Helix* adalah kolaborasi empat pihak yang saling terhubung dan bersinergi dalam mendorong inovasi: pemerintah, bisnis, akademisi, dan komunitas/masyarakat. Konsep ini memadukan kebijakan dari atas ke bawah dan inisiatif dari bawah ke atas, yang secara kolaboratif menghasilkan pengetahuan dan nilai (Yun dan Liu, 2019). Kolaborasi ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM untuk meningkatkan kinerja manajemen mereka.

Di antara empat pilar model *Quadruple Helix*, yaitu akademisi, bisnis, masyarakat lokal, dan pemerintah, bisnis menunjukkan pengaruh paling signifikan terhadap kinerja manajemen, sebagaimana dibuktikan oleh nilai koefisien sebesar 0,311. Selain itu, pemerintah (0,290), akademisi (0,201), dan masyarakat lokal (0,160) menunjukkan koefisien yang lebih rendah. Temuan ini menyiratkan bahwa masyarakat lokal harus lebih aktif terlibat dengan UMKM, sementara pemerintah harus meningkatkan dukungannya melalui kebijakan.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa peran akademisi dalam *Quadruple Helix* secara signifikan mempengaruhi kinerja manajemen UMKM. Namun, dampaknya terhadap kinerja UMKM tidak sebesar pengaruh yang diberikan oleh pelaku bisnis. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewandaru et al. (2021), yang juga tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kolaborasi UMKM dengan akademisi. Hal ini mungkin

disebabkan oleh persepsi bahwa akademisi dari universitas terutama terlibat dalam penelitian fundamental, sementara UKM mencari transfer pengetahuan praktis. Meskipun demikian, efektivitas akademisi dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintah.

Selain itu, akademisi merupakan pemangku kepentingan yang memiliki pengetahuan (literasi) terkini dan relevan yang mencakup teori dan konsep terkini. Upaya kolaboratif antara akademisi dan pemerintah dapat memfasilitasi pembagian risiko dan pemecahan masalah secara kolaboratif untuk mengatasi berbagai tantangan secara efektif. Lebih jauh, peran akademisi berperan penting dalam meningkatkan kinerja manajemen UMKM. Keterlibatan akademisi dalam kerangka *Quadruple Helix* meliputi pemberian literasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan UMKM, pendampingan dalam penyusunan rencana kegiatan yang efektif, pengawasan pengelolaan dan pemantauan laporan keuangan, fasilitasi transfer pengetahuan tentang pengembangan produk berbasis teknologi, promosi pemasaran produk daring, pemberian edukasi dan pelatihan pengetahuan dan keterampilan SDM untuk meningkatkan kinerja UMKM, serta pemberian instruksi tentang manajemen produksi, inventaris, distribusi, dan logistik.

Pelaku usaha, praktisi kawakan di dunia usaha, memiliki segudang pengalaman yang dapat mereka berikan kepada para pengusaha UMKM. Tujuan mereka adalah untuk memberdayakan para pengusaha ini dengan pengetahuan dan keahlian, sehingga UMKM dapat berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar. Para pemangku kepentingan UMKM sangat menghargai peran para pelaku usaha dalam mendukung kinerja pemasaran mereka. Untuk mengakses wawasan bisnis yang berharga, beberapa pelaku UMKM menjadi anggota asosiasi UMKM di Indonesia, berpartisipasi dalam komunitas yang menyatukan para pelaku UMKM dan pengusaha kawakan, berkolaborasi dengan lembaga pemerintah untuk memfasilitasi operasi bisnis dan memperluas jaringan, dan mengumpulkan data berharga untuk pemilihan *reseller*, mengidentifikasi distributor potensial, dan merancang program promosi. Interaksi dalam kerangka *Quadruple Helix* dalam

hal ini saling terkait erat antara bisnis dan pemerintah, yang mengarah pada peningkatan kinerja manajemen.

Perusahaan besar dan lembaga keuangan juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Lembaga-lembaga ini menawarkan dukungan dengan mengatasi tantangan terkait modal yang dihadapi oleh UMKM. Khususnya di Kabupaten Serang Provinsi Banten, upaya bersama diharapkan dari perusahaan-perusahaan terkemuka dalam menjalankan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka secara serius, yang berkontribusi pada pengembangan UMKM. Mereka dapat menyediakan modal melalui mitra yang sudah mapan dan memberikan pelatihan dan bimbingan, yang sering kali bekerja sama dengan universitas. Temuan ini menegaskan pengamatan yang dilakukan oleh Dewandaru et al. (2021), yang menunjukkan bahwa sektor UKM memandang bisnis dan industri sebagai pilar penting kemajuan UMKM. Pelaku bisnis dapat menumbuhkan lingkungan dan komunitas untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan dan peningkatan keterampilan, sementara lembaga keuangan menyediakan sumber daya penting untuk pengembangan UMKM. Selain itu, investor memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan modal tahap awal, sehingga memungkinkan UMKM untuk berkembang. Lebih jauh lagi, pelaku usaha dapat memperluas jaringan mereka untuk mendorong manajemen UMKM yang efektif, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan menghubungkan UMKM dengan calon investor.

Dalam penelitian ini, peran masyarakat dalam memengaruhi kinerja manajemen UMKM terbukti signifikan, meskipun pengaruhnya paling rendah dibandingkan dengan heliks lainnya. Masyarakat berfungsi sebagai penggerak dan pelanggan setia yang mampu berkontribusi pada peningkatan UMKM. Faktor-faktor seperti globalisasi, tata kelola pemerintahan yang demokratis, telekomunikasi, dan kondisi ekonomi telah menyebabkan meluasnya peran masyarakat sipil. Peran penting masyarakat dalam mendukung UMKM, menekankan kapasitas masyarakat untuk berbagi keahlian, berkolaborasi dalam mempromosikan produk melalui bazar bersama dan stan pameran, dan

menyebarkan informasi tentang program UMKM sambil menawarkan dukungan periklanan dan pemecahan masalah bersama. Selain itu, pandemi telah memperkuat pentingnya masyarakat, karena mereka bersatu untuk memberikan dukungan. Selanjutnya, masyarakat dapat memanfaatkan jangkauan luas platform media sosial untuk berbagi informasi yang berharga dan dapat dipercaya tentang penawaran UMKM, sehingga meningkatkan keyakinan dan kepercayaan konsumen.

Peran masyarakat yang berdampak relatif kecil terhadap kinerja UMKM dapat dikaitkan dengan tantangan era normal baru, banyak individu mengalami kondisi ekonomi yang memburuk dan lebih mengutamakan upaya swadaya. Meskipun dampaknya relatif kecil, perlu dicatat bahwa masyarakat setempat tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kinerja manajemen. Hal ini terutama disebabkan oleh ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat setempat, yang secara sosiologis merupakan bentuk modal sosial yang sering dimanfaatkan oleh berbagai mata pencaharian, termasuk UMKM. Usaha skala kecil, seperti UMKM sangat bergantung pada modal sosial untuk menavigasi dan bertahan dari berbagai tekanan sosial-ekonomi dan ekologis.

Masyarakat diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM dengan secara aktif mempromosikan produk-produk UMKM, menumbuhkan budaya mengonsumsi produk-produk tersebut, dan berperan sebagai konsumen potensial untuk memperluas penawaran domestik. Mereka memiliki kapasitas untuk merangsang kreativitas dan inovasi. Sebagai bagian integral dari *Quadruple Helix*, masyarakat berkontribusi pada integrasi perspektif media, budaya, dan konsumen. Masyarakat dapat mendirikan koperasi untuk memberikan pendekatan yang lebih terarah dan kohesif terhadap kegiatan UMKM. Lebih jauh lagi, masyarakat berfungsi sebagai target audiens sekaligus garda terdepan dalam pengembangan dan bimbingan UMKM. Selain anggota koperasi, individu di luar koperasi juga dapat berkontribusi dengan memanfaatkan produk UMKM dan terlibat dalam kampanye iklan atau advokasi. Prioritas masyarakat terhadap produk UMKM sangat penting, karena kemampuan adaptasi

dan ketahanan yang melekat pada segmen tersebut memungkinkannya untuk cepat menanggapi perubahan yang dinamis dan cepat dalam lanskap bisnis yang lebih luas.

4. *Sustainable Practicalities towards Good Governance in Fish Townships and Villages by Ethics-Based Approach* oleh Yuru He, Shuolin Huang, dan Yi Tang dalam jurnal Sustainability Tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi dalam memanfaatkan perangkat kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan sambil mempromosikan legitimasi tata kelola akar rumput perikanan, dengan harapan dapat berkontribusi pada masa depan perikanan dan akuakultur yang lebih ramah lingkungan di seluruh dunia.

Sejak diperkenalkannya Kode Etik Perikanan yang bertanggung jawab pada tahun 1995 yang menyerukan tindakan ramah ikan dari para pemangku kepentingan di seluruh dunia, isu-isu etika mengenai ikan dan habitat akuatik telah dipisahkan sebagai isu moral yang independen untuk tata kelola yang baik.

Studi ini mencoba untuk membangun konfigurasi etis untuk tata kelola yang baik di sektor perikanan. Dengan menggunakan praktik-praktik di Cina sebagai studi kasus, studi ini menguraikan evolusi pengelolaan perikanan dan akuakultur berbasis masyarakat dengan etika partisipatif dan mengeksplorasi keadilan sosio-ekologis di kota-kota dan desa-desa perikanan. Hasilnya menunjukkan bahwa:

- Setelah beberapa dekade pengembangan industri perikanan, model tata kelola perikanan dan akuakultur telah bertransformasi dari tata kelola hirarkis menjadi tata kelola terpadu yang menggabungkan hirarki, pasar, dan komunitas. Transformasi organisasi dari asosiasi perikanan, dinas perikanan, liga perikanan menjadi masyarakat perikanan dan koperasi perikanan telah diresapi dengan etika partisipatif;
- Komite penduduk desa memainkan peran perantara yang signifikan dalam memperluas pemerintahan *vertical* dan mempromosikan otonomi penduduk

desa. Nelayan yang berurusan dengan perairan terbuka telah mengembangkan pemikiran yang lebih luas untuk bekerja sama dengan masyarakat dan saling membantu, terutama terlihat dalam penangkapan ikan di laut di mana kode etik tradisional berfungsi mengatur kegiatan penangkapan ikan. Untuk keadilan sosio-ekologis, pemerintah kota dan desa menerapkan moratorium, izin penangkapan ikan, kontrol ukuran mata jaring dan pendaratan minimum, tindakan keras terhadap penangkapan ikan yang melanggar (*Illegal, Unreported and Unregulated* atau IUU Fishing), dan subsidi *double transfer* untuk nelayan yang berhenti menangkap ikan, sementara mitra akuakultur mengadopsi sistem manajemen sertifikat akuakultur;

- Tata kelola perikanan dan akuakultur membutuhkan pergeseran paradigma dari model hirarkis yang menampilkan antroposentrisme menjadi model multi pemangku kepentingan terpadu yang menghargai partisipasi akar rumput dan memprioritaskan konservasi ekologis, dengan pendekatan sosio-ekologis di kota-kota dan desa-desa perikanan untuk mengurangi degradasi ekologis, mengurangi kemiskinan dan kelaparan, memfasilitasi alokasi sumber daya air, dan mengatasi gender.

5. *Stakeholder perspective on the 2023 Ghana National Aquaculture Development Plan: An integration within the ecosystem approach framework* oleh Jacob Zornu, Matthew Oyih, Martin Binde, Jennifer Viglo, Hayford Agbekpornu, Mary Nkansa, Saraya Tavornpanich, Kari Norheim, Edgar Brun, dan Kofitsyo S. Cudjoe dalam jurnal *Aquaculture, fish and fisheries* Vol 3 Iss 6 Tahun 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif pemangku kepentingan terhadap rencana pembangunan budi daya perikanan nasional Ghana tahun 2023 berdasarkan pendekatan ekosistem. Penelitian ini dilakukan secara eksploratif dengan metode pengumpulan data melalui *focus grup discussion* (FGD) yang terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok 1 berasal dari 6 wilayah dengan 40 peserta, dan kelompok 2 dari 10 wilayah dengan 67 peserta. Sehingga jumlah partisipan sebanyak 107 orang berasal dari lembaga pemerintah dan non

pemerintah seperti pembudi daya ikan, asosiasi pembudi daya ikan, akademisi, direktur/manajer perusahaan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dalam diskusi terpumpun disampaikan empat pertanyaan terbuka, dan satu pertanyaan tertutup. Pertanyaan tersebut meliputi :1) unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam rencana pembangunan budi daya perikanan nasional Ghana, 2) kendala utama yang mengancam industri budi daya perikanan, 3) mengidentifikasi dan memberi peringkat area strategis untuk pertumbuhan budi daya perikanan di Ghana, 4) alasan penggunaan antibiotik secara terus-menerus dalam industri budi daya perikanan di Ghana, 5) persepsi terhadap sektor (sektor pemerintah dan/atau sektor swasta) yang memiliki posisi terbaik untuk mengatur pertumbuhan budi daya perikanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Kelompok 1, wilayah selatan menempatkan nilai tambah dan pemasaran sebagai area strategis pertama untuk pertumbuhan industri, kapasitas/kompetensi berada di peringkat kedua, ketersediaan dan kualitas sarana produksi di peringkat ketiga, fasilitas kredit dan pendanaan di peringkat keempat, regulasi dan penegakan hukum di peringkat kelima, dan rezim perizinan di peringkat terakhir. Sedangkan untuk kelompok 2, wilayah utara menempatkan regulasi dan penegakan hukum di peringkat pertama, nilai tambah dan pemasaran di peringkat kedua, pemantauan dan evaluasi di peringkat ketiga, fasilitas kredit dan pendanaan di peringkat keempat, kapasitas/kompetensi di peringkat kelima, dan rezim perizinan di peringkat keenam.

Hasil lainnya menunjukkan 70% responden mempercayai sektor pemerintah untuk mengatur pertumbuhan budi daya perikanan di Ghana. Sementara, 16,3% menyarankan pendelegasian yang dipimpin sektor swasta untuk mengatur pertumbuhan budi daya perikanan, dan 13,8% memilih upaya gabungan antara pemerintah dan sektor swasta.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi kesenjangan, studi ini berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan industri mengenai elemen-elemen relevan yang perlu dipertimbangkan dalam rencana pembangunan budi daya perikanan

Ghana tahun 2023, termasuk kendala pengembangan budi daya di Ghana. Dengan mengikuti kerangka pendekatan budi daya berbasis ekosistem, elemen-elemen yang teridentifikasi dikategorikan ke dalam faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan/ekologis. Pandangan pemangku kepentingan mengenai elemen yang relevan untuk rencana pembangunan budi daya perikanan nasional Ghana tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Rencana Pembangunan Budi Daya Perikanan Nasional Ghana

No	Pendekatan		Elemen	Keterangan
1	Faktor Sosial	1	Pendekatan inklusi	Memulai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam budi daya perikanan
				Penanganan budi daya perikanan untuk pangan dan pekerjaan sebagai proyek terpisah
		2	Kapasitas/ kompetensi	Pelatihan staf Komisi Perikanan untuk meningkatkan kemampuan teknis
				Kapasitas infrastruktur dan logistik yang memadai untuk perluasan layanan yang efisien
				Pelatihan pembudi daya ikan dalam menghasilkan pakan dan benih ikan yang berkualitas
				Pelatihan pembudi daya ikan tentang praktik budi daya ikan yang baik
				Forum pemangku kepentingan untuk membangun kapasitas individu dalam manajemen penyakit
				Asosiasi pembudi daya ikan untuk berbagi pengetahuan
				Distribusi tenaga perikanan yang merata dan desentralisasi Kementerian Perikanan
		3	Program kesehatan dan keamanan pangan	Diagnosis penyakit ikan secara cepat
				Pedoman keamanan pangan terhadap penyalahgunaan hormon, obat-obatan atau antibiotik
		4	Skema evaluasi dan umpan balik	Evaluasi berkala Rencana Pembangunan Budi Daya Perikanan Nasional Ghana melalui keterlibatan pemangku kepentingan

		5	Kolaborasi/ Kemitraan	Kemitraan pemerintah-investor dan melibatkan pemangku kepentingan untuk merancang Rencana Pembangunan Budi Daya Perikanan Nasional Ghana melalui keterlibatan pemangku kepentingan
		6	Skema asuransi	Asuransi untuk pembudi daya ikan dan otoritas regulasi
		7	Ketersediaan dan kualitas input	Subsidi pemerintah terhadap pakan, benih, dan pengaturan harga pakan
				Penyediaan lahan budi daya tambak dalam program perikanan budi daya untuk penyediaan pangan dan gizi
				Membangun fasilitas produksi pakan local
				Memfasilitasi akses terhadap benih berkualitas melalui unit pembenihan milik negara
2	Faktor ekonomi			Program penelitian untuk meningkatkan kualitas benih dan pakan
		8	Kontingensi dan jadwal kerja	Respon cepat terhadap bencana industri perikanan budi daya dan penetapan jadwal Rencana Pembangunan Budi Daya Perikanan Nasional Ghana
		9	Rezim perizinan	Pendaftaran usaha tani dan penyederhanaan perizinan (<i>one stop service model</i>)
		1	Nilai tambah dan pemasaran	Mengatur atau menstandarisasi harga pasar ikan budi daya
				Membangun fasilitas pengawetan dan pengolahan lanjutan (fillet ikan)
				Mengembangkan platform pemasaran elektronik untuk pertanian berlisensi
				Skema sertifikasi label ekologi untuk meningkatkan konsumsi ikan
				Peluang ekspor produk budi daya
		2	Fasilitas pendanaan dan kredit	Skema pembiayaan untuk produsen pakan dan pembudi daya ikan
				Pendanaan pemerintah untuk penelitian pengembangan budi daya perikanan
				Memungut pajak pada pembudi daya ikan untuk menghasilkan pendapatan
3	Faktor lingkungan/ekologi	1	Pendekatan berkelanjutan dan	Menggunakan sistem budi daya berkelanjutan seperti kolam

		holistik	Mendorong manajemen kesehatan melalui produk berbasis tanaman
			Penetapan lokasi budi daya untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan
			Program intervensi perubahan iklim
		2 Pemantauan dan pengawasan	Program pemantauan dan pengawasan lingkungan budi daya perikanan
			Pedoman biosekuriti untuk tujuan pemantauan
		3 Regulasi dan penegakan hukum	Pedoman regulasi yang ditetapkan secara jelas untuk kegiatan budi daya perikanan
			Melarang atau menetapkan protokol impor ikan dan produk terkait
			Memperkuat Komisi Perikanan untuk menegakkan peraturan dan undang-undang
			Dokumentasikan daftar obat hewan dengan akses dan penggunaan yang diatur
		4 Skema pengumpulan data	Basis data komprehensif untuk kegiatan budi daya perikanan
			Penyediaan data sebagai syarat perpanjangan izin

Sumber: Diolah Penulis (2025)

6. *Evaluating Ghana's Youth-Centered Food-Security Policies: A Collaborative Governance Approach* oleh Evans Sakyi Boadu dalam jurnal Sustainability Tahun 2024

Makalah ini mengkaji perspektif keberlanjutan ketika pendekatan tata kelola kolaboratif dan terbuka diadopsi oleh pemerintah pusat dan departemen, lembaga, serta badan sub nasional dalam pembuatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi ketahanan pangan yang berorientasi pada pemuda. Sejauh mana partisipasi dan kolaborasi pemangku kepentingan aktif, atau kurangnya partisipasi dan kolaborasi tersebut, berdampak negatif atau positif terhadap kebijakan ketahanan pangan yang dieksplorasi dalam makalah ini, termasuk keberlanjutan kebijakan ketahanan pangan yang berpusat pada pemuda di Ghana.

Dengan menggunakan teknik analisis dokumenter kualitatif melalui kerangka tata kelola kolaboratif dan terbuka serta mengacu pada literatur tentang tata kelola multisektoral dan kebijakan ketahanan pangan yang berfokus pada pemuda, makalah ini mengidentifikasi beberapa kebijakan intervensi ketahanan pangan yang berfokus pada pemuda yang terputus-putus di Ghana dengan pengaturan kelembagaan yang tidak jelas yang gagal memastikan implementasi dan penilaian yang memadai untuk mendorong kerja sama, akuntabilitas, dan transparansi. Makalah ini menyarankan perlunya tata kelola kolaboratif, pemantauan kebijakan yang efektif, dan strategi evaluasi yang melibatkan lembaga pemerintah, departemen, badan, masyarakat sipil, organisasi pemuda, dan komitmen warga negara terhadap ketahanan pangan. Penelitian ini menemukan bahwa strategi kolaboratif dan partisipasi aktif pemuda dalam semua kebijakan terkait ketahanan pangan sangat penting bagi Ghana untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 1 dan 2, yaitu mengakhiri kemiskinan dan menghilangkan kelaparan serta mencapai ketahanan pangan.

Pendekatan tata kelola kolaboratif sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik yang inklusif karena asumsi “kollektif” yang mendasari konsep tersebut. Teori “kolaboratif” berusaha menjelaskan pengaturan partisipatif yang dapat muncul dalam berbagai struktur dan sistem sosial yang berakar pada pengambilan keputusan yang membangun konsensus mengenai desain, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dua teori kolaboratif utama meliputi tata kelola kolaboratif dan tata kelola terbuka.

Makalah ini menggunakan kedua teori tersebut untuk membangun kerangka teoritis bagi tata kelola kolaboratif dalam pembuatan kebijakan publik, dengan fokus pada pengambilan keputusan berorientasi konsensus seperti yang disarankan oleh Ansell dan Gash, yang menggabungkan beberapa pemangku kepentingan baik di sektor swasta maupun publik untuk melaksanakan keputusan pembangunan tertentu. Tata kelola kolaborasi memiliki prinsip yang berakar pada pelimpahan wewenang, dengan demikian dapat mengambil beberapa pengaturan dari tingkat pemerintah daerah hingga nasional. Pendekatan pembangunan

berbasis masyarakat, misalnya tertanam dalam tata kelola kolaborasi, dengan beberapa pemangku kepentingan lokal memainkan peran yang berbeda dalam memastikan pembangunan masyarakat.

Masalah keamanan pangan dan sosial yang kompleks di Ghana memerlukan program dan langkah-langkah non-linier. Selain itu, masalah keamanan pangan dan kebijakan intervensi pemuda memerlukan pendekatan non-linier untuk desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi. Kolaborasi interseksional antara kementerian, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah sangat penting untuk keberlanjutan kebijakan yang sukses. Keamanan pangan Ghana adalah masalah multi-aspek yang melibatkan banyak kementerian, departemen, dan lembaga, dengan Kebijakan Gizi Nasional dan program yang berorientasi pada pemuda yang menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap kebutuhan intervensi.

Desain kebijakan yang inklusif dengan kolaborasi yang efektif direkomendasikan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola terbuka seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dialog, dan pembangunan konsensus. Studi ini merekomendasikan tata kelola kolaboratif dan terbuka dalam desain, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik karena dapat mempromosikan pendekatan intersektoral dan partisipatif terhadap kebijakan keamanan pangan yang berorientasi pada pemuda di Ghana. Pendekatan ini bertujuan untuk akuntabilitas, transparansi, dialog, dan partisipasi pemangku kepentingan aktif. Meskipun demikian, pengambilan keputusan linier telah menghambat partisipasi pemangku kepentingan dan keberlanjutan kebijakan, seperti yang terlihat pada kebijakan ketenagakerjaan pemuda nasional tahun 2010 dan kebijakan pemuda nasional tahun 2022.

Berdasarkan temuan studi, analisis holistik terhadap kapasitas semua lembaga pelaksana pemerintah, kementerian, dan departemen, serta masyarakat sipil, kelompok pemuda, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang terlibat dalam inisiasi, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, pembentukan jaringan pemangku kepentingan praktis dengan berbagai jalur komunikasi dan

kolaboratif antara pemerintah sub-nasional atau nasional lebih lanjut direkomendasikan dalam pengembangan strategi implementasi dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan.

Direkomendasikan agar pemangku kepentingan, masyarakat, organisasi pemuda setempat, dan pelaku kebijakan utama lainnya terlibat aktif untuk bertindak sebagai badan penasihat dan advokasi dalam pengembangan strategi nasional dan sub-nasional untuk desain, implementasi, dan evaluasi kebijakan nasional tentang strategi ketahanan pangan dan gizi. Pola laporan dan pengumpulan informasi yang ditetapkan dengan jelas dari distrik dan wilayah hingga tingkat nasional tentang status ketahanan pangan di Ghana direkomendasikan. Harus ada kerangka kerja monitoring dan evaluasi nasional yang mencakup kementerian dan lembaga dengan strategi dan pedoman yang ditetapkan secara jelas untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah nasional dan daerah demi implementasi kebijakan yang optimal, penilaian kebijakan berbasis bukti, dan penyampaian layanan yang efektif.

7. *Collective action in fishery resource management and its challenges in Ethiopia: a review* oleh Oliyad Sori Zenbaba dalam jurnal Discover Food Tahun 2024 (<https://doi.org/10.1007/s44187-024-00123-6>)

Tujuan dari makalah ini adalah untuk meninjau berbagai aspek produksi dan pengelolaan perikanan di Ethiopia, termasuk sejauh mana eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, peran aksi kolektif dalam perikanan, dan tantangan yang dihadapi di bidang ini. Temuan menunjukkan kurangnya koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan kunci, seperti komunitas lokal, entitas pemerintah, agen pembangunan, lembaga penelitian, dan organisasi donor yang mengakibatkan degradasi sungai dan sumber daya perikanan. Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam produksi dan pengelolaan perikanan, penyelesaian konflik sosial yang tidak memadai di antara komunitas lokal, serta rendahnya tingkat kerja sama dalam melindungi sumber daya ikan.

Selain itu, tantangan-tantangan ini telah membatasi pertumbuhan aksi kolektif di sektor perikanan, memperburuk eksploitasi berlebihan dan mengurangi

upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati ikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang mendorong kolaborasi antara pelaku usaha perikanan, komunitas lokal, lembaga pemerintah, dan agen pembangunan. Memberdayakan komunitas lokal melalui aksi kolektif sangat penting untuk meningkatkan perlindungan, produksi, pengelolaan, dan keberlanjutan sumber daya ikan di Ethiopia.

Ethiopia adalah negara dengan kondisi iklim yang baik, berbagai variasi dan topologi ekologi, dan diberkahi sumber daya air yang cukup besar dan lahan basah yang beragam seperti sungai, danau, rawa, kolam alami atau buatan (waduk), dan rawa. Sumber daya ini berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies ikan dan telah menciptakan peluang berkelanjutan untuk produksi perikanan, yang merupakan kesepakatan bagi keberlanjutan sektor perikanan. Namun, pengelolaan sumber daya perikanan melalui tindakan kolektif tertinggal dan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pelaku usaha perikanan dan lembaga pendukung lainnya, serta faktor internal dan eksternal yang sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Tidak adanya manajemen konkret dalam merumuskan aturan dan peraturan serta variasi biofisik dalam masyarakat juga berdampak pada pengorganisasian masyarakat lokal dalam tindakan kolektif dan keterlibatan mereka dalam kegiatan nyata dan praktis untuk pengelolaan perikanan di Ethiopia. Eksploitasi ikan, metode dan waktu penangkapan, pencemaran air, dan pencemaran lingkungan merupakan tantangan penting produksi perikanan di negara ini.

Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya alam seperti perikanan menjadi besar ketika kita gagal melakukan tindakan kolektif dan mengatasi permasalahan tindakan kolektif yang terdapat dalam sumber daya tersebut. Hal ini terutama berdampak pada nelayan miskin yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan membutuhkan perlindungan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan individu yang bekerja sama ketika mereka bersatu untuk menyelamatkan sumber daya dari kerusakan dan mengharap

hasil yang diinginkan bersama dari sumber daya tersebut. Untuk mewujudkannya, tindakan kolektif memegang peranan penting.

Cara para pelaku dalam tindakan kolektif berorganisasi dan bagaimana mereka bekerja sama di sektor perikanan melalui upaya yang berkontribusi dan mengharapkan hasil yang diinginkan dapat menentukan keberlanjutan sumber daya tersebut. Ketika tindakan kolektif dalam sumber daya perikanan ditangani dengan baik, sumber daya tersebut tidak akan tereksplorasi. Semua pengguna sumber daya dapat menjadi penerima manfaat, yang dapat dicapai melalui pengurangan konflik dalam penggunaan sumber daya, penyelesaian masalah dalam tindakan kolektif; terutama pada manfaat atau hasil yang diharapkan dari sumber daya tersebut. Pengelolaan yang tepat dari para pelaku dalam tindakan kolektif, dan bekerja sama dengan lembaga yang dapat berkontribusi pada pengelolaan sumber daya perikanan. Para pelaku dalam aksi kolektif dapat berasal dari berbagai bidang, seperti tingkat standar hidup, agama, politik, budaya, pengetahuan, dan norma, dan saat mereka mengelola perbedaan mereka, perlindungan sumber daya dapat diperkuat. Selain itu, para pemimpin dalam aksi kolektif memulai kerja sama para anggota dan memungkinkan mereka untuk menginginkan hasil masa depan yang diinginkan dari sumber daya tersebut.

Upaya semua pemangku kepentingan dalam melindungi dan menambah nilai bagi lingkungan akan berkontribusi pada perlindungan sumber daya perikanan, meningkatkan produksinya, dan membantu mempertahankan keberlanjutannya. Kehidupan dan produksi sumber daya perikanan bergantung pada sumber daya perairan dan perluasan akuakultur di Ethiopia juga mengubah tantangan produksi perikanan saat ini dan membantu dalam menjaga spesies perikanan, meningkatkan produksinya, dan memberikan hasil yang diharapkan. Selain itu, sumber daya perikanan dianggap sebagai sumber daya akses terbuka, dan semua orang mencoba untuk mendapatkan akses ke sumber daya perikanan, sehingga menciptakan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya tersebut. Jadi, implikasi kebijakan penting dari studi tinjauan ini adalah bahwa mengorganisasikan masyarakat lokal dalam tindakan kolektif melalui penyediaan

layanan yang wajar dan melibatkan mereka di sektor perikanan untuk mengendalikan tangkapan ikan akan meminimalkan kerugian saat ini di sektor perikanan. Meningkatkan kolaborasi bersama antara pengguna perikanan, masyarakat lokal, lembaga pemerintah, dan agen pembangunan juga membantu memastikan perlindungan dan produksi perikanan yang berkelanjutan dan mencapai kesinambungan dan keberlanjutan sumber daya untuk masa depan di Ethiopia.

8. *Enhanced Food-Production Efficiencies through Integrated Farming Systems in the Hau Giang Province in the Mekong Delta, Vietnam* oleh Hakan Berg, Nguyen Thanh Tam, Thai Huynh Phuong Lan dan Chau Thi Da dalam jurnal Agriculture Tahun 2024

Studi ini membandingkan efisiensi produksi pangan dari pertanian padi-ikan terpadu dan pertanian monokultur padi dan mengevaluasi bagaimana sistem pertanian ini berkontribusi terhadap produksi pangan berkelanjutan di Delta Mekong. Studi ini mengeksplorasi bagaimana efisiensi produksi pangan dipengaruhi oleh konektivitas ekologis sistem dengan membandingkan sistem yang lebih terintegrasi yang menerapkan pertanian padi-ikan terpadu dan pengelolaan hama terpadu dengan sistem yang kurang terintegrasi yang hanya menanam padi.

Petani padi-ikan yang memiliki banyak ikan memiliki hasil panen padi yang jauh lebih tinggi daripada petani yang memiliki sedikit atau tidak memiliki ikan, terutama selama panen kedua ketika padi ditanam bersama ikan. Korelasi positif antara hasil panen ikan dan padi menunjukkan efek sinergis antara ikan dan padi, karena adanya peningkatan konektivitas ekologis dan interaksi trofik dalam ekosistem sawah. Secara keseluruhan, petani padi-ikan memiliki hasil panen padi yang lebih tinggi daripada petani padi, meskipun menggunakan pupuk dan pestisida dalam jumlah yang lebih sedikit. Mereka juga memiliki biaya produksi padi yang lebih rendah dibandingkan dengan petani padi, sebagian karena ikan membantu menyuburkan padi dan mengendalikan hama padi. Mereka memiliki rasio biaya keuntungan dan manfaat yang jauh lebih tinggi daripada petani padi

karena biaya produksi yang lebih rendah, dan hasil panen padi dan ikan yang tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi produksi pangan di Delta Mekong dapat ditingkatkan melalui diversifikasi dan peningkatan konektivitas ekologis, yang mengarah pada penggunaan layanan ekosistem sawah yang lebih efisien yang mendukung produksi pangan jangka panjang dan sehat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pertanian yang dibangun berdasarkan peningkatan konektivitas ekologis dan interaksi trofik dalam ekosistem sawah dapat meningkatkan efisiensi produksi pangan melalui peningkatan penggunaan layanan ekosistem, seperti resirkulasi nutrisi dan pengendalian hama. Hal ini membantu petani mengurangi penggunaan dan biaya bahan kimia pertanian, dengan implikasi positif bagi lingkungan dan pendapatan serta kesehatan petani. Strategi pertanian tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk sistem pertanian yang lebih berkelanjutan di Delta Mekong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi sistem pertanian dapat berkontribusi pada perubahan transformasional menuju sistem produksi pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Namun, hal ini memerlukan perubahan pola pikir dari keyakinan yang lebih konvensional bahwa peningkatan hasil panen hanya dapat dicapai melalui peningkatan penggunaan input berbasis bahan bakar fosil, seperti pupuk dan pestisida, yang sering kali mendominasi lingkungan yang semakin dikendalikan oleh manusia. Strategi pertanian baru harus sepenuhnya mendukung kompleksitas alam.

Hasil penelitian memberikan wawasan tentang cara meningkatkan produktivitas alami tanpa mengganggu, tetapi justru meningkatkan, layanan ekosistem untuk produksi pangan jangka panjang dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan agroekologi yang mendukung keanekaragaman hayati dan memanfaatkan proses alami merupakan langkah penting menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Dalam kasus budi daya padi-ikan, hal ini menghasilkan tanaman yang lebih stabil dan beragam dibandingkan dengan budi daya padi monokultur. Hal ini meningkatkan nilai gizi makanan yang dihasilkan, karena ikan menyediakan protein hewani.

Strategi pelengkap seperti pengelolaan hama terpadu sangat penting untuk meningkatkan mekanisme pengendalian hama alami, yang menjadi dasar untuk mengurangi penggunaan bahan kimia pertanian sintetis dan khususnya pestisida. Mengurangi penggunaan pestisida penting untuk keberhasilan produksi ikan dan juga membuat makanan lebih sehat, yang dapat meningkatkan harga pasar. Manfaat tersebut membantu meningkatkan kesadaran petani dan konsumen tentang bagaimana strategi pertanian berbasis ekologi dapat meningkatkan efisiensi produksi untuk menghasilkan makanan yang lebih banyak dan lebih sehat demi manfaat masa depan masyarakat di Delta Mekong.

9. *Exploring Policy of Small-Scale Coastal Fisheries in China: Evolution, Challenges and Prospects* oleh Minsi Xiong, Zuli Wu , Guangrui Qi , Keji Jiang, Na Zhao dan Wei Jiang dalam jurnal Fishes Tahun 2024 (<https://doi.org/10.3390/fishes9110451>)

China memainkan peran penting dalam industri perikanan global. Perikanan skala kecil yang beroperasi di sepanjang pantainya telah memberikan kontribusi yang signifikan dan tak ternilai dalam bidang pengentasan kemiskinan, penyediaan protein, kesetaraan sosial, dan pengembangan sosial ekonomi secara keseluruhan. Pengelolaan perikanan skala kecil di pesisir merupakan tantangan yang terus-menerus bagi semua negara perikanan, termasuk China. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah membuat kemajuan signifikan dalam mengadopsi pendekatan ilmiah dan terperinci untuk pengelolaan perikanan di sektor ini. Makalah ini memberikan gambaran umum tentang perkembangan praktik pengelolaan perikanan pesisir China, termasuk perubahan dalam kebijakan, metode, dan model sejak berdirinya Republik Rakyat China pada tahun 1949. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sistem tata kelola perikanan skala kecil di pesisir dengan menilai dari tiga dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi.

Tindakan pengelolaan yang umum digunakan dalam pengelolaan perikanan skala kecil di Tiongkok adalah pengelolaan izin penangkapan ikan.

Upaya penangkapan ikan dikontrol, kontrol input, zona penangkapan ikan tertutup, dan pembatasan alat tangkap ikan.

Pengelolaan perikanan pesisir skala kecil merupakan bidang yang memiliki berbagai tujuan ekonomi, sosial, dan ekologi. Tiongkok mendorong pengelolaan perikanan pesisir yang tertib melalui sistem perizinan penangkapan ikan. Akan tetapi, karena berbagai kontradiksi internal dan eksternal perikanan, hanya berfokus pada satu dimensi nilai, cara pengelolaan, dan sarana tidak dapat mengurangi penurunan sumber daya perikanan dekat pantai, tetapi menimbulkan tantangan bagi sumber daya dan lingkungan yang menjadi sandaran nelayan tradisional untuk bertahan hidup dalam jangka panjang.

Meskipun kebijakan tata kelola Tiongkok untuk perikanan pesisir skala kecil membaik, kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dan keterbatasan. Seiring dengan berkembangnya industri pesisir lainnya, persyaratan yang lebih tinggi diajukan untuk pengelolaan perikanan pesisir. Pemerintah harus secara bertahap meningkatkan kesadaran akan perikanan pesisir yang berkelanjutan, memperluas fokus kebijakan dari yang berfokus pada nilai ekologis ke nilai sosial dan ekonomi, memperkaya subjek tata kelola, mengadopsi model tata kelola yang fleksibel, meningkatkan keragaman instrumen kebijakan, dan meningkatkan efisiensi tata kelola perikanan tangkap pesisir skala kecil.

Melalui eksplorasi dan reformasi berkelanjutan, pemerintah Tiongkok bergerak menuju pengelolaan perikanan yang terdiferensiasi, disempurnakan, dan ilmiah, yang memberikan peluang baru untuk meningkatkan pengelolaan perikanan skala kecil di Tiongkok. Namun, pengetahuan pemerintah tentang perikanan skala kecil masih terbatas, dan penelitian serta pemahaman tentangnya perlu diperkuat, serta langkah-langkah dukungan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendorong keterlibatan pemangku kepentingan. Hanya dengan cara ini tantangan pembangunan perikanan skala kecil yang berkelanjutan dapat diatasi dengan lebih efektif. Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, keberlanjutan perikanan lebih luas, meliputi tidak hanya konsep perikanan berkelanjutan tetapi juga pembangunan berkelanjutan seluruh sistem

perikanan, termasuk keberlanjutan rantai industri perikanan, pembangunan berkelanjutan masyarakat desa nelayan, penghidupan tenaga kerja perikanan, dan keberlanjutan kebijakan pengelolaan perikanan

Oleh karena itu, kebijakan perikanan pesisir berkelanjutan Tiongkok harus lebih berfokus pada pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk secara bertahap meningkatkan pemahamannya tentang perikanan pesisir berkelanjutan dan mengadopsi berbagai langkah, termasuk memperkaya nilai kebijakan, meningkatkan jumlah subjek tata kelola, dan secara fleksibel menggunakan model tata kelola dan instrumen kebijakan yang beragam untuk meningkatkan efisiensi tata kelola perikanan skala kecil.

10. *The Impact of Aquaculture Cooperation Organization Support on Fish Farmers' Selected Good Aquaculture Practices: Based on a Survey Data of Fish Farmers in China* oleh Wei Yan, Panfeng Chai dan Changbiao Zhong dalam jurnal Water Tahun 2023 (<https://doi.org/10.3390/w15203681>).

Studi ini menyelidiki pentingnya integrasi pembudi daya ikan skala kecil. Melalui mekanisme keterkaitan unik yang dibangun antara koperasi akuakultur dan para praktisi skala kecil, yang ditandai dengan saling berbagi risiko dan manfaat, tidak hanya ada insentif untuk mengadopsi teknik akuakultur yang lebih maju, tetapi juga peningkatan keseluruhan kualitas dan standar keamanan produk perikanan. Dengan menggunakan model probit terurut, penelitian ini menjelaskan pengaruh mendalam dari dukungan organisasi dalam membimbing pemilihan praktik akuakultur yang optimal. Dukungan organisasi dibagi menjadi dua dimensi utama, yaitu dukungan emosional dan dukungan instrumental. Hasil empiris menunjukkan bahwa kedua aspek dukungan yang diberikan oleh koperasi akuakultur secara signifikan meningkatkan kecenderungan pembudi daya ikan untuk mengadopsi praktik terbaik. Secara spesifik, untuk setiap peningkatan unit dalam dukungan organisasi, terdapat peningkatan signifikan sebesar 12,3%, 17,3%, 18,3%, dan 17% dalam aktivitas termasuk pemeriksaan bibit, pengadaan pakan berkualitas, manajemen penyakit ikan, dan pemeriksaan ikan eksternal. Efek dukungan instrumental melebihi dukungan emosional, menjadikannya faktor

yang lebih dominan dalam membimbing pembudi daya ikan untuk mengadopsi praktik optimal.

Pengamatan kritis dari studi ini menekankan perlunya mekanisme koordinasi yang kuat dan terstruktur dalam sektor akuakultur. Sifat fragmentaris dari akuakultur di China merupakan hambatan yang signifikan, sehingga diperlukan pembentukan platform yang kohesif dan terintegrasi. Koperasi akuakultur sangat penting dalam hal ini, memastikan alokasi dan pemanfaatan faktor produksi yang efisien. Peran mereka dalam meningkatkan posisi tawar pembudi daya ikan yang terafiliasi, sehingga memastikan kualitas dan keamanan sejak tahap awal, sangat penting. Koperasi ini, dengan mekanisme terstruktur mereka, dapat berfungsi sebagai poros untuk memastikan koordinasi optimal dan menjamin standar keselamatan dan kualitas.

Penelitian ini secara jelas menyoroti peran signifikan dukungan organisasi dalam memengaruhi praktik yang diadopsi oleh pembudi daya ikan. Namun, kesenjangan yang ada, ditandai dengan keterbatasan afiliasi pembudi daya ikan dengan koperasi dan ketidakadaan koperasi di wilayah tertentu, merupakan masalah mendesak. Mengatasi kesenjangan ini memerlukan intervensi pemerintah yang proaktif dan kuat. Dukungan dan panduan yang ditingkatkan untuk entitas akuakultur yang baru muncul dan yang sudah ada pasti akan memperkuat sektor ini, mengarah pada adopsi praktik optimal dan berkelanjutan secara luas.

Temuan studi ini menegaskan pentingnya dukungan instrumental dibandingkan dukungan emosional dalam meningkatkan praktik akuakultur. Aspek ini menekankan perlunya koperasi akuakultur untuk memperjuangkan produksi standar. Dengan mendorong dan memfasilitasi adopsi praktik produksi standar serta langkah-langkah kualitas dan keamanan yang ketat, koperasi dapat memainkan peran signifikan dalam memastikan produksi produk perikanan berkualitas tinggi. Dukungan ini, pada gilirannya akan memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat untuk produk perikanan premium, memastikan kelayakan ekonomi dan keberlanjutan operasi akuakultur.

Singkatnya, ke depan memerlukan upaya kolektif dan terpadu dari semua pemangku kepentingan dalam sektor akuakultur. Rekomendasi rinci yang diuraikan dalam studi ini berfungsi sebagai panduan komprehensif, memberikan pendekatan terstruktur dan praktis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri. Pelaksanaan rekomendasi ini secara cermat tidak hanya akan memastikan keberlanjutan dan profitabilitas praktik akuakultur di China tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan sektor ini serta daya saing globalnya. Upaya saling terkait dan kolaboratif antara lembaga pemerintah, koperasi akuakultur, dan pembudi daya ikan sangat penting untuk mewujudkan visi ini, mengarah pada sektor akuakultur yang berkembang dan berkelanjutan di China.

11. *Collaborative Digital Governance for Sustainable Rural Development in China: An Evolutionary Game Approach* oleh Shuangming Yin, Yansong Li , Xiaojuan Chen, Woraphon Yamaka, dan Jianxu Liu dalam jurnal Agriculture Tahun 2024 ([https:// doi.org/10.3390/agriculture14091535](https://doi.org/10.3390/agriculture14091535))

Makalah ini mengeksplorasi pentingnya pemerintahan digital untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di China, dengan menekankan upaya kolaboratif antara organisasi administrasi desa, entitas bisnis pertanian baru, dan rumah tangga petani. Menggunakan pendekatan permainan evolusi, peneliti menganalisis perilaku pengambilan keputusan dan titik stabil dari ketiga entitas ini dalam konteks pemerintahan digital pedesaan. Analisis didasarkan pada mekanisme keterkaitan kepentingan di antara para pemangku kepentingan, dengan simulasi numerik digunakan untuk menilai dampak variabel dan parameter kunci terhadap hasil evolusi mereka.

Makalah ini mengungkapkan bahwa organisasi administrasi desa sangat sensitif terhadap perubahan dalam keuntungan kinerja, subsidi khusus, kerugian penalti, dan koefisien distribusi manfaat. Meningkatkan variabel-variabel ini dapat secara signifikan memotivasi organisasi-organisasi ini untuk terlibat dalam pemerintahan digital. Sebaliknya, entitas bisnis pertanian baru dan rumah tangga petani menunjukkan keinginan yang lebih kuat dan konsisten untuk berkolaborasi, yang sedikit terpengaruh oleh perubahan variabel, yang menunjukkan dasar

ekonomi dan sosial yang kuat untuk pemerintahan digital pedesaan di China. Makalah ini menekankan perlunya insentif positif dan mekanisme toleransi kesalahan yang kuat untuk mendorong kolaborasi di antara organisasi administrasi desa. Ini juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan entitas bisnis pertanian baru ke dalam kerangka pemerintahan digital untuk mempromosikan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Wawasan ini memberikan implikasi teoritis dan praktis yang berharga bagi pembuat kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan inklusivitas pemerintahan digital di pedesaan China.

Dalam proses tata kelola digital pedesaan di Tiongkok, terdapat mekanisme hubungan kepentingan yang kompleks antara organisasi administratif tingkat desa, entitas bisnis pertanian baru, dan petani. Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, makalah ini mempelajari perilaku pengambilan keputusan dari ketiga pelaku ini dan titik stabil evolusioner mereka dalam proses tata kelola digital pedesaan di Tiongkok. Lebih jauh, berdasarkan data survei, simulasi numerik dilakukan untuk memeriksa pengaruh variabel dan parameter utama pada hasil evolusioner perilaku pengambilan keputusan dari ketiga pelaku. Kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Di antara ketiga pelaku, organisasi administratif tingkat desa lebih peka terhadap perubahan variabel seperti manfaat kinerja politik, subsidi khusus, kerugian penalti, dan koefisien distribusi pendapatan baru. Peningkatan manfaat kinerja politik melalui berbagai saluran, peningkatan jumlah subsidi khusus, dan peningkatan proporsi distribusi pendapatan baru dapat meningkatkan antusiasme organisasi administratif tingkat desa untuk berkolaborasi dalam tata kelola digital pedesaan.
- b. Ketersediaan badan usaha pertanian baru dan petani untuk berkolaborasi secara signifikan lebih kuat dibandingkan dengan organisasi administratif tingkat desa. Perubahan variabel dan parameter utama pada dasarnya tidak mempengaruhi hasil konvergensi akhir dari kemauan kolaborasi kedua pelaku ini, tetapi hanya memiliki beberapa dampak pada kecepatan konvergensi. Hal ini menunjukkan bahwa badan usaha pertanian baru di Tiongkok memainkan

fungsi layanan ekonomi dan sosial yang penting, dan penerapannya tata kelola digital pedesaan sudah memiliki landasan ekonomi dan sosial yang baik. Dengan pesatnya perkembangan industri pedesaan dan peningkatan taraf hidup petani secara umum, badan usaha pertanian dan petani baru memiliki kesadaran digital yang kuat dan akan secara aktif berkolaborasi dalam tata kelola digital pedesaan.

- c. Fungsi organisasi administratif tingkat desa dalam tata kelola digital pedesaan belum dimanfaatkan secara penuh. Kesadaran kolaborasi organisasi administratif tingkat desa mungkin sempat menurun pada tahap awal, tetapi dengan peningkatan cepat kesadaran kolaborasi dari dua pelaku lainnya, ketiganya akhirnya menunjukkan kolaborasi yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan kolaborasi organisasi administratif tingkat desa dipengaruhi oleh perilaku pengambilan keputusan dari dua pelaku lainnya. Dibandingkan dengan dua pelaku lainnya, sebagai penyelenggara tata kelola digital pedesaan, antusiasme organisasi administratif tingkat desa untuk partisipasi kolaboratif membutuhkan lebih banyak insentif. Kedua, perilaku pengambilan keputusan organisasi administratif tingkat desa menunjukkan tingkat ketertinggalan tertentu dan memiliki karakteristik pengambilan keputusan kolektif yang jelas, yang membutuhkan optimalisasi mekanisme pengambilan keputusan organisasi administratif tingkat desa dan peningkatan ketepatan waktu pengambilan keputusan mereka.

Ada beberapa tantangan dalam mempromosikan tata kelola digital pedesaan, pemerintah daerah di negara-negara berkembang harus terlebih dahulu menerapkan kebijakan insentif positif. Langkah-langkah seperti meningkatkan jumlah subsidi khusus dan meningkatkan insentif kebijakan dapat diadopsi untuk meningkatkan antusiasme organisasi administratif tingkat desa untuk berpartisipasi. Mekanisme toleransi kesalahan yang lebih baik harus ditetapkan untuk menyediakan lebih banyak ruang bagi inovasi kolaboratif oleh organisasi administratif tingkat desa.

Negara-negara berkembang harus secara aktif mendukung dan membina badan usaha pertanian baru dan sepenuhnya memanfaatkan peran mereka dalam tata kelola digital pedesaan. Cara langsung dan tidak langsung bagi badan usaha pertanian baru untuk berpartisipasi dalam tata kelola digital pedesaan harus dieksplorasi secara menyeluruh. Keterkaitan kepentingan antara badan usaha pertanian baru dan petani harus disesuaikan dan ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat pendapatan petani dan meningkatkan kesadaran digital mereka. Dengan fokus pada pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, landasan ekonomi dan sosial yang kokoh bagi tata kelola digital pedesaan harus dibangun.

Negara-negara berkembang perlu meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan organisasi administratif tingkat desa dan memberikan peran utama mereka sepenuhnya dalam tata kelola digital pedesaan. Analisis biaya-manfaat dan risiko yang komprehensif dari tata kelola digital pedesaan harus dilakukan untuk meningkatkan rasionalitas pengambilan keputusan. Keakuratan dan ketepatan waktu keputusan harus ditingkatkan dengan membangun mekanisme komunikasi ilmiah.

Beberapa penelitian terdahulu di atas dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Matrik Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Teori	Metode	Hasil
1	Nopriono dan Suswanta (2019)	Untuk mengidentifikasi peran setiap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan perspektif <i>collaborative governance</i> .	<i>Collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash (2007)	Metode penelitian kualitatif (deskriptif)	Pelaksanaan <i>collaborative governance</i> telah berjalan dengan baik, terlihat dari terpenuhinya beberapa komponen mulai dari <i>starting condition</i> , kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, hingga proses kolaboratif yang berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini berdampak pada capaian hasil sementara, yang tercermin dari meningkatnya produktivitas hasil budi daya ikan, bertambahnya pendapatan masyarakat, serta kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
2	Solikhin	Mengkaji dan	<i>Collaborative</i>	Metode	Kegiatan <i>face-to-face dialogue</i>

	dan Rahaju (2019)	menggambarkan bagaimana proses <i>collaborative governance</i> dilakukan dalam upaya pemberdayaan penyandang tunagrahita melalui kegiatan budi daya Ikan Lele di Desa Karangpatihan.	<i>governance</i> menurut Ansell dan Gash (2007:228)	penelitian kualitatif (deskriptif)	diwujudkan melalui pertemuan rutin antara Pemerintah Desa Karangpatihan, KSM Rumah Harapan, dan masyarakat, serta kunjungan berkala dari KPw BI Kediri ke Desa Karangpatihan. Pada aspek <i>trust building</i> , upaya dilakukan melalui intensitas pertemuan yang tinggi dan penerapan transparansi. Untuk <i>commitment to the process</i> , masih ditemukan beberapa pengurus KSM Rumah Harapan yang belum optimal dalam memberikan pendampingan kepada penyandang tunagrahita. Komponen <i>shared understanding</i> tercapai melalui dialog, pertemuan, dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Sementara itu, <i>intermediate outcomes</i> terlihat dari upaya memastikan penyandang tunagrahita memahami teknik budi Daya Ikan Lele dengan benar sehingga mereka dapat menjalankannya secara mandiri.
3	Bernadin D. et al (2024)	Untuk mengetahui apakah variabel model Quadruple Helix dapat meningkatkan kinerja manajemen UMKM di era normal baru	Konsep <i>Quadruple</i> (Yun dan Liu, 2019)	Pendekatan kuantitatif: Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)	Di antara empat pilar model Quadruple Helix (akademis, bisnis, masyarakat lokal, dan pemerintah), bisnis menunjukkan pengaruh paling signifikan terhadap kinerja manajemen, sebagaimana dibuktikan oleh nilai koefisien sebesar 0,311. Selain itu, pemerintah (0,290), akademis (0,201), dan masyarakat lokal (0,160) menunjukkan koefisien yang lebih rendah.
4	Yuru He, Shuolin Huang, and Yi Tang (2022)	Untuk memberikan referensi nilai dalam memanfaatkan perangkat kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan sambil mempromosikan legitimasi tata	Teori meta- <i>governance</i> (Jesop B, 1997)	Metode penelitian kualitatif	Model tata kelola perikanan dan akuakultur telah berubah dari tata kelola hierarkis menjadi tata kelola terpadu yang menggabungkan hierarki, pasar dan masyarakat. Etika partisipatif tertanam dalam organisasi sipil, dari asosiasi perikanan, kantor, liga menjadi masyarakat dan koperasi.

		kelola akar rumput perikanan			
5	Jacob Zornu, et al (2023)	Menentukan sektor yang memiliki posisi paling strategis dalam pengaturan akuakultur yang dapat memberikan masukan berharga bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan akuakultur berkelanjutan	Teori <i>the ecosystem approach to Aquaculture</i> (FAO, 2010; Soto et al. 2008)	Penelitian eksploratif (Diskusi kelompok terpumpun)	70% responden mempercayai sektor pemerintah untuk mengatur pertumbuhan akuakultur di Ghana, 16,3% menyarankan pendelegasian yang dipimpin sektor swasta dan 13,8% memilih upaya gabungan antara pemerintah dan sektor swasta
6	Evans Sakyi Boadu (2024)	Untuk mengetahui partisipasi dan kolaborasi pemangku kepentingan terhadap kebijakan ketahanan pangan yang berpusat pada pemuda di Ghana	<i>Collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash (2008)	Pendekatan kualitatif: teknik analisis dokumenter kualitatif	Strategi kolaboratif dan partisipasi aktif pemuda dalam semua kebijakan terkait ketahanan pangan sangat penting bagi Ghana untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 1 dan 2
7	Oliyad Sori Zenba (2024)	Untuk meninjau pengelolaan perikanan dan tantangannya di Ethiopia	<i>Collective action and property rights in fisheries management</i> (Ahmed MK, Viswanathan KK, Valmonte-Santos RA: 2020)	Pendekatan kualitatif	Kebijakan penting yang diajukan adalah menciptakan dan meningkatkan kolaborasi bersama antara pelaku usaha perikanan, masyarakat lokal, lembaga pemerintah, dan agen pembangunan; mengorganisasikan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam aksi kolektif untuk melibatkan mereka di sektor perikanan guna berkontribusi pada peningkatan praktis dalam perlindungan, produksi, pengelolaan, dan keberlanjutan.
8	Hakan Berg, et al (2024)	Membandingkan efisiensi produksi pangan dari pertanian padi-ikan terpadu dan pertanian monokultur padi di Delta Mekong	Ekologi (Xie, J.; Hu, L.; Tang, J.; Wu, X.; Li, N.; Yuan, Y.; Yang, H.; Zhang, J.; Luo, S.; Chen, X.: 2011)	Analisis Komunitas Partisipatif (PCA), diskusi kelompok, dan wawancara terstruktur	Petani padi-ikan yang memiliki banyak ikan memiliki hasil panen padi yang jauh lebih tinggi daripada petani yang memiliki sedikit atau tidak memiliki ikan, terutama selama panen kedua ketika padi ditanam bersama ikan
9	Xiong, et al (2024)	Memberikan gambaran umum tentang	<i>Voluntary Guidelines for Securing</i>	Pendekatan kualitatif (analisis	Pemerintah harus meningkatkan pemahamannya tentang perikanan pesisir berkelanjutan

		perkembangan praktik pengelolaan perikanan pesisir Tiongkok	<i>Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication</i> (FAO, 2015)	kebijakan dan dokumenter)	dan mengadopsi berbagai langkah, termasuk memperkaya nilai kebijakan, meningkatkan jumlah subjek tata kelola, dan secara fleksibel menggunakan model tata kelola dan instrumen kebijakan yang beragam untuk meningkatkan efisiensi tata kelola perikanan skala kecil
10	Wei Yan, et al (2023)	Mengetahui pengaruh mendalam dukungan organisasi (Koperasi) dalam memandu pemilihan praktik akuakultur yang optimal	Model resiprositas dan pertukaran sosia (Eisenberger, et al, 1990)	Pendekatan kuantitatif (regresi)	Koperasi akuakultur sangat penting dalam memastikan alokasi dan pemanfaatan faktor produksi yang efisien, memastikan produk akuatik berkualitas tinggi.
11	Yin, et al (2024)	Mengeksplorasi signifikansi tata kelola digital untuk pembangunan pedesaan berkelanjutan di Tiongkok, dengan menekankan upaya kolaboratif organisasi administratif desa, entitas bisnis pertanian baru, dan rumah tangga petani.	<i>Collaborative governance model</i> (Prefontaine, 2003)	Pendekatan kuantitatif	Perlunya insentif positif dan mekanisme toleransi kesalahan yang kuat untuk mendorong kolaborasi di antara organisasi administratif desa. Makalah ini juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan entitas bisnis pertanian baru ke dalam kerangka tata kelola digital untuk mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan

Sumber: Diolah Penulis (2025)

B. Tinjauan Kebijakan dan Literatur

1. Tinjauan Kebijakan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan

a. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang diadopsi oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 melalui dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (United Nations, 2015). SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan agenda

pembangunan sebelumnya, SDGs menekankan prinsip *no one left behind*, yang menempatkan kelompok rentan dan masyarakat akar rumput sebagai sasaran utama kebijakan pembangunan.

Dalam konteks kebijakan publik, SDGs tidak hanya dipahami sebagai seperangkat tujuan normatif, tetapi juga sebagai kerangka kebijakan yang menuntut perubahan paradigma tata kelola pembangunan. Implementasi SDGs mensyaratkan keterlibatan multipihak, lintas sektor, dan lintas level pemerintahan, sehingga pendekatan *governance* menjadi elemen kunci dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut (UNDP, 2016).

Pencapaian SDGs secara eksplisit menuntut mekanisme kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan media. Hal ini tercermin dalam SDG 17 (*Partnerships for the Goals*), yang menekankan pentingnya kemitraan multiaktor dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan (United Nations, 2015). Dalam literatur kebijakan publik, kebutuhan akan kemitraan tersebut sejalan dengan konsep *collaborative governance*, yang menempatkan proses pengambilan keputusan kolektif dan deliberatif sebagai inti tata kelola publik (Ansell & Gash, 2008).

Melalui perspektif *collaborative governance*, SDGs dapat dipahami sebagai agenda pembangunan yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan hierarkis semata. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan *enabler*, sementara aktor non-pemerintah berkontribusi melalui sumber daya, pengetahuan, dan inovasi. Dengan demikian, SDGs menyediakan justifikasi normatif dan kebijakan bagi penerapan *collaborative governance* dalam konteks pembangunan daerah.

Dalam konteks disertasi ini, terdapat beberapa tujuan SDGs yang secara langsung relevan dengan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan.

SDGs 1 (*No Poverty*) menekankan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya. Masyarakat pembudi daya ikan, khususnya skala kecil, sering kali berada dalam kondisi ekonomi rentan akibat fluktuasi produksi, keterbatasan modal, dan ketergantungan pada pasar. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan

pembudi daya ikan berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDG 1 melalui peningkatan pendapatan dan ketahanan penghidupan.

SDGs 2 (*Zero Hunger*) menempatkan sektor perikanan budi daya sebagai bagian penting dari sistem pangan berkelanjutan. FAO (2018) menegaskan bahwa perikanan budi daya berperan strategis dalam penyediaan protein, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan gizi masyarakat. Pemberdayaan pembudi daya ikan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan berbasis perikanan.

SDGs 8 (*Decent Work and Economic Growth*) relevan dengan upaya peningkatan kualitas usaha budi daya ikan agar mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Pemberdayaan yang didukung oleh kolaborasi lintas aktor dapat mendorong inovasi, efisiensi usaha, serta integrasi pembudi daya ikan ke dalam rantai nilai perikanan.

SDGs 12 (*Responsible Consumption and Production*) menekankan pola produksi yang berkelanjutan, termasuk praktik perikanan dan akuakultur yang ramah lingkungan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pembudi daya ikan diperlukan untuk mentransfer teknologi dan praktik budi daya yang berkelanjutan.

SDGs 14 (*Life Below Water*) secara khusus menyoroti pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan. Meskipun fokus utama SDG 14 adalah perikanan tangkap, FAO (2020) menegaskan bahwa perikanan budi daya berkelanjutan merupakan bagian integral dari upaya menjaga ekosistem perairan dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam.

Implementasi SDGs di tingkat lokal menuntut penyesuaian dengan karakteristik wilayah dan masyarakat. Pendekatan *localizing SDGs* menekankan bahwa pemerintah daerah perlu menerjemahkan tujuan global ke dalam kebijakan dan program yang kontekstual (UNDP, 2016). Dalam konteks Kabupaten Banyumas, program Desa Perikanan Cerdas dan Kampung Perikanan Budi Daya dapat dipahami sebagai bentuk lokalisasi SDGs di sektor perikanan.

Namun demikian, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, model *collaborative governance* menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan berbasis SDGs mampu memberdayakan masyarakat pembudi daya ikan secara nyata dan berkelanjutan.

Implementasi SDGs di Indonesia telah diarusutamakan ke dalam berbagai dokumen kebijakan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan sektoral terkait pembangunan perdesaan dan kelautan perikanan. Pemerintah Indonesia secara resmi mengintegrasikan SDGs ke dalam RPJMN 2020–2024 sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Bappenas, 2020). Integrasi ini menegaskan bahwa pencapaian SDGs bukan agenda terpisah, melainkan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional.

Dalam konteks kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menempatkan pembangunan perikanan budi daya sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Kebijakan perikanan budi daya diarahkan untuk meningkatkan produksi yang berkelanjutan, kesejahteraan pembudi daya ikan skala kecil, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha (KKP, 2021). Arah kebijakan ini sejalan dengan SDGs 2, SDGs 8, dan SDGs 14, sekaligus menuntut pendekatan tata kelola yang kolaboratif.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong lokalisasi SDGs hingga tingkat desa melalui kebijakan SDGs Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. SDGs Desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan berkelanjutan dengan menekankan partisipasi masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan. Kebijakan ini relevan dengan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan yang banyak bermukim di wilayah perdesaan dan menggantungkan hidup pada sumber daya perairan.

Integrasi SDGs ke dalam kebijakan nasional dan sektoral tersebut memperkuat argumen bahwa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor perikanan budi daya, memerlukan model *collaborative governance*. Kompleksitas target SDGs, keterbatasan sumber daya pemerintah, serta keberagaman aktor yang terlibat menuntut mekanisme kolaborasi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa SDGs menyediakan kerangka normatif global yang diperkuat oleh kebijakan nasional Indonesia dalam RPJMN, kebijakan perikanan budi daya, dan SDGs Desa. Kerangka kebijakan ini secara implisit maupun eksplisit menuntut penerapan *collaborative governance* sebagai pendekatan utama dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Dengan demikian, analisis *collaborative governance* dalam disertasi ini memiliki relevansi teoretis dan kebijakan yang kuat, baik dalam konteks global, nasional, maupun lokal Kabupaten Banyumas.

b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menegaskan bahwa pemerintah wajib memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil melalui penyediaan skema pembiayaan yang mudah diakses, berbunga rendah, dan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Skema kredit tersebut ditujukan untuk membantu pemenuhan modal usaha serta kebutuhan operasional. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban menyediakan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan bagi nelayan serta pembudi daya ikan kecil, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam kegiatan penangkapan, budi daya, pengolahan, hingga pemasaran ikan.

Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran yang ditujukan bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengorganisasi diri dalam memperoleh akses terhadap informasi pasar, teknologi, permodalan, serta berbagai sumber daya lainnya. Kegiatan ini bertujuan

untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya, pemerintah memiliki peran strategis dalam mengembangkan kelompok-kelompok pembudi daya ikan kecil serta koperasi perikanan sebagai wadah untuk memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan solidaritas antar pelaku. Melalui penguatan kelembagaan ini, pembudi daya ikan kecil diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar, memperluas akses pasar, serta memperoleh dukungan teknologi dan permodalan secara lebih efektif.

Kebijakan pemberdayaan tersebut juga membuka ruang partisipasi masyarakat, di mana berbagai pihak dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas pembudi daya ikan kecil. Di sisi lain, pelaku usaha atau pengusaha perikanan didorong untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan kelompok pembudi daya ikan kecil, terutama dalam aspek produksi, pengolahan, pemasaran, dan distribusi. Kemitraan ini menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan usaha yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan.

Pembudi daya ikan kecil diberi kesempatan untuk membudi dayakan berbagai komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, mereka wajib menjaga kelestarian lingkungan perairan, menerapkan prinsip budi daya berkelanjutan, serta memastikan keamanan pangan hasil perikanan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, setiap pembudi daya ikan kecil wajib mendaftarkan diri, usaha, dan seluruh aktivitas budi dayanya kepada instansi perikanan setempat. Pendaftaran ini bersifat gratis dan bertujuan mendukung penyusunan data statistik perikanan serta mempermudah pelaksanaan program pemberdayaan.

Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dilaksanakan dengan sejumlah tujuan strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan serta penguatan sistem budi daya yang berkelanjutan. Pertama,

pemberdayaan ini diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pembudi daya ikan kecil sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas hidup, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Kedua, kebijakan ini bertujuan mendorong terciptanya usaha budi daya ikan yang lebih produktif, efisien, bernilai tambah, dan berdaya saing, sehingga pembudi daya ikan mampu merespon dinamika pasar maupun tantangan lingkungan. Ketiga, pemberdayaan mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas pembudi daya ikan kecil, baik melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan teknis, maupun penguatan kelembagaan agar mereka mampu mengelola usaha secara mandiri dan profesional.

Keempat, pemerintah berupaya menjamin akses pembudi daya ikan kecil terhadap berbagai sumber daya penting seperti sumber daya ikan dan ekosistem perairan, teknologi budi daya yang tepat guna, dukungan permodalan, sarana dan prasarana produksi, serta akses pemasaran yang lebih luas dan adil. Kelima, pemberdayaan juga diarahkan untuk meningkatkan penumbuhan dan pengembangan kelompok-kelompok pembudi daya ikan kecil, sehingga terbentuk unit-unit kelembagaan yang kuat, solid, dan mampu menjadi motor dalam penguatan jejaring kemitraan maupun pembangunan perikanan budi daya berkelanjutan.

Kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas teknis dan usaha para pembudi daya ikan, tetapi juga mencakup pemberdayaan perempuan dalam keluarga pembudi daya ikan. Perempuan memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan usaha perikanan, baik melalui kontribusi langsung dalam proses produksi maupun dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan meliputi beberapa aspek berikut:

1) Pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non-perikanan

Kegiatan ini bertujuan memperluas sumber pendapatan keluarga pembudi daya ikan sehingga mereka memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Pengembangan ekonomi dilakukan baik melalui usaha budi daya ikan

maupun aktivitas ekonomi alternatif yang dapat dijalankan oleh anggota keluarga, termasuk perempuan.

2) Pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha

Pemerintah memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan teknis budi daya, pengelolaan sarana produksi, manajemen keuangan, perencanaan usaha, hingga pemasaran hasil. Bimbingan ini membantu pembudi daya ikan meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kemampuan mengelola usaha secara lebih profesional.

3) Pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan

Perempuan didorong untuk mengembangkan berbagai bentuk diversifikasi usaha, baik yang terkait dengan perikanan (misalnya pengolahan hasil ikan, pembuatan pakan, atau pemasaran) maupun usaha non-perikanan (misalnya kuliner, kerajinan, atau jasa). Diversifikasi ini membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi perempuan.

4) Pengumpulan dan pertukaran data terpilah untuk pengembangan diversifikasi usaha perempuan

Kegiatan ini mencakup pendataan yang lebih rinci mengenai peran, kebutuhan, dan kapasitas perempuan dalam usaha rumah tangga. Data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan program, pemetaan peluang usaha, serta perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.

5) Peningkatan peran aktif perempuan dalam seluruh tahapan pengelolaan program

Kebijakan pemberdayaan menekankan perlunya keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan, pengambilan keputusan, hingga pengawasan. Hal ini bertujuan memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor penting dalam pengembangan usaha keluarga dan pembangunan sektor perikanan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi terbentuknya kemitraan bagi pembudi daya ikan kecil. Bentuk kemitraan tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain:

- 1) Unit pengolahan atau pelaku pemasaran hasil perikanan;
- 2) Nelayan maupun sesama pembudi daya ikan;
- 3) Koperasi yang bergerak di sektor perikanan;
- 4) Pelaku usaha di bidang perikanan maupun sektor non-perikanan;
- 5) Lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya;
- 6) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- 7) Pihak swasta.

Kemitraan antara pembudi daya ikan dan pelaku usaha lain dapat meliputi beberapa bentuk kerja sama, antara lain:

- 1) Transfer keterampilan di bidang manajerial maupun teknis;
- 2) Dukungan dalam kegiatan pemasaran;
- 3) Akses terhadap permodalan;
- 4) Pengembangan sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi sesuai dengan bentuk kemitraan yang disepakati;
- 5) Penerapan tata niaga dan rantai pasok yang adil; dan/atau
- 6) Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

Pola Kemitraan meliputi:

- 1) Pola inti-plasma;
- 2) Pola perdagangan umum;
- 3) Pola bagi hasil; dan
- 4) Pola kerja sama operasional.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan regulasi yang bertujuan meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan,

melindungi ekosistem perairan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudi daya ikan. Namun, dari perspektif kolaborasi, efektivitas implementasi Undang Undang ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mekanisme kolaboratif antar pemangku kepentingan dapat dijalankan secara nyata di lapangan.

Teori kolaborasi Ansell dan Gash menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi antar pihak dalam kebijakan publik ditentukan oleh lima elemen utama, yaitu: (1) kondisi awal yang mendukung kolaborasi, (2) struktur proses yang inklusif, (3) kepemimpinan yang memfasilitasi, (4) komitmen terhadap tujuan bersama, dan (5) pengembangan hubungan dan kepercayaan antar pihak. Evaluasi UU Perikanan berdasarkan kerangka ini menunjukkan sejumlah temuan penting.

Pertama, kondisi awal Undang Undang Perikanan telah menciptakan dasar legal untuk keterlibatan multi-pihak dengan menekankan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha perikanan. Meskipun demikian, mekanisme formal untuk melibatkan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan, dan organisasi non-pemerintah masih terbatas, sehingga kondisi awal untuk kolaborasi yang efektif belum sepenuhnya optimal.

Kedua, dari sisi struktur proses, Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 lebih menekankan pengaturan *top-down*, penegakan hukum, dan sanksi terhadap pelanggaran. Proses konsultasi publik atau forum kolaboratif untuk merumuskan kebijakan bersama belum secara eksplisit diatur. Hal ini membatasi partisipasi aktif pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, kepemimpinan yang memfasilitasi kolaborasi dalam Undang Undang ini masih dominan bersifat birokratis. Kepemimpinan kolaboratif yang mendorong mediasi, fasilitasi dialog antar pihak, dan penyelesaian konflik secara partisipatif belum menjadi fokus utama regulasi.

Keempat, terkait komitmen terhadap tujuan bersama, Undang Undang Perikanan telah menetapkan tujuan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Namun, pemangku kepentingan sering beroperasi dalam konteks kepentingan masing-

masing, sehingga tujuan bersama yang bersifat kolaboratif belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik pengelolaan sumber daya perikanan.

Kelima, dalam hal pengembangan hubungan dan kepercayaan, Undang-Undang ini belum memberikan mekanisme yang cukup untuk membangun *trust-building* antara pemerintah, nelayan, pembudi daya ikan, dan sektor swasta. Hubungan antar pemangku kepentingan masih bersifat transaksional, sehingga kolaborasi jangka panjang dan pembelajaran bersama menjadi terbatas.

Secara keseluruhan, UU Nomor 45 Tahun 2009 menyediakan kerangka hukum penting untuk pengelolaan perikanan, tetapi dari perspektif teori kolaborasi Ansell dan Gash, regulasi ini lebih menekankan mekanisme *top-down* daripada kolaboratif. Agar implementasi kebijakan perikanan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, perlu dikembangkan forum kolaboratif yang rutin, mekanisme *co-management* dengan masyarakat, transparansi data perikanan, serta program pembelajaran dan pembangunan kepercayaan antar pihak. Dengan demikian, UU Perikanan dapat menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendorong kolaborasi nyata antara semua pemangku kepentingan.

Tabel 2. 3 Evaluasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Aspek Teori Kolaborasi	Evaluasi UU 45/2009
Keterlibatan Multi-Pihak (<i>Multi-Stakeholder Engagement</i>)	UU menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Namun, mekanisme formal untuk melibatkan pembudi daya ikan secara aktif masih terbatas, sehingga partisipasi publik sering bersifat simbolik
Tujuan Bersama (<i>Shared Goals</i>)	UU menetapkan tujuan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Meski demikian, belum sepenuhnya mendorong pemangku kepentingan untuk menetapkan target kolaboratif bersama
Distribusi Tanggung Jawab	UU mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta sanksi bagi pelanggar. Dari sisi kolaborasi, distribusi tanggung jawab kepada masyarakat lokal dan pembudi daya ikan untuk ikut mengawasi sumber daya masih minim

Keterbukaan Informasi (<i>Transparency & Communication</i>)	UU mendorong pengelolaan data perikanan, tetapi mekanisme berbagi informasi dengan pembudi daya ikan serta publik belum optimal. Informasi pengelolaan perikanan lebih banyak diakses oleh birokrasi.
Kepercayaan dan Pembentukan Jaringan	Teori kolaborasi menekankan <i>trust-building</i> antar pemangku kepentingan. UU tidak secara eksplisit mengatur mekanisme membangun kepercayaan, misalnya melalui forum konsultasi rutin antara pemerintah, pembudi daya ikan, dan LSM.
Evaluasi dan Pembelajaran Bersama (<i>Joint Learning</i>)	UU menekankan penelitian dan monitoring, tetapi praktik kolaboratif untuk pembelajaran bersama antar pihak (<i>government, private, community</i>) masih kurang.

Sumber: Diolah Penulis (2025)

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Undang-undang ini merumuskan beberapa strategi utama pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Strategi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan program peningkatan kapasitas sektor perikanan, yaitu:

1) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitas pelaku utama sektor perikanan. Bentuk kegiatan yang diatur dalam UU meliputi:

- a) Pelatihan dan pemagangan bidang perikanan atau perikanan;
- b) Penyediaan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan pada bidang tersebut;
- c) Pelatihan kewirausahaan untuk memperkuat usaha perikanan atau perikanan.

2) Penyuluhan dan Pendampingan

Pemerintah Pusat berkewajiban menyediakan fasilitas penyuluhan dan pendampingan yang mencakup pembudi daya ikan dan keluarganya. Implementasinya dilakukan melalui:

- a) Pembentukan lembaga penyuluhan perikanan;
- b) Penyediaan minimal tiga penyuluh perikanan untuk setiap kawasan potensi perikanan;
- c) Penempatan penyuluh perikanan yang memiliki kompetensi teknis maupun manajerial di bidang perikanan atau perikanan.

Penyuluh perikanan ini tidak hanya memberikan edukasi teknis, tetapi juga membantu pelaku usaha untuk mengakses permodalan, pasar, dan jaringan kemitraan.

3) Kemitraan Usaha

Kemitraan usaha merupakan strategi penting untuk memperkuat posisi pembudi daya ikan dalam rantai ekonomi perikanan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kerja sama dalam berbagai tahap usaha, meliputi:

- a) pra produksi,
- b) produksi,
- c) pasca produksi,
- d) pengolahan,
- e) pemasaran, dan
- f) pengembangan usaha.

Kemitraan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak.

4) Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing, pemerintah menjamin kemudahan akses terhadap:

- a) Informasi dan penyebaran teknologi;
- b) Alih teknologi melalui kerja sama;
- c) Informasi terkait potensi sumber daya ikan, sarana produksi, bahan baku, harga komoditas, peluang pasar, serta isu-isu lain yang mendukung usaha pembudi daya ikan.

Kemudahan akses ini membantu pembudi daya ikan mengambil keputusan usaha yang berbasis data (*evidence-based decision making*).

5) Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan menjadi pilar utama pemberdayaan karena kelompok pembudi daya ikan berfungsi sebagai wadah ekonomi, sosial, dan pembelajaran. Fungsi tersebut antara lain:

- a) Meningkatkan posisi tawar pembudi daya ikan;
- b) Memperkuat kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak;
- c) Menjadi forum tukar informasi untuk memecahkan masalah usaha;
- d) Meningkatkan kapasitas anggota dalam usaha perikanan yang berkelanjutan;
- e) Membela kepentingan anggota dalam hubungan kemitraan;
- f) Memberikan nilai tambah bagi produk perikanan serta mempermudah akses permodalan.

Tujuan pemberdayaan mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

- 1) Menyediakan sarana prasarana dan sumber daya pendukung yang diperlukan untuk mendorong pengembangan usaha perikanan.
- 2) Memberikan jaminan keberlanjutan usaha, sehingga kegiatan budi daya dapat berjalan stabil dan berkesinambungan.
- 3) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas para pembudi daya ikan, sekaligus memperkuat kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga mereka mampu mengelola usaha secara mandiri, produktif, modern, berkelanjutan, serta tetap memprioritaskan kelestarian lingkungan.
- 4) Membangun sistem dan kelembagaan pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan modal usaha secara tepat dan berkelanjutan.
- 5) Memberikan perlindungan kepada nelayan dan pembudi daya ikan dari berbagai risiko, seperti bencana alam, perubahan iklim, maupun pencemaran lingkungan.

- 6) Menjamin aspek keamanan, keselamatan, serta akses terhadap bantuan hukum, sebagai bentuk perlindungan menyeluruh bagi pelaku usaha perikanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam merupakan regulasi strategis yang dirancang untuk memperkuat perlindungan hukum, kesejahteraan, dan kapasitas ekonomi para pelaku perikanan dan garam di Indonesia. Undang Undang ini tidak hanya menekankan aspek pemberdayaan ekonomi, tetapi juga perlindungan sosial dan keberlanjutan sumber daya, sehingga secara konseptual memiliki potensi untuk menjadi instrumen kolaboratif antara pemerintah, masyarakat nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Berdasarkan teori kolaborasi Ansell dan Gash, efektivitas kolaborasi kebijakan publik ditentukan oleh lima elemen utama: kondisi awal yang mendukung kolaborasi, struktur proses yang inklusif, kepemimpinan yang memfasilitasi, komitmen terhadap tujuan bersama, serta pengembangan hubungan dan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Evaluasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 berdasarkan kerangka ini menunjukkan sejumlah temuan sebagai berikut.

Pertama, kondisi awal Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 relatif mendukung kolaborasi karena mengakui peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat. Undang Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga pemberdayaan dan perlindungan nelayan, yang secara teoritis dapat menjadi titik temu berbagai pihak. Namun, mekanisme formal untuk partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam perumusan dan implementasi kebijakan masih terbatas, sehingga kondisi awal kolaborasi belum sepenuhnya optimal.

Kedua, struktur proses Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 menekankan program-program pemberdayaan, perlindungan sosial, akses permodalan, dan

fasilitas pelatihan. Meskipun struktur ini menyediakan peluang untuk keterlibatan multi-pihak, Undang Undang belum secara eksplisit menetapkan mekanisme forum kolaboratif yang rutin antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini membatasi potensi dialog dan pengambilan keputusan bersama.

Ketiga, kepemimpinan yang memfasilitasi masih bersifat birokratis, dengan dominasi pemerintah sebagai pengambil keputusan utama. Undang Undang belum menekankan peran fasilitator atau mediator yang dapat mengelola konflik kepentingan dan mendorong partisipasi setara antar pemangku kepentingan, sehingga dinamika kolaboratif dalam praktik implementasi masih belum optimal.

Keempat, terkait komitmen terhadap tujuan bersama, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 menetapkan visi peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam serta perlindungan terhadap hak-hak mereka. Namun, pemangku kepentingan lain, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, sering beroperasi berdasarkan kepentingan masing-masing, sehingga tujuan bersama yang bersifat kolaboratif belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik.

Kelima, dalam hal pengembangan hubungan dan kepercayaan, Undang Undang ini belum menyediakan mekanisme yang cukup untuk membangun kepercayaan jangka panjang antar pihak. Interaksi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat masih bersifat transaksional, sehingga kolaborasi berkelanjutan dan pembelajaran bersama antar pihak menjadi terbatas.

Secara keseluruhan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka hukum penting untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Namun, dari perspektif teori kolaborasi Ansell dan Gash, implementasi kebijakan ini lebih bersifat *top-down* daripada kolaboratif. Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi, disarankan adanya forum kolaboratif reguler, mekanisme *co-management*, transparansi informasi, serta program pembangunan kapasitas dan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, UU ini tidak hanya menjadi instrumen

regulasi, tetapi juga mendorong kolaborasi nyata untuk pengelolaan sumber daya perikanan dan garam yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif.

d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Bantuan Pemerintah merupakan bentuk bantuan yang tidak termasuk dalam kategori bantuan sosial, dan diberikan oleh pemerintah kepada individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga pemerintah atau nonpemerintah. Di lingkungan Kementerian, Bantuan Pemerintah mencakup beberapa jenis, yaitu:

- 1) Pemberian penghargaan;
- 2) Pemberian beasiswa;
- 3) Bantuan operasional;
- 4) Bantuan sarana/prasarana;
- 5) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan
- 6) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran meliputi:

- 1) Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa;
- 2) Bantuan pembayaran premi asuransi perikanan;
- 3) Bantuan pembayaran premi asuransi pergaraman;
- 4) Bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 5) Bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan;
- 6) Bantuan konservasi ekosistem/lingkungan;
- 7) Bantuan calon induk;
- 8) Bantuan alat penangkapan ikan;
- 9) Perbaikan bantuan mesin kapal penangkap ikan; dan
- 10) Bantuan alat bantu usaha penangkapan ikan.

Semua calon penerima Bantuan Pemerintah harus memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada laman satu data Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan regulasi yang mengatur mekanisme pemberian bantuan pemerintah kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha perikanan lainnya. Peraturan ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan pemerataan bantuan, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat perikanan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif teori kolaborasi, efektivitas implementasi peraturan ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek kunci, yaitu keterlibatan multi-pihak, struktur proses, kepemimpinan kolaboratif, komitmen terhadap tujuan bersama, serta pengembangan hubungan dan kepercayaan antar pemangku kepentingan.

Pertama, dari sisi keterlibatan multi-pihak, Permen KP No. 19/2023 memberikan pedoman bagi kementerian untuk menyalurkan bantuan secara langsung kepada kelompok penerima, namun mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi penyaluran bantuan masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat, prinsip kolaborasi sejati yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif belum sepenuhnya diterapkan.

Kedua, terkait struktur proses, peraturan ini menekankan prosedur administratif dan mekanisme akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Meskipun struktur ini mendukung transparansi dan pengendalian, belum terdapat mekanisme forum kolaboratif yang memungkinkan pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti asosiasi pembudi daya ikan, LSM, dan akademisi, untuk ikut serta dalam merumuskan kriteria penyaluran, prioritas penerima, atau evaluasi program secara bersama-sama.

Ketiga, dalam hal kepemimpinan kolaboratif, Permen KP No. 19/2023 menempatkan kementerian sebagai otoritas utama dalam penyaluran bantuan.

Peran fasilitator yang dapat mendorong dialog antar pemangku kepentingan, menyelesaikan konflik, dan membangun konsensus masih kurang ditekankan. Akibatnya, dinamika kolaboratif yang memungkinkan partisipasi setara antar pihak belum optimal.

Keempat, mengenai komitmen terhadap tujuan bersama, peraturan ini memiliki tujuan jelas yaitu distribusi bantuan yang tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan. Namun, komitmen bersama dari semua pihak untuk merancang strategi penyaluran yang adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan masih perlu ditingkatkan agar tujuan bersama dapat dicapai secara kolaboratif.

Kelima, pada aspek pengembangan hubungan dan kepercayaan, peraturan ini belum secara eksplisit memfasilitasi mekanisme pembangunan *trust-building* antara pemerintah, penerima manfaat, dan pihak lain yang relevan. Kurangnya forum komunikasi reguler dan mekanisme monitoring partisipatif dapat membatasi terbangunnya kepercayaan jangka panjang yang menjadi dasar kolaborasi efektif.

Secara keseluruhan, Permen KP No. 19 Tahun 2023 menyediakan kerangka hukum dan prosedural penting untuk penyaluran bantuan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Namun, dari perspektif teori kolaborasi, regulasi ini masih bersifat *top-down*, dengan keterbatasan dalam mendorong partisipasi aktif, forum kolaboratif, dan pembangunan kepercayaan antar pihak. Untuk meningkatkan efektivitas kolaboratif, disarankan adanya mekanisme perencanaan dan evaluasi partisipatif, forum konsultasi rutin antara pemerintah, penerima manfaat, dan pemangku kepentingan lain, serta sistem monitoring yang transparan dan akuntabel secara bersama. Dengan demikian, penyaluran bantuan pemerintah tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat menjadi medium kolaborasi yang memperkuat kapasitas masyarakat perikanan dan membangun tata kelola yang inklusif serta berkelanjutan.

e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budi Daya

Kampung Perikanan Budi Daya merupakan suatu kawasan yang dikembangkan berdasarkan komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal, dengan memadukan berbagai potensi yang ada untuk mendorong tumbuhnya usaha budi daya ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kawasan ini dikelola dengan melibatkan masyarakat sebagai penggerak utama, sehingga dapat mendukung terjaminnya produksi secara berkelanjutan dan terjadwal, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Tujuan pembentukan Kampung Perikanan Budi Daya meliputi:

- 1) mengembangkan komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal endemik sebagai upaya pencegahan kepunahan;
- 2) mewujudkan rantai usaha perikanan budi daya yang terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana prasarana produksi, sarana prasarana pasca panen, pengembangan skala usaha pelaku usaha, hingga pemasaran;
- 3) meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budi daya;
- 4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudi daya ikan; dan
- 5) memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan budi daya ikan.

Adapun karakteristik utama Kampung Perikanan Budi Daya adalah:

- 1) Memiliki komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal yang bernilai ekonomi tinggi;
- 2) Komoditas tersebut telah menjadi bagian dari kearifan lokal setempat;
- 3) Mayoritas masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan budi daya ikan; dan
- 4) Keberadaan kelembagaan kelompok pembudi daya ikan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi korporasi.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah menetapkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis

Bantuan Pemerintah di Kampung Perikanan Budi Daya. Jenis bantuan pemerintah yang diberikan berupa bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk barang, yaitu:

- 1) Plang nama kampung perikanan budi daya
- 2) Kendaraan roda tiga
- 3) *Chest freezer*
- 4) Perahu ketinting
- 5) Mesin ketinting
- 6) Pompa alcon 6 (enam) inchi
- 7) Pompa alcon 3 (tiga) inchi
- 8) *Crab box*
- 9) *Crab apartemen*
- 10) *Hi blow*/pompa udara
- 11) Cool box
- 12) Timbangan duduk
- 13) Pompa *submersible*
- 14) Sarana budi daya maggot (mesin pemilah sampah)
- 15) Waring ikan

Jadi pendekatan kegiatan pemberdayaan pada Kampung Perikanan Budi Daya masih fokus pada pemberian bantuan pemerintah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budi Daya (KPB) merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan kapasitas pembudi daya ikan melalui pembentukan kawasan perikanan budi daya yang terintegrasi. Kebijakan ini menekankan pentingnya pengembangan wilayah sebagai unit manajemen perikanan budi daya yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembudi daya ikan, pemerintah daerah, penyuluh perikanan, akademisi, serta pelaku usaha sektor perikanan.

Berdasarkan perspektif teori kolaborasi, efektivitas kebijakan ini dapat dianalisis dari beberapa dimensi: keterlibatan pemangku kepentingan, koordinasi,

kapasitas institusional, dan hasil kolaboratif. Teori kolaborasi menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang jelas, tetapi juga oleh kemampuan aktor untuk bekerja secara sinergis dalam pencapaian tujuan bersama.

1) Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Permen KP Nomor 47 Tahun 2021 telah mendorong keterlibatan multipihak melalui mekanisme KPB yang mengintegrasikan pembudi daya ikan, pemerintah, dan sektor swasta. Namun, evaluasi empiris menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pembudi daya ikan belum merata, dengan dominasi beberapa aktor yang lebih berpengalaman atau memiliki akses sumber daya lebih besar. Dalam perspektif kolaboratif, ketidakseimbangan ini dapat menghambat pembelajaran bersama dan pencapaian tujuan kolektif.

2) Koordinasi dan Sinergi

Kebijakan KPB menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta lintas sektor terkait (perikanan, lingkungan, dan ekonomi lokal). Analisis menunjukkan bahwa koordinasi formal telah terjalin melalui forum KPB, tetapi praktik kolaborasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti komunikasi yang terbatas, tumpang tindih wewenang, dan perbedaan prioritas antara pemangku kepentingan. Hal ini mengindikasikan perlunya mekanisme fasilitasi dan mediasi untuk memperkuat kolaborasi horizontal dan vertikal.

3) Kapasitas Institusional

Keberhasilan KPB sangat tergantung pada kapasitas institusi lokal dalam mengelola sumber daya, menyusun rencana teknis, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat. Evaluasi menunjukkan bahwa penyuluh perikanan dan aparat daerah perlu pendampingan dan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan fasilitasi kolaboratif, terutama dalam memadukan aspirasi lokal dengan standar teknis budi daya dan keberlanjutan ekologi.

4) Hasil Kolaboratif

Dari perspektif teori kolaborasi, hasil kebijakan bukan hanya tercermin dari output fisik, seperti jumlah KPB atau produksi ikan, tetapi juga dari kualitas interaksi sosial dan pembelajaran kolektif yang terbangun. Studi lapangan menunjukkan adanya peningkatan jejaring antar-pembudi daya ikan, pertukaran pengetahuan teknis, dan praktik manajemen bersama sumber daya. Meski demikian, keberlanjutan kolaborasi jangka panjang masih memerlukan dukungan insentif, regulasi yang adaptif, dan mekanisme monitoring yang partisipatif.

Permen KP Nomor 47 Tahun 2021 memiliki potensi signifikan sebagai kebijakan kolaboratif dalam pengembangan perikanan budi daya. Namun, implementasinya menunjukkan tantangan terkait partisipasi inklusif, koordinasi antar-aktor, dan kapasitas institusional di tingkat lokal. Berdasarkan teori kolaborasi, rekomendasi evaluatif mencakup penguatan mekanisme fasilitasi kolaboratif, peningkatan kapasitas fasilitator lokal, serta penciptaan insentif untuk partisipasi aktif dan keberlanjutan hubungan antar-pemangku kepentingan. Dengan demikian, KPB tidak hanya menjadi instrumen peningkatan produksi perikanan, tetapi juga wadah pengembangan tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan.

- f. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas.

Desa Perikanan Cerdas merupakan model pembangunan kawasan perdesaan berbasis perikanan yang dirancang untuk mengintegrasikan teknologi tepat guna, tata kelola modern, manajemen sumber daya berkelanjutan, serta peningkatan ekonomi masyarakat secara inklusif. Konsep ini menempatkan desa sebagai pusat inovasi dan produktivitas sektor perikanan dari hulu ke hilir, sekaligus menjadi wahana penerapan teknologi hasil riset Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dapat direplikasi di berbagai wilayah. Tiga konsep utama Desa Perikanan Cerdas adalah:

1) *Circular Economy*

- a) Berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien, minim limbah, serta memaksimalkan daur ulang dan penggunaan kembali (*reuse & recycle*).
- b) Mendorong setiap tahapan produksi perikanan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem dan efisiensi ekonomi. Contoh pemanfaatan limbah organik menjadi pakan, penggunaan energi terbarukan, sistem budi daya terpadu.

2) *Ekonomi Digital Perikanan*

- a) Mengembangkan kapasitas SDM melalui pelatihan talenta digital, seperti pemasaran *online*, literasi finansial digital, aplikasi budi daya, dan sistem monitoring.
- b) Mendorong UMKM kelautan dan perikanan untuk masuk ke ekosistem digital melalui *e-commerce*, *marketplace*, dan *platform* logistik.
- c) Mempercepat transformasi digital pada rantai nilai perikanan dari produksi, distribusi, hingga pemasaran.

3) *Kemitraan dan Public Private Partnership*

- a) Melibatkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, perbankan, dan masyarakat desa dalam skema kolaboratif.
- b) Penguatan jejaring usaha melalui model *offtaker*, pembiayaan mikro, serta penyediaan infrastruktur budi daya dan pengolahan berbasis kemitraan.
- c) Meningkatkan akses terhadap teknologi, pasar, investasi, dan pembiayaan.

Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas meliputi identifikasi potensi desa (sumber daya alam dan sumber daya manusia) dan kebutuhan materi pelatihan dan penyuluhan perikanan, inventarisasi teknologi yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan yang siap diterapkan kepada masyarakat, penjalinan kerja sama dengan mitra, penyusunan proposal kegiatan, melakukan pelatihan dan penyuluhan perikanan untuk alih teknologi, melakukan pendampingan kegiatan

secara kontinyu, melakukan bantuan pendidikan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dan melakukan pemantauan serta evaluasi.

Dalam petunjuk pelaksanaan dijelaskan bahwa berbagai skema pendanaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Desa Perikanan Cerdas. Sumber pembiayaan tersebut meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, dana bergulir, serta pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Desa Perikanan Cerdas diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat diwujudkan melalui perubahan perilaku dan peningkatan kompetensi pembudi daya ikan, peningkatan produksi dan pendapatan, serta bertambahnya peluang kerja dan kesempatan berusaha.

Berdasarkan tinjauan kebijakan tersebut di atas, pendekatan pemberdayaan pembudi daya ikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya masih mengedepankan pendekatan pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana produksi. Sementara itu, pendekatan pemberdayaan pembudi daya ikan yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan pelatihan dan penyuluhan perikanan.

Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendekatan pertama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya memiliki kelebihan adanya bantuan sarana dan prasarana produksi yang diperoleh pembudi daya ikan, tetapi pembudi daya ikan kurang mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam memanfaatkan bantuan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Huraerah (2008) yang menyatakan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan pemerintah masih memiliki sejumlah kelemahan, antara lain terlalu menitikberatkan pada aspek ekonomi dibandingkan pendekatan multidimensi, lebih bercorak karitatif daripada berorientasi pada peningkatan

produktivitas, menempatkan masyarakat miskin sebagai objek alih-alih subjek, serta mempertahankan peran pemerintah sebagai penguasa bukan sebagai fasilitator. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan produktivitas dan pendapatan melalui perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan keterampilan usaha, pemanfaatan teknologi, perluasan jejaring kerja, serta peningkatan akses terhadap informasi pasar.

Pendekatan yang kedua, pembudi daya ikan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan usaha tetapi tidak mendapatkan bantuan sarana dan prasarana produksi. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam suatu kebijakan implementatif agar terjadi *collaborative governance* antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan lainnya. Sehingga, proses pemberdayaan diawali dengan peningkatan kompetensi dan keterampilan pembudi daya ikan terlebih dahulu melalui kegiatan pelatihan, kemudian dibantu sarana dan prasarana produksinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kegiatan usaha pembudi daya ikan didampingi melalui kegiatan penyuluhan perikanan. Proses pendampingan tersebut dilaksanakan untuk membantu pelaku usaha dalam memperoleh akses terhadap informasi pasar, teknologi, permodalan, serta penguatan kelembagaan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan pendapatan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan serta memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Konsep tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Huraerah (2008) bahwa salah satu penyebab kurang efektifnya penanggulangan kemiskinan dikarenakan kurangnya koordinasi serta sinergi program dan lembaga yang menangani kemiskinan karena adanya ego sektoral. Untuk itu, diperlukan penerapan *collaborative governance* yang mendorong keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat miskin sebagai aktor utama. Partisipasi mereka perlu dihadirkan dalam seluruh tahapan penanggulangan

kemiskinan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program, pengawasan, hingga evaluasi dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan dan intervensi yang dirumuskan tidak hanya lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan, meningkatkan kapasitas, serta memastikan keberlanjutan hasil-hasil program pemberdayaan..

Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas merupakan kebijakan teknis yang bertujuan mendorong pengembangan desa perikanan berbasis inovasi, teknologi, dan praktik budi daya berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan pembentukan sistem pengelolaan perikanan yang cerdas melalui integrasi teknologi informasi, pelibatan komunitas lokal, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan.

Berdasarkan perspektif teori kolaborasi, efektivitas implementasi Desa Perikanan Cerdas dapat dianalisis melalui beberapa dimensi, yaitu: partisipasi pemangku kepentingan, koordinasi institusional, kapasitas fasilitator, dan hasil kolaboratif.

1) Partisipasi Pemangku Kepentingan

Teori kolaborasi menekankan bahwa keterlibatan aktif semua pihak merupakan faktor kunci keberhasilan kebijakan. Dalam konteks Desa Perikanan Cerdas, pemangku kepentingan meliputi pembudi daya ikan, aparat desa, penyuluh perikanan, akademisi, dan sektor swasta. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun regulasi Desa Perikanan Cerdas menyediakan ruang partisipasi, keterlibatan pembudi daya ikan secara aktif masih terbatas pada sebagian percontohan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang kolaboratif dengan praktik partisipasi di lapangan.

2) Koordinasi Institusional

Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor 38 Tahun 2022 menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga penelitian dalam mendukung Desa Perikanan Cerdas. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi formal telah terbentuk melalui forum teknis,

tetapi koordinasi horizontal antara pembudi daya ikan dan sektor swasta atau akademisi masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan prioritas, keterbatasan komunikasi, dan kurangnya mekanisme fasilitasi kolaboratif yang sistematis.

3) Kapasitas Fasilitator dan Infrastruktur Pendukung

Keberhasilan Desa Perikanan Cerdas bergantung pada kapasitas penyuluh perikanan, aparat desa, dan fasilitator lokal dalam mengelola teknologi, membimbing pembudi daya ikan, serta memfasilitasi proses kolaboratif. Evaluasi menunjukkan perlunya penguatan kapasitas teknis dan manajerial fasilitator agar mampu mendukung partisipasi aktif pembudi daya ikan, memediasi konflik, serta mendorong praktik kolaboratif yang produktif dan berkelanjutan.

4) Hasil Kolaboratif dan Dampak Sosial-Ekonomi

Dari perspektif teori kolaborasi, hasil kebijakan bukan hanya diukur dari penerapan teknologi atau indikator produksi, tetapi juga dari kualitas hubungan antar-pemangku kepentingan, pertukaran pengetahuan, dan pembelajaran kolektif. Studi lapangan menunjukkan bahwa Desa Perikanan Cerdas mampu meningkatkan jejaring antar-pembudi daya ikan, menumbuhkan praktik berbasis data, serta memfasilitasi pembelajaran bersama. Namun, keberlanjutan kolaborasi masih memerlukan dukungan insentif, monitoring partisipatif, dan evaluasi rutin untuk memperkuat keterlibatan semua pihak.

Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor 38 Tahun 2022 memiliki potensi signifikan sebagai kebijakan kolaboratif dalam pengembangan Desa Perikanan Cerdas. Namun, implementasinya menghadapi tantangan terkait partisipasi inklusif, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas fasilitator lokal. Berdasarkan teori kolaborasi, rekomendasi evaluatif mencakup penguatan mekanisme fasilitasi kolaboratif, peningkatan kapasitas teknis dan manajerial fasilitator, serta penciptaan insentif untuk mendorong partisipasi aktif pembudi daya ikan dan keberlanjutan interaksi kolaboratif. Dengan demikian, Desa Perikanan Cerdas

tidak hanya menjadi sarana modernisasi budi daya perikanan, tetapi juga sebagai *platform* penguatan tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, lima kebijakan di atas menunjukkan potensi kuat untuk mendukung pemberdayaan pembudi daya ikan melalui kolaborasi multisektoral. Tantangan utama terletak pada keterbatasan partisipasi inklusif, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, dan kapasitas fasilitator yang bervariasi. Berdasarkan teori kolaborasi, penguatan mekanisme fasilitasi, peningkatan kapasitas aktor lokal, serta penciptaan insentif untuk partisipasi aktif menjadi rekomendasi strategis agar kebijakan perikanan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membangun tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan.

g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Inpres Nomor 9 tahun 2025 diluncurkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari level desa/kelurahan, memperkuat ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, dan mendukung pembangunan dari desa ke pusat. Inpres ini ditujukan agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih secara cepat.

Inpres sebagai instruksi presiden bersifat mengikat kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi objek instruksi namun bukan undang-undang, sehingga pelaksanaan sangat bergantung pada komitmen administratif dan koordinasi antar lembaga. Selain itu Inpres nomor 9 tahun 2025 menugaskan 18 kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah konkret sesuai tupoksi masing-masing.

Kebijakan ini bersifat *top-down*, pemerintah pusat menetapkan target banyak koperasi dalam waktu relatif cepat, dan mendelegasikan kepada daerah untuk mewujudkannya. Beberapa kritik menyebut bahwa pendekatan seperti ini rentan terhadap rendahnya partisipasi masyarakat lokal, minimnya adaptasi terhadap kondisi lokal, dan risiko “kebijakan seragam” yang kurang fleksibel.

Berikut ringkasan poin-poin penting dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025:

- 1) Target pendirian 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih secara nasional.
- 2) Koperasi Merah Putih tidak hanya sebagai badan usaha tapi sebagai pusat layanan (multi-fungsi), antara lain:
 - pengadaan sembako (kebutuhan pokok)
 - layanan simpan pinjam
 - klinik desa / apotek
 - *cold storage* / pergudangan
 - logistik desa
 - kantor koperasi
- 3) Alokasi pendanaan dari APBN, APBD, dana desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 4) Instruksi agar strategi pelaksanaan bersifat terpadu, holistik, berkesinambungan, efisien, dan akuntabel.
- 5) Sinergi data dan integrasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pemantauan, evaluasi, pelaporan.
- 6) Penugasan khusus sesuai bidang kepada berbagai menteri, gubernur, bupati/wali kota agar mendukung pembentukan koperasi sesuai karakteristik lokal desa/kelurahan.

Potensi dan peluang kebijakan Inpres Nomor 9 Tahun 2025:

- 1) Penguatan ekonomi lokal / desa

Dengan koperasi sebagai motor usaha lokal, desa berpotensi lebih mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar, dan memperluas akses ke modal / layanan dasar (sembako, logistik, kesehatan) di tingkat desa.
- 2) Inklusi keuangan

Koperasi dapat menjadi “gerbang” inklusi keuangan di daerah terpencil, memberikan akses kredit atau simpanan kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
- 3) Pemerataan pembangunan / pengurangan kesenjangan

Dengan penekanan ke desa/kelurahan di seluruh Indonesia, ada potensi untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.

4) Efek multiplier / skala ekonomi

Bila dikelola dengan baik, koperasi Merah Putih bisa menjadi agregator produksi desa, mengorganisir rantai pasok lokal, memfasilitasi pemasaran dan distribusi secara lebih efisien.

5) Modernisasi dan digitalisasi koperasi

Kebijakan ini memberi ruang atau dorongan untuk digitalisasi manajemen koperasi agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Beberapa kajian menyebut pentingnya sistem informasi manajemen dalam mendukung implementasi Inpres ini.

Risiko, tantangan, dan kelemahan Inpres Nomor 9 Tahun 2025:

1) Target ambisius & waktu terbatas

Mendirikan 80.000 koperasi dalam waktu relatif singkat menimbulkan tekanan besar pada kapasitas institusi, dana, SDM, dan koordinasi antar daerah.

2) Komitmen daerah / kapasitas lokal

Jika pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa) kurang kapasitas atau kurang komitmen, inisiatif ini bisa tersendat di tingkat operasional.

3) Partisipasi masyarakat dan “rasa kepemilikan”

Jika desain koperasi dianggap sebagai “proyek dari atas”, bukan inisiatif masyarakat, keberlanjutan koperasi lemah karena kurang tanggung jawab kolektif. Kritik dari *policy brief* menyebut kurangnya pendekatan partisipatif dalam Inpres ini.

4) Kemampuan finansial & pembiayaan

Meskipun sumber dana diatur, alokasi APBN/APBD/dana desa mungkin terbatas, dan desa dengan kondisi keuangan lemah akan menghadapi kesulitan membiayai operasional koperasi.

5) Beban ganda & pelayanan multifungsi

Koperasi dituntut melakukan banyak fungsi (kesehatan, logistik, simpan-pinjam, dll). Ini risiko terlalu luasnya cakupan yang bisa melemahkan fokus dan kapasitas pengelolaan.

6) Pengawasan, akuntabilitas, dan risiko penyalahgunaan

Dengan banyak aktor dan dana yang terlibat, diperlukan sistem pengawasan yang kuat agar tidak terjadi korupsi, manipulasi, atau inefisiensi.

7) Ketidakcocokan model di tiap daerah

Model koperasi yang cocok di satu desa bisa tidak cocok di desa lain (karakteristik sosial, ekonomi, kultur berbeda). Jika kebijakan terlalu kaku, bisa gagal diterapkan di beberapa daerah.

Inpres Nomor 9 Tahun 2025 adalah kebijakan yang mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bila berhasil diimplementasikan secara efektif dengan pendekatan lokal, kapasitas kelembagaan yang memadai, digitalisasi, dan pengawasan yang baik, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak positif signifikan dalam pemerataan ekonomi, penguatan desa, dan inklusi keuangan.

Namun, tantangan besar berupa target yang tinggi, kapasitas daerah yang heterogen, risiko kurangnya partisipasi masyarakat, dan kebutuhan koordinasi lintas lembaga harus diantisipasi sejak awal. Keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, komitmen *stakeholder* lokal, serta mekanisme adaptasi yang fleksibel agar model koperasi dapat tumbuh sesuai konteks lokal.

2. Tinjauan Literatur

a. Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan administrasi publik ditandai oleh pergeseran paradigma yang mencerminkan perubahan cara pandang negara dalam mengelola sektor publik serta relasinya dengan masyarakat dan aktor non-negara. Secara umum, literatur mengelompokkan perkembangan tersebut ke dalam empat paradigma

utama, yaitu *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), *New Public Service* (NPS), dan *New Public Governance* (NPG).

Paradigma *Old Public Administration* (OPA) berakar kuat pada pemikiran klasik administrasi dan birokrasi Weberian. Dalam paradigma ini, administrasi publik dipahami sebagai instrumen negara untuk melaksanakan kebijakan politik secara rasional, hierarkis, dan berbasis aturan. Wilson (1887) melalui gagasan dikotomi politik–administrasi menekankan bahwa administrasi harus dijalankan secara netral dan profesional, terpisah dari proses politik. Weber (1946) kemudian memperkuat fondasi OPA melalui konsep birokrasi rasional-legal yang ditandai oleh hierarki kewenangan, pembagian kerja yang jelas, serta kepatuhan terhadap aturan formal. Dalam praktiknya, OPA menempatkan warga negara sebagai objek layanan dan menekankan efisiensi prosedural serta kepatuhan administratif.

Sejak dekade 1980-an, paradigma OPA mulai dipandang tidak lagi memadai dalam menghadapi tuntutan efisiensi, inovasi, dan kinerja sektor publik. Kritik terhadap birokrasi yang kaku dan boros mendorong lahirnya paradigma *New Public Management* (NPM). Paradigma ini mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti orientasi pada hasil, kompetisi, desentralisasi, dan pengukuran kinerja. Hood (1991) menyebut NPM sebagai seperangkat doktrin yang menekankan efisiensi, *value for money*, serta penggunaan mekanisme pasar dalam pelayanan publik. Osborne dan Gaebler (1992) melalui konsep *reinventing government* mempopulerkan gagasan pemerintahan yang berjiwa wirausaha (*entrepreneurial government*), di mana pemerintah berperan sebagai pengarah (*steering*) daripada pelaksana langsung (*rowing*).

Meskipun NPM berhasil meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja, paradigma ini menuai kritik karena terlalu menekankan logika pasar dan memposisikan warga negara sebagai pelanggan (*customers*). Kritik tersebut melahirkan paradigma *New Public Service* (NPS) yang dikembangkan oleh Denhardt dan Denhardt (2000; 2015). NPS menolak reduksi warga negara menjadi konsumen layanan publik dan menegaskan bahwa tujuan utama

administrasi publik adalah melayani warga negara sebagai pemilik kedaulatan (*citizens*). Dalam paradigma ini, nilai-nilai demokrasi, partisipasi, kepentingan publik, dan akuntabilitas normatif lebih diutamakan dibandingkan sekadar efisiensi manajerial. Pemerintah dipandang sebagai pelayan masyarakat yang memfasilitasi dialog publik dan kepentingan bersama, bukan sebagai manajer yang hanya mengejar target kinerja.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa kompleksitas persoalan publik tidak dapat ditangani oleh negara secara unilateral. Globalisasi, desentralisasi, dan keterbatasan kapasitas negara mendorong munculnya paradigma *New Public Governance* (NPG). Osborne (2006; 2010) menjelaskan bahwa NPG menekankan tata kelola berbasis jejaring (*network-based governance*), di mana pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal berinteraksi secara kolaboratif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Dalam paradigma ini, pemerintah tidak lagi menjadi aktor dominan tunggal, melainkan salah satu simpul dalam jaringan kolaborasi.

NPG menempatkan proses kolaboratif, kepercayaan, dan koordinasi lintas aktor sebagai elemen kunci tata kelola publik. Rhodes (1996) menyebut kondisi ini sebagai *governing without government*, yaitu situasi di mana penyelenggaraan urusan publik bergantung pada jejaring aktor yang saling bergantung. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pengambilan keputusan bersama antara aktor negara dan non-negara untuk mencapai tujuan publik (Ansell & Gash, 2008). Dengan demikian, NPG merepresentasikan pergeseran paradigma dari pemerintah sebagai pengendali menuju pemerintah sebagai fasilitator dan mitra kolaborasi.

Secara keseluruhan, evolusi paradigma administrasi publik menunjukkan pergeseran mendasar dari birokrasi hierarkis (OPA), manajemen berbasis pasar (NPM), pelayanan publik berbasis nilai demokrasi (NPS), hingga tata kelola kolaboratif berbasis jejaring (NPG). Perubahan ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan administrasi publik dengan dinamika sosial,

ekonomi, dan politik yang semakin kompleks, serta memperkuat peran masyarakat dan aktor non-negara dalam penyelenggaraan urusan publik.

Tabel 2. 4 Perbandingan Paradigma Administrasi Publik

Aspek Perbandingan	Old Public Administration (OPA)	New Public Management (NPM)	New Public Service (NPS)	New Public Governance (NPG)
Landasan Teoretis	Birokrasi Weberian, dikotomi politik-administrasi	Manajemen sektor swasta, teori ekonomi neoklasik	Teori demokrasi, kewargaan (<i>citizenship</i>)	Teori <i>governance</i> , jejaring, institusionalisme
Peran Negara	Pengendali utama, regulator dan pelaksana	Manajer publik, pengarah (<i>steering</i>)	Pelayan masyarakat	Fasilitator dan mitra kolaborasi
Mekanisme Pengelolaan	Hierarki, aturan formal, prosedur	Pasar, kontrak, kompetisi, kinerja	Dialog publik, pelayanan berbasis nilai	Jejaring, kolaborasi, kemitraan lintas aktor
Posisi Masyarakat	Objek administrasi	Pelanggan (<i>customers</i>)	Warga negara (<i>citizens</i>)	Mitra kolaboratif
Orientasi Utama	Kepatuhan dan stabilitas	Efisiensi dan kinerja	Kepentingan publik dan demokrasi	Proses kolaboratif dan penciptaan nilai publik
Akuntabilitas	Administratif dan hukum	Kinerja dan hasil	Demokratis dan etis	Bersama (<i>shared accountability</i>)
Kelemahan Utama	Kaku, lamban, <i>top-down</i>	Reduksi nilai publik ke logika pasar	Kurang responsif pada kompleksitas jejaring	Kompleks, membutuhkan kepercayaan dan kapasitas kolaborasi

Sumber: Diolah Penulis (2023)

b. Konsep dan Teori Pembangunan

Konsep pembangunan merupakan salah satu tema sentral dalam ilmu sosial, khususnya dalam kajian administrasi publik, ekonomi politik, dan studi pembangunan. Pemahaman mengenai pembangunan mengalami evolusi yang signifikan, seiring dengan perubahan konteks global, kritik akademik, serta dinamika sosial, ekonomi, dan politik di negara berkembang.

Pada tahap awal, pembangunan dipahami terutama sebagai proses pertumbuhan ekonomi. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh teori modernisasi

yang berkembang pada dekade 1950–1960-an. Rostow (1960) memandang pembangunan sebagai proses linier melalui tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi, mulai dari masyarakat tradisional hingga tahap konsumsi massal. Dalam perspektif ini, pembangunan diukur melalui indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), industrialisasi, dan akumulasi modal. Negara berkembang diasumsikan dapat mengejar ketertinggalan dengan meniru jalur pembangunan negara maju.

Pendekatan modernisasi kemudian menuai kritik karena dianggap mengabaikan konteks sosial, budaya, dan struktur ketimpangan global. Sebagai respons, berkembang teori dependensia dan strukturalis yang menyoroti relasi tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Frank (1967) dan Cardoso dan Faletto (1979) berargumen bahwa keterbelakangan bukan disebabkan oleh faktor internal semata, melainkan oleh posisi struktural negara berkembang dalam sistem ekonomi dunia. Dalam perspektif ini, pembangunan dipahami sebagai proses politik dan struktural, bukan sekadar persoalan teknis ekonomi.

Memasuki dekade 1970–1980-an, kritik terhadap paradigma pertumbuhan ekonomi melahirkan pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada manusia. Seers (1969) menegaskan bahwa pembangunan seharusnya diukur dari kemampuan suatu negara dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi pendekatan *basic needs* yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan (Streeten et al., 1981).

Pendekatan pembangunan berbasis manusia mencapai formulasi yang lebih sistematis melalui konsep *Human Development* yang dipopulerkan oleh UNDP. Sen (1999) mengembangkan pendekatan kapabilitas (*capability approach*) yang memandang pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam kerangka ini, pembangunan tidak lagi dipersempit pada pertumbuhan ekonomi, melainkan mencakup dimensi sosial, politik, dan kultural.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keterbatasan pendekatan *top-down*, berkembang pula paradigma pembangunan partisipatif. Chambers (1997) menekankan pentingnya menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, dengan mengakui pengetahuan lokal dan pengalaman hidup mereka. Partisipasi dipahami bukan sekadar keterlibatan simbolik, melainkan proses pembalikan relasi kuasa dalam perencanaan dan implementasi pembangunan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembangunan juga dipahami dalam kerangka keberlanjutan. Laporan Brundtland (WCED, 1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Perspektif ini mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam kajian administrasi publik kontemporer, konsep pembangunan semakin erat dikaitkan dengan isu tata kelola (*governance*). UNDP (1997) dan World Bank (2000) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas institusi, partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar aktor. Pendekatan ini menandai pergeseran dari *government-centered development* menuju *governance-based development*.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan konsep multidimensional dan dinamis. Evolusi teori pembangunan menunjukkan pergeseran dari orientasi pertumbuhan ekonomi menuju pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemahaman ini menjadi landasan teoretis penting dalam menganalisis kebijakan pembangunan sektoral, termasuk pembangunan masyarakat pembudi daya ikan berbasis tata kelola kolaboratif.

c. Kebijakan

Kebijakan publik merupakan konsep kunci dalam kajian administrasi publik dan ilmu politik karena menjadi instrumen utama negara dalam merespons masalah publik. Pemahaman mengenai kebijakan publik tidak bersifat tunggal,

melainkan berkembang seiring dengan dinamika teori negara, peran pemerintah, serta kompleksitas persoalan publik.

Secara klasik, kebijakan publik didefinisikan sebagai apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye (2017) menegaskan bahwa kebijakan publik mencerminkan keputusan politik yang memiliki konsekuensi mengikat bagi masyarakat. Definisi ini menekankan peran otoritatif pemerintah serta dimensi pilihan (*choice*) dalam kebijakan publik. Sementara itu, Anderson (2015) memandang kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor dalam menangani masalah publik.

Dalam perspektif proses, kebijakan publik sering dipahami melalui pendekatan siklus kebijakan (*policy cycle*). Lasswell (1956) memperkenalkan gagasan bahwa kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari perumusan masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi. Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh Dunn (2018) yang menekankan fungsi analisis kebijakan pada setiap tahap siklus sebagai upaya meningkatkan rasionalitas kebijakan.

Meskipun pendekatan siklus memberikan kerangka analitis yang sistematis, sejumlah ilmuwan mengkritiknya karena dianggap terlalu linier dan normatif. Sebagai respons, berkembang teori *inkrementalisme* yang dipelopori oleh Lindblom (1959). Menurut Lindblom, kebijakan publik pada praktiknya lebih banyak dihasilkan melalui perubahan kecil dan bertahap (*muddling through*) daripada melalui perencanaan rasional komprehensif. Pendekatan ini menyoroti keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas aktor kebijakan.

Selain *inkrementalisme*, teori *mixed scanning* yang dikemukakan oleh Etzioni (1967) berupaya menjembatani pendekatan rasional dan inkremental. Etzioni berargumen bahwa pengambilan kebijakan memerlukan kombinasi antara pandangan strategis makro dan keputusan-keputusan mikro yang bersifat bertahap. Teori ini relevan dalam konteks kebijakan publik yang kompleks dan dinamis.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan pergeseran perhatian dari kebijakan sebagai produk menuju kebijakan sebagai proses interaksi antar aktor. Dalam perspektif ini, kebijakan publik dipahami sebagai hasil dari relasi kekuasaan, negosiasi, dan kepentingan. Sabatier (1998) melalui *Advocacy Coalition Framework (ACF)* menjelaskan bahwa kebijakan terbentuk dan berubah melalui koalisi aktor yang berbagi sistem kepercayaan (*belief systems*) dalam jangka panjang. Kerangka ini menegaskan pentingnya dimensi ide, pembelajaran kebijakan, dan konteks institusional.

Pendekatan lain yang berpengaruh adalah *Multiple Streams Framework* yang dikembangkan oleh Kingdon (2014). Kingdon menjelaskan bahwa kebijakan muncul ketika tiga arus—masalah, kebijakan, dan politik—bertemu dalam suatu *policy window*. Perspektif ini menekankan peran ketidakpastian, momentum politik, dan aktor kebijakan (*policy entrepreneurs*).

Dalam kajian kontemporer, kebijakan publik semakin dikaitkan dengan konsep *governance* dan kolaborasi. Rhodes (1997) dan Osborne (2010) menegaskan bahwa kebijakan publik tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan dihasilkan melalui jejaring aktor publik dan non-publik. Pendekatan ini melahirkan konsep *collaborative governance*, di mana perumusan dan implementasi kebijakan dilakukan melalui proses dialog, kepercayaan, dan pengambilan keputusan bersama (Ansell & Gash, 2008).

Dalam konteks ini, kebijakan publik dipahami sebagai proses sosial dan institusional yang kompleks. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kualitas interaksi antar aktor, kapasitas institusi, serta legitimasi proses pengambilan keputusan. Perspektif ini relevan untuk menganalisis kebijakan pembangunan sektoral yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan.

Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan konsep multidimensional yang terus berkembang. Evolusi teori kebijakan publik menunjukkan pergeseran dari pendekatan rasional-instrumental

menuju pendekatan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual. Pemahaman ini menjadi landasan teoretis penting dalam menganalisis kebijakan publik dalam kerangka *New Public Governance*.

d. Collaborative Governance

Tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) telah menjadi perhatian utama sebagai model untuk meningkatkan administrasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian teoretis dan empiris menunjukkan bahwa berbagai pemangku kepentingan dapat bersatu dan bekerja sama secara efektif untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks, menggantikan pendekatan manajerial yang permusuhan (Lima, 2021). Model ini dianggap relevan dalam penanggulangan kemiskinan, mitigasi dampak lingkungan, dan peningkatan ketahanan pangan melalui keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Florini & Pauli, 2018; Muslim et al., 2021).

Penting untuk membedakan antara tata kelola kolaboratif dan manajemen publik kolaboratif. Keduanya menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan, namun berbeda dalam cakupan dan fokus. Manajemen publik kolaboratif bersifat lokal dan menitikberatkan pada penyelesaian masalah komunitas melalui kolaborasi antar organisasi, sedangkan tata kelola kolaboratif bersifat lebih luas, berfokus pada proses kolaborasi yang efektif, struktur lembaga nonhierarkis, dan partisipasi warga melalui kemitraan atau *e-governance* (Kapucu et al., 2009).

Dalam praktiknya, *collaborative governance* menghadapi dinamika seperti kegagalan memulai proses kolaboratif, penurunan performa, maupun kesulitan mempertahankan kolaborasi jangka panjang. Faktor kunci mencakup kepemimpinan, proses kolaboratif, akuntabilitas, dan desain kelembagaan, serta musyawarah sebagai forum persuasi dalam pengambilan kebijakan (Ulibarri et al., 2020; Doberstein, 2016; Hysing, 2022; Johnston et al., 2011).

Efektivitas kolaborasi juga dipengaruhi oleh partisipasi aktor, struktur jaringan sosial, kepercayaan, komitmen, komunikasi, legitimasi, dan penggunaan

teknologi informasi (Leary & Vij, 2012; Nohrstedt & Bodin, 2020; Getha-Taylor et al., 2019; Sururi, 2020). Proses kolaboratif bersifat non-linier, melibatkan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, harmonisasi, dan mencapai konsensus (Rahmawati, 2016; Maulana et al., 2022).

Beberapa pakar menekankan tahap-tahap kolaborasi yang mencakup identifikasi isu, karakteristik masalah, aktor terkait, implementasi, penyelenggaraan forum, dan evaluasi hasil (Vigoda, 2002; Margerum, 2002). Kolaborasi merupakan manajemen jaringan sosial yang menekankan integrasi fungsi birokrasi, kebijakan lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan organisasi non-pemerintah (Booher & Innes, 2002; Weber et al., 2005).

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah secara aktif, dengan enam kriteria utama: (1) inisiasi dan pelaksanaan oleh lembaga publik, (2) partisipasi aktor non-publik, (3) keterlibatan dalam pengambilan keputusan, (4) forum formal, (5) orientasi pada konsensus, dan (6) fokus pada kebijakan dan manajemen publik. Variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaboratif, sejarah kerja sama, insentif, ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya (Ansell & Gash, 2008; Ratner, 2012).

Emerson et al. (2011) menambahkan bahwa proses kolaboratif terdiri dari tiga komponen: dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, dan dampak/adaptasi dari kolaborasi. Tujuan utama *collaborative governance* adalah mencapai hasil publik yang tidak dapat dicapai secara individual, menekankan keadilan sosial dan konsensus antar pemangku kepentingan (O'Leary & Bingham, 2008; Bardach, 2015; DeSeve, 2015).

Kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta maupun masyarakat sipil dapat dikategorikan menjadi: (1) kolaborasi internal pemerintah, (2) kolaborasi pemerintah-bisnis, dan (3) kemitraan pemerintah-masyarakat sipil (Astuti & Warsono, 2020). Keberhasilan kolaborasi ini bergantung pada

representasi, framing isu, desain forum, mekanisme diskusi, serta penguatan partisipasi masyarakat (O'Doherty, 2012).

Menurut O'Toole (dalam McGuire, 2006), semakin kompleks isu yang ditangani maka semakin tinggi pula kebutuhan terhadap struktur yang kolaboratif dalam implementasinya. Urgensi tersebut terlihat dalam isu pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan yang cukup kompleks dan melibatkan lintas pemangku kepentingan. Istilah kolaborasi sendiri berasal dari Bahasa latin *co-labor* yang berarti kerja bersama (Emerson dan Nabatchi, 2015). Dalam konteks kebijakan pemerintah, Carlson (2007) mendefinisikan kolaborasi sebagai proses yang menyatukan pihak lintas sektor melalui berbagai bentuk keterlibatan publik untuk mengatasi isu dalam suatu kebijakan. Carlson juga menyebutkan bahwa dalam beberapa literatur istilah kolaborasi juga dikenal sebagai pembangunan konsensus, resolusi konflik, dialog konflik, dialog kebijakan, dan pemecahan masalah bersama.

Zhong (2015) menambahkan bahwa kolaborasi juga sering disandingkan dengan beberapa istilah lain yang memiliki relevansi dari segi konteks, seperti:

- 1) Koordinasi (*coordination*), pertukaran informasi dan komunikasi untuk mencapai keuntungan timbal balik antara pihak yang bekerja dengan harmonis;
- 2) Kerja sama (*cooperation*), aktivitas koordinasi yang dilakukan dengan berbagi sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan; dan
- 3) Kolaborasi (*collaboration*), aktivitas kerja sama dan koordinasi yang mencakup pertukaran informasi, sumber daya dan tanggung jawab antar pihak untuk menggabungkan tujuan, rencana, implementasi serta analisis aksi lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

Perkembangan awal teori kolaboratif banyak yang bermunculan pada akhir abad ke-20 (Jumanah, 2022). Salah satunya ialah studi Ring dan Van de Ven (1994) yang menjabarkan tentang kolaborasi sebagai rangkaian berulang dari:

- 1) Aktivitas negosiasi terkait penggabungan ekspektasi;
- 2) Komitmen terhadap aksi di masa depan yang dilegalisasi; dan

3) Interaksi dan pembagian peran untuk eksekusi komitmen.

Studi lainnya yang menekankan pada interaksi antar pihak yang saling membutuhkan dilakukan oleh Ines dan Booher (2002) yang mengembangkan teori kolaboratif yang dikenal dengan DIAD (*diversity interdependence*, dan *authentic dialogue*). Dalam teori ini kolaborasi dilandaskan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan beragam, saling membutuhkan dan kemudian saling bergantung satu sama lain. Hal tersebut dapat memicu adanya dialog otentik yang bercirikan adanya hubungan, timbal balik, pembelajaran dan kreativitas yang diadaptasi dalam sebuah sistem.

Aktivitas kolaborasi yang memiliki alur proses dari input hingga output ditekankan oleh Selin dan Chavez (1995). Dalam studi mereka muncul rangkaian proses kolaborasi antar organisasi yang berawal dari faktor pemicu, pendefinisian masalah dan pencapaian konsensus, pengembangan tujuan dan arah, penyusunan struktur dan sistem, dan hasil atau dampak serta manfaat. Berdasarkan literatur mengenai studi kolaborasi tersebut penulis menyimpulkan bahwa kolaborasi merupakan suatu situasi interaksi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bersinggungan untuk membangun komitmen dalam mencapai tujuan bersama.

Penulis berfokus pada kolaborasi dalam konteks implementasi kebijakan yang erat kaitannya dengan aktivitas kolaborasi pada lingkungan pemerintahan dan manajemen kebijakan publik. Dalam beberapa studi jenis kolaborasi tersebut dikategorikan ke dalam *collaborative governance* yang sudah muncul sejak 1990an (Lihat pada Jacoby dan Terpstra, 1990; Jones, 1994, Freeman, 1997). Kemudian semakin didalami pada studi tahun 2000an seperti oleh Erickson dkk (2003), Ghose (2005), Skelcher dan Sullivan (2008), Ansell dan Gash (2008), Kallis dkk (2009) dan lain sebagainya (Jumanah, 2022).

Istilah *collaborative governance* dapat mengacu pada studi Ansell dan Gash (2008) yang menganalisis 137 literatur untuk kemudian mendefinisikannya sebagai pengelolaan pemerintahan yang secara langsung melibatkan *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bersama yang formal,

berorientasi pada konsensus dan musyawarah, serta bertujuan untuk menyusun atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program/asset publik.

Menurut Yang (2017), terdapat delapan prinsip untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif, yaitu:

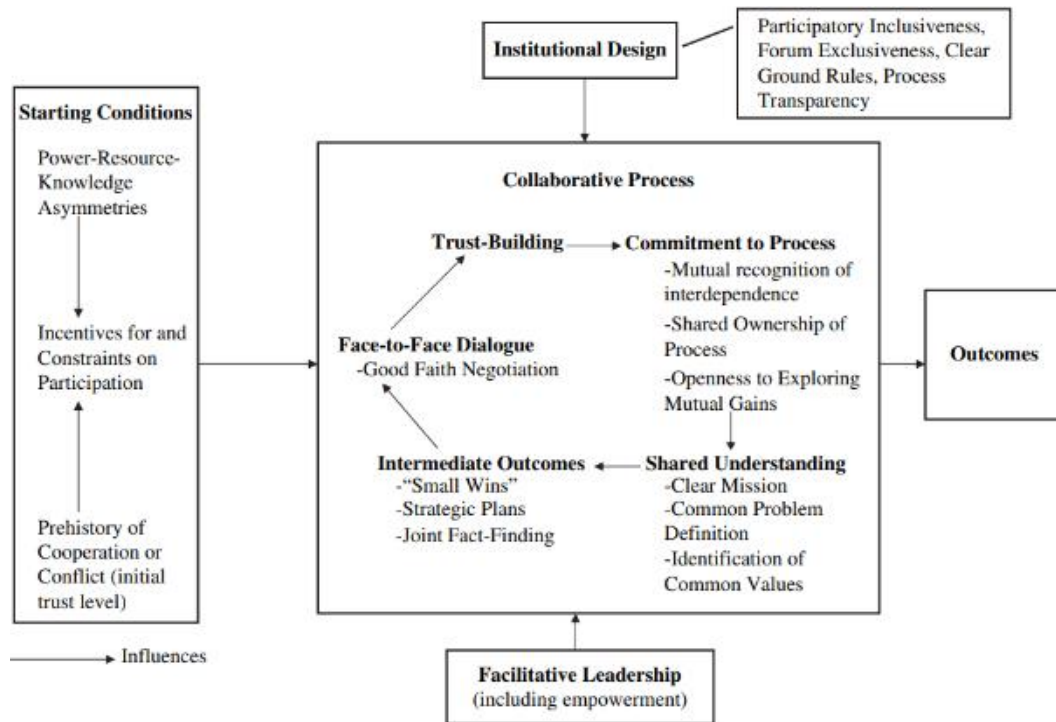
- 1) Partisipasi aktif dari berbagai aktor dengan dukungan sumber daya yang memadai.
- 2) Adanya forum yang terbuka dan demokratis bagi semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi.
- 3) Pelaksanaan kegiatan kolaboratif yang terarah, terorganisir, sistematis, dan konsisten.
- 4) Mekanisme diskusi, komunikasi, dan pembelajaran bersama yang berjalan secara efektif.
- 5) Mekanisme pembangunan kepercayaan yang efektif di antara para pihak.
- 6) Mekanisme untuk merealisasikan dan meningkatkan potensi keuntungan serta distribusi manfaat yang adil.
- 7) Mekanisme penyelesaian konflik yang efektif.
- 8) Metode tata kelola yang memungkinkan percobaan (*experimentation*) dalam pengelolaan kolaboratif.

Berikut ini beberapa model prinsip *collaborative governance* yang banyak dijadikan referensi utama dalam banyak kajian ilmiah.

1) Ansell dan Gash (2008)

Penelitian Ansell dan Gash (2008) menyuguhkan salah satu model kerangka *collaborative governance* yang cukup populer, dimana proses kolaborasi dibagi menjadi empat variabel utama sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash



Ansell dan Gash (2008) dalam jurnal *Collaborative Governance in Theory and Practice* mengembangkan model *collaborative governance* berdasarkan kajian literatur. Model ini terdiri dari empat variabel utama: kondisi awal (*starting condition*), proses kolaboratif (*collaborative process*), desain kelembagaan (*institutional design*), dan kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*).

a) Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Kondisi awal memengaruhi kemungkinan keberhasilan kolaborasi sebelum proses dimulai. Variabel ini dapat mendukung atau menghambat kerja sama antara pemangku kepentingan maupun lembaga. Tiga aspek utama kondisi awal meliputi:

- (1) Ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan di antara pemangku kepentingan.
- (2) Sejarah kerja sama atau konflik yang terjadi sebelumnya.
- (3) Dorongan dan hambatan partisipasi dalam proses kolaboratif.

b) Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Proses kolaboratif mencakup serangkaian aktivitas yang membangun kerja sama dan konsensus:

- (1) Dialog tatap muka: Memfasilitasi identifikasi peluang dan menekankan keuntungan bersama (*mutual gains*).
- (2) Membangun kepercayaan: Proses jangka panjang yang memerlukan komitmen tinggi dari para pemangku kepentingan.
- (3) Komitmen: Tingginya saling ketergantungan meningkatkan motivasi untuk berkolaborasi secara berkelanjutan.
- (4) Pemahaman bersama: Menekankan kesepahaman mengenai tujuan, masalah, dan nilai yang ingin dicapai.
- (5) Hasil antara (*small wins*): Keberhasilan awal meski kecil, mendorong kepercayaan dan komitmen untuk melanjutkan kolaborasi.

c) Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Desain kelembagaan mengatur aturan dasar kolaborasi dan memberikan legitimasi prosedural. Fokusnya meliputi:

- (1) Aturan partisipasi dan pelaksanaan kolaborasi.
- (2) Pembentukan forum kolaboratif yang jelas.
- (3) Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

d) Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan ini penting untuk memediasi konflik, membangun kepercayaan, dan memastikan partisipasi pemangku kepentingan. Pemimpin fasilitatif berperan sebagai mediator yang diterima dan dipercaya oleh semua pihak, mengarahkan proses kolaborasi menuju tujuan bersama.

Terlepas dari popularitas teori Ansell dan Gash, beberapa studi memberikan kritikan terhadap kerangka modelnya yang kurang dinamis, dimana inisiatif kolaborasi hanya berasal dari pemerintah sehingga interaksi bersifat vertikal dan formal (Wijayanti dan Kasim, 2022). Currie, Smith dan Jagals

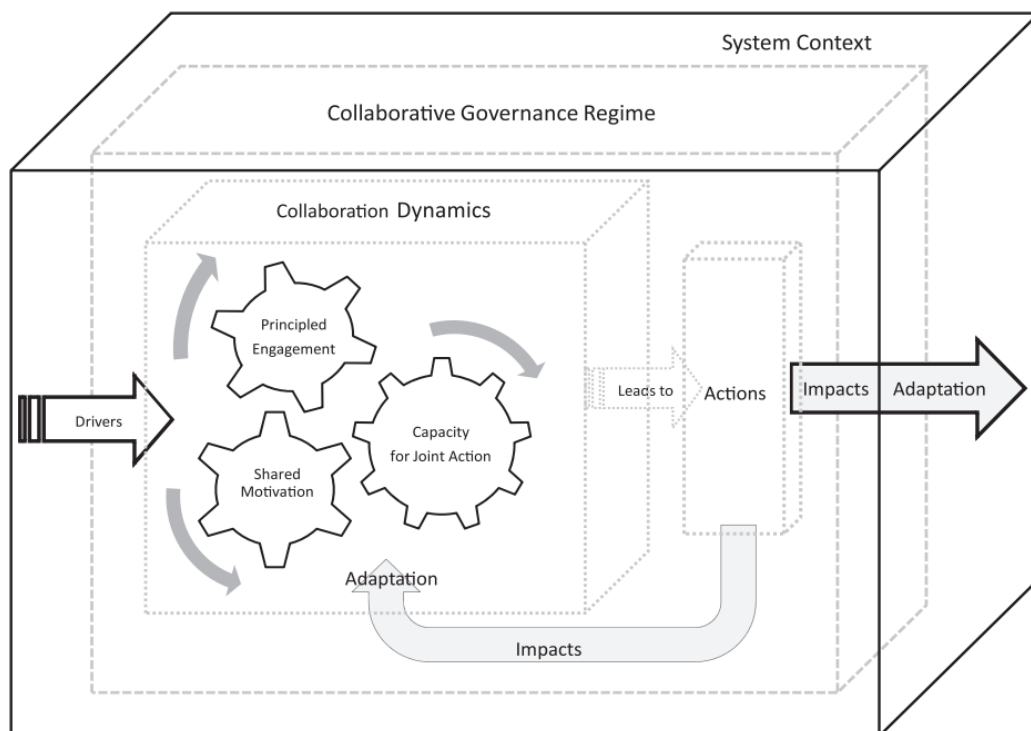
(2018), menekankan kebutuhan akan model kolaborasi yang dinamis karena proses kebijakan dan perilaku aktor kolaborasi sulit diprediksi.

2) Emerson, dkk (2012)

Emerson dkk (2012) memunculkan adanya integrasi dan perluasan konsep pemerintahan yang kolaboratif atau disebut sebagai *collaborative governance regime* beserta dengan model implementasi kolaborasi yang dinamis. Lebih jauh lagi, *collaborative governance* dapat melibatkan partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas pada berbagai tingkat, mengingat dukungan dan kesadaran publik merupakan komponen penting dalam efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan secara kolaboratif.

Teori *collaborative governance* dari Emerson dkk merupakan model multidimensi yang mempertimbangkan beberapa faktor lain selain proses kolaborasi itu sendiri seperti konteks sistem, penggerak, aksi dan dampak seperti pada Gambar 2.2.

Gambar 2. 2 Kerangka Integratif untuk *Collaborative Governance* (Emerson et al, 2011)



Berikut adalah penjabaran dari model *collaborative governance* dari Emerson dkk:

a) Konteks sistem dan penggerak

Konteks sistem merujuk pada situasi politik, hukum, sosial, ekonomi, lingkungan, dan bidang-bidang lainnya yang menimbulkan pengaruh dua arah dengan proses kolaborasi. Pada model kolaborasi Emerson, *driver* mencakup kepemimpinan, insentif konsekuensial, saling ketergantungan, dan ketidakpastian. Adapun ketidakpastian mengacu kepada situasi keraguan, ambiguitas, keterbatasan informasi, dan ketidakstabilan terkait kondisi, peristiwa, ketersediaan sumber daya, atau keputusan saat ini dan masa depan, atau keputusan aktor lain.

b) Dinamika kolaborasi

Pada inti model, proses kolaborasi dinamis terdiri dari komponen keterikatan prinsip (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas aksi bersama (*capacity for joint action*). Proses kolaborasi ini mengarah pada aksi yang menghasilkan dampak untuk kemudian diadaptasi dalam sistem. Masing-masing komponen tersebut memiliki empat elemen pendukung berperan sebagai mesin kolaborasi yang menggerakkan aksi dan menghasilkan dampak beserta proses adaptasi selama sistem berjalan.

Dalam perputaran komponen kolaborasi dinamis tersebut, stakeholder akan membangun tujuan dan target bersama yang dilaksanakan melalui aksi kolaborasi. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing komponen pada dinamika kolaborasi:

(1) Keterikatan berprinsip (*principled engagement*)

Istilah *principled engagement* mengacu pada proses keterikatan *stakeholder* yang efektif dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, komunikasi inklusif, representasi seimbang, serta penggabungan perspektif dan pengetahuan seluruh pihak yang terlibat. Keseimbangan dalam perwakilan merupakan indikator dari keragaman partisipasi, ide, keyakinan serta perspektif yang relevan terkait isu kebijakan. Melalui *principled engagement*, pihak yang memiliki tujuan dari berbagai konteks, rasional dan identitas dapat bekerja sama

di luar batas institusi, sektor ataupun yuridiksi untuk memecahkan masalah, menyelesaikan konflik, atau menciptakan nilai.

(2) Motivasi bersama (*shared motivation*)

Motivasi bersama merupakan komponen interpersonal dan relasional dari kolaborasi dinamis yang juga disebut sebagai *social capital*. Komponen ini dapat menjadi output sekaligus berdampak kembali sebagai penguat dari komponen *principled engagement*. Keterkaitan yang terbentuk dalam kolaborasi akan memicu adanya penilaian dari peserta kolaborasi terkait manfaat yang mereka terima beserta pertimbangan waktu dan sumber daya yang telah dikeluarkan. Dengan karakteristik *stakeholder* yang heterogen, *collaborative governance* perlu memperhatikan pemenuhan kepentingan masing-masing kepentingan dalam rangka mengelola kesamaan perspektif dan motivasi.

(3) Kapasitas aksi bersama (*capacity for join action*)

Tujuan utama dari kolaborasi adalah untuk mencapai hasil bersama yang tidak mampu dicapai jika dilakukan secara terpisah. Kolaborasi mampu meningkatkan kapasitas diri maupun pihak lain untuk mencapai tujuan bersama melalui aktivitas yang saling kooperatif. Dengan demikian, *collaborative governance* harus menghasilkan kapasitas baru atau kapasitas aksi bersama yang tidak ada sebelumnya untuk kemudian dikelola atau dikembangkan selama pencapaian tujuan bersama. Peningkatan kapasitas peserta kolaborasi perlu diidentifikasi sejak tahapan *principled engagement* sesuai kebutuhan ruang lingkup dan skala tujuan.

c) Tindakan kolaborasi, dampak dan adaptasi

Efektivitas dari tindakan kolaborasi akan tercapai jika tujuan dari kolaborasi tersebut dirumuskan secara eksplisit. Dalam model ini tindakan-tindakan yang dilakukan tergantung dari bentuk kolaborasi yang dibangun.

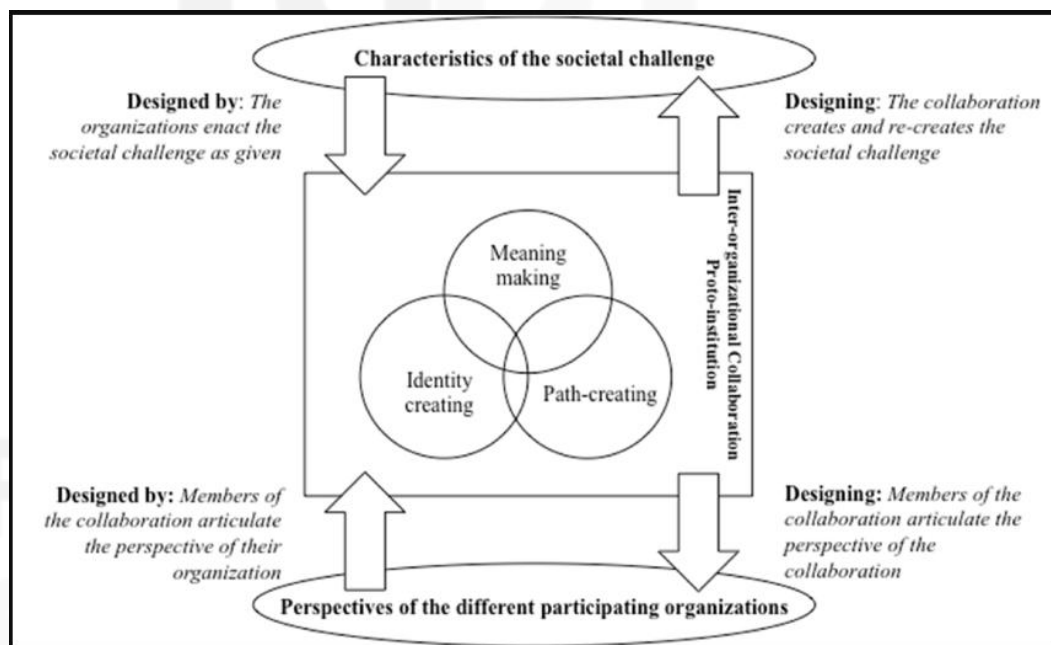
Dampak dapat diartikan sebagai perubahan yang terkait dengan tindakan kolaboratif. Adapun dampak dapat berupa hasil yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, yang juga ikut timbul akibat proses dinamika kolaborasi.

Selanjutnya, adaptasi mengacu pada umpan balik yang didapat dari dampak hasil kolaborasi.

3) Bogers, dkk (2016)

Berbanding terbalik dengan model Ansell dan Gash, Bogers dkk (2016) mempertimbangkan komponen eksternal sebagai faktor yang berpengaruh sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2. 3 Kerangka collaborative governance menurut Bogers, dkk



Komponen tersebut berupa tantangan dari masyarakat dan global serta perspektif yang beragam dari aktor kolaborasi yang memiliki kontribusi resiprok (dua arah) dengan proses kolaborasi. Inti dari proses kolaborasi sendiri dikategorikan oleh Bogers dkk ke dalam tiga praktik utama, yaitu pembangunan arah/tujuan (*path-creating*), penentuan identitas/struktur (*identity creating*) dan penyatuan pemahaman (*meaning making*). Pemodelan kolaborasi Bogers dkk ini dinilai penulis kurang sistematis karena tidak disertai alur input hingga dampak, sehingga model kolaborasi di khawatirkan tidak dapat memberikan dampak yang optimal dan tepat sasaran.

Berdasarkan kerangka teori model *collaborative governance* yang dijelaskan di atas, berikut adalah perbandingan antar kerangka model yang dapat dijadikan acuan untuk digunakan dalam teori penelitian sebagaimana terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Perbandingan Kerangka Teori *Collaborative Governance*

Penulis	Ansell dan Gash	Emerson dkk	Bogers dkk
Komponen	<ul style="list-style-type: none"> - Starting condition - Collaborative process - Institutional design - Facilitative leadership 	<ul style="list-style-type: none"> - System context dan drivers - Collaboration dynamics - Action outcome dan adaption 	<ul style="list-style-type: none"> - Inter-organizational collaboration - Proto-institution - Characteristic of the social challenge - Perspective of the different participating organization
Inti model	<ul style="list-style-type: none"> - Trust building - Commitment process - Shared understanding - Intermediate outcome - Face to face dialogue 	<ul style="list-style-type: none"> - Principle engagement - Shared motivation - Capacity for join action 	<ul style="list-style-type: none"> - Meaning making - Patch-creating - Identify creatingh
Kesimpulan	Kurang dinamis, inisiatif kolaborasi hanya berasal dari pemerintah sehingga interaksi bersifat vertikal dan formal	Kurang sistematis karena tidak disertai alur input hingga dampak sehingga diawatirkan tidak dapat memberikan dampak yang optimal dan tepat sasaran	Sangat dinamis

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan perbandingan kerangka teori di atas, model dari Ansell dan Gash (2008) merupakan yang paling sesuai dengan tema penelitian pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Pemilihan model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) sebagai pisau analisis utama dalam disertasi ini memiliki landasan teoretis yang kuat dan relevan, khususnya untuk membedah proses pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Model ini tidak hanya populer dan mapan dalam literatur kebijakan publik, tetapi juga menawarkan kerangka analitis yang sistematis untuk memahami bagaimana kolaborasi lintas aktor dibangun, dikelola, dan menghasilkan perubahan dalam konteks kebijakan publik.

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus. Definisi ini relevan dengan konteks pemberdayaan pembudi daya ikan karena program pembangunan perikanan budi daya pada umumnya melibatkan interaksi intensif antara pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas kelompok pembudi daya ikan, dan media.

Kekuatan utama model Ansell dan Gash terletak pada kemampuannya menjelaskan proses kolaborasi secara bertahap dan kontekstual. Komponen *starting conditions* memungkinkan analisis yang mendalam terhadap kondisi awal kolaborasi, termasuk ketimpangan kekuasaan, perbedaan kapasitas, serta tingkat kepercayaan antara pemerintah dan pembudi daya ikan. Dalam konteks pemberdayaan, analisis kondisi awal ini penting untuk memahami mengapa sebagian kelompok pembudi daya ikan lebih mampu berpartisipasi aktif dibandingkan kelompok lain, serta bagaimana intervensi kebijakan dapat mengurangi asimetri tersebut.

Selanjutnya, elemen *institutional design* dalam model Ansell dan Gash memberikan kerangka untuk menganalisis sejauh mana aturan main, mekanisme partisipasi, dan struktur forum kolaborasi mendukung keterlibatan bermakna pembudi daya ikan. Desain kelembagaan yang inklusif, transparan, dan adaptif

menjadi prasyarat penting agar kolaborasi tidak bersifat simbolik, melainkan benar-benar membuka ruang bagi pembudi daya ikan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Peran *facilitative leadership* juga menjadi aspek kunci dalam analisis pemberdayaan. Ansell dan Gash menekankan bahwa kepemimpinan dalam *collaborative governance* bukan bersifat komando-hierarkis, melainkan memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan menjaga komitmen aktor terhadap proses kolaboratif. Dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, peran pemerintah sebagai pemimpin fasilitatif sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan pembudi daya ikan, terutama dalam menjembatani kepentingan, pengetahuan, dan sumber daya antar aktor.

Inti dari model Ansell dan Gash adalah *collaborative process* yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses, serta pencapaian pemahaman bersama (*shared understanding*). Proses ini memiliki implikasi langsung terhadap pemberdayaan pembudi daya ikan. Melalui dialog dan interaksi berulang, pembudi daya ikan memperoleh ruang untuk menyuarakan kepentingan, berbagi pengetahuan lokal, serta meningkatkan kapasitas reflektif dan kolektif mereka. Dengan demikian, pemberdayaan dipahami sebagai hasil dari proses kolaboratif yang berkelanjutan, bukan sebagai output kebijakan yang instan.

Meskipun model Ansell dan Gash lebih menekankan pada proses kolaborasi dibandingkan pada hasil jangka panjang, kerangka ini tetap relevan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat apabila dipahami secara dinamis. Pemberdayaan pembudi daya ikan dapat ditelusuri melalui indikator-indikator proses, seperti peningkatan intensitas partisipasi, penguatan kepercayaan diri kelompok, serta meningkatnya kapasitas pembudi daya ikan dalam bernegosiasi dan berkolaborasi dengan aktor lain.

Selain itu, penggunaan model Ansell dan Gash sebagai pisau analisis utama juga memiliki keunggulan metodologis. Kerangka ini relatif mudah dioperasionalkan dalam penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam,

observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Setiap komponen model dapat dijadikan kategori analisis yang jelas dan konsisten, sehingga membantu penulis menjaga keterkaitan antara teori, data, dan temuan penelitian.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penggunaan model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) sebagai pisau analisis utama dalam disertasi ini dapat dipertanggungjawabkan secara teoretis dan metodologis. Model ini memungkinkan analisis yang tajam terhadap dinamika kolaborasi dalam pemberdayaan pembudi daya ikan, sekaligus selaras dengan paradigma *New Public Governance* yang menekankan partisipasi, dialog, dan kemitraan lintas aktor.

e. Konsep dan Teori Kolaborasi *Pentaheliks*

Kolaborasi *Pentaheliks* merupakan salah satu pendekatan kolaboratif yang berkembang dalam kajian pembangunan, inovasi, dan kebijakan publik untuk merespons kompleksitas persoalan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan lima aktor utama—pemerintah, akademisi, sektor bisnis, masyarakat, dan media—dalam suatu proses kolaboratif yang bersifat sinergis dan berkelanjutan.

Konsep *Pentaheliks* berakar dari pengembangan model *triple helix* yang diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000), yang menekankan interaksi antara pemerintah, universitas, dan industri sebagai penggerak inovasi. Model ini kemudian dikembangkan menjadi *quadruple helix* dengan memasukkan masyarakat sipil sebagai aktor keempat (Carayannis & Campbell, 2009). Perluasan ini didorong oleh kesadaran bahwa inovasi dan pembangunan tidak hanya bersumber dari relasi negara–pasar–akademisi, tetapi juga dari partisipasi publik dan konteks sosial-budaya.

Selanjutnya, konsep *Pentaheliks* muncul dengan memasukkan media sebagai aktor kelima yang berperan dalam membangun komunikasi publik, membentuk opini, serta memperkuat legitimasi kebijakan dan kolaborasi. Menurut Carayannis dan Campbell (2010), media memiliki fungsi strategis dalam

ekosistem inovasi karena mampu menjembatani informasi, pengetahuan, dan kepentingan antar aktor. Dalam konteks kebijakan publik, peran media juga penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses kolaboratif.

Dalam literatur pembangunan dan tata kelola, kolaborasi *Pentaheliks* dipahami sebagai bentuk konkret dari pendekatan *governance* dan *network governance*. Rhodes (1997) menegaskan bahwa dalam era *governance*, negara tidak lagi menjadi aktor tunggal yang dominan, melainkan bagian dari jejaring aktor yang saling bergantung. Pendekatan *Pentaheliks* merefleksikan logika ini dengan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator kolaborasi, bukan pengendali tunggal.

Beberapa studi menekankan bahwa kekuatan utama kolaborasi *Pentaheliks* terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai jenis pengetahuan, sumber daya, dan perspektif. Akademisi berperan dalam menyediakan dasar ilmiah dan inovasi, sektor bisnis berkontribusi melalui investasi dan efisiensi, masyarakat menyediakan pengetahuan lokal dan legitimasi sosial, sementara media memperluas jangkauan komunikasi dan advokasi kebijakan (Sianipar et al., 2013; Sudarmo, 2015).

Dalam konteks pembangunan lokal dan sektoral, kolaborasi *Pentaheliks* sering digunakan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai salah satu heliks utama memungkinkan proses pembangunan yang lebih partisipatif dan kontekstual. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *co-creation* dan *co-production*, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan (Bovaird, 2007).

Meskipun menawarkan banyak potensi, literatur juga mencatat sejumlah tantangan dalam implementasi kolaborasi *Pentaheliks*. Tantangan tersebut meliputi perbedaan kepentingan antar aktor, ketimpangan kapasitas, lemahnya koordinasi, serta dominasi aktor tertentu—terutama pemerintah atau sektor bisnis—yang dapat mengurangi makna kolaborasi (Ansell & Gash, 2008; Sudarmo, 2015). Oleh karena itu, keberhasilan *Pentaheliks* sangat bergantung

pada desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan mekanisme komunikasi yang inklusif.

Dalam kerangka teoritis, kolaborasi *Pentaheliks* dapat diposisikan sebagai pendekatan operasional dari *collaborative governance*. *Pentaheliks* memberikan pemetaan aktor yang jelas, sementara *collaborative governance*—seperti yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008)—menyediakan kerangka proses untuk memahami bagaimana kolaborasi tersebut berlangsung. Dengan demikian, *Pentaheliks* dan *collaborative governance* bersifat saling melengkapi dalam menganalisis kebijakan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, kolaborasi *Pentaheliks* dapat dipahami sebagai pendekatan kolaboratif multidimensi yang relevan untuk menjelaskan pembangunan berbasis kemitraan lintas aktor. Pendekatan ini sangat sesuai digunakan dalam menganalisis kebijakan pembangunan perikanan budi daya yang membutuhkan integrasi pengetahuan, sumber daya, dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan.

Astuti dkk. (2020) mendefinisikan kolaborasi *penta helix* sebagai model sinergi pembangunan yang melibatkan lima unsur utama, yaitu akademisi, sektor bisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Kelima unsur ini dipandang sebagai aktor strategis yang memiliki peran, fungsi, dan kontribusi berbeda, namun saling melengkapi dalam mendorong keberhasilan pembangunan dan inovasi berbasis kolaborasi.

Menurut Astuti dkk. (2020), unsur akademisi berperan sebagai *knowledge creator* yang menyediakan landasan ilmiah melalui riset, pengembangan teknologi, dan transfer pengetahuan. Akademisi berfungsi memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Unsur sektor bisnis diposisikan sebagai *economic driver* yang berkontribusi melalui investasi, efisiensi produksi, penguatan rantai nilai, serta adopsi inovasi. Dalam konteks pembangunan sektoral, dunia usaha berperan

penting dalam menjembatani hasil inovasi dengan kebutuhan pasar dan keberlanjutan ekonomi.

Selanjutnya, pemerintah berperan sebagai *regulator* dan *fasilitator* kolaborasi. Astuti dkk. (2020) menegaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi strategis dalam menetapkan kebijakan, menyediakan infrastruktur, menciptakan iklim kondusif, serta mengoordinasikan interaksi antaraktor dalam kerangka *Pentaheliks*.

Unsur komunitas atau masyarakat dipahami sebagai subjek utama pembangunan yang memiliki pengetahuan lokal, pengalaman praktis, serta legitimasi sosial. Astuti dkk. (2020) menekankan bahwa keterlibatan aktif komunitas menjadi kunci keberlanjutan program, karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku dan mitra pembangunan.

Adapun unsur media diposisikan sebagai *communication enabler* yang berfungsi menyebarluaskan informasi, membangun opini publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kolaborasi. Media berperan memperkuat jejaring antar aktor sekaligus meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan dan program pembangunan.

Dengan demikian, menurut Astuti dkk. (2020), kolaborasi *Pentaheliks* bukan sekadar konfigurasi aktor, melainkan suatu sistem interaksi yang menuntut sinergi peran, kesetaraan relasi, dan komitmen bersama. Konsep ini relevan untuk dianalisis menggunakan kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008), khususnya dalam menelaah proses dialog, pembangunan kepercayaan, dan pencapaian hasil kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan.

f. Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) berkembang sebagai respons terhadap kegagalan pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* dan kurang memberikan ruang bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemberdayaan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas,

kemandirian, serta kemampuan masyarakat untuk mengontrol sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Secara konseptual, pemberdayaan pertama kali banyak dibahas dalam literatur pembangunan dan ilmu sosial sebagai proses peningkatan kekuatan (*power*) kelompok yang lemah. Friedman (1992) memandang pemberdayaan sebagai upaya memperluas akses masyarakat miskin terhadap basis kekuasaan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam perspektif ini, pemberdayaan tidak hanya menyangkut peningkatan pendapatan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Chambers (1997) menempatkan pemberdayaan sebagai inti dari pembangunan yang berpusat pada manusia. Ia menekankan bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk menganalisis permasalahan mereka sendiri, sehingga peran aktor eksternal seharusnya bergeser dari pengendali menjadi fasilitator. Pemberdayaan, dalam pandangan ini, berkaitan erat dengan pembalikan relasi kuasa dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal.

Dalam kajian sosiologi dan pembangunan komunitas, pemberdayaan juga dipahami sebagai proses multidimensional. Perkins dan Zimmerman (1995) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses yang memungkinkan individu dan komunitas memperoleh kontrol atas kehidupan mereka, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat kemampuan kolektif untuk bertindak. Definisi ini menekankan bahwa pemberdayaan mencakup dimensi psikologis, sosial, organisasi, dan politik.

Pendekatan lain yang berpengaruh adalah perspektif pembangunan berbasis aset (*asset-based community development*). Kretzmann dan McKnight (1993) mengkritik pendekatan berbasis masalah (*needs-based approach*) dan mengusulkan agar pemberdayaan berangkat dari pengenalan dan penguatan aset lokal, seperti keterampilan, jaringan sosial, dan institusi komunitas. Pendekatan ini relevan untuk konteks masyarakat pembudi daya ikan yang memiliki pengetahuan lokal dan modal sosial yang kuat.

Dalam konteks kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat sering dikaitkan dengan partisipasi dan tata kelola. Arnstein (1969) melalui konsep *ladder of citizen participation* menjelaskan bahwa pemberdayaan sejati hanya terjadi ketika masyarakat memiliki kekuasaan nyata dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar dilibatkan secara simbolik. Kerangka ini memberikan dasar normatif untuk menilai kualitas partisipasi dalam program pemberdayaan.

Selanjutnya, pemberdayaan juga dipahami sebagai proses pembelajaran sosial dan kolektif. Ife (2016) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan penguatan kapasitas kritis, solidaritas, dan kemampuan berorganisasi. Dalam perspektif ini, pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat setempat.

Dalam literatur pembangunan kontemporer, pemberdayaan semakin dikaitkan dengan paradigma *governance* dan kolaborasi. Pemberdayaan dipandang sebagai hasil dari interaksi antara aktor negara dan masyarakat dalam proses kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *New Public Governance* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembangunan.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan posisi tawar masyarakat dalam struktur sosial dan kelembagaan. Pemberdayaan bukan hanya *outcome* kebijakan, tetapi juga proses sosial yang dibentuk melalui partisipasi, pembelajaran, dan kolaborasi lintas aktor. Kerangka konseptual ini menjadi landasan penting dalam menganalisis pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan dalam konteks kebijakan publik kolaboratif.

g. Participatory Rural Appraisal, Pengetahuan Lokal, dan Partisipasi Masyarakat

Kajian mengenai *Participatory Rural Appraisal* (PRA) tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pemikiran Robert Chambers pada awal 1990-an. Chambers (1992) mengawali kritiknya terhadap pendekatan *rapid rural appraisal*

(RRA) yang meskipun efisien dan cepat, masih didominasi oleh perspektif peneliti dan ahli eksternal. Dalam pandangannya, RRA belum sepenuhnya mengakui masyarakat lokal sebagai subjek pengetahuan. Oleh karena itu, Chambers mengusulkan PRA sebagai pendekatan appraisal yang tidak hanya cepat (*rapid*), tetapi juga santai (*relaxed*) dan partisipatif (*participatory*), dengan tujuan utama membalik posisi masyarakat dari objek menjadi analis utama dalam proses pembangunan.

Lebih lanjut, Chambers (1992) menegaskan bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan kontekstual yang kaya mengenai lingkungan, sumber daya alam, serta dinamika sosial-ekonomi yang membentuk kehidupan mereka sehari-hari. Pengetahuan semacam ini sering kali luput dari metode survei konvensional yang bersifat *top-down* dan terstandarisasi. Melalui PRA, pengetahuan lokal tersebut digali dan divisualisasikan menggunakan berbagai teknik partisipatif, seperti pemetaan sosial, diagram musiman, transek, dan diskusi kelompok. Teknik-teknik ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai proses pembelajaran sosial yang memperkuat kapasitas analitis dan reflektif masyarakat.

Pengembangan konseptual PRA kemudian diperdalam oleh Chambers (1994a) melalui artikelnya di *World Development* yang menjelaskan asal-usul dan praktik PRA secara sistematis. Chambers menelusuri bagaimana PRA berkembang dari berbagai tradisi pemikiran, antara lain RRA, antropologi terapan, serta pendidikan kritis ala Paulo Freire. Dalam kerangka ini, PRA dipahami sebagai hasil evolusi lintas disiplin yang menekankan pembelajaran bersama (*mutual learning*) antara masyarakat dan fasilitator. Inti dari PRA, menurut Chambers, adalah pengakuan terhadap *local knowledge* dan *local analysis*, yaitu kemampuan masyarakat untuk menganalisis kondisi, mengidentifikasi persoalan, dan merumuskan solusi berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

Dalam praktiknya, Chambers (1994a) menekankan sejumlah prinsip kunci PRA, seperti *handing over the stick*, triangulasi, serta pembelajaran yang cepat dan berulang. Prinsip *handing over the stick* menegaskan pentingnya penyerahan

kendali proses analisis kepada masyarakat, sementara peran aktor eksternal dibatasi sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini sekaligus menuntut perubahan sikap profesional pembangunan, dari posisi mengajar dan mengontrol menuju peran belajar dan memfasilitasi. Dengan demikian, PRA diposisikan bukan sekadar sebagai metode teknis, melainkan sebagai pendekatan dan paradigma pembangunan yang menantang praktik konvensional yang bersifat hierarkis.

Meskipun demikian, Chambers (1994b) juga secara kritis mengulas berbagai tantangan dan keterbatasan PRA. Ia menyoroti kecenderungan formalisasi PRA dalam proyek-proyek pembangunan, di mana PRA direduksi menjadi prosedur administratif semata. Kondisi ini memunculkan risiko *token participation*, yaitu partisipasi masyarakat yang bersifat simbolik dan tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan substantif. Chambers menegaskan bahwa esensi PRA terletak pada perubahan relasi kuasa antara aktor eksternal dan masyarakat lokal. Tanpa perubahan tersebut, PRA kehilangan makna transformasionalnya.

Dimensi etis dan filosofis dari pendekatan partisipatif kemudian diperdalam dalam karya Chambers (1997) *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Dalam buku ini, Chambers mempertanyakan legitimasi realitas siapa yang selama ini dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan. Ia menunjukkan bahwa realitas dan pengalaman kelompok miskin serta terpinggirkan kerap terabaikan oleh birokrasi dan budaya profesional pembangunan. Chambers menegaskan bahwa pengetahuan lokal bukan sekadar pelengkap data teknis, melainkan fondasi utama dalam memahami persoalan pembangunan secara kontekstual dan adil.

Gagasan pembalikan prioritas yang dirumuskan Chambers melalui konsep *putting the first last* menempatkan kelompok paling lemah sebagai pusat perhatian kebijakan. Dalam konteks ini, PRA dan pendekatan partisipatif lainnya dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan epistemik dan sosial. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran sebelumnya yang tertuang dalam karya kolektif *Farmer First* (Chambers, Pacey, & Thrupp, 1989), yang menekankan

petani sebagai inovator dan produsen pengetahuan. Buku tersebut menunjukkan bahwa banyak inovasi pertanian lahir dari praktik dan eksperimen petani, namun sering diabaikan oleh sistem penelitian dan penyuluhan perikanan formal yang bersifat *top-down*.

Prinsip *farmer first* menjadi landasan penting bagi berkembangnya PRA, khususnya dalam sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian dan perikanan budi daya. Pengakuan terhadap pengetahuan lokal pembudi daya ikan mengenai siklus produksi, kualitas lingkungan, dan manajemen usaha menjadi kunci bagi perumusan kebijakan yang kontekstual dan berkelanjutan. Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan PRA diperluas melalui kerangka *Participatory Learning and Action* (PLA) yang dikembangkan oleh IIED dan Pretty et al. (1995). PLA menekankan bahwa partisipasi tidak berhenti pada proses analisis, tetapi harus dilanjutkan dengan pembelajaran kolektif dan tindakan bersama yang mendorong pemberdayaan serta perubahan sosial.

Secara keseluruhan, literatur yang dikembangkan oleh Chambers dan para pengikutnya menegaskan bahwa PRA merupakan landasan teoretis yang kuat bagi pendekatan pembangunan partisipatif. Pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat diposisikan sebagai pilar utama dalam merancang intervensi pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks tata kelola kolaboratif, PRA menyediakan kerangka konseptual dan metodologis untuk membangun dialog setara, kepercayaan, dan komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah, dan aktor pembangunan lainnya.

h. Konsep dan Teori Kesejahteraan Masyarakat

Konsep kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan dan kebijakan publik. Secara umum, kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai kondisi ekonomi semata, tetapi mencakup dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara menyeluruh. Pergeseran pemahaman ini mencerminkan perkembangan teori pembangunan dan

administrasi publik yang semakin menekankan pendekatan multidimensional dan berorientasi pada manusia.

Dalam literatur klasik kebijakan publik, kesejahteraan sering dikaitkan dengan kemampuan negara dalam menyediakan layanan dasar dan menjamin perlindungan sosial bagi warganya. Pigou (1920) melalui konsep *welfare economics* menekankan bahwa kesejahteraan sosial berkaitan dengan distribusi sumber daya yang adil dan efisien untuk memaksimalkan kesejahteraan kolektif. Perspektif ini memandang kesejahteraan sebagai hasil dari intervensi negara dalam mengoreksi kegagalan pasar.

Seiring perkembangan pemikiran pembangunan, konsep kesejahteraan mengalami perluasan. Todaro dan Smith (2015) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tercermin dari tiga nilai inti pembangunan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*), peningkatan harga diri (*self-esteem*), dan kebebasan dari penindasan (*freedom from servitude*). Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk hidup bermartabat.

Pendekatan yang berpengaruh besar dalam kajian kesejahteraan adalah *human development approach* yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP (1990) menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat harus diukur melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pendekatan ini menggeser fokus pembangunan dari pertumbuhan ekonomi semata menuju peningkatan kualitas manusia.

Sen (1999) memperkuat perspektif tersebut melalui *capability approach*, yang memandang kesejahteraan sebagai kemampuan individu dan masyarakat untuk mencapai fungsi-fungsi kehidupan yang mereka nilai penting. Menurut Sen, kesejahteraan bukan hanya tentang apa yang dimiliki masyarakat, tetapi tentang apa yang dapat mereka lakukan dan menjadi. Pendekatan kapabilitas ini banyak digunakan untuk menganalisis kesejahteraan dalam konteks kemiskinan, ketimpangan, dan pemberdayaan.

Dalam kajian sosiologi dan pembangunan komunitas, kesejahteraan masyarakat juga dikaitkan dengan konsep *social well-being*. Midgley (1995) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi di mana kebutuhan sosial terpenuhi, masalah sosial dapat dikelola, dan kesempatan sosial tersedia secara adil. Kesejahteraan dalam perspektif ini sangat bergantung pada interaksi antara kebijakan publik, institusi sosial, dan partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, Chambers (1997) menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat miskin harus dipahami dari perspektif mereka sendiri. Ia memperkenalkan konsep *well-being* yang bersifat subjektif dan kontekstual, mencakup rasa aman, martabat, dan kontrol atas sumber daya kehidupan. Pandangan ini menegaskan pentingnya pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan indikator kesejahteraan.

Dalam konteks kebijakan publik kontemporer, kesejahteraan masyarakat sering dianalisis dalam kerangka *governance* dan kolaborasi. Osborne (2010) menyatakan bahwa pencapaian kesejahteraan publik merupakan hasil dari interaksi berbagai aktor—negara, pasar, dan masyarakat—dalam jejaring tata kelola. Oleh karena itu, kesejahteraan dipandang sebagai *outcome* kolektif dari proses kolaboratif, bukan semata-mata hasil kebijakan pemerintah.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek material, sosial, dan subjektif. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, kesejahteraan masyarakat pembudi daya ikan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap layanan, penguatan kapasitas, keberlanjutan mata pencaharian, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, analisis kesejahteraan masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan partisipatif dan kolaboratif.

Berdasarkan sintesis teori kesejahteraan (Pigou, 1920; UNDP, 1990; Sen, 1999; Midgley, 1995; Chambers, 1997; Todaro & Smith, 2015), kesejahteraan masyarakat pembudi daya ikan dapat dioperasionalisasikan ke dalam beberapa dimensi utama. Pertama, dimensi ekonomi, yang mencakup tingkat pendapatan

rumah tangga pembudi daya ikan, stabilitas usaha budi daya, akses terhadap modal dan pasar, serta diversifikasi sumber pendapatan. Dimensi ini mencerminkan kemampuan ekonomi dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kedua, dimensi sosial, yang meliputi akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial, kualitas perumahan, serta hubungan sosial dalam komunitas. Dimensi ini sejalan dengan pendekatan *human development* UNDP (1990) yang menekankan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.

Ketiga, dimensi kapasitas dan pemberdayaan, yang mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis budi daya, kemampuan berorganisasi, akses terhadap informasi, serta posisi tawar pembudi daya ikan dalam rantai nilai perikanan. Dimensi ini selaras dengan *capability approach* Sen (1999), yang memandang kesejahteraan sebagai kemampuan untuk memilih dan bertindak.

Keempat, dimensi keberlanjutan dan keamanan penghidupan, yang meliputi keberlanjutan lingkungan budi daya, ketahanan terhadap risiko (penyakit ikan, fluktuasi harga, perubahan iklim), serta rasa aman dalam menjalankan usaha. Chambers (1997) menekankan bahwa rasa aman dan kontrol atas sumber penghidupan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat miskin.

Kelima, dimensi partisipasi dan kelembagaan, yang mencakup keterlibatan pembudi daya ikan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, keberfungsian kelompok atau koperasi, serta kualitas relasi dengan pemerintah dan aktor lainnya. Dimensi ini relevan dalam kerangka *governance* dan *collaborative governance* yang menempatkan kesejahteraan sebagai hasil dari proses kolaboratif (Osborne, 2010).

Secara konseptual, kesejahteraan masyarakat pembudi daya ikan dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara peningkatan kondisi ekonomi, penguatan kapasitas manusia, keberlanjutan penghidupan, dan partisipasi dalam tata kelola pembangunan. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya menjadi tujuan akhir kebijakan, tetapi juga indikator keberhasilan proses kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan.

C. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

1. Definisi Konsep

Definisi konseptual berisi penjelasan mengenai karakteristik model/kerangka berpikir konsep dari suatu masalah yang akan diteliti. Mengacu pada landasan teori, kebijakan dan regulasi yang sebelumnya dijelaskan, beberapa konsep yang termuat dalam penelitian ini diantaranya:

- a. *Collaborative governance* adalah suatu bentuk pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan berbasis musyawarah, dengan tujuan merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik maupun mengelola program atau aset publik.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan yang menekankan peningkatan kapasitas manusia, meliputi motivasi, perilaku proaktif, pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kerjasama, jejaring, serta kemampuan mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya.
- c. Pembudi daya ikan adalah individu yang mata pencahariannya berfokus pada kegiatan budi daya ikan, baik di perairan tawar, payau, maupun laut.
- d. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku usaha dan pendukung sektor kelautan dan perikanan, yang bertujuan agar mereka mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lain, sehingga meningkatkan produktivitas, efisiensi, pendapatan, kesejahteraan, serta kesadaran akan pelestarian lingkungan.
- e. Bantuan pemerintah adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah, yang tidak termasuk dalam kategori bantuan sosial.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan agar konsep dapat digunakan atau diterapkan dalam fenomena empiris. Operasionalisasi dapat dimaknai sebagai proses mendefinisikan variabel yang mewakili teori atau konsep dengan tujuan agar dapat diukur melalui penelitian (Senese, 1997). Teori *collaborative governance* yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008) dioperasionalkan menjadi beberapa dimensi, elemen, dan alat ukur yang akan digunakan sebagai upaya pemberdayaan pembudi daya ikan. Rincian operasionalisasi konsep dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 6 Definisi Operasional

Dimensi	Elemen	Indikator
Starting condition	Power resource knowledge asymmetries	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi adanya ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan - Identifikasi adanya ketidakseimbangan kekuatan yang dimiliki para pemangku kepentingan
	Incentives for and constraints on participation	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya insentif untuk berpartisipasi dalam kolaborasi (pencapaian tujuan pemangku kepentingan) - Adanya ancaman regulasi - Adanya ketergantungan diantara pemangku kepentingan
	Prehistory of cooperation or conflict (initial trust level)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kerjasama di masa lalu - Adanya konflik di masa lalu
Collaborative process	Face to face dialogue	- Terjadinya dialog tatap muka
	Trust building	- Membangun kepercayaan
	Commitment to process	- Adanya komitmen terhadap proses
	Shared understanding	- Adanya pemahaman bersama
	Intermediate outcomes	- Adanya hasil antara

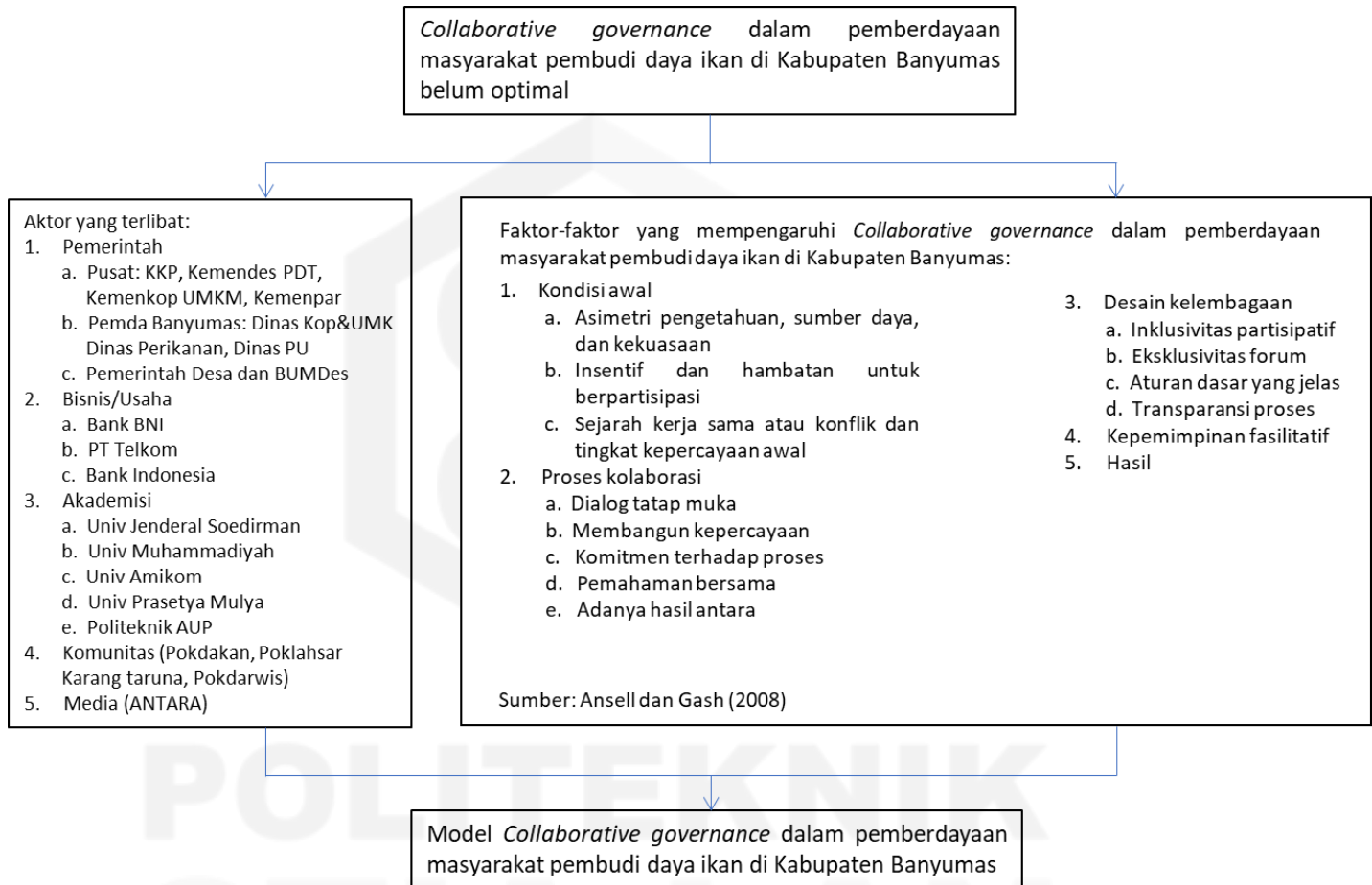
Institutional design	Participatory Inclusiveness	- Adanya inklusivitas partisipasi
	Forum Exclusiveness	- Adanya forum alternatif karena eksklusivitas
	Clear Ground Rules	- Adanya aturan yang jelas
	Process Transparency	- Adanya transparansi pores kolaborasi
Facillitative leadership		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya fasilitasi, mediasi, perundingan, dan solusi - Adanya kemampuan mempromosikan partisipasi yang luas dan aktif - Memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif - Memperoleh rasa hormat dan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan

Sumber: Penulis, diolah berdasarkan teori Ansell dan Gash (2008)

D. Model/Kerangka Berfikir

Setelah melakukan pemahaman pada kerangka kerja dan juga perbandingan penelitian sebelumnya, penulis telah membuat kerangka teoritis yang digunakan pada penelitian. Kerangka teoritis penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2. 4 Kerangka Teoritis Penelitian



Sumber: Diolah Penulis (2023)

Penelitian ini menggunakan pendekatan *collaborative governance* sebagai kerangka konseptual utama untuk menganalisis proses dan dinamika pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini dipilih karena proses pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan bersifat kompleks, melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang beragam, serta membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Collaborative governance dipahami sebagai suatu pengaturan tata kelola yang melibatkan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam suatu proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal maupun informal, berorientasi pada konsensus, dan diarahkan untuk mencapai tujuan publik bersama. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, tujuan tersebut mencakup peningkatan produktivitas, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan pembudi daya ikan, dan ketahanan sistem pangan.

Secara konseptual, penelitian ini merujuk pada pemikiran Ansell dan Gash (2008) yang menekankan bahwa *collaborative governance* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), dan kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), yang berinteraksi dalam suatu proses kolaboratif (*collaborative process*).

Proses kolaboratif tersebut ditandai oleh dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara (*intermediate outcomes*). Kerangka ini relevan untuk mengkaji bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan membangun kerja sama yang efektif dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, ketimpangan kapasitas, dan tantangan keberlanjutan.

Kerangka konseptual penelitian ini menempatkan beberapa aktor utama sebagai elemen kunci kolaborasi, yaitu:

1. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang berperan sebagai regulator, fasilitator, dan penyedia dukungan kebijakan, infrastruktur, bantuan, serta layanan teknis.

2. Pembudi daya ikan, sebagai aktor utama di tingkat operasional yang memiliki pengetahuan lokal, pengalaman praktis, dan kepentingan langsung terhadap keberhasilan usaha budi daya.
3. Sektor bisnis, termasuk penyedia akses permodalan, akses pasar, sarana produksi, industri pengolahan, dan pelaku pasar, yang berperan dalam investasi, inovasi, dan penguatan rantai nilai.
4. Lembaga pendukung, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil, yang berkontribusi dalam pengembangan kapasitas, transfer teknologi, pendampingan, serta pengawasan.

Interaksi antar pelaku tersebut membentuk jaringan kolaboratif yang menentukan efektivitas tata kelola pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Dalam penelitian ini, proses *collaborative governance* dianalisis melalui beberapa dimensi utama sebagai berikut:

1. Dialog dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perikanan budi daya.
2. Pembangunan kepercayaan (*trust building*) yang tercermin dari keterbukaan informasi, konsistensi kebijakan, dan keberlanjutan interaksi.
3. Komitmen bersama, yang ditunjukkan melalui kesediaan aktor untuk berbagi sumber daya, risiko, dan tanggung jawab.
4. Pemahaman bersama (*shared understanding*) mengenai tujuan, permasalahan, dan strategi pengembangan perikanan budi daya.

Dimensi-dimensi ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kolaborasi yang terbangun.

Kerangka konseptual penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan *collaborative governance*, antara lain:

1. Kondisi sosial ekonomi pembudi daya ikan, termasuk skala usaha, tingkat pendidikan, dan akses terhadap sumber daya.

2. Kapasitas kelembagaan lokal, seperti keberadaan kelompok pembudi daya ikan, koperasi, dan kelembagaan desa.
3. Lingkungan kebijakan, yang mencakup konsistensi regulasi, dukungan anggaran, dan koordinasi antarinstansi.

Faktor-faktor tersebut berfungsi sebagai variabel yang dapat memperkuat atau melemahkan proses kolaboratif.

Hasil akhir (*outcomes*) dari penerapan *collaborative governance* dalam perikanan budi daya diharapkan meliputi:

1. Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembudi daya ikan melalui akses terhadap pengetahuan, teknologi, permodalan, dan pasar.
2. Peningkatan kinerja perikanan budi daya, baik dari sisi produktivitas, efisiensi, maupun kualitas produk.
3. Keberlanjutan lingkungan, melalui penerapan praktik budi daya yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.
4. Penguatan tata kelola sektor, yang ditandai oleh koordinasi lintas sektor yang lebih efektif dan inklusif.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka konseptual penelitian ini memandang *collaborative governance* sebagai suatu proses dinamis yang menghubungkan aktor, institusi, dan konteks dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Kerangka ini digunakan sebagai landasan analitis untuk menilai sejauh mana praktik kolaborasi yang ada mampu mendorong pemberdayaan pembudi daya ikan dan pencapaian tujuan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilaksanakan melalui strategi studi kasus di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, yang dikenal sebagai lokasi Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village*). Dengan mengadopsi paradigma fenomenologi, studi kasus difokuskan pada satu objek tertentu yang dipilih untuk diteliti secara mendalam, dengan tujuan menggali realitas yang mendasari fenomena yang terlihat. Dalam perspektif fenomenologi, apa yang tampak secara fisik bukanlah realitas itu sendiri, melainkan hanya representasi dari apa yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, tugas penulis dalam studi kasus adalah menyingkap aspek-aspek yang tidak tampak, sehingga dapat dihasilkan pengetahuan yang dapat diamati dan dipahami.

Dengan demikian, studi kasus dapat dipahami sebagai proses penyelidikan mendalam terhadap suatu kasus sekaligus upaya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Meskipun penelitian yang menyeluruh dan menyelami keseluruhan konteks sangat penting, studi kasus yang berfokus pada kasus atau objek yang spesifik dan unik serta dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih luas memberikan manfaat signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Studi kasus mampu menyajikan peristiwa secara rinci sehingga menjadi sumber pengetahuan yang berharga.

Walaupun ruang lingkup studi kasus bersifat terbatas, penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan berpotensi menghasilkan konsep atau teori baru untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, unit analisis dalam studi kasus mencakup individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, bukan masyarakat secara keseluruhan. Setiap peneliti studi kasus memiliki motivasi untuk menemukan hal-hal baru dan memberikan kontribusi

bagi perkembangan ilmu pengetahuan, baik berupa konsep, proposisi, definisi, model, rumus, dalil, paradigma, maupun teori.

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan *collaborative governance* untuk pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi, serta diskusi kelompok terfokus, menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya (Lampiran 1).

Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan publikasi yang sudah ada, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kerja sama, buku panduan, laporan, berita, serta penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur dan analisis media.

Wawancara bertujuan untuk melakukan verifikasi data yang terdapat dalam dokumen serta menggali lebih dalam tentang fenomena tersebut. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan. Penentuan partisipan dalam penelitian kualitatif disesuaikan dengan kebutuhan penulis yang sudah disesuaikan dengan substansi di dalam rencana atau skenario wawancara dan selaras dengan pertanyaan penelitian, mendapat informasi yang baik, dapat diakses dan dapat memberikan petunjuk tentang informasi lanjut. Partisipan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Proses pemilihan dilakukan langsung oleh penulis atau pendapat dari pihak lain yang mengetahui persis siapa yang dapat masuk dalam sampel, sehingga didapatkan jawaban yang diperlukan.

Tabel 3. 1 Daftar Partisipan Penelitian

No	Partisipan	Peran	Jumlah
1	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP, KKP	Pengambil Kebijakan Desa Perikanan Cerdas	1
2	Deputi Bidang Perkoperasian, Kemenkop UKM	Pengambil kebijakan perkoperasian di Indonesia	1
3	Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, KKP	Penanggung Jawab Desa Perikanan Cerdas Desa lingkup BPPSDMKP	1
4	Direktorat Pakan dan Obat Ikan, KKP	Penanggung jawab Kampung Perikanan Budi daya	1
5	Direktur Perencanaan Teknis Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDT	Perumus kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan	1
6	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, KKP	Penanggung Jawab Desa Perikanan Cerdas Panembangan	2
7	Manajer Indonesia Telecommunication & Digital Research Institute (ITDRI), PT Telkom	Penyedia layanan digitalisasi	1
8	Bank BNI KC Purwokerto	Penyedia permodalan usaha	1
9	BLU LPMUKP	Penyedia permodalan usaha	1
10	Pemerintah Daerah Banyumas	Pengambil kebijakan perencanaan pembangunan daerah, bidang perikanan, dan usaha mikro kecil dan koperasi	3
11	Universitas Jenderal Soedirman	Kolaborator pengembangan Desa Perikanan Cerdas	1
12	Desa Panembangan	Penyedia lahan usaha, Pengambil kebijakan	2

		penggunaan Dana Desa	
13	Penyuluh perikanan	Pendamping program Desa Perikanan Cerdas	6
14	Pembudi daya ikan	Pelaku Program Desa Perikanan Cerdas	11
Jumlah			33

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Beberapa partisipan yang menjadi sasaran wawancara terdiri atas perwakilan dari aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan model *collaborative governance* untuk pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, yaitu:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP

Kepala Badan berperan sebagai inisiator program Desa Perikanan Cerdas. Program ini merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang mencakup seluruh rantai kegiatan, dari hulu hingga hilir, dengan penekanan pada penerapan teknologi informasi, komunikasi, serta manajemen yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Deputi Bidang Perkoperasian, Kemenkop UKM

Pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM. Usaha budi daya ikan termasuk usaha mikro dan kecil yang membutuhkan pembinaan serta pendampingan dalam aspek kewirausahaan maupun kelembagaannya. Oleh karena itu, salah satu partisipan yang dilibatkan adalah Deputi Bidang Perkoperasian atau perwakilannya.

Deputi Bidang Perkoperasian, Kemenkop UKM merupakan pengambil kebijakan penguatan kelembagaan pelaku usaha sektor mikro untuk pembentukan koperasi yang telah memfasilitasi legalisasi Koperasi Mina Satya Panembangan.

3. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan penanggung jawab kegiatan Desa Perikanan cerdas, termasuk di Desa

Panembangan di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Selain itu, juga merupakan instansi pembina penyuluh perikanan yang mendampingi kegiatan Desa Perikanan Cerdas.

4. Direktur Pakan dan Obat Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, KKP

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan program Kampung Perikanan Budi daya (KPB) serta memberikan bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan budi daya. KPB merupakan kawasan yang difokuskan pada komoditas unggulan atau komoditas lokal, dengan memanfaatkan berbagai potensi untuk mendorong pertumbuhan usaha budi daya ikan yang kompetitif dan berkelanjutan. Berdasarkan informasi yang ada, penanggung jawab pelaksanaan KPB adalah Direktorat Pakan dan Obat Ikan. Oleh karena itu, salah satu partisipan dalam penelitian ini adalah Direktur Pakan dan Obat Ikan.

5. Direktur Perencanaan Teknis Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDT

Penelitian mengenai model *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan akan dilaksanakan pada tingkat kewilayahan desa. Oleh karena itu, informasi terkait program pembangunan desa menjadi sangat penting. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu partisipan yang akan diwawancara adalah Direktur Perencanaan Teknis Desa dan Perdesaan.

6. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

BPPP Tegal merupakan penanggung jawab kegiatan Desa Perikanan Cerdas di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Sehingga sangat mengetahui kegiatan yang dilaksanakan baik kegiatan pelatihan maupun kegiatan penyuluhan perikanan.

7. Manajer ITDRI, PT Telkom

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, diperlukan digitalisasi serta komunikasi yang efektif. Digitalisasi menjadi penting dalam proses pelatihan (*diklat*), produksi, dan pemasaran produk. Namun, beberapa wilayah desa masih tergolong sebagai *blank spot zone*, sehingga dukungan dari

PT Telkom sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, salah satu aktor yang akan dijadikan partisipan dalam penelitian ini adalah perwakilan dari ITDRI, PT Telkom.

8. Perbankan dan Lembaga Penyedia Permodalan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pembudi daya ikan adalah keterbatasan permodalan. Padahal, pemerintah menyediakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP). Oleh karena itu, beberapa aktor yang akan dijadikan *key informan* dalam penelitian ini berasal dari lembaga penyedia permodalan, yaitu BNI, dan BLU LPMUKP.

9. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

Pelaksanaan model *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan tentu memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, khususnya beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD yang berperan antara lain adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Dinas yang membidangi kewirausahaan dan perkoperasian.

10. Akademisi/Perguruan Tinggi

Untuk memahami peran akademisi dalam pelaksanaan *collaborative governance* pada pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, penulis akan melakukan wawancara dengan akademisi dari perguruan tinggi terdekat dengan lokasi penelitian. Sebagai contoh, di Kabupaten Banyumas, wawancara dapat dilakukan dengan akademisi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Soedirman.

11. Kepala Desa

Keberhasilan pembangunan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, salah satu

partisipasi yang akan diwawancarai adalah Kepala Desa beserta Kepala Urusan Perencanaan.

12. Penyuluh perikanan

Penyuluh perikanan merupakan ujung tombak pembangunan kelautan dan perikanan di lapangan. Mereka bertugas mendampingi pembudi daya ikan dalam mengakses informasi mengenai pasar, teknologi, permodalan, bantuan pemerintah, serta dalam penguatan kelembagaan usaha. Oleh karena itu, penyuluh perikanan yang memiliki wilayah kerja di lokasi penelitian akan dijadikan salah satu partisipan.

13. Perwakilan pembudi daya ikan

Pembudi daya ikan menjadi sasaran utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana model *collaborative governance* memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan mereka, pembudi daya ikan juga dijadikan partisipan penelitian. Responden yang akan diwawancarai meliputi ketua atau perwakilan pengurus kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan) serta pengurus Koperasi Mina Satya Panembangan.

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan lapangan bagaimana proses *collaborative governance* yang terjadi di lokasi penelitian, kegiatan usaha pemberdayaan pembudi daya ikan yang dilakukan oleh para aktor, dan dampak yang dihasilkan. Penulis akan berada di lokasi penelitian dalam beberapa waktu sampai diperolehnya data yang dibutuhkan. Sedangkan diskusi kelompok terpumpun dilakukan untuk mengkonfirmasi peran para aktor dalam proses *collaborative governance* pemberdayaan pembudi daya ikan di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dan Desa Petarangan Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas.

Untuk memastikan validitas data kualitatif yang diperoleh, dilakukan triangulasi. Proses triangulasi ini melibatkan pengecekan silang antara data hasil wawancara dengan data dari observasi dan studi dokumentasi.

C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi rekaman wawancara, catatan observasi, dan hasil studi pustaka. Seluruh data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verification*). Tahap penarikan kesimpulan bertujuan menghasilkan generalisasi atau kesimpulan, sekaligus melakukan interpretasi terhadap data spesifik dengan mendeskripsikan setiap pokok permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori yang sesuai dengan tema, konsep, atau kesamaan karakteristik. Khusus untuk penelitian kualitatif berbasis studi kasus, data yang dianalisis harus saling terkait, dan tidak menggunakan unit empiris yang telah ada sebelumnya atau kategorisasi teoritis dari data. Penulis menganalisis situasi yang terjadi, mengolah data, serta menghubungkan data relevan untuk membangun pemahaman terhadap kasus spesifik.

Langkah-langkah analisis data dan informasi dari hasil wawancara maupun observasi lapangan dilakukan melalui empat tahapan:

1. Fase pengumpulan data atau pencatatan lapangan

Penulis mencatat, merekam, atau memotret informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi mendalam, serta studi dokumen.

2. Fase reduksi data dan penyusunan catatan penelitian

Seluruh catatan lapangan ditulis ulang secara rapi dan sistematis. Proses ini dilakukan segera setelah pengumpulan data agar informasi tetap segar dan tidak menumpuk.

3. Fase pengelompokan data sejenis

Data yang memiliki kesamaan dikategorikan secara tematik dan subtematik sesuai dengan kerangka pemikiran dan konsep penelitian.

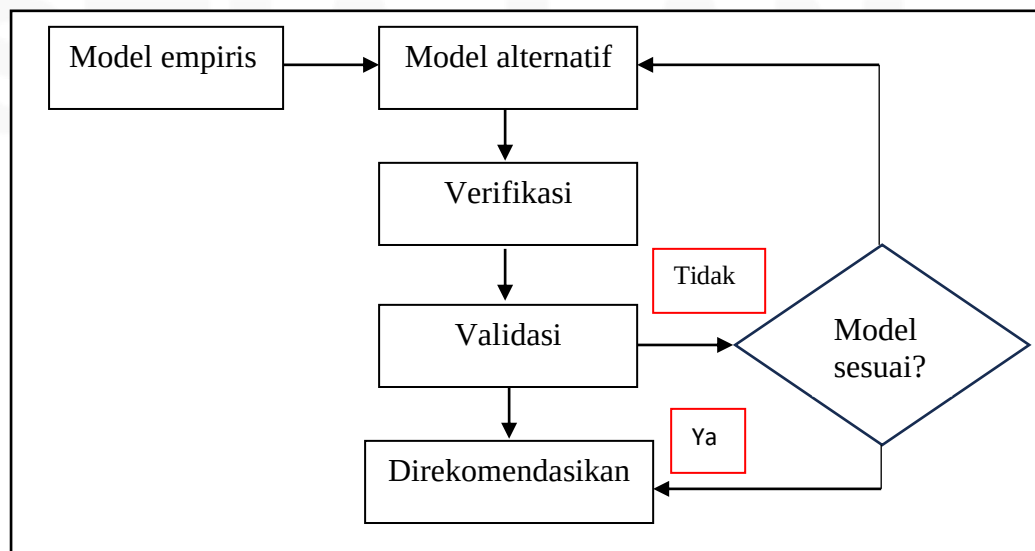
4. Fase interpretasi data

Penulis memberikan makna terhadap pendapat partisipan untuk menjawab pertanyaan penulisan dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

D. Prosedur Validasi Model

Pada rumusan masalah penelitian ini, salah satu tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan model *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Dalam penelitian yang bertujuan untuk membangun sebuah model, penting untuk melakukan validasi sebelum menerapkannya di lokasi penelitian. Sebuah model dianggap valid jika hasil yang diperoleh dapat diterima oleh pengguna dan mampu menjelaskan realitas implementasinya. Sebelum melakukan validasi model, langkah pertama adalah verifikasi, yaitu proses untuk memastikan bahwa asumsi yang ada adalah benar. Secara sederhana, prosedur validasi model dalam penelitian ini disajikan seperti yang terlihat pada gambar 3.2 berikut.

Gambar 3. 1 Prosedur Validasi Model *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Pembudi Daya Ikan



Sumber: Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan gambar di atas, prosedur validasi model *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan secara teknis dilakukan oleh penulis dengan para *stakeholder* yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas melalui kegiatan diskusi kelompok terpusat. Penulis memaparkan model empiris dan model alternatif. Selanjutnya, *stakeholder* dan pakar atau narasumber melakukan verifikasi dari setiap tahapan pemodelan tersebut, dan jika dapat diterima maka dapat dianggap model sudah valid dan penulis dapat merekomendasikan model tersebut.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data, sehingga proses penelitian dapat berlangsung secara lebih terstruktur dan sistematis. Dalam penelitian kualitatif, penulis sendiri berperan sebagai instrumen utama. Beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Panduan wawancara, sebagai salah satu instrumen penelitian, berisi daftar pertanyaan yang di penelitian sebaiknya tidak hanya menanyakan “apa” (*what*), tetapi juga “bagaimana” (*how*) dan “mengapa” (*why*). Pertanyaan “apa” bertujuan memperoleh informasi deskriptif, pertanyaan “bagaimana” untuk mendapatkan pemahaman eksplanatif, dan pertanyaan “mengapa” untuk pengetahuan eksploratif. Yin menekankan pentingnya pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” karena dianggap efektif dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Selain itu, jenis pertanyaan yang digunakan juga akan memengaruhi strategi pengumpulan data yang diterapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

1. Sumber Daya Alam

Kabupaten Banyumas terletak di Provinsi Jawa Tengah, berada di antara 7°15' dan 7°37' Lintang Selatan serta antara 108°39' dan 109°27' Bujur Timur. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 1.391,15 km², sekitar 4,05 persen dari total luas Provinsi Jawa Tengah.

Secara geografis, Kabupaten Banyumas berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Pemalang di utara, Kabupaten Cilacap di selatan, Kabupaten Cilacap dan Brebes di barat, serta Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen di timur. Ketinggian wilayah Banyumas bervariasi, mulai dari 14,31 meter hingga 233,5 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan, 331 Desa/Kelurahan (301 Desa, 30 Kelurahan). Semua kecamatan memiliki potensi sumber daya air dan lahan pertanian yang baik. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Banyumas berada dekat dari kaki Gunung Slamet. Pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak sekitar 3.400 meter di atas permukaan laut menjadi sumber air utama dan memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi. Sungai Serayu yang melintasi wilayah Banyumas berperan penting untuk irigasi pertanian, transportasi, dan perikanan.

Tabel 4. 1 Produksi Perikanan Budi Daya Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kolam (ton)	Sawah (ton)	Jumlah (ton)
1	Lumbir	49,09	-	49,09
2	Wangon	185,28	-	185,28
3	Jatilawang	318,79	-	318,79
4	Rawalo	168,95	-	168,95
5	Kebasen	329,95	-	329,95
6	Kemranjen	774,91	-	774,91
7	Sumpiuh	979,97	-	979,97
8	Tambak	175,40	-	175,40
9	Somagede	685,47	-	685,47
10	Kalibagor	148,77	-	148,77
11	Banyumas	171,31	-	171,31
12	Patikraja	91,27	-	91,27
13	Purwojati	162,65	-	162,65
14	Ajibarang	271,20	5,56	276,76
15	Gumelar	37,44	-	37,44
16	Pekuncen	194,63	2,78	197,41
17	Cilongok	635,48	79,81	715,29
18	Karanglewas	313,79	-	313,79
19	Kedungbanteng	926,11	-	926,11
20	Baturraden	422,11	-	422,11
21	Sumbang	194,38	-	194,38
22	Kembaran	1.343,79	-	1.343,79
23	Sokaraja	1.981,99	-	1.981,99
24	Purwokerto Selatan	424,99	-	424,99
25	Purwokerto Barat	239,15	-	239,15
26	Purwokerto Timur	376,90	-	376,90
27	Purwokerto Utara	219,25	-	219,25
	Banyumas	11.823,02	88,15	11.911,17

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (2024)

Luas lahan kolam air tenang 469,5 Ha, terdiri dari kolam pembesaran 424,5 Ha, dan kolam pembenihan 45 Ha. Sementara itu luas lahan sawah 63.581 Ha. Produksi yang dihasilkan 11.911.155 kg (11,9 ton) ikan konsumsi, dan 473.426.548 ekor benih. Komoditas utama yang dibudi dayakan berupa ikan air tawar seperti Gurame, Lele, Nila, Bawal, Nilem, Mujair, Tawes, Patin, dan Mas. Adapun produksi per tahun untuk masing-masing komoditas ikan tersebut adalah Gurame 4.062.067 kg, Lele 3.860.008 kg, Nila 1.348.322 kg, Bawal 1.056.449 kg, Nilem 702.324 kg, Mujair 516.163 kg, Tawes 227.561 kg, Patin 90.222 kg, dan Mas 45.484 kg.

Tabel 4. 2 Luas Kolam dan Produksi Ikan Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kolam Pembesaran		Kolam Pembenihan	
		Luas (Ha)	Produksi (Kg)	Luas (Ha)	Produksi (Ekor)
1	Lumbir	1,84	49.087	0,05	16.470
2	Wangon	0,61	185.283	0,42	326.890
3	Jatilawang	10,20	318.788	0,55	56.961
4	Rawalo	1,26	168.946	0,10	109.671
5	Kebasen	12,08	329.949	0,03	248.051
6	Kemranjen	24,00	774.905	3,07	23.275.017
7	Sumpiuh	4,97	979.967	0,03	269.450
8	Tambak	0,97	175.399	0,10	386.954
9	Somagede	1,92	685.470	1,54	253.376
10	Kalibagor	2,09	148.765	0,21	531.713
11	Banyumas	2,17	171.311	0,05	3.875
12	Patikraja	7,09	91.271	0,07	28.206
13	Purwojati	1,16	162.653	0,05	4.642
14	Ajibarang	26,79	276.761	0,03	25.995
15	Gumelar	3,10	37.439	0,01	86.382
16	Pekuncen	22,80	197.410	1,22	105.187.699

17	Cilongok	27,33	715.291	4,26	54.093. 143
18	Karanglewas	30,66	313.793	5,22	18.429. 104
19	Kedungbanteng	51,50	926.110	16,12	124.00 4.629
20	Baturraden	23,30	422.110	6,19	121.69 6.887
21	Sumbang	21,07	194.384	3,21	20.349. 069
22	Kembaran	49,86	1.343.787	2,08	3.120.9 53
23	Sokaraja	73,88	1.981.990	0,19	398.10 6
24	Purwokerto Selatan	2,99	424.988	0,05	3.427
25	Purwokerto Barat	12,58	239.150	0,03	2.124
26	Purwokerto Timur	3,30	376.901	0,02	39.958
27	Purwokerto Utara	4,98	219.247	0,10	477.79 6
	Banyumas	424,50	11.911.155	45,00	473.42 6.548

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (2024)

Dengan kondisi sumber daya alam yang subur, pola pembangunan yang digunakan di Kabupaten Banyumas adalah pendekatan berbasis sumber daya. Meskipun demikian, pola pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Banyumas dapat mengkombinasikan antara ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, seperti air dan lahan yang luas dengan penerapan inovasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, khususnya Dinas Perikanan dan Peternakan terus menjalin kerja sama dan membuka diri dengan sumber inovasi perikanan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perguruan Tinggi, dan sektor bisnis.

“Kabupaten Banyumas merupakan salah satu sentra produksi ikan Gurame di Jawa Tengah, namun sejak tahun 2018 produksinya menurun karena adanya serangan penyakit jamur *aeromonas* yang menyerang induk dan benih Gurame. Untuk itu, kami sangat mengharapkan adanya bantuan induk unggul dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tahan terhadap penyakit tersebut” ujar Kepala Bidang Perikanan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.

Tabel 4. 3 Produksi Jenis Ikan Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Ikan				
		Tawes (Kg)	Gurame (Kg)	Karper (Kg)	Nilem (Kg)	Bawal (Kg)
1	Lumbir	794	938	751	-	39.538
2	Wangon	3.494	29.621	1.862	3.972	3.112
3	Jatilawang	5.512	18.417	1.333	7.822	165.804
4	Rawalo	2.934	38.666	2.874	8.611	-
5	Kebasen	5.340	153.044	2.938	17.558	-
6	Kemranjen	11.955	472.063	1.370	7.192	-
7	Sumpiuh	16.775	211.331	764	10.310	17.299
8	Tambak	2.226	20.597	942	3.616	8.075
9	Somagede	12.250	185.641	1.660	17.594	30.252
10	Kalibagor	2.701	38.751	458	1.432	-
11	Banyumas	3.272	32.977	1.012	4.613	-
12	Patikraja	1.488	13.373	2.772	29.568	-
13	Purwojati	2.648	54.131	1.251	6.661	-
14	Ajibarang	3.695	83.868	2.463	11.128	13.969
15	Gumelar	625	7.091	389	4.116	-
16	Pekuncen	2.906	10.879	3.743	13.419	9.792
17	Cilongok	10.303	280.775	1.574	17.145	28.440
18	Karanglewas	11.017	74.077	2.588	24.563	65.384
19	Kedungbanteng	22.965	190.808	4.961	221.708	100.471
20	Baturraden	19.335	81.177	529	105.277	58.351
21	Sumbang	15.850	33.155	2.947	30.051	21.211
22	Kembaran					

		21.258	734.775	1.523	8.023	57.459
23	Sokaraja	30.887	1.012.095	1.507	30.389	77.772
24	Purwokerto Selatan	6.616	90.759	546	10.629	107.891
25	Purwokerto Barat	3.538	81.457	825	26.559	52.783
26	Purwokerto Timur	3.818	61.682	989	55.694	138.888
27	Purwokerto Utara	3.359	49.919	913	24.674	59.958
	Banyumas	227.561	4.062.067	45.484	702.324	1.056.449

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (2024)

Dengan kondisi sumber daya alamnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang 4 besar Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Banyumas sebesar 7.952,63 milyar, dibawah industri pengolahan 17.883,74 milyar, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10.512,35 milyar, dan kontruksi sebesar 8.996,17 milyar.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 menempati urutan tiga terbesar di Jawa Tengah dengan jumlah 1.828.573 jiwa (laki-laki sejumlah 919.879 orang dan perempuan sejumlah 908.694 orang), pada urutan nomor satu adalah Kabupaten Brebes dan kedua adalah Kabupaten Cilacap. Dengan menggunakan garis kemiskinan Rp 479.027/kapita/bulan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas sebanyak 216.500 jiwa, dan merupakan terbanyak kedua setelah Kabupaten Brebes. Sedangkan berdasarkan persentasenya, penduduk miskin Kabupaten Banyumas berada di urutan kesembilan terbanyak dengan angka 12,53%.

Dari jumlah penduduk tersebut, yang termasuk usia angkatan kerja sejumlah 1.256.947 orang (68,74 %). Pada bulan Agustus 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,35 persen dan merupakan urutan ke-5 terbesar di Jawa Tengah. Urutan pertama adalah Kabupaten Brebes dan urutan kedua adalah Kabupaten Cilacap. Adapun rata-rata lama sekolah 7, 87 tahun (setingkat SLTP

kelas 2). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori tinggi pada nilai 73,96 dan menjadi urutan ke-16 di Provinsi Jawa Tengah.

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Cilongok dengan 127.607 orang. Jumlah pelaku utama kelautan dan perikanan sebanyak 2.165 orang, terdiri dari pembudi daya ikan sejumlah 1.951 orang, dan pengolah dan pemasar ikan sejumlah 214 orang. Pelaku utama kelautan dan perikanan tersebut tergabung dalam 145 kelompok, yaitu 131 kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan) dan 14 kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar).

Banyaknya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas, salah satunya dikarenakan upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah kurang optimal. Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi kurang efektif, tanpa adanya program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat miskin menjadi tergantung dengan program bantuan tersebut, dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan tetap. Sehingga jumlah penduduk miskin cenderung stagnan dari tahun ke tahun.

3. Kelembagaan Pemerintah, Pendidikan, Kesehatan, Permodalan, dan Pasar

Kelembagaan pemerintah di Kabupaten Banyumas, khususnya yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, tergolong sangat lengkap. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banyumas mencakup Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Desa, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Di bidang pendidikan, Kabupaten Banyumas tidak kekurangan sekolah. Terdapat 627 unit Taman Kanak-Kanak (TK), 166 unit Raudhatul Athfal (RA) PAUD, 811 unit Sekolah Dasar, 192 unit Madrasah Ibtidaiyah, 166 unit Sekolah Menengah Pertama, 65 unit Madrasah Tsanawiyah, 38 unit Sekolah Menengah Atas, 80 unit Sekolah Menengah Kejuruan, 32 unit Madrasah Aliyah, dan 24 unit Perguruan Tinggi.

Di bidang Kesehatan, fasilitas kesehatan di Kabupaten Banyumas juga tergolong lengkap. Tersedia rumah sakit sejumlah 25 unit, poliklinik 64 unit, puskesmas 40 unit, puskesmas pembantu 36 unit, poskesdes 306 unit, apotek 304 unit, dan posyandu 613 unit.

Untuk lembaga perbankan, jumlah kantor cabang bank yang ada di Kabupaten Banyumas sejumlah 26 unit. Terdiri dari 21 bank umum konvensional dan 5 bank syariah. Bank umum konvensional terdiri dari 5 bank persero, 1 bank pembangunan daerah, dan 15 bank swasta. Perbankan berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana yang membantu meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, total posisi pinjaman dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan oleh bank umum dan BPR di Kabupaten Banyumas mencapai Rp 19.213 milyar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 13.050 milyar (67,92%) dialokasikan untuk pendanaan usaha.

Jumlah pinjaman yang diberikan pihak perbankan untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sejumlah Rp 908.533,89 juta rupiah dari total 13.049.751,15 juta rupiah, lebih kecil dari sektor perdagangan besar (6.139.590,40 juta) dan industri pengolahan (3.686.745,58 juta). Adapun suku bunga pinjaman yang diberikan berkisar antara 9-11 % per tahun.

Selain perbankan, lembaga usaha dan permodalan yang dapat diandalkan adalah koperasi. Pada tahun 2023, jumlah koperasi di Kabupaten Banyumas tercatat ada sejumlah 624 unit. Dari jumlah tersebut, yang aktif melakukan kegiatan usaha hanya 361 unit. Terdiri dari 84 koperasi simpan pinjam, 22 koperasi jasa, 68 koperasi produsen, 397 koperasi konsumen, dan 33 koperasi

pemasaran. Untuk kegiatan pemasaran, di Kabupaten Banyumas terdapat 26 pasar rakyat, 1 pusat perbelanjaan, dan 213 pasar swalayan/ mini market.

4. Gambaran Desa Panembangan Kecamatan Cilongok

Desa Panembangan terletak di sebelah barat ibu kota Kabupaten Banyumas, dengan jarak sekitar 17 km. Secara administratif, desa ini masuk wilayah Kecamatan Cilongok dan berjarak sekitar 2 km dari ibu kota kecamatan. Desa Panembangan memiliki topografi yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara: Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok
- Timur: Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok
- Selatan: Desa Pernasidi dan Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok
- Barat: Desa Karanglo dan Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok

Desa Panembangan memiliki luas 276.972 hektar (Ha), topografi rata-rata berada pada 220-270 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 29⁰C. Adapun rincian penggunaan lahan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Penggunaan Lahan di Desa Panembangan

No	Fungsi	Luas (Ha)
1	Jalan	13,758
2	Sawah	137
3	Ladang/ Perkebunan	46,154
4	Kolam ikan/ empang	0,95
5	Pemukiman / Perumahan	52,317
6	Bangunan Umum	3,176
7	Kuburan	4,59
8	Hutan/ Tanah Negara	-
9	Lainnya	19,027
Total		276, 972

Sumber: Monografi Desa (2024)

Berdasarkan data tersebut di atas, mata pencaharian utama penduduk Desa Panembangan adalah petani padi. Kemudian ada pekebun, dan pembudi daya ikan. Dari 137 Ha lahan sawah, 25 Ha diantaranya digunakan untuk usaha mina padi. Mina padi adalah usaha budi daya ikan bersama padi di sawah. Caranya

dengan membuat saluran caren di sekeliling sawah dengan lebar 2 meter dan kedalaman 1 m. Dengan demikian, sebagian petani juga brprofesi sebagai pembudi daya ikan. Dalam satu siklus usaha, petani dapat menghasilkan padi dan ikan secara bersamaan.

Sistem budi daya mina padi tersebut sama seperti yang dikemukakan oleh Hakan Berg. et al (2024) dalam penelitian terdahulu di Delta Mekong, Vietnam. Petani padi-ikan yang memiliki banyak ikan memiliki hasil panen padi yang jauh lebih tinggi daripada petani yang memiliki sedikit atau tidak memiliki ikan, terutama selama panen kedua ketika padi ditanam bersama ikan.

Secara administratif, Desa Panembangan terbagi menjadi 5 dusun, 3 Rukun Warga (RW), dan 25 Rukun Tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut:

- Dusun I: 1 RW dan 5 RT
- Dusun II, III, dan IV: masing-masing 1 RW dan 8 RT
- Dusun V: 1 RW dan 12 RT

Hingga 31 Desember 2021, jumlah penduduk Desa Panembangan mencapai 5.366 jiwa, terdiri dari 2.756 laki-laki dan 2.610 perempuan. Jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 1.754 KK. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Desa Panembangan Menurut Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)
1	0 – 4	336
2	5 – 9	374
3	10 – 14	434
4	15 – 19	418
5	20 – 24	421
6	25 – 29	404
7	30 – 34	345
8	35 – 39	322
9	40 – 44	345
10	45 – 49	410
11	50 – 54	397
12	55 – 59	361
13	60 – 64	286

14	65 – 69	220
15	70 – 74	156
16	75 - ke atas	345
Jumlah		5.366

Sumber: Monografi Desa (2024)

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas penduduk Desa Panembangan tidak sekolah dan hanya tamat SD/ sederajat sejumlah 3.839 orang (71,54 %). Hal tersebut sesuai dengan karakteristik masyarakat miskin yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu mata pencahariannya di sektor pertanian dan berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan penduduk Desa Panembangan disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Panembangan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak/belum sekolah	1.379
2	Tidak/belum tamat SD/MI	513
3	Tamat SD/ sederajat	1947
4	Tamat SLTP/ sederajat	736
5	Tamat SLTA/ sederajat	633
6	Tamat D I / D II	17
7	Tamat Akademi / DIII / S. Muda	10
8	Tamat D IV / S1	126
9	Tamat S-2	5
10	Tamat S-3	-
Jumlah		5.366

Sumber: Monografi Desa (2024)

Masyarakat Desa Panembangan yang masuk kategori miskin tercatat di Dinas Sosial ada sejumlah 270 orang. Masyarakat miskin tersebut mengikuti program pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, masih ada juga masyarakat yang belum memiliki sarana MCK sendiri sejumlah 140 orang. (Pramono et al., 2023).

Roda perekonomian Desa Panembangan ditopang oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk usia produktif (15–55 tahun) adalah 3.057 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Penduduk usia 15–55 tahun yang masih menempuh pendidikan: 552 orang
- Penduduk usia 15–55 tahun yang bekerja penuh: 1.864 orang
- Penduduk usia 15–55 tahun yang bekerja tidak tetap: 641 orang

Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	44
2	T N I	5
3	Polri	4
4	Swasta	1.205
5	Wiraswasta	232
6	Pedagang	181
7	T a n i	311
8	Buruh Tani	39
9	Pertukangan	34
10	Jasa	10
11	Peternak	6
Jumlah		

Sumber: Monografi Desa (2024)

Sektor ekonomi yang paling dominan di Desa Panembangan adalah sektor pertanian. Hal ini terlihat dari distribusi penduduk berdasarkan pekerjaan dan jenis usaha yang ada di desa, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 8 Jumlah Tenaga Kerja sesuai Jenis Usaha

No	Pekerjaan	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1	Pertanian	743	1.406
2	Peternakan	15	30
3	Perikanan	16	204
4	Perdagangan	134	175
5	Industri Pangan	4	8
6	Industri Pakaian	2	5
7	Industri Kayu	18	78
8	Industri kerajinan tangan dari barang bekas	1	12
9	Jasa Perbengkelan	8	12
Jumlah			

Sumber: Monografi Desa (2024)

Kepemilikan dari luas lahan sawah tersebut, sebanyak 135,5 Ha dimiliki oleh penduduk setempat sejumlah 743 orang. Sedangkan 1,8 Ha dimiliki oleh penduduk luar desa sejumlah 17 orang. Lahan pertanian berupa sawah seluas 137 Ha, dan tanaman palawija 1 Ha. Lahan pertanian di Desa Panembangan terdiri dari sawah seluas 137 Ha dan tanaman palawija seluas 1 Ha. Lahan sawah tersebut dikelola oleh enam kelompok tani, yaitu:

- Kridoyuwono I: 131 anggota, 25,6 Ha
- Kridoyuwono II: 164 anggota, 19,2 Ha
- Kridoyuwono III: 148 anggota, 20,4 Ha
- Kridoyuwono IV: 89 anggota, 20,8 Ha
- Kridoyuwono V: 16 anggota, 17,3 Ha
- Kridoyuwono VI: 150 anggota, 30,2 Ha

Kelompok Kridoyuwono I, yang mengelola lahan sawah seluas 25,6 Ha, mengembangkan diversifikasi usaha berupa budi daya ikan dengan sistem mina padi. Awalnya, kelompok ini menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, melalui pendampingan penyuluh perikanan, Kridoyuwono I berkembang menjadi lima kelompok perikanan dengan usaha mina padi, yaitu:

- Pokdakan Krido Yuwono (A): 4 Ha, 15 anggota
- Pokdakan Mina Sayudan (B): 6 Ha, 27 anggota
- Pokdakan Sukan Makmur (C): 5 Ha, 20 anggota
- Pokdakan Mina Irbi (D): 5 Ha, 33 anggota
- Pokdakan Mina Prayadita (E): 5 Ha, 13 anggota

Selain mina padi, usaha budi daya ikan juga dilakukan di kolam oleh empat kelompok, yaitu:

- Pokdakan Mina Mandiri: 0,35 Ha, 22 anggota
- Pokdakan Prukut Ulam Sari: 0,35 Ha, 21 anggota
- Pokdakan Berkah Randu Alas: 0,35 Ha, 26 anggota
- Pokdakan Langgas (Ikan Hias): 0,1 Ha, 16 anggota

Secara keseluruhan, 9 kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan) mengelola lahan seluas 26,5 Ha dengan 214 anggota dari total 313 orang. Jumlah unit usaha mencapai 417 caren mina padi dan 514 petak kolam.

Selain kelompok pembudi daya ikan tersebut di atas, juga terdapat kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) ikan. Terdapat 4 Poklahsar, yaitu Ummi Mandiri dengan jumlah anggota 19 orang, produk unggulannya terdiri dari abon lele, realeey snack, keripik baby fish, dan ikan frozen. Poklahsar Berkah Momji dengan 15 anggota, produk unggulan berupa nila krispi, abon nila, serundeng nila, dan pepes nila. Poklahsar Bunda Madani dengan 20 anggota, produk unggulannya nila siap goreng, dan dendeng nila. Poklahsar Berlian Pajhero dengan jumlah anggota 10 orang, produk unggulan berupa ikan bumbu. Selain itu juga terdapat kelompok pembudi daya ikan Magot BSF, yaitu Kelompok Putra Surung dengan jumlah anggota 10 orang.

Untuk memperkuat kelembagaan pembudi daya ikan, telah diinisiasi pembentukan Koperasi Mina Satya Panembangan. Jumlah anggota pada saat awal pembentukan sejumlah 60 orang berasal dari 14 kelompok. Saat ini jumlah anggotanya telah bertambah menjadi 82 orang.

5. Gambaran Umum Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan

Kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas berupa bantuan pemerintah dan pelatihan aspirasi. Bantuan pemerintah berasal dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Dinas Kelautan dan Perikanan), dan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Dinas Perikanan dan Peternakan). Sedangkan pelatihan aspirasi dari anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan anggaran yang melekat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal. Selain itu, ada juga kegiatan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh 11 orang penyuluh perikanan yang merupakan pegawai Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bantuan pemerintah yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk bantuan pakan, dan bantuan benih ikan. Bantuan pakan dari Balai Besar Perikanan Budi daya Air Payau (BBPBAP) Jepara pada tahun 2022 sejumlah 1,5 ton kepada Pokdakan Mina Mandiri. Bantuan benih Ikan Nila dari Balai Besar Perikanan Budi daya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi pada tahun 2022 sejumlah 10.000 ekor kepada Pokdakan Berkah Randu Alas .

Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berupa percontohan budi daya Ikan Nila sistem mina padi sejumlah 1 paket (benih dan pakan) dengan anggaran 1 milyar pada lahan seluas 25 Ha. Sedangkan bantuan pemerintah dari Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perikanan dan Peternak berupa paket budi daya Ikan Lele sistem Bioflok, paket

budi daya Ikan Gurame, dan paket budi daya Ikan Nila. Paket bantuan tersebut rata-rata senilai dua puluh dua juta rupiah.

Untuk pelatihan aspirasi, dalam 1 tahun terdapat 2-3 kali kegiatan dengan peserta sejumlah 30 orang setiap kali pelaksanaan. Materi yang diberikan berupa materi teknis budi daya ikan seperti Ikan Gurame, dan budi daya Ikan Lele sistem bioflok. Adapun instruktur yang memberikan pelatihan berasal dari BPPP Tegal.

Penentuan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) bantuan pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui mekanisme pengusulan proposal dari kelompok yang disampaikan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan, kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Kampung Perikanan Budi Daya Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Ditjen Perikanan Budi Daya melakukan penilaian dan seleksi, sehingga ditetapkan kelompok pembudi daya ikan calon penerima, sampai pada disalurkan bantuan pemerintah tersebut. Sehingga proses pengusulannya bersifat *bottom up*. Sedangkan untuk pemberian bantuan pemerintah dari provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan mekanisme pengusulan proposal oleh penyuluh perikanan melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten, kemudian Tim DKP Provinsi melakukan survey terhadap usulan lokasi dalam proposal tersebut. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang disusun, Desa Panembangan Kecamatan Cilongok masuk dalam kriteria. Sehingga terpilih menjadi lokasi percontohan usaha budi daya Ikan Nila sistem mina padi.

Untuk pemberian bantuan pokir penentuan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) sepenuhnya menjadi kewenangan anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang diatur melalui staf ahlinya. Sehingga seringkali penerima merupakan kelompok yang baru dibentuk, bukan kelompok yang selama ini dibina dan didampingi oleh penyuluh perikanan. Dampaknya, pembudi daya ikan yang telah lama melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan dan menjadi binaan penyuluh perikanan tidak mendapatkan bantuan.

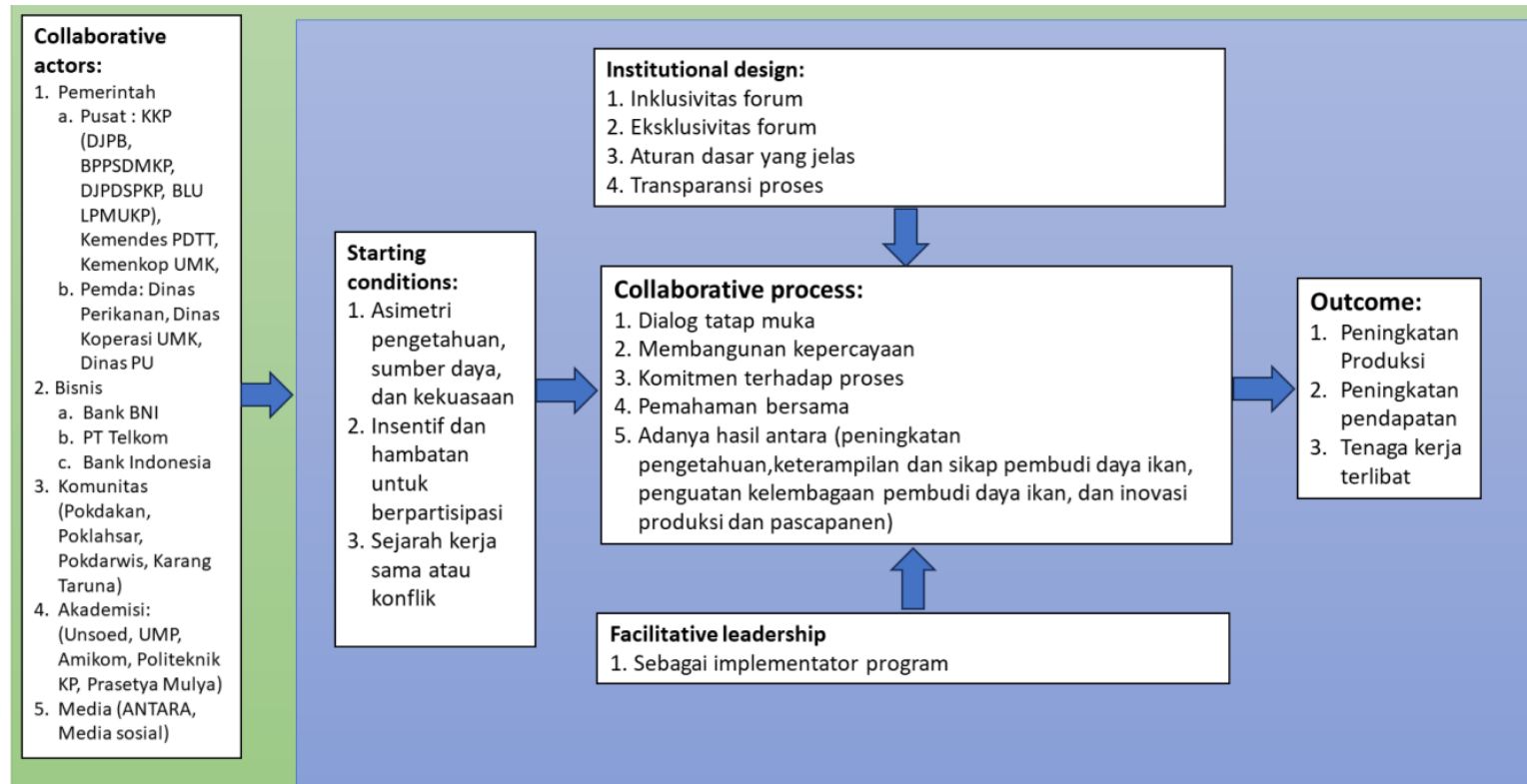
Namun demikian, pemberian bantuan ini tidak dibarengi dengan adanya peningkatan kompetensi pembudi daya ikan terlebih dahulu. Misalnya, pemberian bantuan pakan, tidak diawali dengan adanya kegiatan pelatihan tentang cara pembuatan pakan atau penyimpanan pakan agar tahan tidak berjamur.

“Anggaran APBD untuk Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas kecil, hampir tidak ada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Kegiatan yang ada berupa Pokir (kelompok pikir) aspirasi DPRD Kabupaten/Kota”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Banyumas mencapai 3,7 Triliyun. Namun demikian sekitar 70-75 % APBD tersebut digunakan untuk biaya tetap. Sehingga untuk biaya pembangunan hanya 25 % atau sekitar 925 Milyar. Untuk itu, kegiatan pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas berupa bantuan induk Gurame, pendampingan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), penguatan kelembagaan pembudi daya ikan, dan monitoring kualitas air dan kesehatan ikan.

Pada tahun 2022, Kabupaten Banyumas terpilih menjadi lokasi Kampung Perikanan Budi Daya (KPB) dan Desa Perikanan Cerdas. Ke-dua program tersebut diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Model *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Banyumas saat ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. 1 Model *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Banyumas saat ini



Sumber: Diolah Penulis (2024)

Pola kolaborasi para aktor dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya berjalan dalam kerangka kolaborasi yang setara, melainkan masih didominasi oleh peran pemerintah. Pemerintah, khususnya KKP berperan sebagai sektor penggerak utama (*leading sector*) yang menjalankan fungsi perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, pengalokasian anggaran, serta pengendalian kegiatan pemberdayaan. Dominasi peran pemerintah tersebut menyebabkan pola kolaborasi yang terbentuk cenderung bersifat *top-down*, dengan ruang partisipasi aktor lain yang masih terbatas.

Dalam model ini, masyarakat pembudi daya ikan berperan terutama sebagai penerima manfaat program dan pelaksana teknis kegiatan di lapangan. Meskipun keterlibatan masyarakat telah ada, partisipasi tersebut belum sepenuhnya mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. Partisipasi masyarakat masih bersifat administratif dan operasional, belum berkembang ke arah partisipasi deliberatif yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam perumusan masalah, penentuan kebijakan, dan evaluasi program secara bersama-sama. Sementara itu, aktor non-pemerintah seperti PT Telkom, Bank BNI, akademisi (Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Universitas Amikom, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Universitas Prasetya Mulya), dalam model ini belum terintegrasi secara sistematis ke dalam jejaring kolaborasi. Keterlibatan aktor-aktor tersebut masih bersifat parsial, temporer, dan umumnya berbasis proyek, sehingga belum mampu memperkuat keberlanjutan kolaborasi.

Pola hubungan antar-aktor yang tergambar dalam model tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan peran dan kewenangan. Hubungan yang terbangun lebih bersifat instruktif dibandingkan kolaboratif, di mana alur koordinasi didominasi oleh pemerintah. Mekanisme dialog, negosiasi, serta pengambilan keputusan bersama antar-aktor masih terbatas, sehingga kolaborasi yang terjadi lebih menyerupai koordinasi program dan kemitraan administratif,

bukan kolaborasi substantif yang dilandasi oleh kepercayaan, kesetaraan, dan tujuan bersama.

Dari sisi mekanisme proses, model *collaborative governance* yang berlangsung saat ini belum didukung oleh pelembagaan forum kolaboratif yang permanen. Tidak terdapat mekanisme bersama yang secara sistematis mengatur proses perumusan masalah, penyusunan solusi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara kolaboratif. Kondisi ini mengakibatkan kolaborasi yang terbangun belum mampu menciptakan rasa kepemilikan bersama (*shared ownership*) dan tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) di antara para aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan.

Implikasi dari model kolaborasi yang demikian adalah rendahnya tingkat kemandirian masyarakat pembudi daya ikan, terbatasnya inovasi lokal yang berkembang, serta masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Selain itu, pengetahuan lokal dan modal sosial masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian integral dari proses pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan lebih menekankan pada pencapaian output program jangka pendek dibandingkan pada penguatan kapasitas, kemandirian, dan kesadaran kritis masyarakat dalam jangka panjang.

Secara substantif, model tersebut menunjukkan bahwa praktik *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas masih berada pada tahap awal (*early stage collaboration*). Model ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip utama *collaborative governance*, seperti partisipasi yang setara, proses deliberatif, pencapaian konsensus, serta pembangunan kepercayaan antaraktor. Oleh karena itu, model eksisting ini menjadi dasar justifikasi akademik atas perlunya pengembangan model *collaborative governance* yang lebih ideal dan kontekstual, sekaligus mendorong pergeseran pendekatan dari *government-centered* menuju *network-based governance* dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, banyaknya aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas, baik dari unsur pemerintah maupun akademisi, belum dapat dikatakan efektif dalam menghasilkan pemberdayaan yang berkelanjutan. Secara teoretis, keterlibatan multiaktor merupakan prasyarat utama *collaborative governance* karena memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan kewenangan lintas sektor. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa kuantitas aktor yang tinggi tidak diiringi oleh kualitas kolaborasi yang memadai, sehingga kontribusi masing-masing aktor belum terakumulasi secara optimal dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian pembudi daya ikan.

Dari sisi aktor pemerintah, banyaknya perangkat pemerintah pusat yang terlibat justru cenderung memperkuat pola kerja sektoral dan administratif. Peran dan fungsi antarinstansi belum terintegrasi dalam satu kerangka tujuan bersama yang jelas, melainkan berjalan berdasarkan mandat birokratis masing-masing. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kolaborasi antar-pemerintah masih berada pada level koordinasi formal, bukan kolaborasi substantif. Dalam perspektif Ansell dan Gash, situasi tersebut mencerminkan ketidaksiapan desain kelembagaan kolaborasi, di mana ketimpangan kewenangan dan dominasi aktor pemerintah menghambat terciptanya proses deliberatif yang setara.

Sementara itu, keterlibatan akademisi dalam pemberdayaan pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas menunjukkan potensi besar namun belum dimanfaatkan secara strategis. Akademisi memiliki fungsi penting sebagai produsen pengetahuan, inovator teknologi, serta fasilitator peningkatan kapasitas masyarakat. Akan tetapi, peran tersebut dalam praktik masih bersifat episodik dan berbasis kegiatan jangka pendek, seperti penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan akademisi belum terinstitusionalisasi dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga hasil riset dan rekomendasi akademik belum menjadi rujukan utama dalam desain dan implementasi program pemberdayaan.

Dalam kerangka Emerson, Nabatchi, dan Balogh, kondisi ini menunjukkan lemahnya *capacity for joint action* dan *shared motivation* antaraktor. Meskipun aktor yang terlibat relatif banyak, tidak terdapat mekanisme yang mampu mengonsolidasikan sumber daya, menyelaraskan kepentingan, dan membangun komitmen bersama secara berkelanjutan. Akibatnya, kolaborasi yang terbentuk belum menghasilkan *shared ownership* dan *shared responsibility*, baik di kalangan aktor pemerintah, akademisi, maupun masyarakat pembudi daya ikan.

Dengan demikian, efektivitas pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas tidak ditentukan oleh banyaknya aktor yang terlibat, melainkan oleh sejauh mana peran dan fungsi aktor-aktor tersebut terkoordinasi, terintegrasi, dan dilembagakan dalam satu sistem kolaborasi yang jelas. Temuan ini menegaskan bahwa praktik *collaborative governance* di Kabupaten Banyumas masih berada pada tahap awal, di mana kolaborasi belum berkembang menjadi jejaring kebijakan yang setara dan berorientasi pada transformasi kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar pelibatan aktor secara kuantitatif menuju penguatan kualitas kolaborasi melalui kejelasan peran, mekanisme kerja bersama, dan kepemimpinan fasilitatif yang mampu mengorkestrasi kontribusi multiaktor secara efektif.

B. Faktor-Faktor Penyebab *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Banyumas belum Optimal

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dianalisis menggunakan pendekatan teori Ansell dan Gash. Teori ini menekankan lima komponen utama yang digunakan untuk menilai hambatan dan peluang dalam pemberdayaan pembudi daya ikan, yaitu: kondisi awal, proses kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan hasil.

Kondisi awal mencakup ketidakseimbangan dalam hal pengetahuan, sumber daya, dan kekuasaan, insentif serta hambatan untuk berpartisipasi, serta sejarah kerja sama atau konflik sebelumnya. Proses kolaborasi meliputi dialog

tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, serta tercapainya pemahaman bersama di antara para pihak yang terlibat. Desain kelembagaan mencakup inklusivitas partisipatif, eksklusivitas forum yang tepat, aturan dasar yang jelas, dan transparansi dalam proses pelaksanaan.

1. Kondisi awal (*Starting condition*)

a. Asimetri Pengetahuan, Sumber Daya, dan Kekuasaan (*Power resource knowledge asymmetries*)

Pembudi daya ikan masih menghadapi berbagai ketimpangan dalam proses kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain. Dari sisi akses informasi dan teknologi, banyak pembudi daya ikan belum memperoleh informasi teknis maupun peluang program secara tepat waktu akibat keterbatasan jaringan komunikasi dan minimnya pelatihan berbasis digital. Selain itu, ketimpangan juga terlihat dalam aspek modal dan fasilitas, di mana pihak swasta maupun pemerintah umumnya memiliki kekuatan permodalan serta sarana produksi yang lebih memadai, sedangkan pembudi daya ikan masih mengandalkan peralatan yang terbatas. Kondisi ini diperparah dengan tingginya ketergantungan pembudi daya ikan terhadap peran penyuluh perikanan untuk memahami dan mengikuti program yang tersedia, sehingga apabila penyuluh perikanan kurang aktif dalam pendampingan, pembudi daya ikan berisiko mengalami keterlambatan dalam penerapan program. Oleh karena itu, pembudi daya ikan berharap adanya upaya yang lebih nyata untuk menyeimbangkan kondisi tersebut, antara lain melalui pendampingan yang merata, pemberian subsidi peralatan produksi, serta penyelenggaraan pelatihan yang berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pak Anto selaku perwakilan ketua kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan).

“Ketidakseimbangan itu memang ada, tapi kami melihat program pemberdayaan masyarakat ini justru mulai membuka jalan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Dengan pendampingan yang berkelanjutan dan kolaborasi yang transparan, kami optimis bisa lebih seimbang ke depannya.”

Indikasi pertama terlihat dari dominasi pemerintah atau lembaga pengelola program. Instansi pelaksana seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Perikanan dan Peternakan, maupun Pemerintah Desa memegang kontrol utama dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menjadikan pembudi daya ikan lebih sering diposisikan sebagai objek penerima manfaat dibandingkan sebagai subjek aktif yang turut serta dalam perencanaan program.

Selanjutnya, ketidakmerataan akses informasi dan teknologi juga menjadi persoalan yang menonjol. Tidak semua pembudi daya ikan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan, memanfaatkan teknologi digital, ataupun mengakses sarana produksi yang disediakan melalui program Desa Perikanan Cerdas. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara pembudi daya ikan yang memiliki keterhubungan lebih baik dengan program dan mereka yang belum terjangkau.

Ketimpangan juga tampak pada aspek permodalan dan akses pembiayaan. Program pemberdayaan cenderung lebih menguntungkan pembudi daya ikan yang telah memiliki modal awal, sementara pelaku usaha skala kecil atau tradisional mengalami kesulitan untuk beradaptasi maupun mengikuti ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu, kelembagaan lokal seperti kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan) masih relatif lemah dalam kapasitas negosiasi. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk menyuarakan kebutuhan secara efektif dalam forum perencanaan maupun evaluasi program. Lemahnya kelembagaan tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan program secara partisipatif dan berkelanjutan.

Hal senada disampaikan oleh penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan menyampaikan adanya ketidakseimbangan sumber daya dan kekuatan di antara para pemangku kepentingan. Kondisi ini cukup memengaruhi efektivitas proses kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan.

Ketidakseimbangan sumber daya tampak dari akses informasi dan teknologi yang tidak merata. Pemerintah maupun mitra akademik umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap perangkat teknologi, data, serta pelatihan

terbaru, sementara sebagian besar pembudi daya ikan khususnya yang berada di wilayah pinggiran masih menghadapi keterbatasan perangkat digital, jaringan internet, maupun keterampilan dasar penggunaan teknologi. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia juga tidak setara. Pembudi daya ikan yang tergolong besar atau kelompok yang telah lama aktif biasanya memiliki pengalaman, keterampilan, dan modal yang lebih kuat dibandingkan pembudi daya ikan pemula. Bahkan, terdapat perbedaan tingkat dinamika organisasi, di mana sebagian kelompok memiliki pengurus yang aktif, sedangkan kelompok lain masih pasif dan sangat bergantung pada dorongan eksternal.

Dari sisi pengambilan keputusan, ketimpangan juga terlihat jelas. Dalam forum pertemuan, suara pembudi daya ikan kecil kerap kali kurang mendapat perhatian karena dominasi pihak yang memiliki posisi struktural maupun pengetahuan teknis yang lebih tinggi. Akibatnya, kebijakan atau program lanjutan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Dampak dari ketidakseimbangan ini antara lain implementasi program yang tidak merata, menurunnya partisipasi pembudi daya ikan kecil yang merasa tidak relevan dengan arah program, serta hambatan dalam kolaborasi karena kerja sama cenderung bersifat satu arah.

Selain ketidakseimbangan sumber daya, terdapat pula ketidakseimbangan kekuatan di antara pemangku kepentingan. Dominasi pemegang kebijakan atau otoritas struktural membuat arah program, alokasi anggaran, dan pemilihan kelompok sasaran lebih sering ditentukan secara *top-down*. Kelompok pembudi daya ikan besar atau pelaku usaha yang telah mapan juga cenderung memperoleh prioritas dalam akses bantuan maupun kerja sama dengan pihak ketiga, sementara pembudi daya ikan pemula sering tertinggal. Di sisi lain, peran penyuluh perikanan dan fasilitator yang strategis di lapangan belum sepenuhnya diimbangi dengan kewenangan formal dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan aspirasi masyarakat pembudi daya ikan kadang tidak sampai ke tingkat pengambil keputusan karena terhambat oleh jalur birokrasi.

Di sisi lain, pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Kepala BPPSDMKP. Kelompok pembudi daya ikan dan pemerintah masih menjadi aktor dominan dalam pengelolaan program, sedangkan sektor swasta belum berperan optimal di luar kegiatan pemasaran. Ketidakseimbangan ini berimplikasi pada efektivitas kolaborasi serta keberlanjutan pemberdayaan, sehingga perlu adanya upaya memperkuat keterlibatan semua pihak secara lebih seimbang, khususnya dengan meningkatkan kontribusi swasta sebagai mitra strategis dalam rantai nilai perikanan.

Bentuk ketidakseimbangan tersebut tercermin dalam beberapa aspek. Pertama, dari sisi kapasitas dan peran, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki akses yang besar terhadap teknologi, anggaran, dan kebijakan nasional. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat *top-down*, sehingga implementasinya di tingkat lokal belum sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik pembudi daya ikan. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Peternakan Banyumas, lebih memahami kondisi lapangan, tetapi memiliki keterbatasan dalam aspek pendanaan dan teknis jika dibandingkan dengan pusat. Perguruan tinggi, seperti Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), berkontribusi pada inovasi dan pendampingan, tetapi keterlibatan mereka cenderung episodik, terbatas pada proyek tertentu. Sementara itu, kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan) menjadi aktor yang paling terdampak langsung oleh program, namun justru memiliki sumber daya paling terbatas dalam hal pengetahuan, teknologi, maupun modal.

Kedua, ketimpangan terlihat dari akses terhadap teknologi dan informasi. Teknologi seperti *Internet of Things* (IoT) untuk akuakultur dan sistem digital pemasaran baru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, misalnya Pokdakan Minasari. Sebagian besar pembudi daya ikan lainnya masih belum memiliki perangkat memadai maupun keterampilan digital, sehingga tidak dapat menikmati manfaat program *Go Digital*.

Ketiga, perencanaan dan evaluasi program masih didominasi oleh aktor yang memiliki kekuatan struktural. Partisipasi pembudi daya ikan dalam proses

tersebut belum optimal, sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dengan arah program yang dirancang dari atas. Keempat, masih adanya ketergantungan kelompok pembudi daya ikan terhadap bantuan eksternal. Tanpa penguatan kelembagaan lokal, pembudi daya ikan berisiko terus bergantung pada program dari luar dan tidak berkembang menjadi mandiri secara ekonomi maupun manajerial.

Kelima, peran penyuluh perikanan sebagai ujung tombak pemberdayaan belum sepenuhnya optimal. Jumlah penyuluh perikanan yang terbatas serta kapasitas yang belum merata membuat fungsi mereka sebagai jembatan antara kebijakan dan kebutuhan lapangan belum berjalan maksimal. Hal ini berimplikasi pada masih adanya kesenjangan antara desain program dengan realitas yang dihadapi masyarakat pembudi daya ikan.

“Kami melihat bahwa dalam proses pemberdayaan pembudi daya ikan, khususnya di Kabupaten Banyumas, masih terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara para pemangku kepentingan. Pemerintah pusat dan lembaga-lembaga pendukung memang memiliki kapasitas yang besar dalam hal regulasi, teknologi, dan pembiayaan. Namun, pelaku utama, yaitu pembudi daya ikan itu sendiri belum mendapatkan porsi keterlibatan dan pengaruh yang setara dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kami menyadari bahwa ketidakseimbangan ini dapat menghambat efektivitas program pemberdayaan. Oleh karena itu, kami di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terus mendorong pendekatan partisipatif dan kolaboratif, di mana pembudi daya ikan lokal diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Melalui program Desa Perikanan Cerdas di Desa Panembangan, Banyumas, kami berupaya menciptakan model pemberdayaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuan kami adalah memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, swasta, maupun masyarakat pembudi daya ikan dapat bersinergi dalam posisi yang saling melengkapi, bukan timpang.”

Pernyataan serupa dikemukakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang menyampaikan bahwa masih terlihat adanya ketidakseimbangan sumber daya di antara para pemangku kepentingan. Dari sisi permodalan, misalnya, pelaku usaha dan sektor swasta memiliki kekuatan finansial yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok pembudi daya ikan lokal yang masih terbatas akses maupun kapasitasnya. Disparitas juga muncul dalam aspek keahlian teknis dan akses

informasi. Akademisi dan pemerintah relatif lebih unggul dalam menguasai teknologi serta memiliki akses terhadap data dan pengetahuan terkini, sementara sebagian besar masyarakat pembudi daya ikan belum sepenuhnya siap untuk mengikuti perkembangan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan yang hanya dapat dijabatani melalui upaya pelatihan, pendampingan, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

Namun demikian, ketidakseimbangan tersebut tidak harus menjadi hambatan apabila dikelola dengan prinsip kolaborasi yang adil dan transparan. Peran fasilitator, termasuk penyuluh perikanan, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya, sekaligus memperoleh manfaat yang seimbang. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang rutin agar dinamika kolaborasi tetap berjalan inklusif. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk menjembatani disparitas ini, sehingga pemberdayaan pembudi daya ikan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi benar-benar berorientasi pada peningkatan kemandirian dan keberlanjutan usaha mereka.

“Kalau bicara sumber daya, tentu ada ketidakseimbangan. Misalnya, dari sisi permodalan, pelaku usaha atau sektor swasta jelas lebih kuat dibanding kelompok pembudi daya ikan kita yang masih terbatas akses dan kapasitasnya. Akademisi dan pemerintah punya akses informasi dan teknologi yang lebih baik. Tapi kelompok masyarakat belum semuanya siap secara kapasitas, jadi di situ juga ada kesenjangan yang perlu dijabatani lewat pelatihan dan pendampingan. Tugas kita sebagai fasilitator adalah memastikan semua pihak bisa berkontribusi sesuai kemampuannya, tapi juga mendapatkan manfaat yang seimbang. Karena itu penting ada koordinasi dan komunikasi yang rutin.”

Sementara itu, Kepala Desa Panembangan menyampaikan bahwa pemerintah desa sebenarnya memiliki komitmen untuk mendukung pemberdayaan pembudi daya ikan, namun ruang fiskalnya terbatas dan kerap terkendala oleh prioritas penggunaan dana desa. Di sisi lain, keterlibatan pihak swasta maupun lembaga pendukung juga belum merata, sehingga kontribusi mereka dalam memperkuat rantai nilai masih perlu ditingkatkan. Ketimpangan juga tampak dalam hal akses terhadap pelatihan dan informasi. Kelompok pembudi daya ikan

yang sudah mapan lebih mudah memperoleh pendampingan, sedangkan kelompok baru atau yang berada di wilayah pinggiran sering kali tertinggal, padahal mereka juga membutuhkan dukungan untuk berkembang sejajar.

Selain itu, ketidakseimbangan juga muncul dalam hal kekuatan atau pengaruh dalam pengambilan keputusan. Instansi teknis dan pemerintah daerah memiliki kontrol lebih besar terhadap arah kebijakan, alokasi anggaran, serta pemilihan wilayah intervensi. Sementara itu, pemerintah desa maupun kelompok pembudi daya ikan kerap hanya diposisikan sebagai pelaksana program, bukan sebagai penentu arah. Contohnya, desa sering kali tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan, tetapi baru diminta menyediakan lokasi atau membentuk kelompok ketika program sudah berjalan. Kondisi serupa juga dialami oleh kelompok pembudi daya ikan, kelompok yang sudah lama aktif biasanya memiliki akses lebih luas kepada dinas, sedangkan kelompok baru atau yang kecil masih kesulitan mendapatkan kesempatan yang sama.

"Saya melihat memang masih ada ketidakseimbangan sumber daya di antara pemangku kepentingan. Kalau kita bicara soal sumber daya, itu bukan hanya soal dana, tapi juga mencakup kapasitas SDM, akses informasi, teknologi, dan jejaring kerja sama. Yang paling terasa adalah ketimpangan akses terhadap pelatihan dan informasi. Kelompok yang sudah mapan biasanya lebih dahulu mendapat pendampingan, sementara kelompok baru atau yang berada di wilayah pinggiran seringkali tertinggal. Padahal mereka juga butuh didorong agar bisa berkembang sejajar."

Contoh konkretnya, dalam beberapa pertemuan atau program, desa kadang tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan. Ketika program masuk, kami baru diberi tahu harus menyediakan lokasi atau membentuk kelompok. Padahal kami yang paling dekat dengan masyarakat dan tahu kondisi lapangan secara langsung. Kemudian dari sisi kelompok pembudi daya ikan, kekuatan mereka sangat bergantung pada seberapa aktif dan solid kelompoknya. Kelompok yang sudah lama aktif biasanya punya koneksi ke dinas, sementara kelompok baru atau yang kecil masih kesulitan untuk bersuara atau mendapat akses yang sama.

Sektor bisnis melalui Kepala Cabang BNI Purwokerto menyatakan bahwa ketidakseimbangan ini tampak jelas ketika masing-masing pihak membawa

kekuatan yang berbeda, sementara pembudi daya ikan sebagai pelaku utama justru berada pada posisi paling lemah. Dari sisi permodalan, pengetahuan teknis, akses terhadap teknologi, hingga jejaring pasar, kapasitas pembudi daya ikan masih terbatas jika dibandingkan dengan aktor lain.

Sebagai contoh, lembaga perbankan dan pemerintah daerah memiliki akses yang lebih komprehensif terhadap sumber daya finansial, perangkat regulasi, serta berbagai instrumen pendukung lainnya. Akan tetapi, masyarakat pembudi daya ikan belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan peluang tersebut akibat keterbatasan kapasitas. Kondisi ini mendorong sektor perbankan, seperti BNI, untuk mengambil langkah aktif menjembatani kesenjangan melalui edukasi literasi keuangan, sosialisasi produk pembiayaan, serta sinergi dengan pemerintah desa, dinas terkait, dan komunitas pembudi daya ikan.

Di sisi lain, ketimpangan juga terlihat pada aspek pengaruh dalam proses kolaborasi. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Sementara itu, pembudi daya ikan sebagai pelaku utama di lapangan masih berada dalam posisi relatif pasif, sehingga keterlibatan mereka dalam menentukan arah program belum maksimal. Keputusan strategis kerap kali didominasi oleh pihak yang memiliki akses terhadap regulasi atau modal, padahal seharusnya pembudi daya ikan diberikan ruang yang lebih besar untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka.

“Kalau kita bicara secara objektif, ketidakseimbangan sumber daya di antara para pemangku kepentingan memang nyata terjadi. Masing-masing pihak membawa kekuatan yang berbeda, dan dalam konteks ini, pembudi daya ikan sebagai pelaku utama justru sering kali memiliki keterbatasan paling besar baik dari sisi permodalan, pengetahuan teknis, akses ke teknologi, maupun jaringan pasar. Kami memiliki sumber daya finansial, sistem digital, serta instrumen untuk mendukung usaha mereka. Pemerintah daerah punya kebijakan dan akses ke pelatihan. Tapi masyarakat pembudi daya ikan, meski mereka yang menjalankan usaha sehari-hari, banyak yang masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengoptimalkan semua dukungan yang tersedia.”

Ketimpangan tersebut pada dasarnya tidak dapat dihindari karena setiap aktor membawa kapasitas yang berbeda. Namun, justru di sinilah pentingnya peran kolaborasi, yaitu bagaimana pihak yang memiliki sumber daya lebih kuat mampu memperkuat pihak yang lemah secara proporsional. Intervensi yang berpihak, seperti pemberian subsidi teknologi, pelatihan berkelanjutan, atau kemudahan akses pembiayaan mikro, menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan yang dialami pembudi daya ikan kecil. Tanpa upaya ini, mereka akan tetap berada pada posisi yang lemah, sehingga tujuan pemberdayaan sulit tercapai.

Dari sisi kekuatan dalam proses pengambilan keputusan, juga terlihat ketimpangan yang cukup signifikan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan, sementara sektor swasta berpengaruh karena menguasai modal dan jaringan pasar. Sebaliknya, kelompok pembudi daya ikan sering kali hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam perencanaan maupun evaluasi program. Posisi tawar mereka yang lemah menyebabkan aspirasi di tingkat akar rumput sering kali kurang terdengar atau bahkan diabaikan.

Meski demikian, ketidakseimbangan kekuatan ini masih dapat diatasi apabila mekanisme kolaborasi dirancang secara inklusif dan partisipatif. Suara dari pembudi daya ikan perlu dijamin masuk ke dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. Dengan begitu, kolaborasi tidak hanya berhenti pada aspek formalitas, tetapi benar-benar mampu memberdayakan pembudi daya ikan secara nyata dan berkelanjutan.

“Kalau bicara kekuatan, tentu saja ada ketimpangan. Pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur dan menentukan arah kebijakan, sektor swasta punya pengaruh karena membawa modal dan jaringan bisnis, sementara kelompok pembudi daya ikan sering kali hanya menjadi penerima manfaat, bukan pengambil keputusan. Ketimpangan ini tidak bisa dihindari, tapi justru di sinilah peran kolaborasi menjadi penting, bagaimana pemangku kepentingan yang kuat bisa membantu memperkuat yang lemah, tanpa menciptakan dominasi. Kalau tidak ada intervensi yang berpihak misalnya lewat pelatihan, subsidi teknologi, atau akses pembiayaan mikro maka pembudi daya ikan kecil akan tetap berada di posisi yang lemah. Itu bisa menghambat tujuan pemberdayaan.”

Ketidakseimbangan ini tidak harus dipandang sebagai hambatan mutlak, melainkan sebagai dasar untuk memperkuat kemitraan antar pemangku kepentingan. Dengan transparansi, komunikasi dua arah, serta kesadaran kolektif, kesenjangan tersebut dapat dikelola secara adil. Peran fasilitator dan pemimpin kolaborasi menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap aktor dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya, sekaligus memperoleh manfaat secara seimbang. Dengan demikian, proses pemberdayaan tidak hanya berjalan lebih inklusif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian pembudi daya ikan secara berkelanjutan.

Ketidakseimbangan kekuatan antar pemangku kepentingan memang masih menjadi tantangan nyata. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan kolaboratif perlu terus diperkuat agar pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan tidak hanya berjalan formalitas, tetapi benar-benar memberi dampak yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pembudi daya ikan secara menyeluruh, baik dari sisi pengetahuan, digitalisasi, maupun kelembagaan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan ini dan memastikan bahwa seluruh proses kolaborasi berjalan secara adil, transparan, dan partisipatif.

Idealnya, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan melalui Desa Perikanan Cerdas dibangun atas dasar kolaborasi dan keseimbangan peran di antara seluruh pemangku kepentingan. Kemitraan yang terjalin seharusnya menempatkan pemerintah, pembudi daya ikan, akademisi, dan sektor swasta dalam posisi sejajar sesuai fungsi dan kapasitas masing-masing. Dalam kerangka ini, pembudi daya ikan tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi terlibat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Partisipasi yang setara akan mendorong munculnya rasa memiliki serta tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program.

Selain itu, transparansi dalam penyaluran bantuan maupun pelaksanaan program pelatihan menjadi prinsip penting yang harus dijaga. Keterbukaan informasi dapat mengurangi potensi kesenjangan akses dan memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pembudi daya ikan, baik yang telah mapan maupun yang masih berskala kecil. Dengan demikian, keseimbangan peran dan transparansi dalam kolaborasi akan memperkuat efektivitas Desa Perikanan Cerdas sebagai model pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian, perlu ada mekanisme partisipatif yang menjamin suara semua pihak, khususnya dari akar rumput, bisa masuk dalam proses pengambilan keputusan. Jika tidak, kolaborasi hanya formalitas dan tidak memberdayakan secara nyata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para partisipan di atas, dalam pelaksanaan pemberdayaan pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas, masih ditemukan ketidakseimbangan sumber daya maupun kekuatan di antara para pemangku kepentingan. Pemerintah, akademisi, dan sektor swasta memiliki akses yang lebih luas terhadap teknologi, informasi, regulasi, serta sumber pendanaan. Sebaliknya, pembudi daya ikan sebagai pelaku utama di lapangan masih menghadapi keterbatasan signifikan, baik dalam aspek permodalan, penguasaan teknologi, maupun kapasitas manajerial. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan yang berimplikasi langsung terhadap efektivitas kolaborasi dan keberlanjutan program pemberdayaan.

Ketimpangan pertama tampak pada aspek akses informasi dan teknologi. Pemerintah dan lembaga akademik relatif unggul dalam menguasai data, perangkat digital, serta inovasi budi daya ikan terkini, sementara banyak pembudi daya ikan belum mampu memanfaatkan teknologi sederhana sekalipun, seperti pencatatan digital atau sistem pemantauan kualitas air. Minimnya perangkat, keterampilan digital, serta jaringan komunikasi membuat sebagian pembudi daya ikan tertinggal dalam memperoleh informasi teknis maupun peluang program. Akibatnya, manfaat program pemberdayaan pembudi daya ikan melalui program Desa Perikanan Cerdas tidak terdistribusi secara merata.

Ketimpangan juga terlihat dalam aspek permodalan. Sektor swasta dan lembaga keuangan memiliki kekuatan modal yang memungkinkan mereka berperan strategis dalam rantai nilai perikanan, sedangkan sebagian besar pembudi daya ikan masih mengandalkan peralatan terbatas dan bergantung pada bantuan eksternal. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya literasi keuangan, sehingga akses pembudi daya ikan terhadap produk perbankan maupun skema pembiayaan formal masih rendah. Situasi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara pembudi daya ikan skala besar yang relatif mapan dengan pembudi daya ikan kecil yang berada pada posisi rentan.

Selain itu, terdapat ketidakseimbangan kekuatan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah pusat maupun daerah sering kali memegang kendali dominan melalui pendekatan *top-down* dalam perencanaan program, sementara peran pembudi daya ikan masih terbatas pada level implementasi. Posisi tawar kelembagaan lokal, seperti kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan), relatif lemah sehingga aspirasi mereka tidak selalu terakomodasi dalam forum perencanaan maupun evaluasi. Kondisi serupa juga terlihat dalam forum kolaborasi, di mana suara pembudi daya ikan kecil kerap kurang terdengar dibandingkan aktor lain yang memiliki posisi struktural maupun kapasitas teknis lebih tinggi.

Ketidakseimbangan tersebut bukanlah sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Dengan intervensi yang tepat seperti pemberdayaan kelembagaan lokal, penguatan mekanisme dialog antarpemangku kepentingan, serta penerapan model partisipatif dalam perencanaan dan evaluasi program ketimpangan ini dapat diminimalisasi. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan kolaborasi yang lebih setara, inklusif, dan berkelanjutan dalam kerangka pengembangan Desa Perikanan Cerdas.

Meskipun demikian, pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan melalui program Desa Perikanan Cerdas tetap memberikan dampak positif, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produksi ikan, serta berkembangnya praktik budi daya berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa

kolaborasi lintas aktor mampu menghasilkan capaian nyata meskipun masih belum merata. Oleh karena itu, perbaikan desain kolaborasi menjadi penting untuk mengurangi ketimpangan yang ada.

Untuk mewujudkan pemberdayaan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, meningkatkan kapasitas kelembagaan pembudi daya ikan (Pokdakan) agar memiliki daya tawar lebih kuat dalam perencanaan dan evaluasi program, memperluas akses terhadap teknologi dan pelatihan digital secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat sinergi program pusat dan daerah melalui pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal. Ketiga, mendorong pola kolaborasi partisipatif, di mana pembudi daya ikan diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat. Keempat, memperluas peran sektor swasta sebagai mitra strategis, tidak hanya pada aspek pemasaran, tetapi juga dalam pembiayaan, transfer teknologi, dan pendampingan usaha. Kelima, transparansi dan keterbukaan informasi dalam penyaluran bantuan maupun pelaksanaan program perlu dijaga untuk memastikan manfaat dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pihak. Dengan demikian, ketidakseimbangan sumber daya dan kekuatan antar pemangku kepentingan dapat diminimalisasi, sehingga Desa Perikanan Cerdas benar-benar berfungsi sebagai model pemberdayaan perikanan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 9 Ketidakseimbangan Sumber Daya Aktor Kolaborasi

Aktor	Sumber Daya Utama	Kekuatan dalam Kolaborasi	Keterbatasan / Ketidakseimbangan
Pemerintah Pusat & Daerah	- Otoritas kebijakan & regulasi	Tinggi → pengambil keputusan utama, dominasi perencanaan	Cenderung <i>top-down</i> , aspirasi pembudi daya ikan kurang terakomodasi
	- Anggaran & program		
	- Akses data & teknologi		
Perguruan Tinggi	- Pengetahuan ilmiah & teknologi	Sedang-Tinggi → unggul dalam inovasi & transfer pengetahuan	Hasil riset sering tidak mudah diakses/diadopsi oleh pembudi daya ikan kecil
	- Tenaga ahli & riset terapan		

	- Jaringan akademik		
Sektor Swasta & Lembaga Keuangan	- Modal finansial	Sedang-Tinggi → kuat di aspek pembiayaan & rantai nilai	Orientasi profit bisa memperlebar kesenjangan, akses pembudi daya ikan ke pembiayaan masih rendah
	- Akses pasar & distribusi		
	- Infrastruktur bisnis & investasi		
Pembudi daya ikan (Pokdakan)	- Tenaga kerja	Rendah-Sedang → pelaku utama tetapi lemah posisi tawarnya	Minim modal, terbatas akses teknologi & informasi, lemah dalam proses pengambilan keputusan
	- Lahan/kolam		
	- Pengetahuan lokal & pengalaman praktik		
Masyarakat Lokal & Organisasi Desa (BUMDes, LSM, Poklahsar)	- Legitimasi sosial	Rendah → kuat secara sosial tetapi lemah finansial & teknologi	Jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis
	- Dukungan komunitas & kearifan lokal		

Sumber: Diolah Penulis (2024)

b. Insentif dan Hambatan untuk Berpartisipasi (*Incentives for and constraints on participation*)

Insentif merupakan faktor strategis dalam memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan pada program pemberdayaan pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas. Insentif tidak hanya dipahami dalam bentuk finansial, tetapi juga mencakup dukungan non-finansial seperti akses teknologi, pelatihan, pendampingan berbasis riset, penguatan kelembagaan, serta pengakuan peran masing-masing aktor. Dengan demikian, insentif berfungsi ganda, sebagai stimulus peningkatan produktivitas sekaligus sebagai instrumen yang mengikat kepentingan bersama.

Pemberian insentif atas pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) merupakan salah satu faktor yang mendorong keterlibatan aktor dalam proses

kolaborasi pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas. Setiap aktor institusional memiliki target kinerja tertentu yang harus direalisasikan, sehingga keterlibatan mereka dalam kolaborasi selaras dengan mandat organisasi masing-masing.

Sebagai ilustrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memiliki target terkait pembentukan koperasi serta pengembangan inkubator bisnis. Keterlibatan Kemenkop UKM dalam proses legalisasi dan pendampingan manajemen Koperasi Mina Satya Panembangan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pencapaian IKU kelembagaan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya keterhubungan langsung antara target institusional dengan tingkat partisipasi dalam kolaborasi.

Demikian pula, PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana pihak ketiga melalui berbagai skema kredit, baik konsumtif maupun produktif. Secara khusus, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan mandat yang harus direalisasikan, termasuk pada sektor perikanan budi daya. Melalui keterlibatan dalam kolaborasi, BNI memperoleh kemudahan dalam melaksanakan sosialisasi, mengakses data pembudi daya ikan, serta memperluas penyaluran kredit agar lebih tepat sasaran.

Sementara itu, PT Telkom sebagai penyedia layanan telekomunikasi nasional berupaya mengembangkan inovasi produk berbasis digital, antara lain *Smart Village* dan *Agreefisheries*. Implementasi layanan tersebut membutuhkan ekosistem uji coba yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karakteristik masyarakat pembudi daya ikan di Desa Panembangan dinilai selaras dengan kebutuhan penerapan inovasi dimaksud. Oleh karena itu, PT Telkom menjalin kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka mendukung program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di desa tersebut

Secara keseluruhan, keterlibatan berbagai aktor dalam kolaborasi pemberdayaan tidak hanya dilandasi oleh kepentingan sosial-ekonomi

masyarakat, tetapi juga terkait erat dengan pencapaian target kinerja institusional masing-masing pihak. Hal ini menguatkan argumen bahwa kolaborasi multi-aktor dalam konteks pembangunan pedesaan perikanan merupakan arena timbal balik (*mutual benefit*) antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dari perspektif pembudi daya ikan, insentif yang paling relevan meliputi subsidi benih dan pakan, akses terhadap pembiayaan murah, dukungan teknologi digital budi daya, serta pelatihan peningkatan kapasitas. Hal ini penting mengingat mayoritas pembudi daya ikan skala kecil masih menghadapi keterbatasan modal dan keterampilan.

Pada dimensi pengetahuan dan teknologi, insentif dapat berupa pelatihan, pendampingan, serta transfer teknologi ramah lingkungan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, maupun *startup* teknologi. Mengingat program Desa Perikanan Cerdas berorientasi pada digitalisasi perikanan, penguasaan teknologi menjadi prasyarat utama keberhasilan program.

Selanjutnya, insentif pasar dan rantai nilai diwujudkan melalui kepastian harga yang adil, fasilitasi kemitraan dengan *offtaker*, serta digitalisasi pemasaran berbasis *e-commerce*. Bentuk insentif ini penting untuk mengatasi persoalan klasik pembudi daya ikan, yakni lemahnya akses pasar dan rendahnya posisi tawar.

Pada dimensi lingkungan dan keberlanjutan, insentif dapat berupa dukungan penerapan teknologi budi daya ikan berkelanjutan, misalnya sistem bioflok atau *zero waste*, serta penghargaan bagi pembudi daya ikan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga memastikan keberlanjutan produksi jangka panjang.

Selain itu, terdapat pula insentif sosial dan kelembagaan berupa penguatan kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan), koperasi, maupun BUMDes. Insentif ini termasuk kemudahan legalitas, akses perizinan, serta prioritas dalam memperoleh pendampingan. Bentuk non-material seperti penghargaan, publikasi kisah sukses, dan pelibatan dalam perencanaan desa juga berfungsi sebagai motivasi kolektif.

Setiap pemangku kepentingan memiliki insentif yang berbeda namun saling melengkapi. Pemerintah daerah memperoleh legitimasi pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian lokal. Perguruan tinggi mendapatkan ruang penerapan hasil riset dan penguatan tridarma. Kelompok pembudi daya ikan memperoleh peningkatan kapasitas, produktivitas, serta akses pasar. Sementara itu, sektor swasta dan perbankan mendapat peluang investasi, perluasan layanan keuangan, serta pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan demikian, keberlanjutan kolaborasi dalam implementasi pemberdayaan pembudi daya ikan sangat ditentukan oleh keberhasilan merancang ekosistem insentif yang adil, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Penyelarasan insentif antar aktor menjadi prasyarat untuk menghindari konflik kepentingan sekaligus memastikan bahwa setiap pihak merasa memperoleh manfaat sesuai kontribusinya. Pada akhirnya, insentif yang terkelola dengan baik menjadikan pembudi daya ikan tidak hanya sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai aktor utama dalam transformasi desa perikanan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 10 Bentuk Insentif Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Bentuk Insentif	Tujuan/Manfaat
Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan, Pemerintah Desa)	- Dukungan kebijakan dan regulasi	- Peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudi daya ikan
	- Subsidi benih, pakan, dan sarana produksi	- Pencapaian target RPJM/ RPJMD
	- Fasilitasi perizinan dan legalitas usaha	- Legitimasi keberhasilan pembangunan daerah
	- Pelatihan dan program pendampingan	
Perguruan Tinggi & Lembaga Riset	- Pendampingan berbasis riset	- Penerapan hasil riset
	- Transfer teknologi tepat guna	- Peningkatan publikasi ilmiah

	- Penguatan kapasitas SDM	- Penguatan peran tridarma perguruan tinggi
	- Penyediaan rekomendasi ilmiah	
Pembudi daya ikan (Pokdakan, Koperasi)	- Akses pembiayaan murah	- Peningkatan produktivitas
	- Pelatihan dan peningkatan keterampilan	- Akses pasar yang lebih luas
	- Akses teknologi digital budi daya	- Peningkatan posisi tawar dan keberdayaan
	- Kemitraan dengan pasar/offtaker	
	- Penghargaan/publikasi kisah sukses	
Sektor Swasta & Perbankan	- Akses pembiayaan dan kredit usaha	- Perluasan peluang bisnis
	- Fasilitasi pasar dan distribusi	- Peningkatan literasi keuangan masyarakat
	- Kemudahan regulasi investasi	- Reputasi positif melalui CSR
	- Pemenuhan program CSR	- Potensi investasi jangka panjang
Masyarakat & Organisasi Lokal (BUMDes, Poklhasar, LSM)	- Penguatan kapasitas kelembagaan	- Peningkatan kohesi social
	- Ruang partisipasi dalam perencanaan	- Penguatan kelembagaan desa
	- Dukungan sosial dan simbolik (penghargaan, pengakuan peran)	- Mendorong partisipasi generasi muda

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Sebagai pelaku utama dalam sektor perikanan, pembudi daya ikan memandang bahwa insentif yang dikolaborasikan oleh para pemangku kepentingan memiliki peranan penting dalam memastikan keberhasilan serta keberlanjutan program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas. Kolaborasi tersebut diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat meliputi

pemerintah, pembudi daya ikan, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat lokal dapat bergerak secara sinergis dan saling memberikan manfaat.

Pertama, insentif ekonomi yang mencakup dukungan finansial dan akses pembiayaan perlu dioptimalkan melalui keterlibatan pemerintah, lembaga keuangan, serta koperasi. Bentuk insentif yang dimaksud antara lain berupa subsidi benih, pakan, serta sarana produksi, kemudahan akses kredit atau pembiayaan mikro dengan bunga rendah, serta pemberian insentif bagi pembudi daya ikan yang menerapkan teknologi digital. Insentif ini sangat relevan mengingat banyak pembudi daya ikan skala kecil masih menghadapi keterbatasan modal untuk meningkatkan produktivitas.

Kedua, insentif dalam bidang pengetahuan dan teknologi dapat diberikan melalui pelatihan, pendampingan, dan transfer teknologi berbasis digital maupun ramah lingkungan. Keterlibatan dinas perikanan, universitas, lembaga riset, dan *startup* teknologi menjadi kunci dalam penyediaan platform edukasi digital dan sistem pemantauan daring. Mengingat konsep Desa Perikanan Cerdas berorientasi pada pemanfaatan teknologi, maka penguasaan aspek ini menjadi syarat utama bagi keberhasilan program.

Ketiga, insentif pasar dan rantai nilai perlu dikembangkan melalui kolaborasi antara dinas perdagangan, BUMDes, serta pelaku usaha swasta. Insentif tersebut mencakup kepastian pasar dengan harga yang adil, fasilitasi kemitraan antara pembudi daya ikan dan *offtaker*, serta digitalisasi pemasaran melalui platform *e-commerce* perikanan. Upaya ini penting mengingat banyak pembudi daya ikan masih mengalami kesulitan dalam menjual hasil panen dengan nilai yang menguntungkan.

Keempat, insentif yang berorientasi pada lingkungan dan keberlanjutan perlu didorong melalui keterlibatan pemerintah, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Bentuknya antara lain berupa dukungan penerapan teknologi budi daya berkelanjutan seperti sistem bioflok atau *zero waste*, serta penghargaan bagi pembudi daya ikan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Hal ini

penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memastikan keberlanjutan produksi jangka panjang.

Kelima, insentif sosial dan kelembagaan berperan dalam memperkuat kapasitas organisasi lokal, termasuk kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan) dan koperasi. Selain itu, pengakuan dan pelibatan pembudi daya ikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa serta pengembangan peran generasi muda dalam sektor perikanan menjadi faktor yang mendukung peningkatan posisi tawar pembudi daya ikan dalam struktur sosial dan kelembagaan.

Dengan demikian, insentif dalam program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan perlu dirancang secara kolaboratif, menyeluruh, dan terintegrasi, mencakup dimensi ekonomi, teknologi, pasar, lingkungan, dan sosial. Sinergi yang dibangun antar pemangku kepentingan akan memastikan bahwa pembudi daya ikan tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam transformasi desa perikanan yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing di Kabupaten Banyumas.

Sementara itu penyuluh perikanan menilai bahwa insentif memiliki peranan yang sangat penting dan perlu dikolaborasikan oleh para pemangku kepentingan agar program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan partisipatif. Insentif yang dirancang secara kolaboratif tidak hanya berfungsi sebagai stimulus dalam meningkatkan produktivitas, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas, jejaring, serta keberlanjutan usaha pembudi daya ikan.

Secara umum, terdapat beberapa bentuk insentif yang dapat dikolaborasikan. Pertama, insentif finansial, yang meliputi bantuan modal usaha, subsidi pakan, serta penyediaan peralatan budi daya. Insentif ini dapat disalurkan melalui sinergi antara dinas terkait, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, maupun mitra swasta. Kedua, insentif nonfinansial, yang mencakup pelatihan keterampilan, sertifikasi usaha, akses terhadap pasar, promosi produk, serta pelibatan dalam kegiatan pameran atau studi banding. Insentif ini berperan

dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperluas jaringan usaha.

Ketiga, insentif kelembagaan, berupa dukungan administratif maupun regulatif yang diberikan kepada kelompok pembudi daya ikan yang aktif dan transparan. Contoh insentif ini antara lain kemudahan legalitas, perizinan usaha, maupun prioritas dalam memperoleh program pendampingan. Keempat, insentif sosial dan simbolik, yang dapat berupa penghargaan bagi kelompok terbaik, publikasi kisah sukses, serta pencatatan prestasi di tingkat desa atau kecamatan. Insentif ini bersifat nonmaterial, namun memiliki nilai motivasional yang signifikan dalam mendorong partisipasi dan semangat kolektif pembudi daya ikan.

Dengan demikian, insentif yang dikolaborasikan secara menyeluruh baik finansial, nonfinansial, kelembagaan, maupun sosial akan memperkuat efektivitas program pemberdayaan. Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penentu agar pembudi daya ikan tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam pembangunan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan.

Setiap pemangku kepentingan memiliki motivasi dan insentif masing-masing dalam keterlibatannya pada proses kolaborasi pemberdayaan pembudi daya ikan. Di Kabupaten Banyumas, dinamika kolaborasi tumbuh karena adanya insentif yang saling melengkapi, baik dalam aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, maupun reputasi. Hal ini menunjukkan bahwa insentif tidak hanya berfungsi sebagai pendorong partisipasi, tetapi juga sebagai pengikat kepentingan bersama untuk mencapai tujuan pembangunan sektor perikanan budi daya.

Bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, insentif utama dari keterlibatan dalam kolaborasi adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pencapaian tersebut juga sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta indikator kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, kolaborasi dalam sektor

perikanan budi daya memberikan legitimasi dan capaian konkret bagi pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah.

Dari perspektif perguruan tinggi, seperti Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan mitra akademik lainnya, insentif yang diperoleh mencakup penerapan hasil riset, peningkatan jumlah publikasi ilmiah, serta penguatan peran tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi ini sekaligus memperkuat posisi kampus sebagai mitra strategis pembangunan daerah dan memperluas jaringan kemitraan dengan masyarakat serta sektor swasta.

Bagi kelompok pembudi daya ikan atau Pokdakan, insentif yang paling dirasakan adalah peningkatan produktivitas, akses terhadap teknologi budi daya, serta kesempatan memperoleh pelatihan dan pendampingan. Selain itu, kolaborasi juga membuka peluang bagi mereka untuk mengakses pasar yang lebih luas serta memperkuat jaringan distribusi. Insentif ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberdayaan dan posisi tawar pembudi daya ikan di tingkat lokal.

Sementara itu, bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), insentif yang diperoleh adalah realisasi target nasional, antara lain peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan desa perikanan berbasis teknologi. Keterlibatan dalam kolaborasi merepresentasikan kehadiran negara dalam mendukung pembangunan perikanan pada tingkat tapak.

Adapun bagi sektor swasta, insentif yang diperoleh melalui keterlibatan dalam kolaborasi mencakup terbukanya peluang kerja sama bisnis baru, pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang berdampak nyata, serta potensi investasi di sektor akuakultur berbasis masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya menguntungkan masyarakat lokal, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi dunia usaha.

Dari perspektif keseluruhan, kolaborasi dapat terjaga keberlanjutannya apabila seluruh pemangku kepentingan merasa memiliki peran, manfaat, dan insentif yang seimbang. Oleh karena itu, penting untuk membangun ekosistem

insentif yang adil, sehingga semua pihak termotivasi untuk berkontribusi dalam memajukan sektor perikanan budi daya secara inklusif dan berkelanjutan.

“Setiap pemangku kepentingan tentu memiliki motivasi dan insentif tersendiri terlibat dalam kolaborasi pemberdayaan pembudi daya ikan. Di Kabupaten Banyumas, kami melihat bahwa kolaborasi ini tumbuh karena adanya insentif yang saling melengkapi, baik secara sosial, ekonomi, kelembagaan, maupun reputasi. Kami percaya bahwa kolaborasi akan langgeng jika semua pihak merasa memiliki peran dan manfaat. Oleh karena itu, kami terus membangun ekosistem insentif yang adil, agar semua pemangku kepentingan termotivasi untuk bersama-sama memajukan sektor perikanan budi daya secara berkelanjutan.” Ujar Kepala BPPSDMKP.

Menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, insentif merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Insentif yang dimaksud tidak terbatas pada aspek finansial, melainkan juga mencakup akses terhadap teknologi, pelatihan peningkatan kapasitas, kemudahan regulasi, serta jaminan pasar bagi para pembudi daya ikan.

Bagi pembudi daya ikan, kebutuhan utama terkait insentif meliputi subsidi benih dan pakan, dukungan akses terhadap teknologi digital budi daya, serta pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka. Sementara itu, bagi pihak swasta, insentif yang relevan antara lain berupa kepastian regulasi dan dukungan fiskal yang dapat mendorong minat investasi di sektor perikanan budi daya.

Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Banyumas menekankan peran strategisnya sebagai koordinator dalam memastikan berbagai bentuk insentif tersebut tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam satu kerangka kolaboratif. Kolaborasi yang efektif diyakini hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan merasakan manfaat sesuai dengan peran dan kontribusinya masing-masing. Oleh karena itu, skema insentif perlu dirancang secara menyeluruh, adil, dan berorientasi jangka panjang agar mampu menciptakan sinergi yang berkelanjutan dalam pengembangan Desa Perikanan Cerdas.

“Tentu, insentif adalah aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan pada program Desa Perikanan Cerdas. Tidak hanya insentif dalam bentuk finansial, tapi juga dalam bentuk akses teknologi, pelatihan, kemudahan regulasi, dan jaminan pasar. Pemerintah berperan dalam mengoordinasikan insentif ini, agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi yang baik akan muncul jika semua pihak merasa diuntungkan, sesuai peran dan kontribusinya masing-masing. Maka dari itu, penting bagi kami untuk merancang skema insentif yang saling terintegrasi, adil, dan berorientasi jangka panjang.”

Pernyataan dari perwakilan desa menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkolaborasikan berbagai bentuk insentif antar pemangku kepentingan dalam program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Keberhasilan pemberdayaan pembudi daya ikan tidak dapat ditopang hanya oleh satu pihak, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh aktor dengan kepentingan bersama serta insentif yang saling menguatkan.

Dari perspektif pemerintah, insentif dapat berupa dukungan kebijakan, penyediaan anggaran, serta pelatihan yang berkelanjutan. Perguruan tinggi atau lembaga akademik memperoleh insentif dalam bentuk penerapan riset terapan, pengembangan teknologi tepat guna, serta pendampingan berbasis pengetahuan ilmiah. Sementara itu, pihak swasta atau pelaku usaha dapat didorong melalui insentif berupa peluang kemitraan, akses pasar, serta keringanan pajak apabila mereka berperan aktif dalam pembinaan kelompok pembudi daya ikan.

Bagi pemerintah desa, insentif yang paling penting tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga berupa ruang partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan aspirasi kelompok pembudi daya ikan, yang menekankan perlunya manfaat langsung dari program, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, akses terhadap teknologi, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, apabila seluruh pemangku kepentingan merasakan adanya nilai tambah atau keuntungan dari keterlibatan mereka, maka kolaborasi dalam implementasi pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan akan lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

"Saya melihat memang ada kebutuhan yang mendesak untuk mengkolaborasikan insentif antar pemangku kepentingan. Karena keberhasilan pemberdayaan pembudi daya ikan, terutama dalam konteks Desa Perikanan Cerdas, tidak bisa hanya ditopang oleh satu pihak saja. Semua pihak harus punya kepentingan bersama dan insentif yang saling menguatkan. Misalnya, dari sisi pemerintah, insentifnya bisa berupa dukungan kebijakan, anggaran, dan pelatihan berkelanjutan. Dari pihak akademisi atau perguruan tinggi, insentifnya bisa dalam bentuk riset terapan, teknologi tepat guna, atau pendampingan berbasis ilmu pengetahuan. Lalu dari swasta atau pelaku usaha, mereka bisa diberi insentif berupa peluang kemitraan usaha, akses pasar, atau insentif pajak kalau mereka ikut membina kelompok pembudi daya ikan. Dari sisi kami di desa, insentifnya bukan hanya soal anggaran, tapi juga ruang partisipasi kami ingin dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai pelaksana program. Begitu juga kelompok pembudi daya ikan, mereka harus merasa bahwa ada manfaat langsung yang mereka terima, baik dari sisi ekonomi, teknologi, maupun peningkatan kapasitas diri.

Menurut perspektif sektor perbankan, insentif merupakan aspek yang perlu bahkan harus dikolaborasikan karena setiap pemangku kepentingan memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, insentif berfungsi sebagai instrumen untuk menyatukan arah dan menciptakan keselarasan kolaborasi. Bagi perbankan, insentif dapat berupa perluasan akses layanan keuangan dan peningkatan literasi digital di sektor perikanan. Sementara itu, bagi pembudi daya ikan, insentif yang relevan mencakup kemudahan akses permodalan, penyediaan pelatihan, maupun dukungan pasar.

Lebih lanjut, insentif tidak harus dipahami secara sempit dalam bentuk materiil, melainkan juga dapat diwujudkan dalam bentuk non-materiil seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kemitraan jangka panjang, serta jaminan keberlanjutan usaha. Dengan adanya peluang peningkatan keterampilan, kepastian pasokan yang berkelanjutan, serta kemudahan dalam membangun jejaring dengan mitra usaha, komitmen antar pemangku kepentingan akan lebih mudah terjaga.

Aspek lain yang ditekankan adalah pentingnya transparansi dan kesepakatan bersama dalam perumusan insentif, agar tidak terjadi keberpihakan

yang hanya menguntungkan aktor tertentu. Insentif yang dirancang melalui musyawarah terbuka, dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak, akan menghasilkan kolaborasi yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan dalam kerangka implementasi Desa Perikanan Cerdas.

“Tentu saja ada insentif yang perlu dan bahkan harus dikolaborasikan. Masing-masing pihak yang terlibat punya tujuan dan kepentingan yang berbeda, sehingga insentif menjadi alat untuk menyatukan arah gerak. Bagi kami di sektor perbankan misalnya, insentifnya bisa berupa perluasan akses layanan keuangan dan literasi digital di sektor perikanan. Tapi bagi pembudi daya ikan, insentifnya bisa berupa kemudahan akses modal, pelatihan, atau dukungan pasar. Insentif itu tidak selalu harus dalam bentuk uang atau subsidi. Bisa juga berupa peningkatan keterampilan, jaminan keberlanjutan pasokan, atau kemudahan berjejaring dengan mitra usaha. Jika semua pihak menyadari bahwa mereka bisa mendapat manfaat dari kolaborasi ini, maka komitmen akan lebih mudah dijaga.”

Insentif merupakan salah satu aspek krusial dalam memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan pada program pemberdayaan pembudi daya ikan. Insentif yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup akses terhadap sumber daya, kesempatan mengikuti pelatihan, serta pengakuan terhadap peran dan kontribusi setiap aktor.

Berbagai bentuk insentif tersebut perlu dikelola dan dibagikan secara adil sesuai kapasitas serta fungsi masing-masing pemangku kepentingan. Pemerintah, misalnya, dapat memberikan insentif melalui dukungan kebijakan, regulasi, dan program yang berpihak pada pembudi daya ikan. Dunia usaha, termasuk perbankan dan korporasi, berpotensi menawarkan insentif berupa akses pembiayaan dan perluasan pasar. Sementara itu, akademisi berkontribusi melalui pendampingan berbasis riset, penerapan teknologi tepat guna, dan penyediaan rekomendasi ilmiah.

Lebih jauh, penyelarasan insentif di antara seluruh pihak menjadi sangat penting. Jika tidak dikolaborasikan secara tepat, perbedaan bentuk dan orientasi insentif berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, setiap insentif harus dirancang untuk saling mendukung tujuan bersama, yakni pemberdayaan pembudi daya ikan secara berkelanjutan dan inklusif.

“Tentu saja, insentif menjadi salah satu aspek penting dalam kolaborasi ini. Tidak hanya insentif finansial, tetapi juga insentif dalam bentuk akses, pelatihan, dan bahkan pengakuan peran setiap aktor. Pemerintah bisa memberikan insentif berupa dukungan kebijakan dan program. Dunia usaha seperti perbankan atau korporasi dapat menawarkan insentif pembiayaan dan akses pasar. Sementara akademisi bisa berkontribusi melalui pendampingan berbasis riset dan teknologi.” Ujar Kepala Cabang BNI Puwokerto.

c. Sejarah Kerja Sama atau Konflik (*Prehistory of cooperation or conflict*) dan Tingkat Kepercayaan Awal (*Initial trust level*)

1) Sejarah Kerja Sama

Di Kabupaten Banyumas, telah tercatat adanya sejarah kerja sama yang relatif panjang antara berbagai pemangku kepentingan dalam bidang pemberdayaan pembudi daya ikan, sebelum program-program strategis seperti Desa Perikanan Cerdas dilaksanakan secara formal. Pola kolaborasi ini menjadi landasan penting dalam menciptakan ekosistem kelembagaan yang kondusif bagi pengembangan sektor perikanan budi daya.

Pertama, kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan, dengan kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan) menjadi bentuk kerja sama paling awal. Dinas Perikanan memberikan dukungan berupa bantuan sarana produksi, dan penyelenggaraan pelatihan teknis. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penguatan kelembagaan kelompok pembudi daya ikan sebagai mitra program. Kolaborasi ini berdampak pada peningkatan kapasitas teknis masyarakat, termasuk pemanfaatan teknologi modern seperti sistem bioflok dan perangkat pemantauan kualitas air berbasis digital. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Ketua Pokdakan, Bapak Anto:

“Ya, terdapat sejarah kerja sama yang cukup baik antara pemangku kepentingan dalam pemberdayaan pembudi daya ikan melalui program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah, pembudi daya ikan, BUMDes, perguruan tinggi, hingga swasta. Meski belum sempurna, sejarah kerja sama ini membuktikan bahwa ketika seluruh pihak saling mendukung dan memiliki visi yang sama, program Desa Perikanan Cerdas bisa berjalan lebih efektif dan memberi manfaat jangka panjang bagi pembudi daya ikan serta masyarakat desa secara luas”.

Kedua, kerja sama antara pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah memperkuat aspek kelembagaan ekonomi lokal. Pola kolaborasi ini terwujud melalui pengelolaan sarana produksi bersama, penyediaan layanan logistik, hingga pemasaran kolektif hasil panen. Peran BUMDes sebagai penghubung antara pembudi daya ikan dan pasar meningkatkan efisiensi distribusi serta memperkuat daya tawar kelompok di pasar.

Ketiga, dukungan dari kalangan akademisi, khususnya Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), memberikan kontribusi signifikan dalam bentuk penelitian terapan, transfer teknologi tepat guna, serta pendampingan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa melalui program magang maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN) turut mendukung proses digitalisasi data produksi, pengembangan *e-logbook*, serta pelatihan manajemen usaha. Keterlibatan akademisi berperan penting dalam mempercepat alih pengetahuan dan transfer inovasi.

Keempat, peran penyuluh perikanan menjadi kunci dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pembudi daya ikan. Penyuluh perikanan memfasilitasi pelatihan, pendampingan teknis, serta penguatan kelembagaan, sehingga memperkuat integrasi antara kebijakan formal dan praktik lapangan.

Kelima, kerja sama dengan sektor swasta, koperasi, dan *offtaker* memberikan jaminan pasar serta memperkenalkan teknologi baru. Beberapa kelompok pembudi daya ikan telah menjalin kontrak kemitraan dengan *offtaker* untuk memastikan pemasaran produk, sementara pihak swasta berperan dalam penyediaan benih unggul, perangkat sensor kualitas air, maupun aplikasi manajemen budi daya. Kontribusi sektor swasta berimplikasi pada meningkatnya kepastian usaha dan peluang penerapan teknologi digital dalam sistem budi daya.

Selain aktor-aktor tersebut, sektor perbankan juga memiliki kontribusi melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perikanan dan program edukasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan. Relasi yang telah terjalin sejak lama memperlancar

koordinasi dan adaptasi ketika program Desa Perikanan Cerdas mulai diimplementasikan, sehingga proses kolaborasi tidak dimulai dari titik nol.

Secara keseluruhan, pengalaman historis dalam bentuk kolaborasi lintas aktor di Kabupaten Banyumas telah menciptakan modal sosial yang berharga. Kepercayaan yang dibangun melalui interaksi jangka panjang memperkuat kelembagaan lokal, memperluas jaringan pasar, serta mempercepat proses digitalisasi dalam sektor perikanan budi daya. Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan melalui program Desa Perikanan Cerdas dapat dipandang sebagai upaya sistematisasi dan integrasi dari kerja sama yang telah ada sebelumnya, yang kini diarahkan menuju model pemberdayaan berbasis kolaborasi multi-aktor yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 4. 11 Sejarah Kerja Sama Antar Aktor

Aktor	Bentuk Kerja Sama	Kontribusi	Dampak
Dinas Perikanan Kabupaten Banyumas	Pelatihan teknis, bantuan sarana produksi, fasilitasi kelembagaan	Penyediaan alat budi daya, transfer teknologi budi daya modern, penguatan kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan)	Peningkatan kapasitas teknis pembudi daya ikan dan penguatan kelembagaan lokal
Pemerintah Desa & BUMDes	Pengelolaan sarana produksi bersama, logistik, pemasaran kolektif	Penyediaan kolam komunitas, pabrik pakan skala kecil, layanan distribusi & penjualan	Efisiensi distribusi, peningkatan daya tawar di pasar, kemandirian ekonomi desa
Perguruan Tinggi (Unsoed, UMP, Politeknik Kelautan Perikanan)	Penelitian terapan, pendampingan masyarakat, magang/KKN tematik	Transfer teknologi bioflok, RAS, digitalisasi data produksi, pelatihan manajemen usaha	Alih pengetahuan & inovasi, peningkatan literasi digital pembudi daya ikan

Penyuluh perikanan	Pendampingan teknis & kelembagaan, fasilitasi komunikasi	Menjembatani kebijakan dengan kebutuhan lapangan, mendampingi adopsi teknologi	Integrasi kebijakan-program, peningkatan adopsi inovasi oleh pembudi daya ikan
Sektor Swasta & <i>Offtaker</i>	Kemitraan pemasaran, penyediaan teknologi & input produksi	Menyediakan benih unggul, kontrak penjaminan pasar, perangkat sensor & aplikasi budi daya	Kepastian pasar, peningkatan efisiensi produksi, adopsi teknologi digital
Koperasi Perikanan	Dukungan modal usaha & pemasaran kolektif	Menyalurkan bantuan, memperkuat akses modal, pelatihan berbasis pasar	Penguatan posisi tawar, akses pembiayaan lebih mudah
Perbankan (Bank Penyalur KUR)	Fasilitasi permodalan & edukasi keuangan	Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perikanan, pelatihan literasi finansial	Meningkatkan akses pembiayaan formal, memperkuat manajemen keuangan UMKM perikanan
Kementerian (KKP, Kominfo)	Program bantuan teknis & digitalisasi	Dukungan regulasi, riset teknologi tepat guna, pelatihan digitalisasi	Dukungan lintas lembaga, penguatan inovasi & integrasi program nasional

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Secara keseluruhan, pengalaman-pengalaman kolaboratif tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki modal sosial dan kelembagaan lokal yang relatif kuat. Fondasi historis ini menjadi basis penting bagi pengembangan model kolaborasi yang lebih terpadu, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bupati Banyumas:

“Sejarah kerja sama ini menjadi fondasi penting bagi kami untuk mengembangkan model kolaborasi yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Banyumas

memiliki potensi kelembagaan lokal yang cukup kuat untuk mendukung pemberdayaan pembudi daya ikan secara bersama-sama.”

Implementasi pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan melalui program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas tidak dapat dilepaskan dari sejarah kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antar pemangku kepentingan. Meskipun dalam beberapa kasus terdapat dinamika berupa gesekan kecil dan perbedaan kepentingan, pengalaman kolaboratif yang terbentuk sebelum dan selama pelaksanaan program telah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem perikanan yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

Ketika program Desa Perikana Cerdas mulai diimplementasikan, kerja sama yang telah terbentuk sebelumnya menjadi modal sosial yang berharga. Misalnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal dalam penerapan teknologi bioflok telah memperkuat fondasi digitalisasi yang kini menjadi salah satu pilar utama program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Demikian pula, kemitraan antara koperasi, kelompok pembudi daya ikan, dan dinas terkait dalam pengelolaan bantuan serta kegiatan pelatihan turut memperkuat kelembagaan lokal. Dengan demikian, program Desa Perikana Cerdas dapat dipandang sebagai upaya sistematisasi dan perluasan dari kerja sama yang telah ada, dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi.

Tantangan yang tersisa terletak pada bagaimana semua pihak dapat menjaga komitmen, meningkatkan konsistensi partisipasi, dan memastikan keberlanjutan kolaborasi. Dengan demikian, program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas memiliki potensi untuk berkembang menjadi model pemberdayaan perikanan berbasis kolaborasi multi-aktor yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Bapak Sulis:

“Ya, tentu ada sejarah kerja sama yang cukup positif di antara para pemangku kepentingan. Bahkan sebelum program Desa Perikanan Cerdas ini digulirkan secara resmi, sebenarnya kami di Kabupaten Banyumas sudah beberapa kali menjalin kolaborasi antara pemerintah daerah, kelompok pembudi daya ikan, perguruan tinggi, dan pihak swasta,

terutama dalam hal pelatihan teknis, bantuan sarana budi daya, dan pengembangan pasar.”

Sejarah kerja sama antar pemangku kepentingan dalam implementasi program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh tingkat kolaborasi lintas sektor. Program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan pada dasarnya tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya sinergi antara pemerintah, pemerintah kabupaten, dinas perikanan, pemerintah desa, kelompok pembudi daya ikan, akademisi, serta sektor swasta. Setiap aktor berkontribusi melalui peran dan kapasitasnya masing-masing, sehingga membentuk ekosistem kolaboratif yang saling melengkapi.

Salah satu bentuk konkret kerja sama dapat dilihat pada tahap awal implementasi program, ketika Dinas Perikanan Kabupaten Banyumas menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi lokal. Melalui program tersebut, dosen dan mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan pendampingan terhadap kelompok pembudi daya ikan, khususnya dalam penerapan teknologi digital. Beberapa inovasi yang diperkenalkan meliputi penggunaan aplikasi pencatatan panen serta sistem monitoring kualitas air berbasis digital. Kehadiran teknologi ini terbukti membantu meningkatkan kapasitas pembudi daya ikan, terutama karena sebagian besar dari mereka sebelumnya belum memiliki pengalaman yang memadai dalam pemanfaatan teknologi.

Selain itu, pemerintah desa juga memainkan peran signifikan melalui kerja sama dengan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kolaborasi ini difokuskan pada aspek permodalan dan pemasaran hasil budi daya, sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat atau daerah. Inisiatif ini sekaligus mencerminkan upaya membangun kemandirian ekonomi lokal berbasis kelembagaan desa.

Peran penyuluh perikanan juga sangat penting dalam memperkuat keberhasilan program. Kehadiran penyuluh perikanan di lapangan memberikan dukungan teknis dan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok pembudi

daya ikan. Tanpa peran strategis penyuluh perikanan, penerapan teknologi maupun inovasi budi daya modern sulit diadaptasi secara efektif oleh masyarakat pembudi daya ikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas telah mendorong terbangunnya semangat kolaborasi yang relatif kuat. Sinergi antara berbagai aktor tidak hanya mendukung keberhasilan implementasi program, tetapi juga memperlihatkan adanya embrio kemandirian lokal yang dapat dijadikan sebagai model kolaboratif dalam pengembangan sektor perikanan berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Panembungan:

“Ya, tentu saja ada sejarah kerja sama yang cukup baik antara pemangku kepentingan dalam program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan melalui Desa Perikanan Cerdas ini. Justru keberadaan program ini tidak akan berjalan tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah kabupaten, dinas perikanan, pemerintah desa, kelompok pembudi daya ikan, hingga akademisi dan sektor swasta, semua pernah terlibat dalam berbagai bentuk kolaborasi. Salah satu contoh konkret yang bisa saya sebutkan adalah saat awal implementasi program di wilayah kami, di mana ada kerja sama antara dinas perikanan dengan perguruan tinggi lokal. Mereka mengirim mahasiswa dan dosen untuk membantu mendampingi kelompok pembudi daya ikan dalam menerapkan teknologi digital seperti penggunaan aplikasi pencatatan panen dan monitoring kualitas air. Itu sangat membantu masyarakat, apalagi mereka sebelumnya tidak familiar dengan teknologi.”

Sebelum implementasi program Desa Perikanan Cerdas, kerja sama antar pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas telah terjalin dalam berbagai bentuk, meskipun masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka kolaborasi yang menyeluruh. Salah satu aktor penting dalam kerja sama ini adalah sektor perbankan, yang telah menyalurkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perikanan dan menyelenggarakan program edukasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan. Relasi yang telah terbangun sejak lama menjadi pondasi yang memperlancar proses adaptasi dan koordinasi ketika program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan mulai dijalankan, sehingga tidak perlu dimulai dari titik nol.

Bentuk kerja sama yang pernah terjalin dapat diuraikan ke dalam beberapa pola utama. Pertama, kolaborasi antara Dinas Perikanan dan kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan) yang diwujudkan melalui pemberian pelatihan teknis, bantuan sarana produksi, serta pembinaan manajemen usaha. Kelompok pembudi daya ikan berperan aktif dalam mengorganisasi kegiatan, mengelola bantuan, dan menyusun pelaporan secara kolektif. Kedua, sinergi antara penyuluh perikanan dengan aparat desa maupun kecamatan, di mana penyuluh perikanan menjembatani kebutuhan teknis dengan kebijakan desa, sementara aparat desa memfasilitasi ruang, dukungan anggaran dari dana desa, serta penyuluh perikanan massal.

Ketiga, keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset, baik melalui penelitian terapan, pendampingan teknologi budi daya seperti sistem bioflok atau *recirculating aquaculture system* (RAS), maupun kegiatan pengolahan hasil perikanan. Selain itu, mahasiswa turut berperan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di desa-desa yang menjadi lokasi program. Keempat, kerja sama dengan pelaku usaha dan koperasi perikanan, yang mencakup aspek pemasaran hasil budi daya, penyediaan benih, pelatihan berbasis kebutuhan pasar, hingga penguatan modal usaha melalui mekanisme koperasi.

Meskipun kerja sama sebelumnya lebih bersifat sporadis dan berbasis program tertentu, pengalaman tersebut menjadi modal awal yang penting bagi terbentuknya ekosistem kolaboratif dalam program Desa Perikanan Cerdas. Program ini kemudian hadir untuk mensistematisasi, memperluas, dan memperdalam kolaborasi lintas aktor sehingga pembangunan sektor perikanan di Banyumas dapat diarahkan secara lebih holistik, berkelanjutan, dan inklusif. Berikut pernyataan dari Kepala Kantor Cabang BNI Purwokerto:

“Sebenarnya sebelum adanya program Desa Perikanan Cerdas ini, kami dari pihak perbankan sudah beberapa kali menjalin kerja sama dengan dinas perikanan dan kelompok pembudi daya ikan. Misalnya dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perikanan atau program edukasi keuangan bagi pelaku UMKM perikanan. Relasi yang sudah terbangun sejak lama cukup membantu saat program ini dijalankan. Jadi kita tidak mulai dari nol. Sudah ada rasa saling mengenal dan

memahami pola kerja masing-masing. Ini mempercepat proses adaptasi dan koordinasi di lapangan.”

Meskipun demikian, kerja sama sebelumnya masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi sekompleks sekarang. Kerja sama sebelumnya masih bersifat sporadis atau berbasis program tertentu, belum menyatu dalam satu ekosistem kolaboratif seperti program Desa Perikanan Cerdas. Saat ini kerja samanya lebih terstruktur, dan masing-masing pemangku kepentingan duduk bersama merancang arah pembangunan perikanan yang lebih holistik.

2) Sejarah Konflik

Secara umum, tidak ditemukan adanya konflik terbuka maupun sistemik antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas. Namun demikian, dinamika kolaborasi lintas sektor secara inheren tidak terlepas dari potensi gesekan dan perbedaan kepentingan yang dapat memengaruhi efektivitas program.

Pertama, perbedaan tujuan dan kepentingan antar aktor menjadi salah satu sumber potensial ketegangan. Perguruan tinggi, misalnya, cenderung berorientasi pada penerapan teknologi dan penguatan basis riset, sedangkan kelompok pembudi daya ikan lebih menekankan pada efisiensi biaya serta peningkatan hasil produksi. Perbedaan orientasi ini kadang menimbulkan ketidaksinkronan maupun miskomunikasi dalam implementasi kegiatan.

Kedua, ketimpangan akses dan peran juga dapat memicu munculnya ketegangan. Dalam beberapa kasus, ketika salah satu pihak merasa dominan atau ketika kontribusinya tidak dihargai secara proporsional khususnya pada kelompok masyarakat lokal maka dapat timbul ketidakpercayaan atau resistensi terhadap program. Hal ini menunjukkan pentingnya distribusi peran dan manfaat yang adil dalam setiap skema kolaborasi.

Ketiga, tantangan koordinasi lintas lembaga juga kerap muncul sebagai sumber gesekan. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar lembaga pendukung, masih sering diwarnai oleh kendala birokratis maupun ego

sektoral. Hambatan koordinasi semacam ini berpotensi mengurangi efektivitas kolaborasi apabila tidak ditangani dengan mekanisme komunikasi yang tepat.

Meskipun terdapat potensi gesekan, secara keseluruhan seluruh pemangku kepentingan di Banyumas menunjukkan komitmen yang relatif tinggi terhadap tujuan bersama, yakni peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan. Pendekatan kolaboratif yang dikembangkan melalui peran penyuluh perikanan dan forum komunikasi lokal telah berfungsi sebagai instrumen penting untuk meredam ketegangan, mengarahkan perbedaan, serta mengubah potensi konflik menjadi kekuatan kolaboratif.

Dengan demikian, dinamika perbedaan pandangan yang muncul lebih bersifat operasional ketimbang fundamental. Alih-alih menjadi penghambat, pengalaman tersebut justru memberikan pelajaran berharga dalam membangun model kolaborasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan di masa mendatang. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPPSDMKP:

“Secara umum, kami tidak mencatat adanya konflik terbuka atau sistemik antar pemangku kepentingan dalam pemberdayaan pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas. Namun, dalam dinamika kolaborasi lintas sektor seperti ini, tentu tidak terlepas dari potensi gesekan atau perbedaan kepentingan. Kami melihat bahwa seluruh pemangku kepentingan di Banyumas memiliki komitmen yang cukup tinggi terhadap tujuan bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan pembudi daya ikan. Pendekatan kolaboratif yang terus kami kembangkan termasuk melalui penyuluhan perikanan dan forum komunikasi lokal mampu meredam potensi konflik dan mengarahkan perbedaan menjadi kekuatan. Jadi, jika pun pernah muncul dinamika atau perbedaan pandangan, hal itu lebih bersifat operasional, bukan konflik fundamental. Justru dari proses tersebut, kami belajar untuk membangun kolaborasi yang lebih terbuka dan partisipatif ke depan.”

Hal berbeda disampaikan oleh ketua kelompok pembudi daya ikan Kridoyuwono, dalam proses pemberdayaan pembudi daya ikan melalui program Desa Perikanan Cerdas, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat dinamika konflik atau ketegangan antar pemangku kepentingan. Meskipun konflik yang terjadi tidak berkembang menjadi pertentangan terbuka berskala besar, sejumlah gesekan

dan perbedaan kepentingan muncul secara nyata dan memengaruhi jalannya program.

Salah satu bentuk ketegangan yang muncul berkaitan dengan ketidakjelasan peran pada tahap awal pelaksanaan program. Terdapat kebingungan mengenai pembagian tanggung jawab antara dinas terkait, pemerintah desa, serta kelompok pembudi daya ikan. Situasi ini menimbulkan miskomunikasi yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program dan kekecewaan sebagian aktor yang merasa bahwa ekspektasi mereka tidak terpenuhi.

Selain itu, distribusi bantuan dan fasilitas program juga menjadi sumber ketegangan. Beberapa kelompok pembudi daya ikan merasa diperlakukan tidak adil karena tidak memperoleh peralatan, pelatihan, atau akses teknologi yang sama dengan kelompok lain. Ketidakmerataan ini memicu rasa ketidakpuasan, kecemburuan sosial, dan berpotensi melemahkan semangat gotong royong di tingkat komunitas.

Konflik lain juga terjadi dalam hubungan antara kelompok pembudi daya ikan dengan pelaku pasar atau pihak swasta. Persoalan utama yang muncul adalah terkait ketidaktransparanan harga jual dan model kemitraan yang diterapkan. Dalam beberapa kasus, pembudi daya ikan merasa memiliki posisi tawar yang lemah sehingga tidak memperoleh keuntungan yang proporsional. Kondisi ini menegaskan pentingnya adanya mekanisme mediasi, transparansi, serta kepemimpinan yang adil untuk menjaga keseimbangan kepentingan antar pihak.

Secara keseluruhan, dinamika konflik yang terjadi dalam pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas bersifat laten dan lebih merefleksikan perbedaan persepsi maupun akses terhadap sumber daya. Namun, jika tidak dikelola secara tepat, potensi konflik ini dapat menjadi hambatan bagi keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif, forum musyawarah multipihak, serta peningkatan kapasitas kelembagaan lokal agar konflik dapat diredam dan diselesaikan secara konstruktif. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Panembangan:

"Kalau kita bicara sejarah konflik, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pemberdayaan pembudi daya ikan, terutama melalui program seperti Desa Perikanan Cerdas, pernah terjadi gesekan-gesekan antar pemangku kepentingan. Walaupun tidak sampai ke tingkat konflik besar, ketegangan dan perbedaan kepentingan itu nyata. Contohnya masalah pembagian bantuan atau fasilitas juga sempat menimbulkan ketegangan. Ada kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil, misalnya tidak mendapatkan alat budi daya, pelatihan, atau akses teknologi seperti yang diterima kelompok lain. Hal ini bisa memicu rasa iri dan menurunkan semangat gotong royong."

Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Bidang Perikanan, Ibu Irma yang menyatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas terdapat dinamika interaksi antar pemangku kepentingan. Terdapat beberapa bentuk ketegangan yang dapat dikategorikan sebagai konflik laten, meskipun tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Salah satu contohnya adalah terjadinya miskomunikasi antara kelompok pembudi daya ikan dengan pihak swasta penyedia teknologi pada tahap awal pelaksanaan program. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman bersama mengenai peran serta manfaat dari teknologi yang ditawarkan, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan pembudi daya ikan dalam menerima inovasi tersebut.

"Kalau kita bicara konflik, memang ada beberapa dinamika yang bisa dikategorikan sebagai bentuk ketegangan atau perbedaan kepentingan di lapangan. Misalnya, pada tahap awal pelaksanaan program Desa Perikanan Cerdas, sempat terjadi miskomunikasi antara pembudi daya ikan dengan pihak swasta penyedia teknologi. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman bersama mengenai peran dan manfaat dari teknologi yang ditawarkan."

Selain itu, muncul pula kekhawatiran di kalangan pembudi daya ikan terkait transparansi distribusi bantuan maupun insentif program. Kondisi ini menimbulkan rasa curiga terhadap pemerintah maupun mitra pelaksana, meskipun lebih tepat dikategorikan sebagai perbedaan persepsi yang belum terselesaikan secara tuntas ketimbang konflik terbuka. Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan ketidakselarasan persepsi dan mengganggu kelancaran implementasi program.

Koordinator penyuluh perikanan, Khotoh Suraikhanah juga menyampaikan hal senda, tercatat adanya dinamika konflik di antara para pemangku kepentingan, meskipun sifatnya relatif terbatas dan tidak destruktif. Konflik tersebut umumnya berakar pada perbedaan kepentingan, ketidakmerataan akses terhadap sumber daya, serta komunikasi yang belum optimal di antara aktor-aktor yang terlibat.

“Ya, terdapat sejarah konflik atau setidaknya ketegangan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas. Konflik ini umumnya bersifat struktural (*top-down*), sosial (antar kelompok), dan kelembagaan (antar institusi pelaksana). Meskipun tidak selalu meledak, gesekan ini berpotensi menghambat efektivitas program”.

Dalam pelaksanaan program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas, terdapat riwayat konflik yang meskipun tidak berskala besar, namun mencerminkan adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antar pemangku kepentingan. Konflik yang terjadi lebih bersifat laten dan muncul dalam bentuk ketidakselarasan persepsi mengenai peran, mekanisme pengambilan keputusan, serta prioritas program. Pada tahap awal implementasi, sebagian pihak merasa bahwa proses perencanaan terlalu terpusat pada aktor tertentu, sementara aspirasi aktor lainnya kurang terakomodasi.

Sejumlah konflik juga bersumber dari komunikasi yang belum optimal dan perbedaan ekspektasi antarpihak. Misalnya, pelaku usaha kerap menilai bahwa kebijakan pemerintah berjalan lambat, sedangkan pemerintah menilai bahwa sektor usaha kurang transparan dalam menyampaikan kepentingannya. Miskomunikasi dan ketidaksinkronan ekspektasi inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan dalam koordinasi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh perwakilan PT Telkom, Bapak Rizki:

“Kalau dibilang pernah ada konflik, ya memang pernah. Bukan konflik besar, tapi lebih ke perbedaan pandangan dan kepentingan. Misalnya, pada awal program, beberapa pihak mungkin merasa ragu atau belum yakin dengan peran masing-masing. Ada juga yang merasa proses pengambilan keputusan terlalu terpusat di satu pihak, padahal seharusnya semua duduk sama rata. Sumber konflik biasanya karena miskomunikasi, atau

ekspektasi yang tidak sejalan. Kadang pelaku usaha merasa kebijakan terlalu lambat, sementara pemerintah merasa sektor usaha kurang transparan. Tapi hal-hal seperti ini bisa diselesaikan kalau ada ruang dialog.”

Gesekan juga terjadi antara pemangku kepentingan teknis dan nonteknis. Perguruan tinggi misalnya, lebih menekankan penerapan teknologi berbasis riset, sedangkan pembudi daya ikan mengutamakan efisiensi biaya dan peningkatan hasil produksi. Perbedaan orientasi ini kerap menimbulkan ketidaksinkronan antara inovasi teknologi dan realitas sosial-ekonomi di lapangan. Di sisi lain, keterlibatan banyak lembaga seperti koperasi, BUMDes, perguruan tinggi, dan mitra swasta kadang menimbulkan tumpang tindih kewenangan (*overlapping roles*) yang berpotensi memicu ketegangan antar institusi.

Pertama, terdapat ketegangan antara pemerintah dan pembudi daya ikan yang disebabkan oleh pola pengambilan keputusan yang cenderung *top-down* tanpa melibatkan pembudi daya ikan secara aktif dalam tahap perencanaan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) di kalangan pembudi daya ikan, sehingga menimbulkan resistensi atau rendahnya tingkat partisipasi. Beberapa forum diskusi kelompok terfokus (FGD) menunjukkan bahwa pembudi daya ikan kerap menilai teknologi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi lapangan, namun tetap dipaksakan oleh pihak pelaksana program.

Kedua, konflik kepentingan juga terjadi antar kelompok pembudi daya ikan. Tidak semua kelompok memperoleh akses yang setara terhadap fasilitas, pelatihan, maupun bantuan program. Ketidakmerataan ini menimbulkan kecemburuan sosial dan fragmentasi antar kelompok, terutama antara kelompok yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa atau pengelola program dengan kelompok yang relatif terpinggirkan. Misalnya, bantuan teknologi budi daya seperti sensor kualitas air atau aerator otomatis hanya diberikan kepada kelompok yang dinilai aktif, sementara kelompok lain merasa diabaikan.

Ketiga, ketegangan muncul antara pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Koperasi Mina Satya Panembangan. Persoalan

utama terletak pada perbedaan persepsi mengenai pengelolaan dana serta pembagian peran kelembagaan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Akibatnya, terjadi tarik-menarik kepentingan yang berimplikasi pada melambatnya bahkan stagnasi pelaksanaan program. Dalam beberapa kasus, BUMDes menilai kewenangannya hanya terbatas pada pelaksanaan teknis, sedangkan keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa tanpa adanya koordinasi yang memadai.

Keempat, konflik juga teridentifikasi dalam relasi antara pembudi daya ikan dengan pihak swasta atau *offtaker*. Permasalahan yang menonjol adalah ketidaktransparanan dalam kerja sama bisnis, khususnya terkait mekanisme harga dan kontrak jual beli. Hal ini melemahkan posisi tawar pembudi daya ikan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian. Terdapat kasus di mana pembudi daya ikan telah menyesuaikan produksi sesuai permintaan *offtaker*, tetapi saat panen harga diturunkan secara sepihak.

Konflik-konflik tersebut tidak bersifat destruktif, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai *conflict of adjustment* yang bersifat konstruktif. Pengalaman menghadapi gesekan justru menjadi sarana pembelajaran kolektif bagi pemangku kepentingan untuk menegaskan posisi dan perannya, serta menyadari pentingnya koordinasi lintas sektor. Seiring waktu, komunikasi antar pihak berkembang lebih terbuka, dan setiap aktor mulai menunjukkan kesediaan untuk menerima kritik serta masukan.

Pengalaman konflik tersebut justru berperan sebagai katalis dalam memperkuat kesadaran akan pentingnya komunikasi terbuka, kejelasan peran, serta penyusunan mekanisme kolaborasi yang lebih transparan dan inklusif. Dengan kata lain, konflik ringan yang terjadi menjadi bagian dari proses pembelajaran kolektif yang mendorong terciptanya tata kelola kolaborasi yang lebih sehat di kemudian hari. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Taufik, akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman:

“Kalau kita lihat dari dinamika yang terjadi sebelum Desa Perikanan Cerdas ini berjalan, memang pernah ada gesekan kecil antar pemangku kepentingan, terutama soal pembagian peran dan persepsi siapa yang

paling dominan. Misalnya, dulu sempat ada ketegangan antara kelompok pembudi daya ikan dengan pihak pemerintah desa karena merasa kurang dilibatkan dalam proses awal. Juga, sektor swasta pernah merasa dibebani ekspektasi terlalu tinggi tanpa dukungan kebijakan yang memadai.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejarah konflik dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural (relasi *top-down*), sosial (ketidaksetaraan akses antar kelompok), kelembagaan (ketidakseimbangan peran antar institusi), maupun ekonomi (asimetrisnya hubungan pasar antara pembudi daya ikan dan pihak swasta). Walaupun konflik tersebut tidak meledak secara terbuka, gesekan yang terjadi berpotensi menghambat efektivitas program apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola kolaborasi melalui:

- a) Penerapan komunikasi yang transparan dan partisipatif.
- b) Pembentukan forum musyawarah multipihak yang berkelanjutan.
- c) Peningkatan transparansi dalam distribusi sumber daya.
- d) Penguatan kapasitas kelembagaan pembudi daya ikan agar memiliki posisi tawar yang lebih setara dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan pendekatan tersebut, potensi konflik tidak hanya dapat diredam, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai katalisator untuk membangun model kolaborasi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 12 Sejarah Konflik Antar Aktor

Aktor yang Terlibat	Penyebab Konflik	Bentuk Konflik	Dampak	Mekanisme Penyelesaian
Kelompok pembudi daya ikan ↔ Pemerintah (pusat/daerah/desa)	Proses perencanaan bersifat <i>top-down</i> , kelompok merasa kurang dilibatkan	Gesekan komunikasi, protes, resistensi terhadap program	Lemahnya rasa memiliki (<i>sense of ownership</i>), partisipasi menurun	Musyawarah desa, peningkatan partisipasi dalam perencanaan, forum dialog multipihak
Antar kelompok pembudi daya ikan	Distribusi bantuan, pelatihan, dan fasilitas teknologi tidak merata	Kecemburuan sosial, persaingan antar kelompok	Fragmentasi, solidaritas kelompok melemah	Transparansi distribusi bantuan, pembentukan forum kelompok pembudi daya ikan
Pemerintah desa ↔ BUMDes dan Koperasi Mina Satya Panembangan	Perbedaan persepsi tentang kewenangan dan peran strategis	Tarik-menarik kepentingan, koordinasi tersendat	Pelaksanaan program melambat, stagnasi pada kegiatan ekonomi	Penegasan peran melalui regulasi desa, mekanisme koordinasi rutin
Pembudi daya ikan ↔ Swasta/Offtaker	Harga jual tidak transparan, kontrak kemitraan timpang	Ketegangan ekonomi, rasa dirugikan	Posisi tawar pembudi daya ikan lemah, potensi kerugian ekonomi	Kontrak bisnis transparan, pendampingan hukum, pembentukan koperasi sebagai penguat posisi tawar
Perguruan tinggi ↔ Pembudi daya ikan	Perbedaan orientasi (teknologi riset vs efisiensi biaya produksi)	Perbedaan perspektif, ketidaksinkronan implementasi teknologi	Teknologi kurang diterapkan secara optimal	Pendampingan adaptif, riset terapan berbasis kebutuhan lapangan

Multipihak (pemerintah, koperasi, BUMDes, perguruan tinggi, swasta)	Tumpang tindih kewenangan (<i>overlapping roles</i>)	Konflik kelembagaan, ego sektoral	Koordinasi terhambat, efektivitas program menurun	Forum koordinasi lintas sektor, pembagian peran yang jelas dan tertulis
--	---	---	---	---

Sumber: Diolah Penulis (2024)

2. Proses Kolaborasi (*Collaborative process*)

a. Dialog Tatap Muka (*Face to face dialogue*)

Proses kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas dimulai dengan gagasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan melalui program Desa Perikanan Cerdas. Program ini dipelopori oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) yang saat ini menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) sebagai inisiator utama.

Tahap awal implementasi meliputi pemilihan lokasi program, yang dilakukan melalui mekanisme usulan dari penyuluh perikanan. Seleksi lokasi mempertimbangkan sejumlah kriteria yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan, hingga akhirnya Desa Panembangan dipilih sebagai lokasi *pilot project*. Setelah lokasi ditetapkan, dilakukan identifikasi terhadap potensi, peluang, dan permasalahan yang dihadapi oleh pembudi daya ikan. Dalam pendekatan ini, masyarakat pembudi daya ikan tidak hanya dipandang sebagai objek program, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek dalam pelaksanaan program.

Melalui fasilitasi Pemerintah Desa Panembangan dan penyuluh perikanan, tim BRSDMKP melakukan pertemuan dengan 40 perwakilan pembudi daya ikan untuk menggali informasi lapangan. Hasil dialog menunjukkan sejumlah persoalan utama, antara lain: harga pakan buatan (pelet) yang relatif tinggi, keterbatasan benih dan induk unggul, keterbatasan pemahaman mengenai Cara Budi daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB),

serta teknik budi daya sistem mina padi. Selain itu, pemasaran hasil produksi masih terbatas pada lokasi usaha, pola tanam padi masih dua kali dalam setahun meskipun memungkinkan tiga kali, keterbatasan akses jaringan telekomunikasi, minimnya modal usaha, serta lamanya siklus pembesaran ikan nila (3–4 bulan) yang mendorong kebutuhan diversifikasi usaha. Aspek sosial-ekonomi juga menjadi tantangan, antara lain tingkat pendidikan rata-rata hanya setingkat Sekolah Dasar, usia pembudi daya ikan relatif lanjut (rata-rata 46 tahun), serta kelembagaan koperasi yang belum berbadan hukum.

Di sisi lain, sejumlah potensi diidentifikasi oleh pembudi daya ikan dan pemerintah desa, meliputi luas lahan potensial untuk budi daya sistem mina padi sekitar 25 hektare, ketersediaan sumber air berkualitas sepanjang tahun, keindahan lanskap persawahan terasering di kaki Gunung Slamet yang berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis perikanan, serta tingginya semangat dan kekompakan masyarakat dalam menerima program.

Berdasarkan pemetaan masalah dan potensi tersebut, Kepala BRSDMKP melakukan penjajakan kerja sama dengan berbagai calon mitra kolaborasi yang dianggap mampu memberikan solusi. Mitra kolaborasi berasal dari beragam sektor, yaitu pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, serta media. Selanjutnya, seluruh aktor diundang untuk melakukan pertemuan dan dialog bersama masyarakat pembudi daya ikan guna menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut memuat program kegiatan, strategi penyelesaian masalah, pemanfaatan potensi lokal, kebutuhan sumber daya, jadwal pelaksanaan, sasaran, serta pihak penanggung jawab.

Untuk menunjang komunikasi dan koordinasi antarpihak, dibentuk forum komunikasi daring melalui aplikasi *WhatsApp group* serta dilaksanakan rapat daring secara berkala, baik mingguan maupun sesuai kebutuhan tindakan kolaborasi. Selain itu, pertemuan tatap muka (*on-site meeting*) juga dilakukan di Desa Panembangan sebagai sarana evaluasi efektivitas pelaksanaan program.

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang efektif menuntut adanya komunikasi yang jelas, pengelolaan yang baik, serta komitmen

kuat dari setiap aktor yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, para aktor kolaborasi mampu bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, serta pemahaman bersama atas masalah yang dihadapi (Ansell & Gash, 2008; Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012).

Gambar 4. 2 Whatsapp Group untuk Memudahkan Komunikasi



Dialog tatap muka antar pemangku kepentingan merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun *collaborative governance* pada implementasi program Desa Perikanan cerdas di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan perspektif dari berbagai aktor, dialog ini telah dilaksanakan dalam beragam bentuk, meskipun intensitas, kualitas, dan keberlanjutannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Bentuk dialog tatap muka yang dilakukan adalah:

- 1) Pemerintah daerah menekankan bahwa forum diskusi, sosialisasi, dan rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan menjadi agenda rutin, meskipun pada tahap awal pelaksanaan belum optimal akibat keterbatasan koordinasi.
- 2) Penyuluh perikanan mengonfirmasi adanya rapat teknis, sosialisasi desa, serta pertemuan intensif dengan kelompok pembudi daya ikan. Pertemuan informal inilah yang dinilai paling efektif sebagai saluran komunikasi dua arah.
- 3) Kelompok pembudi daya ikan menyebut forum sosialisasi awal, pelatihan teknis, serta kunjungan akademisi sebagai ruang interaksi yang membuka kesempatan menyampaikan aspirasi.
- 4) Akademisi menekankan fungsi dialog dalam menjembatani komunikasi, mengidentifikasi kendala, serta memperkuat jaringan sosial antar pihak.
- 5) Pihak swasta (perbankan/BNI) menilai forum tatap muka efektif mempercepat klarifikasi regulasi dan teknis, terutama terkait pembiayaan, meskipun tindak lanjut dan dokumentasi hasil diskusi masih lemah.
- 6) Kepala desa menekankan rapat kerja dan kunjungan lapangan sebagai sarana penting untuk memastikan relevansi program dengan kebutuhan lokal.

Beberapa keterbatasan yang konsisten muncul menurut partisipan dalam pelaksanaan dialog tatap muka ini adalah:

- 1) Keterlibatan terbatas, tidak semua pembudi daya ikan ikut serta, biasanya hanya perwakilan kelompok atau koperasi.
- 2) Asimetri komunikasi, forum cenderung bersifat *top-down*, lebih banyak informasi dari pemerintah ke masyarakat dibanding dialog partisipatif.

- 3) Frekuensi tidak rutin, pertemuan sering hanya dilakukan pada awal program atau saat evaluasi tahunan.
- 4) Kurang terdokumentasi, hasil dialog belum sepenuhnya diarsipkan dan dijadikan dasar perbaikan program.
- 5) Ketidakhadiran aktor kunci, unsur swasta, akademisi, dan kelompok perempuan sering tidak konsisten dalam menghadiri forum dialog.

Dialog tatap muka dipandang esensial oleh seluruh pemangku kepentingan karena:

- 1) Mendorong penyampaian aspirasi langsung dari pembudi daya ikan terkait persoalan teknis maupun sosial.
- 2) Memperkuat kepercayaan antar pihak (*trust building*), terutama antara pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat.
- 3) Menjadi instrumen penyelesaian masalah secara cepat (*problem-solving*) baik teknis maupun administratif.
- 4) Menjamin program lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan lokal, bukan sekadar berbasis target administratif.

Berdasarkan refleksi dari para aktor, terdapat sejumlah rekomendasi penguatan dialog tatap muka dalam implementasi pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, yaitu:

- 1) Rutin dan terjadwal, forum dialog sebaiknya tidak hanya insidental, melainkan terstruktur secara berkala.
- 2) Partisipatif dan inklusif, melibatkan seluruh kelompok pembudi daya ikan, termasuk skala kecil dan perempuan, serta aktor non-pemerintah seperti swasta dan akademisi.
- 3) Transparansi dan akuntabilitas, dialog harus diiringi evaluasi program, laporan hasil, dan keterbukaan anggaran.
- 4) Dokumentasi sistematis, setiap hasil pertemuan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk notulensi dan rekomendasi kebijakan.
- 5) Penguatan kapasitas penyuluh perikanan sebagai penghubung komunikasi lintas pihak, agar dialog lebih substantif dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Secara umum, dialog tatap muka dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Banyumas telah berjalan, namun masih dominan bersifat seremonial, *top-down*, dan sporadis. Agar dapat menjadi instrumen kolaborasi yang efektif, dialog perlu diperkuat ke arah partisipatif, rutin, inklusif, serta terintegrasi dalam sistem tata kelola program. Dengan demikian, dialog tatap muka tidak hanya menjadi sarana koordinasi, tetapi juga menjadi medium penguatan kepercayaan, resolusi konflik, dan pembangunan kolaborasi yang berkelanjutan.

Dalam implementasi program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas, dialog tatap muka antar pemangku kepentingan menjadi salah satu mekanisme penting untuk membangun kolaborasi lintas sektor yang efektif. Konsep *participatory governance* menekankan pentingnya pelibatan seluruh aktor dalam pengambilan keputusan, agar kebijakan dan program pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak, terungkap bahwa dialog tatap muka telah berlangsung dalam beberapa bentuk, meskipun intensitas, kualitas, dan keberlanjutannya masih perlu ditingkatkan.

Dari perspektif pembudi daya ikan, forum sosialisasi awal, pelatihan teknis, serta kunjungan akademisi menjadi momen utama untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan di lapangan. Namun, keterlibatan pembudi daya ikan masih terbatas pada perwakilan kelompok atau anggota koperasi, sehingga dialog belum sepenuhnya bersifat partisipatif. Beberapa kegiatan cenderung bersifat *top-down*, di mana informasi disampaikan dari pemerintah atau pelaksana program kepada masyarakat, bukan melalui mekanisme diskusi dua arah yang memungkinkan umpan balik dari pembudi daya ikan. Hal ini sejalan dengan temuan Bovaird dan Löffler (2003) yang menyatakan bahwa ketidakmerataan partisipasi dapat mengurangi rasa memiliki (*sense of ownership*) di kalangan masyarakat penerima program.

Penyuluh perikanan berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat. Pertemuan koordinasi teknis di tingkat dinas maupun

kecamatan, sosialisasi program di desa, serta pertemuan rutin dengan kelompok pembudi daya ikan difokuskan pada pembahasan teknis budi daya, pengisian data, pemanfaatan bantuan, dan evaluasi kegiatan. Meskipun demikian, frekuensi pertemuan cenderung sporadis, ruang dialog *bottom-up* masih terbatas, dan dokumentasi hasil pertemuan belum selalu memadai untuk perbaikan program di tahap berikutnya.

Dari perspektif pemerintah daerah dan kepala desa, rapat koordinasi lintas sektor serta kunjungan lapangan dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan, pembagian peran, dan evaluasi pelaksanaan program. Pihak swasta, termasuk mitra pasar dan lembaga perbankan, menilai dialog tatap muka membantu mempercepat klarifikasi teknis, persyaratan pembiayaan, dan penyelesaian kendala yang muncul di lapangan. Akademisi menekankan fungsi dialog sebagai sarana membangun komunikasi yang efektif, memahami kendala dan kebutuhan masing-masing pihak, serta memperkuat jaringan sosial antar pemangku kepentingan. Pandangan ini sejalan dengan teori *collaborative governance*, yang menekankan pentingnya kepercayaan, keterbukaan, dan jaringan sosial dalam keberhasilan kolaborasi multisektor (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012).

Secara keseluruhan, dialog tatap muka dalam program Desa Perikanan Cerdas menunjukkan beberapa keterbatasan, antara lain sifatnya yang cenderung *top-down*, frekuensi yang sporadis, keterlibatan aktor kunci yang belum merata, serta minimnya dokumentasi dan tindak lanjut. Meski demikian, dialog tetap memiliki peran strategis, karena memungkinkan penyampaian aspirasi secara langsung, memperkuat kepercayaan antar pemangku kepentingan, memfasilitasi penyelesaian masalah secara cepat, dan memastikan program lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penguatan mekanisme dialog tatap muka melalui jadwal rutin, pendekatan partisipatif, keterlibatan seluruh pihak, transparansi alokasi sumber daya, dan dokumentasi hasil pertemuan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi, membangun kepercayaan, serta mendukung keberlanjutan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan melalui program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust building*)

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas, rasa saling percaya antar pemangku kepentingan menjadi salah satu fondasi utama keberhasilan kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan berbagai aktor, dapat dikemukakan bahwa rasa saling percaya ini mulai tumbuh, meskipun belum sepenuhnya kuat dan merata. Hal ini sejalan dengan teori *collaborative governance*, yang menekankan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial yang krusial dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012).

Dari perspektif pembudi daya ikan, terdapat beberapa tanda positif terhadap munculnya rasa percaya. Pertama, komitmen bersama yang ditunjukkan melalui penandatanganan kerja sama dan peluncuran program Desa Perikanan Cerdas mengindikasikan niat semua pihak untuk bekerja sama. Kedua, pendampingan berkelanjutan oleh penyuluh perikanan dan petugas lapangan menciptakan hubungan yang akrab dan profesional, sehingga meningkatkan kepercayaan di tingkat lokal. Ketiga, pelibatan akademisi dan lembaga pelatihan, seperti Balai Pelatihan Perikanan Budi daya (BPPP) Tegal, memberikan keyakinan bahwa intervensi yang diberikan berbasis ilmu pengetahuan dan praktik lapangan.

Meski demikian, masih terdapat hambatan dalam membangun kepercayaan yang menyeluruh. Kurangnya keterbukaan informasi, khususnya terkait dana, jadwal kegiatan, dan hasil evaluasi, membuat sebagian pembudi daya ikan merasa tidak sepenuhnya dilibatkan. Selain itu, beberapa keputusan program masih bersifat *top-down* tanpa konsultasi mendalam dengan pelaku di lapangan, sehingga menimbulkan kesan bahwa pembudi daya ikan hanya menjadi pelaksana, bukan mitra sejajar. Ketimpangan partisipasi antar kelompok juga menjadi faktor penghambat, di mana hanya sebagian pembudi daya ikan yang lebih sering dilibatkan, sedangkan kelompok lain merasa terpinggirkan. Dampak dari kurangnya rasa percaya ini dapat berupa resistensi terhadap inovasi atau

kebijakan baru, yang pada akhirnya menghambat efektivitas dan keberlanjutan program.

Dari perspektif penyuluh perikanan, indikasi awal munculnya kepercayaan terlihat ketika kelompok pembudi daya ikan mulai terbuka terhadap pendampingan, menerima inovasi, dan mengikuti arahan program dengan itikad baik. Kepercayaan juga tercermin dari penyerahan keleluasaan kepada kelompok untuk mengelola bantuan, menentukan teknis budi daya, pengelolaan anggaran, dan penjadwalan kegiatan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah desa dan pembudi daya ikan menunjukkan adanya pengakuan dan dukungan yang nyata terhadap kapasitas lokal. Kendati demikian, masih terdapat kelompok yang ragu terhadap niat baik pemerintah akibat pengalaman sebelumnya, ketimpangan komunikasi, serta forum dialog yang belum rutin dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas menekankan bahwa rasa saling percaya merupakan fondasi utama dalam membangun kolaborasi yang sehat. Secara umum, pemerintah menilai kepercayaan sudah mulai terbentuk, terutama melalui keterlibatan pembudi daya ikan sebagai mitra aktif, bukan sekadar objek program. Pihak swasta, termasuk mitra teknologi dan perbankan, juga mulai melihat pembudi daya ikan sebagai mitra jangka panjang. Namun, pemerintah mengakui adanya tantangan, seperti keraguan sebagian pembudi daya ikan terhadap keberlanjutan program dan keyakinan pihak luar terhadap kesiapan lokal dalam menerima inovasi baru. Oleh karena itu, komunikasi terbuka, transparansi, dan pelibatan partisipatif di setiap tahap program menjadi strategi penting untuk memperkuat kepercayaan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) menegaskan bahwa rasa saling percaya antara pemangku kepentingan telah mulai terbangun melalui proses pendampingan berkelanjutan, keterlibatan aktif dalam perencanaan, dan keberhasilan-keberhasilan kecil yang dicapai bersama. Kepercayaan ini memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan secara kolaboratif. Kepala desa dan akademisi menambahkan bahwa forum diskusi, koordinasi terbuka, dan

partisipasi langsung menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap peran masing-masing, sehingga *trust* dalam kolaborasi semakin kuat.

Secara keseluruhan, rasa saling percaya antar pemangku kepentingan dalam program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan positif, meskipun belum sepenuhnya merata. Untuk memperkuat fondasi kolaborasi, perlu dilakukan komunikasi terbuka dan berkelanjutan, pelibatan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif, serta transparansi dalam setiap aspek program. Dengan strategi tersebut, kepercayaan dapat tumbuh secara alami, mendukung keberhasilan program, dan memastikan keberlanjutan pemberdayaan pembudi daya ikan di tingkat lokal.

c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to process*)

Dalam program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas, komitmen antar pemangku kepentingan merupakan faktor kunci yang mendasari keberhasilan kolaborasi. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan berbagai aktor, komitmen tersebut mulai terbangun, meskipun dalam praktiknya masih belum merata dan konsisten di semua tingkatan. Dari perspektif pembudi daya ikan, beberapa bentuk komitmen nyata telah terlihat, antara lain dukungan pemerintah pusat dan daerah melalui alokasi anggaran, penyediaan tenaga penyuluh perikanan, serta fasilitas pelatihan; keterlibatan akademisi dan lembaga pelatihan seperti Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal dalam memberikan pelatihan dan pendampingan teknis; serta kesungguhan kelompok pembudi daya ikan dalam membentuk kelompok kerja, mengikuti pelatihan, dan mencoba menerapkan teknologi baru dalam praktik budi daya.

Meskipun komitmen awal sudah terlihat, terdapat beberapa tantangan yang menghambat konsistensi kolaborasi. Pergantian pejabat atau perubahan kebijakan terkadang memengaruhi arah dan intensitas dukungan, sedangkan tidak semua pembudi daya ikan merasa dilibatkan secara aktif, sehingga muncul persepsi

bahwa kolaborasi hanya terjadi pada tingkat formalitas atau kelompok tertentu. Selain itu, kendala teknis dan keterbatasan anggaran kadang menyebabkan target kolaborasi tidak tercapai tepat waktu, yang berdampak pada semangat kerja sama di lapangan.

Penyuluh perikanan menambahkan bahwa komitmen terlihat dari dukungan struktural dan programatik Dinas Perikanan, keterlibatan aktif kelompok pembudi daya ikan, serta peran penyuluh perikanan sebagai penghubung dan penggerak. Pemerintah desa juga mulai memberikan perhatian nyata, misalnya dengan menyediakan fasilitas atau mempermudah proses administratif. Namun, beberapa pemangku kepentingan masih bersifat pasif, mekanisme evaluasi kontribusi masing-masing pihak minim, komitmen formal belum sepenuhnya tertulis, dan ekspektasi antar pihak kadang berbeda.

Dari perspektif pemerintah daerah, komitmen antar pemangku kepentingan merupakan fondasi utama kolaborasi yang efektif. Pemerintah menekankan pentingnya komunikasi rutin, monitoring bersama, serta penegasan kesepakatan melalui perjanjian kerja sama yang jelas, agar setiap pihak dapat mempertahankan tanggung jawabnya. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) menegaskan bahwa komitmen ini terlihat dalam keterlibatan aktif semua pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, serta upaya menjaga keberlanjutan dan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan. Forum koordinasi rutin juga berperan dalam memperkuat komunikasi dan menyamakan visi misi antar pemangku kepentingan.

Kepala desa menambahkan bahwa komitmen terlihat dalam tindakan nyata, bukan sekadar formalitas, seperti pendampingan langsung oleh penyuluh perikanan dan akademisi, serta keterlibatan aktif pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Namun, perlunya memperkuat konsistensi di semua level, mengingat beberapa pihak masih memandang program sebagai kegiatan jangka pendek. Demikian pula, pihak swasta, termasuk perbankan, menilai bahwa komitmen harus diwujudkan melalui evaluasi berkala dan tindak lanjut nyata, agar kolaborasi bersifat jangka panjang dan bukan sekadar proyek

sesaat. Akademisi menambahkan bahwa komitmen tercermin dari kehadiran dan kontribusi aktif semua pihak, yang menjadi fondasi agar program Desa Perikanan Cerdas dapat berjalan efektif dan membawa perubahan nyata di tingkat masyarakat.

Secara keseluruhan, komitmen antar pemangku kepentingan dalam program Desa Perikanan Cerdas di Banyumas sudah terlihat dan menjadi dasar kolaborasi, namun perlu diperkuat melalui konsistensi, keterlibatan yang merata, komunikasi rutin, serta tindakan nyata di lapangan. Komitmen yang kuat dan berkelanjutan memungkinkan semua pihak merasa memiliki tanggung jawab bersama, mendorong rasa percaya, dan mendukung keberlanjutan program di tingkat masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya dimulai dari niat baik, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata untuk menghadapi tantangan yang ada.

d. Pemahaman Bersama (*Shared understanding*)

Pemahaman bersama antar pemangku kepentingan merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan kolaborasi program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pengalaman pembudi daya ikan yang terlibat langsung, pemahaman ini telah mulai terbentuk, meskipun belum sepenuhnya merata dan menyatu di semua level. Bukti awal pemahaman bersama terlihat sejak sosialisasi awal program, di mana tujuan utama program Desa Perikanan Cerdas seperti digitalisasi, peningkatan produktivitas, dan pemberdayaan pembudi daya ikan dijelaskan secara jelas, sehingga semua pihak memperoleh gambaran bersama mengenai arah program. Selain itu, pelatihan bersama yang melibatkan pembudi daya ikan, penyuluh perikanan, dan aparat desa menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait mulai memahami arah dan tujuan kolaboratif program. Beberapa kelompok kerja bahkan telah mulai menjalankan tujuan kolaboratif secara selaras, seperti efisiensi produksi, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan berkelanjutan.

Meskipun demikian, pemahaman bersama belum merata. Bahasa teknis dan pendekatan akademis kadang sulit dipahami oleh pembudi daya ikan kecil yang belum terbiasa dengan konsep digitalisasi dan manajemen modern. Selain itu, tingkat kepedulian dan prioritas tiap pihak berbeda. Misalnya, pemerintah lebih menekankan target program, sementara pembudi daya ikan fokus pada hasil ekonomi jangka pendek. Belum adanya forum rutin yang menjadi tempat menyamakan persepsi secara terbuka dan sejajar juga menjadi kendala.

Penyuluh perikanan menegaskan bahwa pemahaman bersama mulai terbangun karena semua pihak memiliki persepsi relatif sama mengenai tujuan umum program dan peran masing-masing. Penyuluh perikanan berfungsi sebagai fasilitator teknis, dinas sebagai pengarah kebijakan, dan pembudi daya ikan sebagai pelaksana utama kegiatan. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan awal memberi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyamakan persepsi. Kendati demikian, tantangan masih ada, misalnya adanya interpretasi berbeda terkait tujuan atau strategi program, keterbatasan partisipasi dalam proses perencanaan, komunikasi lintas pemangku kepentingan yang belum optimal, serta minimnya dokumen rujukan bersama sebagai acuan.

Dari perspektif pemerintah daerah, pemahaman bersama terlihat dari keselarasan tujuan semua pihak untuk meningkatkan kapasitas pembudi daya ikan melalui teknologi dan digitalisasi. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pemahaman di level teknis dan operasional. Pemerintah berupaya menjembatani perbedaan perspektif antara pihak swasta, akademisi, dan pembudi daya ikan melalui forum dialog, sosialisasi, dan pelatihan terpadu. Kepala BPPSDMKP menegaskan bahwa pemahaman bersama ini merupakan fondasi utama kolaborasi, terlihat dari kesamaan visi, tujuan, dan peran yang disepakati bersama. Forum koordinasi dan dialog tatap muka rutin mendukung penguatan pemahaman ini, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika lapangan.

Kepala desa menambahkan bahwa secara umum pemahaman bersama telah terbentuk, terutama mengenai tujuan peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan melalui teknologi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun,

tingkat pemahaman antar pemangku kepentingan belum sepenuhnya seragam. Terdapat perbedaan fokus antara pengembangan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, atau manajemen usaha. Dialog dan komunikasi yang menyamakan persepsi menjadi penting agar semua pihak bergerak ke arah yang sama dan tidak saling tumpang tindih.

Sektor perbankan menekankan bahwa kesamaan tujuan menjadi fondasi penting, tetapi pendekatan masing-masing aktor harus selaras. Forum koordinasi dan pertemuan tatap muka sangat membantu menyatukan persepsi, sehingga setiap pihak mengetahui tanggung jawab dan titik temu peran mereka. Akademisi menegaskan bahwa pemahaman bersama ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui komunikasi intens dan forum koordinasi lintas sektor. Ketika semua pihak memiliki pemahaman yang sama, pelaksanaan program berjalan lebih lancar karena setiap pihak mengetahui arah dan kontribusinya.

Secara keseluruhan, pemahaman bersama antarpemangku kepentingan dalam program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Banyumas sudah mulai tumbuh, tetapi masih perlu dikuatkan melalui komunikasi yang setara, partisipatif, dan kontekstual. Tanpa pemahaman yang sama, kolaborasi hanya akan berjalan di permukaan, namun dengan pemahaman bersama yang kokoh, kolaborasi dapat menjadi kekuatan utama dalam pemberdayaan masyarakat perikanan.

e. Adanya Hasil Antara (*Intermediate outcomes*)

Keberhasilan sementara (*quick wins*) dalam program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas mulai terlihat, meskipun masih bersifat awal dan perlu penguatan agar berdampak jangka panjang. Berdasarkan pengalaman pembudi daya ikan yang terlibat, beberapa capaian utama dapat dikategorikan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan, terbentuknya jejaring kolaboratif, serta digitalisasi awal dalam pendataan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPP Tegal dan mitra akademik telah meningkatkan pemahaman pembudi daya ikan terhadap teknologi baru, termasuk

aplikasi manajemen kolam dan teknik budi daya berbasis efisiensi pakan. Sebagian kelompok bahkan mulai menggunakan alat bantu otomatis seperti kincir dan pemberi pakan otomatis, meskipun belum merata di seluruh wilayah.

Selain itu, program ini berhasil mempertemukan pihak-pihak yang sebelumnya tidak saling terhubung, seperti pembudi daya ikan, penyuluh perikanan, aparat desa, akademisi, dan pemerintah kabupaten. Forum-forum kolaboratif kecil mulai terbentuk, terutama dalam pengelolaan kelompok pembudi daya ikan dan koperasi, sehingga komunikasi dan koordinasi lebih lancar. Digitalisasi awal juga mulai diterapkan melalui pelaporan produksi dan penggunaan lahan secara daring, walaupun masih memerlukan pendampingan teknis lebih lanjut. Faktor pendukung keberhasilan ini antara lain komitmen awal dari dinas dan penyuluh perikanan, kesediaan sebagian pembudi daya ikan untuk belajar hal baru, serta pendampingan dari lembaga pendidikan yang menjembatani kesenjangan pengetahuan.

Tabel 4. 13 Hasil Antara Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan

NO	UNSUR	KEGIATAN
A	Akademisi	
1	Polteknik Ahli Usaha Perikanan	Pendidikan anak pembudi daya ikan
2	Universitas Jenderal Soedirman	Pengabdian masyarakat
3	Universitas Amikom	Pelatihan Digital Marketing
4	Universitas Muhammadiyah	Pendampingan koperasi
5	Universitas Prasetya Mulya	<i>Community Development rintisan</i> Desa Wisata
B	Bisnis	
1	PT Bank Negara Indonesia	Fasilitasi akses permodalan (KUR)
		Pembangunan gerbang, <i>street food booth</i> , <i>gazebo</i> , dan rumah padi
2	Bank Indonesia	Pembangunan pasar ikan
3	PT Telekom Indonesia	Penguatan signal
		Bantuan Lab <i>Virtual Reality</i>
C	Masyarakat	
1	Pembudi daya ikan	Inisiasi pembentukan kelompok pembudi daya ikan Mina Padi
		Inisiasi diversifikasi usaha padi dengan ikan
		Inisiasi pembentukan Koperasi Mina Satya

		Panembangan
D	Pemerintah	
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
a	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
	- Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal	Percontohan budi daya ikan sistem mina padi Percontohan budi daya ikan hias Pelatihan budi daya ikan sistem mina padi Pelatihan pembuatan pakan ikan berbahan baku lokal Pelatihan diversifikasi olahan ikan Pelatihan pembuatan tepung maggot untuk pembuatan pakan ikan Pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) Pelatihan Cara Budi daya Ikan yang Baik (CBIB) Pendampingan oleh penyuluh perikanan
	- Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi	Pemberian bantuan induk ikan nila unggul Pelatihan pembenihan ikan
	- Balai Riset Budi daya Ikan Hias Depok	Percontohan budi daya ikan hias Neon Tetra
	- Balai Riset Perikanan Budi daya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor	Pemberian bantuan vaksin ikan Pelatihan aplikasi vaksin
	- Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Pelatihan pasca panen Pelatihan <i>packaging</i> dan <i>labeling</i>
	- Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Penguatan kelembagaan koperasi Pembuatan gerai informasi dan digitalisasi usaha
	- Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Sosialisasi gemar makan ikan Perpustakaan mini
b	Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya	Bantuan pakan mandiri
c	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Bantuan administrasi legalisasi Koperasi Bantuan alat pengolahan produk perikanan
d	Badan Layanan Umum Lembaga Penyedia Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	Fasilitasi akses permodalan
2	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Pendampingan koperasi (penyuluh koperasi)

3	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pendampingan penggunaan dan desa (Tenaga Pendamping Desa)
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rintisan Desa Wisata
5	Pemerintah Daerah Banyumas	
a	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan kewirausahaan diversifikasi produksi olahan ikan Pelatihan manajemen koperasi
b	Dinas Pekerjaan Umum	Pengaspalan jalan di area persawahan
c	Dinas Pertanian	Pelatihan Penggunaan benih padi organik
6	Pemerintah Desa Panembangan	Pelatihan pasca panen Pelatihan pembuatan pakan Pembuatan Caren permanen Rintisan Desa Wisata (BUMDes)
E	Media	
1	Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA	Mengangkat potensi lokal melalui pemberitaan

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Meski demikian, keberhasilan tersebut masih bersifat sementara. Ketimpangan antar kelompok pembudi daya ikan masih terlihat, di mana kelompok yang aktif dan memiliki jejaring lebih cepat berkembang dibanding kelompok yang terpencil atau belum tergabung. Implementasi teknologi juga belum sepenuhnya stabil akibat keterbatasan jaringan internet, peralatan, atau pemahaman teknis. Dari sisi ekonomi, keberhasilan ini belum menyentuh aspek pemasaran secara signifikan, sehingga akses pasar tetap menjadi tantangan besar.

Penyuluh perikanan menekankan bahwa beberapa indikator keberhasilan sudah tampak, seperti peningkatan kapasitas pembudi daya ikan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, adopsi teknologi budi daya dan digitalisasi awal, terciptanya kerja sama antar kelompok, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencatatan serta evaluasi usaha. Forum-forum koordinasi antarpemangku kepentingan mulai memperkuat komunikasi, namun keberhasilan ini masih perlu didokumentasikan secara sistematis agar dapat menjadi model replikasi. Kolaborasi saat ini masih sangat bergantung pada inisiatif personal, baik

dari penyuluh perikanan maupun ketua kelompok, sehingga belum sepenuhnya sistemik.

Dari perspektif pemerintah daerah, keberhasilan sementara ini terlihat pada peningkatan kapasitas teknis pembudi daya ikan dan penerapan teknologi digital dalam monitoring kualitas air dan kesehatan ikan, yang mulai menurunkan tingkat kematian ikan dan meningkatkan produktivitas. Terbentuknya jaringan komunikasi yang lebih baik antara pembudi daya ikan, penyuluh perikanan, dan pemerintah daerah memudahkan koordinasi dan tindak lanjut solusi di lapangan. Kepala BPPSDMKP menegaskan bahwa capaian sementara ini merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah, pembudi daya ikan, penyuluh perikanan, akademisi, dan mitra pembangunan lainnya.

Kepala desa menyoroti beberapa pencapaian nyata, antara lain penggunaan sistem pemantauan kualitas air berbasis sensor digital oleh kelompok pembudi daya ikan, koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, serta meningkatnya semangat belajar dan inovasi di kalangan pembudi daya ikan. Dari sisi perbankan, keberhasilan ini juga tercermin dalam meningkatnya akses pembiayaan bagi pembudi daya ikan yang sebelumnya sulit memperoleh modal, sehingga mendukung keberlanjutan usaha. Akademisi menekankan bahwa keberhasilan-keberhasilan kecil ini menjadi modal sosial dan psikologis, karena para pemangku kepentingan mulai merasakan manfaat nyata dari kolaborasi, yang memperkuat motivasi untuk melanjutkan program ke tahap berikutnya.

Secara keseluruhan, program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas telah menunjukkan beberapa keberhasilan sementara dalam peningkatan kapasitas pembudi daya ikan, adopsi teknologi, penguatan jejaring kolaboratif, dan digitalisasi awal. Namun, keberhasilan ini perlu dijaga dan dikembangkan agar berdampak luas dan berkelanjutan bagi seluruh pembudi daya ikan, bukan hanya bagi sebagian pihak. Ke depan, keberhasilan program harus diukur tidak hanya dari penerapan teknologi, tetapi juga dari peningkatan pendapatan, penguatan jejaring, dan keberlanjutan usaha pembudi daya ikan secara menyeluruh.

3. Desain Kelembagaan (*Institutional design*)

a. Inklusivitas Partisipatif (*Participatory inclusiveness*)

Untuk menjalankan proses kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas, dibentuk kelembagaan formal maupun informal. Kelembagaan ini diwujudkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati, SK Tim Pelaksana oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), perjanjian kerja sama antara BRSDMKP dan mitra kolaborasi, serta pembentukan forum lintas pemangku kepentingan.

Bupati Banyumas menerbitkan SK Nomor 900/1153 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Lintas Pemangku Kepentingan untuk pengembangan Smart Fisheries Village (DESA PERIKANAN CERDAS) di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok. Dalam SK tersebut, struktur kelembagaan diatur dengan jelas: Sekretaris Daerah ditunjuk sebagai pengarah, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banyumas menjabat sebagai ketua forum, dan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan menjabat sebagai ketua harian. Keanggotaan forum meliputi perwakilan berbagai perangkat daerah, antara lain: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu, forum ini juga melibatkan unsur akademisi, yakni Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, unsur pemerintahan lokal yaitu Camat Cilongok dan Kepala Desa Panembangan, serta unsur keamanan melalui partisipasi Bhabinkamtibmas Desa Panembangan.

Gambar 4. 3 Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang Pembentukan Forum Lintas Pemangku Kepentingan



Pembentukan kelembagaan formal ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi tidak hanya bersifat *ad-hoc*, tetapi memiliki dasar hukum dan struktur organisasi yang jelas. Dengan demikian, forum lintas pemangku kepentingan dapat berfungsi sebagai wadah koordinasi, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan program pemberdayaan secara lebih terintegrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengenai pentingnya *collaborative governance regime* yang dibangun melalui mekanisme kelembagaan

formal untuk menciptakan legitimasi, kejelasan peran, serta akuntabilitas dalam kolaborasi multi-aktor.

Forum lintas pemangku kepentingan memiliki mandat untuk merancang rencana pengembangan kawasan serta kerja sama antar kawasan, melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, menyusun agenda temu usaha, pameran, dan promosi investasi, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala maupun insidental. Tugas-tugas tersebut menjadi instrumen kelembagaan yang strategis dalam mendukung pengembangan Desa Perikanan Cerdas di Desa Panembangan.

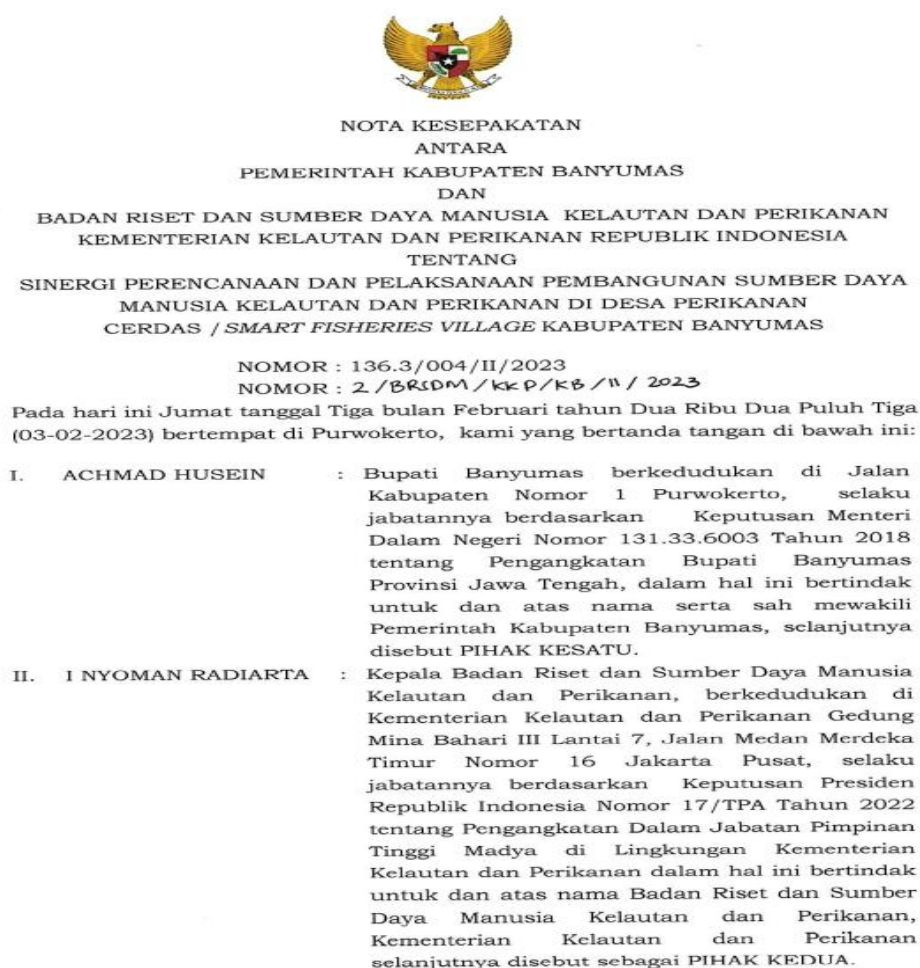
Selain forum lintas pemangku kepentingan, penguatan kelembagaan juga diwujudkan melalui berbagai perjanjian kerja sama antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) dengan sejumlah mitra strategis, antara lain Pemerintah Kabupaten Banyumas, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta PT Telekomunikasi Indonesia.

Perjanjian kerja sama antara BRSDMKP dan Pemerintah Kabupaten Banyumas berfungsi sebagai pedoman untuk sinergi pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat perikanan secara berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Panembangan. Perjanjian ini mengatur secara rinci tugas dan peran masing-masing pihak. Pemerintah Kabupaten Banyumas bertanggung jawab menyediakan calon peserta didik, pelatihan, dan penyuluhan perikanan; membentuk forum lintas pemangku kepentingan; menyediakan data sumber daya manusia dan alam; mengalokasikan anggaran; melaksanakan rekomendasi kebijakan; serta memanfaatkan dan memelihara sarana-prasarana yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat perikanan.

Sementara itu, BRSDMKP bertugas melakukan seleksi peserta didik, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan, menyiapkan rancangan bisnis koperasi, menyediakan data, informasi, dan teknologi, serta

mendukung kelembagaan pengelola perikanan. Untuk memperjelas implementasi, perjanjian ini dilengkapi dengan rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, lokasi, tugas, output, outcome, pendanaan, dan penanggung jawab.

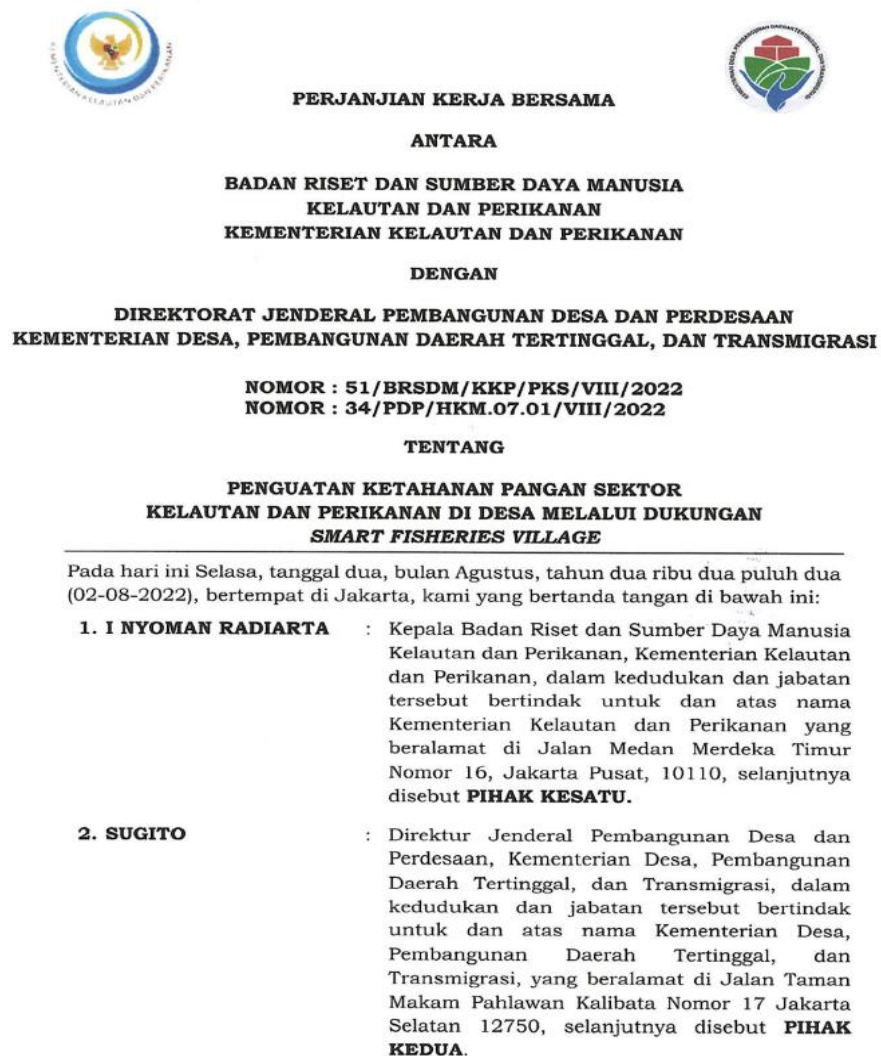
Gambar 4. 4 Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Banyumas dengan BRSDMKP



Sementara itu, kerja sama BRSDMKP dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berfokus pada penguatan ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan. Bentuk kerja sama meliputi identifikasi serta pemetaan ketahanan pangan, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan, pelaksanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan

sesuai kewenangan desa, serta pertukaran data dan informasi terkait pengelolaan sumber daya perikanan.

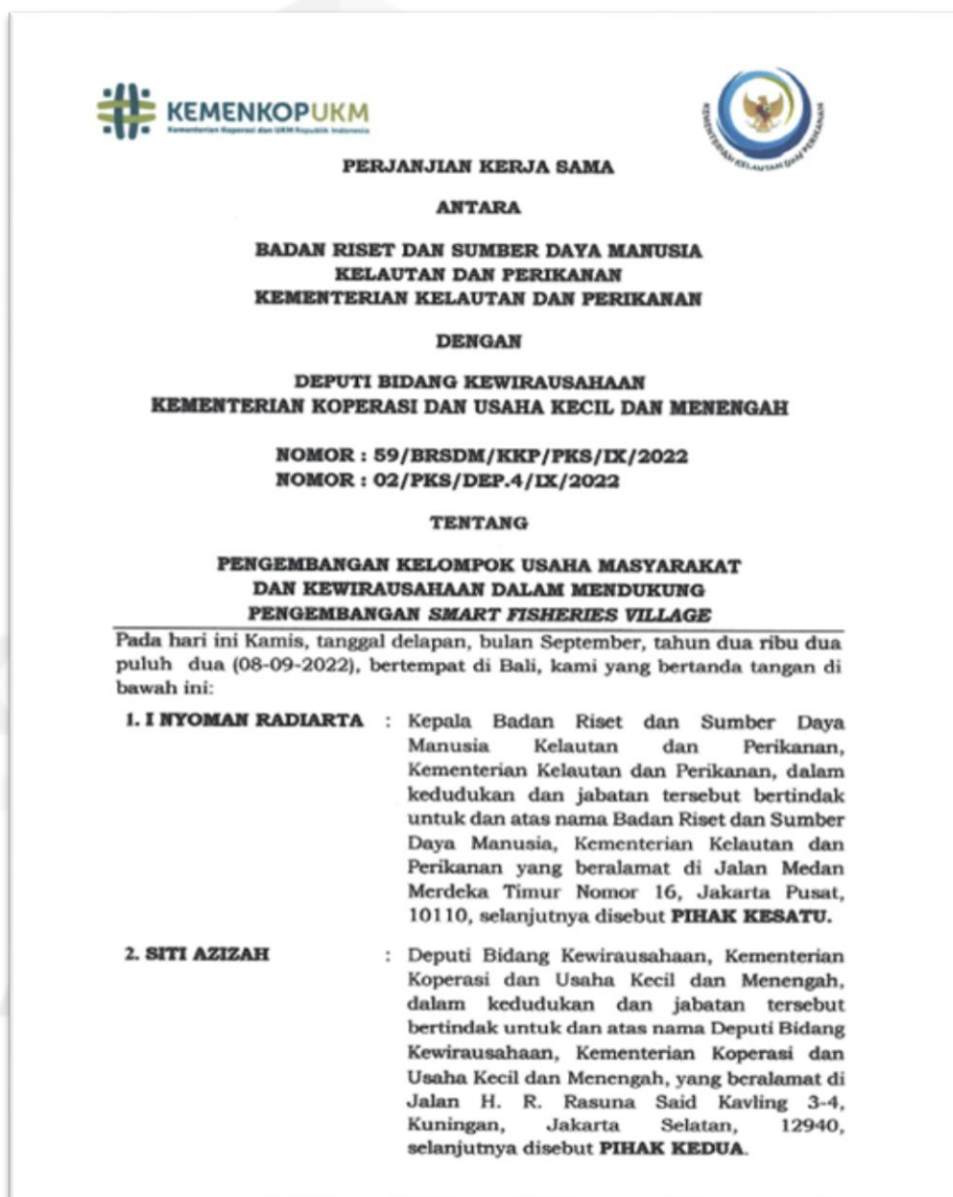
Gambar 4. 5 Perjanjian Kerja Sama antara BRSDMKP dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan



Kerja sama antara BRSDMKP dengan Deputy Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM difokuskan pada pengembangan kewirausahaan dan kelompok usaha masyarakat dalam rangka mendukung Desa Perikanan Cerdas. Ruang lingkup kerja sama meliputi: (1) sinergi program dan kegiatan, (2)

pelatihan dan pendampingan kelompok usaha, koperasi, serta UMKM, (3) penguatan kelembagaan, dan (4) pertukaran data dan informasi yang relevan.

Gambar 4. 6 Perjanjian Kerja Sama antara BRSDMKP dengan Deputi Kewirausahaan

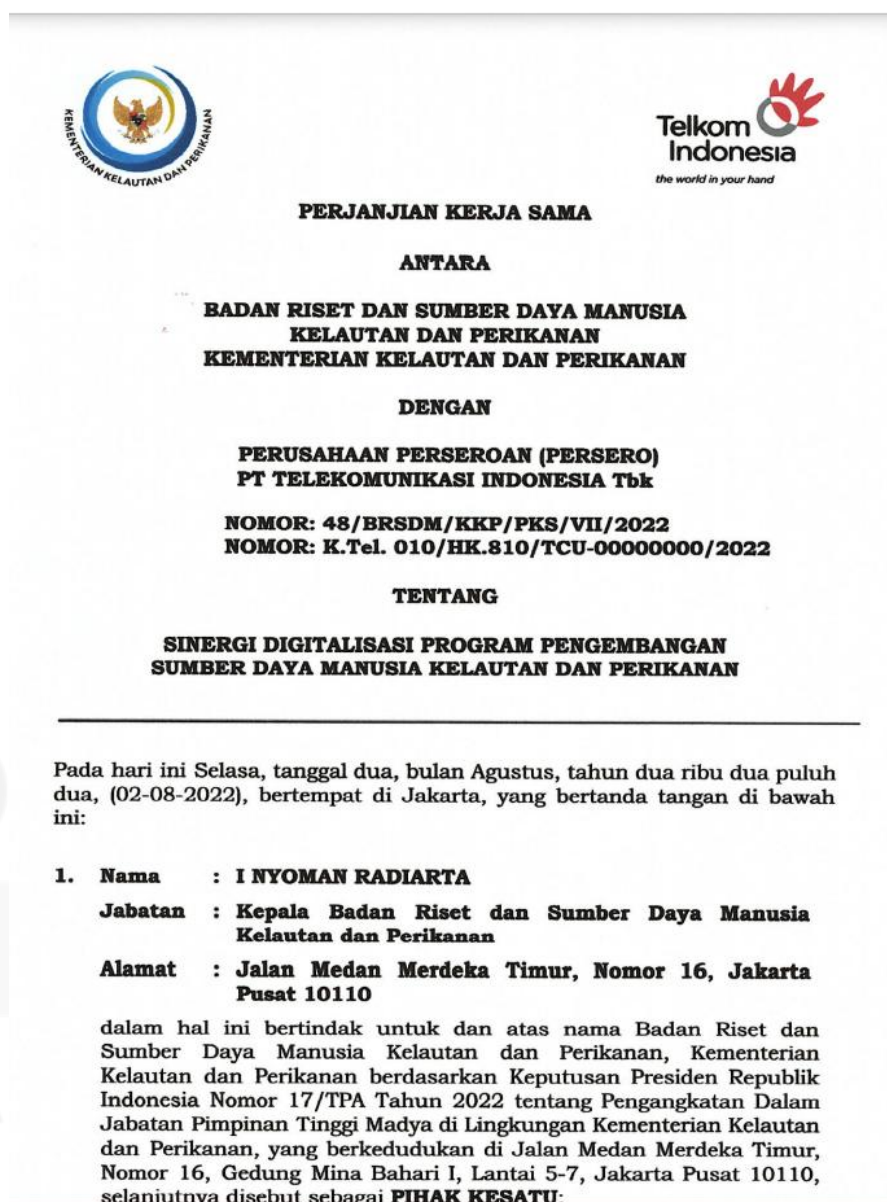


Kerja sama antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) dengan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM difokuskan pada pengembangan usaha kelompok masyarakat dan kewirausahaan sebagai bagian dari pengembangan Desa Perikanan Cerdas. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup beberapa aspek utama:

- 1) Sinergi Program dan Kegiatan: Mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pengembangan Desa Perikanan Cerdas.
- 2) Pelatihan dan Pendampingan: Menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan perikanan, dan pendampingan bagi kelompok usaha masyarakat, koperasi, serta pelaku UMKM di sektor kelautan dan perikanan.
- 3) Penguatan Kelembagaan: Memperkuat struktur dan kapasitas kelembagaan kelompok usaha masyarakat di sektor kelautan dan perikanan.
- 4) Pertukaran Data dan Informasi: Melakukan pertukaran data dan informasi yang relevan untuk mendukung kelompok usaha masyarakat, koperasi, dan pelaku UMKM di sektor kelautan dan perikanan.

Selain itu, kerja sama BRSDMKP dengan PT Telekomunikasi Indonesia ditujukan untuk mendorong digitalisasi sektor kelautan dan perikanan melalui penguatan talenta digital, inovasi berbasis ekonomi biru, serta percepatan transformasi pembelajaran. Ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan inovasi digital pada pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan; penerapan *use case* produk digital; pertukaran data dan informasi; serta pengawasan kinerja berbasis sistem digital.

Gambar 4. 7 Perjanjian Kerja Sama antara BRSDMKP dengan PT Telekomunikasi



Untuk mendukung koordinasi antaraktor, dibutuhkan mekanisme komunikasi yang efektif. Hal ini krusial guna memastikan keselarasan pemahaman dan kelancaran pelaksanaan program. Mekanisme yang digunakan antara lain melalui pertemuan rutin secara daring, pertemuan tatap muka di lokasi

program, serta pemanfaatan platform komunikasi digital berupa grup WhatsApp sebagai sarana koordinasi harian.

Dalam pelaksanaan program Desa Perikanan Cerdas di Desa Panembangan, prinsip inklusivitas partisipatif mulai diterapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif. Proses ini bertujuan agar semua pihak mulai dari pembudi daya ikan, penyuluh perikanan, pemerintah desa, akademisi, hingga pihak swasta dapat memberikan masukan, berpartisipasi dalam perencanaan, dan turut mengambil keputusan terkait pengelolaan kolam dan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan.

Bukti penerapan inklusivitas partisipatif terlihat pada beberapa kegiatan. Pertama, sosialisasi dan pelatihan dilakukan secara terbuka, menghadirkan semua kelompok pembudi daya ikan tanpa diskriminasi, sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan program Desa Perikanan Cerdas, termasuk digitalisasi usaha, peningkatan produktivitas, dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Kedua, forum koordinasi rutin dibentuk sebagai wadah dialog antara pemangku kepentingan, di mana setiap pihak dapat menyampaikan kebutuhan, tantangan, dan saran terkait pelaksanaan program. Hal ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap program dan meminimalkan kesenjangan informasi antar kelompok.

Namun, beberapa kendala juga muncul terkait implementasi inklusivitas partisipatif. Beberapa pembudi daya ikan masih mengalami kesulitan memahami konsep digitalisasi atau manajemen modern karena keterbatasan literasi teknologi. Selain itu, perbedaan prioritas antara pihak pemerintah yang fokus pada target program dan pembudi daya ikan yang lebih menekankan hasil ekonomi jangka pendek kadang menimbulkan perbedaan persepsi. Forum komunikasi yang ada juga belum sepenuhnya rutin di semua level, sehingga pemahaman bersama belum merata.

Meskipun demikian, upaya membangun inklusivitas partisipatif di Desa Panembangan telah memberikan dampak positif. Partisipasi aktif semua pihak memperkuat kepercayaan, meningkatkan kolaborasi, dan mempermudah

penerapan inovasi teknologi budi daya. Dengan adanya mekanisme partisipatif ini, program Desa Perikanan Cerdas tidak hanya menjadi proyek *top-down*, tetapi berkembang menjadi program kolaboratif yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan, yang mampu menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan kapasitas pembudi daya ikan secara menyeluruh.

Inklusivitas partisipatif dalam program Desa Perikanan Cerdas di Desa Panembangan merupakan fondasi penting untuk memastikan keberlanjutan program. Meskipun masih ada tantangan terkait literasi, komunikasi, dan keselarasan prioritas, prinsip ini membantu semua pemangku kepentingan bergerak secara selaras, membangun rasa memiliki, serta memperkuat kapasitas pembudi daya ikan untuk menghadapi perubahan dan inovasi dalam sektor perikanan.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas, prinsip inklusivitas partisipatif menjadi salah satu pilar utama untuk memastikan keterlibatan luas dan aktif dari semua pemangku kepentingan. Kepala BPPSDMKP menegaskan bahwa promosi partisipasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pembudi daya ikan, penyuluh perikanan, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas lokal dapat berperan secara nyata dalam setiap tahapan program.

Pelibatan partisipatif dimulai sejak tahap perencanaan, di mana pembudi daya ikan bukan sekadar objek intervensi, tetapi juga subjek pengambilan keputusan. Musyawarah lokal dan dialog komunitas digunakan sebagai sarana utama untuk menyamakan persepsi, menyampaikan kebutuhan, serta menetapkan strategi pengembangan budi daya ikan. Selain itu, pelatihan dan pendampingan dilakukan secara inklusif, menjangkau tidak hanya pengurus kelompok, tetapi juga anggota kelompok, pemuda, dan perempuan pelaku usaha perikanan. Pendekatan ini memastikan bahwa keterlibatan tidak terpusat pada segelintir pihak saja, tetapi merata di seluruh lapisan masyarakat perikanan.

Program Desa Perikanan Cerdas juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta, sehingga

partisipasi tidak terbatas pada unsur pemerintah dan pembudi daya ikan. Pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi tambahan untuk memperluas akses informasi, edukasi, dan praktik baik, sehingga meskipun secara fisik tidak selalu hadir, pihak-pihak terkait tetap dapat berpartisipasi secara aktif.

Dengan pendekatan inklusif dan partisipatif ini, program Desa Perikanan Cerdas tidak hanya mendorong kolaborasi yang efektif, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kepala BPPSDMKP menegaskan bahwa tingkat keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan menciptakan partisipasi yang luas dan aktif, baik secara formal maupun informal, sehingga setiap pemangku kepentingan merasa berkontribusi dalam pembangunan perikanan berkelanjutan di Banyumas.

b. Eksklusivitas Forum (*Forum exclusiveness*)

Dalam pelaksanaan program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas, terdapat fenomena eksklusivitas forum yang patut diperhatikan. Meskipun program ini mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan, beberapa forum diskusi dan pengambilan keputusan cenderung bersifat terbatas atau hanya melibatkan pihak-pihak tertentu. Hal ini biasanya terjadi pada pertemuan strategis atau rapat koordinasi tingkat tinggi, di mana pejabat pemerintah, akademisi, dan pengurus kelompok pembudi daya ikan menjadi peserta utama, sementara anggota kelompok lain, pemuda, atau perempuan pelaku usaha perikanan kurang terlibat secara langsung.

Eksklusivitas ini menimbulkan beberapa dampak. Pertama, persepsi mengenai kepemilikan program bisa menjadi terbatas pada kelompok yang hadir dalam forum, sehingga sebagian pembudi daya ikan merasa kurang terlibat atau sekadar mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan. Kedua, informasi dan masukan dari lapangan terkadang tidak tersalurkan secara optimal, sehingga potensi inovasi atau masalah spesifik di tingkat kelompok bisa luput dari perhatian pengambil keputusan.

Meski demikian, eksklusivitas forum juga memiliki sisi positif, terutama dalam menjaga efisiensi pengambilan keputusan teknis atau strategis yang membutuhkan koordinasi intensif antara pihak yang memiliki kapasitas atau tanggung jawab lebih besar. Namun, untuk mewujudkan prinsip kolaborasi yang lebih inklusif, perlu ada mekanisme penghubung yang memastikan aspirasi semua anggota kelompok pembudi daya ikan dapat disampaikan melalui wakil atau pertemuan tambahan, sehingga keputusan yang diambil tetap relevan dan diterima secara luas.

Dengan demikian, eksklusivitas forum dalam program Desa Perikanan Cerdas di Desa Panembangan mencerminkan dinamika antara efisiensi pengambilan keputusan dan kebutuhan partisipasi luas. Menyadari hal ini penting agar program dapat tetap berjalan secara efektif, tetapi juga menjaga rasa memiliki dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

c. Aturan Dasar yang Jelas (*Clear ground rules*)

Untuk melaksanakan Program Desa Perikanan Cerdas, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) menerbitkan Peraturan Kepala BRSDMKP Nomor 38 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman bagi unit kerja pusat di lingkup BRSDMKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BRSDMKP, dinas perikanan kabupaten/kota, pemerintah desa, penyuluh perikanan, pelaku usaha, serta kelompok pelaku utama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat perikanan. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini mencakup kegiatan usaha yang menjadi fokus intervensi, tahapan pelaksanaan, mekanisme pembiayaan, sistem monitoring dan evaluasi, serta capaian *output* dan *outcome* dari program.

Kegiatan usaha yang menjadi sasaran intervensi mencakup budi daya ikan air tawar, budi daya ikan payau dan laut, budi daya ikan hias, sistem mina padi, pengolahan hasil perikanan, eduwisata, produksi pakan mandiri, serta perikanan tangkap. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi potensi desa (sumber

daya alam dan manusia), analisis kebutuhan pelatihan dan penyuluhan perikanan, inventarisasi teknologi, penjalinan kerja sama dengan mitra, penyusunan proposal, pelatihan dan penyuluhan perikanan, pendampingan secara berkelanjutan, monitoring dan evaluasi, pemberian beasiswa bagi anak pelaku utama, hingga pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Identifikasi potensi desa menjadi langkah awal untuk mengenali, memahami, dan memetakan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aspek yang dipetakan meliputi ketersediaan air, luas lahan budi daya, jumlah pelaku utama, kelembagaan pelaku utama, akses pasar, lembaga pembiayaan, serta teknologi usaha yang digunakan. Hasil pemetaan potensi menjadi dasar penyusunan kebutuhan materi pelatihan dan penyuluhan perikanan.

Inventarisasi teknologi dilakukan oleh UPT BRSDMKP, yang mencakup teknologi pakan buatan maupun alami, budi daya maggot, pengelolaan kualitas air, pengendalian hama dan penyakit ikan, teknik pembenihan, sistem mina padi, budi daya ikan hias, serta diversifikasi produk olahan ikan. Implementasi program membutuhkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain PT Telkom untuk digitalisasi produksi dan pemasaran, perbankan untuk akses pembiayaan usaha, pemerintah desa melalui pemanfaatan dana desa untuk pelatihan, Kementerian Koperasi dan UKM untuk penguatan kelembagaan koperasi, serta Kementerian Pariwisata untuk pengembangan kegiatan eduwisata.

Pelatihan bagi pelaku utama dilaksanakan oleh UPT BRSDMKP sesuai hasil identifikasi kebutuhan. Metode pelatihan dapat dilakukan secara *on the spot* di lapangan, tatap muka di balai pelatihan, *blended learning*, maupun daring, bergantung pada ketersediaan anggaran. Narasumber pelatihan dapat berasal dari KKP (widyaiswara, instruktur, atau fungsional terkait) maupun pihak eksternal sesuai kompetensi materi.

Kegiatan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh penyuluh perikanan dan asisten penyuluh perikanan sesuai wilayah kerja. Tugas penyuluh perikanan meliputi pendampingan kelompok, penumbuhan kelompok baru, peningkatan

kelas kelompok, fasilitasi permodalan dan pemasaran, penyebaran informasi teknologi, sosialisasi regulasi, pembinaan koperasi, serta pemutakhiran data pelaku utama.

Untuk menjaga kontinuitas dan regenerasi pelaku utama, BRSDMKP melalui Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan memberikan beasiswa bagi anak pelaku utama agar dapat menempuh pendidikan pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan. Selain itu, implementasi *Tridharma Perguruan Tinggi* juga didorong melalui praktik kerja lapangan, penelitian, diseminasi teknologi, dan kegiatan pengabdian masyarakat.

Sumber pembiayaan program berasal dari APBN melalui DIPA UPT BRSDMKP, dana desa, dana bergulir (sesuai PMK No. 218/2009), serta dana CSR (PP No. 47/2012). Dana bergulir dikelola oleh BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) untuk memperkuat modal usaha koperasi, UMKM, dan pelaku utama perikanan. Sementara itu, CSR dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan infrastruktur, perbaikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam petunjuk pelaksanaan juga ditetapkan indikator input, proses, *output*, dan *outcome* sebagai berikut:

- 1) Indikator input: ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, peralatan, dan material pendukung.
- 2) Indikator proses: ketercapaian tahapan kegiatan sesuai rencana aksi.
- 3) Indikator *output*: terlaksananya kegiatan pemberdayaan, penyuluhan perikanan, serta tridharma perguruan tinggi berbasis kebutuhan masyarakat.
- 4) Indikator *outcome*: perubahan perilaku dan peningkatan kompetensi peserta, peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, serta bertambahnya jumlah tenaga kerja dan peluang usaha.

Selain itu, Kepala BRSDMKP juga menetapkan Keputusan Nomor 521 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Desa Perikanan Cerdas. Desa Panembangan ditetapkan sebagai lokasi dengan tiga fokus kegiatan, yaitu: budi daya sistem mina padi (oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal),

budi daya ikan hias (oleh Balai Riset Budi Daya Ikan Hias Depok), serta penguatan kelembagaan usaha dan digitalisasi (oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan). Keputusan serupa juga ditetapkan untuk Desa Sumberdodol, Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Keputusan Kepala BRSDMKP Nomor 582 Tahun 2022 mengatur tentang pembentukan Tim Pelaksana Desa Perikanan Cerdas, yang terdiri atas kepala unit kerja pusat, kepala UPT penanggung jawab kegiatan, serta pegawai BRSDMKP yang ditugaskan. Tim ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan mandat regulasi.

Pelaksanaan program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha perikanan masyarakat desa melalui pendekatan teknologi digital dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok pembudi daya ikan, akademisi, serta sektor swasta.

Berdasarkan pengamatan pembudi daya ikan yang terlibat dalam program Desa Perikanan Cerdas, aturan formal terkait pelaksanaan program memang telah tersedia. Di tingkat nasional, program Desa Perikanan Cerdas merujuk pada kebijakan KKP dan berbagai regulasi terkait perlindungan serta pemberdayaan pembudi daya ikan. Di tingkat daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Banyumas telah menetapkan pedoman teknis (juknis) mengenai pelaksanaan program, jenis bantuan, serta mekanisme pendampingan. Desa juga memiliki peraturan desa (Perdes) atau nota kesepahaman antara pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kelompok pembudi daya ikan sebagai acuan pelaksanaan program.

Meskipun aturan formal telah ada, pembudi daya ikan menyatakan bahwa sosialisasi aturan masih terbatas. Sosialisasi hanya dilakukan saat peluncuran program dan jarang dilanjutkan melalui forum dialog atau pendampingan rutin. Selain itu, bahasa aturan yang bersifat teknis dan birokratis menyulitkan pemahaman oleh pembudi daya ikan berskala kecil, sehingga menimbulkan

kebingungan terkait pembagian bantuan, kriteria penerima, dan prosedur pelaporan.

Selain itu, belum terdapat standarisasi pelaksanaan antar desa. Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas di setiap desa berbeda-beda, tergantung dukungan lokal dan peran aktor di lapangan. Beberapa desa melaksanakan program dengan terstruktur dan terbuka, sementara desa lain belum memiliki mekanisme pengawasan dan pelaporan yang jelas. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan, terutama ketika aturan di satu desa berbeda signifikan dengan desa lain.

Secara keseluruhan, program Desa Perikanan Cerdas telah menerapkan aturan dan kebijakan yang relatif konsisten. KKP, melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), mengembangkan konsep program yang mencakup penerapan benih unggul, teknologi informasi dan komunikasi, manajemen tepat guna, serta prinsip keberlanjutan. Program ini juga didukung oleh pelatihan teknis dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP Tegal), meliputi budi daya ikan nila dengan sistem minapadi, pembuatan pakan ikan berbahan baku lokal, serta diversifikasi olahan ikan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia unggul dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berlandaskan nilai ekologi dan berbasis digital.

Meski demikian, implementasi di tingkat lapangan menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Universitas Jenderal Soedirman mengidentifikasi problematika terkait pengembangan SDM, kelembagaan, teknologi, bisnis, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Tantangan ini menunjukkan perlunya strategi pengembangan yang komprehensif, terarah, dan terukur untuk memastikan keberhasilan program.

Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas mengakui bahwa kerangka aturan Desa Perikanan Cerdas telah dibangun, namun implementasi operasional di lapangan belum sepenuhnya rinci dan konsisten. Peran masing-masing pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan kelompok pembudi daya ikan, masih memerlukan penajaman agar tidak terjadi tumpang

tindih atau kekosongan peran. Upaya penguatan meliputi penyusunan nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) lintas pihak, khususnya terkait pendampingan teknologi, pemasaran, dan akses pembiayaan.

Sektor perbankan menilai bahwa aturan umum telah jelas, tetapi aturan operasional harian masih perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih peran. Akademisi menekankan pentingnya forum evaluasi dan koordinasi rutin untuk menyamakan persepsi antar-pemangku kepentingan sehingga aturan dapat diterapkan secara konsisten.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program Desa Perikanan Cerdas di Desa Panembangan menunjukkan adanya upaya penerapan aturan yang konsisten dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan melalui penguatan kelembagaan, pelatihan teknis, dan pemanfaatan teknologi. Meski aturan formal telah ada, konsistensi implementasi di tingkat lapangan masih menghadapi tantangan, khususnya terkait sosialisasi, standarisasi antar desa, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Untuk menjamin keberlanjutan program, diperlukan strategi penguatan aturan yang mencakup peningkatan sosialisasi, penyusunan panduan teknis yang sederhana, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta forum koordinasi yang rutin dan terstruktur.

d. Transparansi Proses (*Process transparency*)

Pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan melalui Program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas merupakan inisiatif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya pembudi daya ikan. Pendekatan yang digunakan mencakup pemanfaatan teknologi digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pemberdayaan kelembagaan lokal. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok pembudi daya ikan, akademisi, dan sektor swasta.

Transparansi dan penetapan tenggat waktu merupakan dua aspek penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ini. Transparansi berkaitan

dengan keterbukaan informasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, sedangkan penetapan tenggat waktu menyangkut realisme jadwal implementasi serta sinkronisasi antar pihak.

Berdasarkan pengalaman pembudi daya ikan yang terlibat dalam program Desa Perikanan Cerdas, terdapat beberapa mekanisme transparansi yang telah diimplementasikan:

1) Penyuluhan Perikanan dan Pelatihan Terbuka

Pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP Tegal) terbuka untuk masyarakat pembudi daya ikan, sehingga mereka dapat memahami tahapan program, teknologi yang diterapkan, dan penggunaan bantuan.

2) Pendampingan dan Forum Diskusi

Tim teknis dari KKP, penyuluh perikanan, dan akademisi memberikan pendampingan langsung, menciptakan forum komunikasi terbuka antara pembudi daya ikan, pemerintah, dan mitra lainnya.

3) Keterlibatan Kelembagaan Lokal

Koperasi dan kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan) menjadi pilar utama dalam pengelolaan program, termasuk distribusi manfaat, perencanaan, dan pengambilan keputusan kolektif di tingkat desa.

4) Rapat Gabungan Stakeholder

Pemerintah daerah menyelenggarakan rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan secara rutin untuk mendiskusikan perkembangan dan kendala program, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Meski upaya transparansi telah dilakukan, beberapa tantangan masih ditemui:

- 1) Informasi terkait alokasi anggaran, pemanfaatan dana, dan keputusan strategis belum selalu tersampaikan merata ke seluruh pemangku kepentingan.
- 2) Partisipasi individu pembudi daya ikan skala kecil sering terbatas, sedangkan kelompok besar atau tokoh formal lebih mudah mengakses informasi.

- 3) Pelaporan publik mengenai progres program belum dilakukan secara rutin dan mudah diakses.
- 4) Pemanfaatan media digital untuk keterbukaan informasi masih terbatas, padahal program Desa Perikanan Cerdas menekankan penggunaan teknologi dan informasi.

Pembudi daya ikan dan pemangku kepentingan lain mengusulkan penguatan transparansi melalui:

- 1) Penerapan sistem digital terbuka, seperti dashboard online untuk memantau progres program dan penggunaan dana.
- 2) Pelibatan lebih luas dalam pengambilan keputusan, tidak terbatas pada kelompok besar atau tokoh formal.
- 3) Evaluasi rutin yang melibatkan masyarakat untuk memberikan umpan balik terkait pelaksanaan program.

Pada tahap awal implementasi Desa Perikanan Cerdas, telah disusun rencana kerja dan tahapan program yang mencakup pembangunan infrastruktur kolam, pelatihan SDM, serta pengembangan sistem digitalisasi. Tenggat waktu umumnya ditetapkan oleh instansi pusat maupun daerah dalam bentuk rencana tahunan atau semesteran.

Pengalaman di lapangan menunjukkan beberapa kendala dalam realisasi tenggat waktu:

- 1) Kondisi geografis, cuaca, dan kesiapan sarana/prasarana dapat memengaruhi jadwal pembangunan dan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Kapasitas SDM dan kelembagaan lokal belum merata, sehingga implementasi program kadang meleset dari jadwal.
- 3) Koordinasi antar instansi di tingkat desa, kabupaten, dan pusat sering memerlukan waktu lebih lama daripada yang direncanakan.
- 4) Tidak adanya mekanisme konsekuensi atau evaluasi atas keterlambatan kegiatan.

Agar tenggat waktu lebih realistis dan efektif, maka penulis menyarankan agar:

- 1) Penyesuaian jadwal perlu dilakukan secara fleksibel berdasarkan kondisi lokal masing-masing desa.
- 2) Pembudi daya ikan harus dilibatkan dalam proses penjadwalan agar target waktu tidak bersifat *top-down*.
- 3) Monitoring dan evaluasi berkala bersama pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk menangani keterlambatan secara proaktif.

Program Desa Perikanan Cerdas di Kabupaten Banyumas telah menerapkan prinsip transparansi melalui pelatihan terbuka, pendampingan, forum diskusi, dan keterlibatan kelembagaan lokal. Demikian pula, tenggat waktu telah ditetapkan untuk tiap tahapan program. Namun, kedua aspek tersebut belum sepenuhnya optimal. Tantangan utama mencakup keterbatasan akses informasi bagi pembudi daya ikan skala kecil, ketidaksesuaian jadwal dengan kondisi lapangan, dan minimnya dokumentasi serta evaluasi rutin.

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan melalui program Desa Perikanan Cerdas, diperlukan penguatan mekanisme transparansi yang lebih inklusif, penggunaan teknologi informasi secara maksimal, serta penyesuaian tenggat waktu yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis evaluasi berkala.

4. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facillitative leadership*)

Pemimpin di tingkat daerah maupun pelaksana program telah berupaya mempromosikan partisipasi masyarakat. Namun, tingkat partisipasi tersebut belum sepenuhnya luas dan merata di semua lapisan pembudi daya ikan. Upaya pemimpin dalam mendorong partisipasi terlihat melalui sosialisasi program dan pelatihan awal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pembudi daya ikan, pemerintah desa, penyuluh perikanan, hingga akademisi. Kegiatan seperti pelatihan teknologi budi daya, digitalisasi, serta manajemen kelompok sering dipimpin langsung oleh dinas perikanan atau penyuluh perikanan lapangan, sehingga kelompok pembudi daya ikan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif.

Dalam beberapa kesempatan, pimpinan desa dan penyuluh perikanan berperan sebagai penghubung yang aktif antara program pusat dan kebutuhan pembudi daya ikan di lapangan. Hal ini menunjukkan kepemimpinan yang cukup responsif. Namun, masih terdapat tantangan dalam partisipasi masyarakat. Partisipasi cenderung terbatas pada kelompok pembudi daya ikan yang sudah terorganisir, sementara pembudi daya ikan mandiri atau yang berada di lokasi terpencil sering tertinggal informasi dan kurang dilibatkan. Suara dari pembudi daya ikan kecil kadang kurang didengar, dan arah kebijakan sering ditentukan secara *top-down*. Selain itu, literasi digital yang rendah dan rasa kurang percaya diri juga membatasi partisipasi aktif.

Pemimpin yang efektif dalam konteks Desa Perikanan Cerdas seharusnya membuka ruang dialog sejajar, aktif turun ke lapangan untuk mendengar kebutuhan semua pembudi daya ikan, serta membangun kepercayaan jangka panjang agar masyarakat merasa aman dan dihargai saat menyampaikan pendapat atau usulan. Pembudi daya ikan berharap adanya mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, seperti forum musyawarah khusus pembudi daya ikan, pelibatan tokoh lokal, serta evaluasi partisipasi yang menilai keterlibatan masyarakat secara nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Sejauh pengaruh dan kendali program, pemimpin telah berupaya memastikan arah pelaksanaan program tetap sesuai tujuan. Kehadiran BPPP Tegal dan penyuluh perikanan secara rutin, pengorganisasian pelatihan, bimbingan teknis, dan pendataan berbasis teknologi menjadi indikator pengaruh yang ingin dijangkau. Pemimpin di tingkat wilayah, seperti kepala BPPP Tegal dan kepala desa, berperan aktif mendukung program, memberikan fasilitas, dan mendorong partisipasi masyarakat. Kendati demikian, pengaruh tersebut belum sepenuhnya menjangkau pembudi daya ikan kecil, mandiri, atau yang berada di wilayah terpencil. Koordinasi lintas instansi kadang tidak sinkron, dan monitoring serta evaluasi menyeluruh masih terbatas, sehingga pengaruh dan kendali pemimpin perlu diperkuat agar semua pihak dapat bergerak selaras dengan tujuan program.

Luasnya pengaruh dan kendali penting untuk menyatukan langkah semua pihak, memastikan pelaksanaan program tepat sasaran, dan mendorong rasa percaya serta kepatuhan masyarakat terhadap arahan program. Harapan dari pembudi daya ikan adalah agar pengaruh pemimpin diperluas ke kelompok-kelompok kecil, disertai sistem pengawasan dan evaluasi aktif, serta harmonisasi kepentingan dari pusat hingga akar rumput agar kendali program tidak hanya formal, tetapi dirasakan nyata di lapangan.

Pemimpin program juga telah mulai memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif. Pelatihan dan pendampingan kelompok yang diselenggarakan dinas perikanan dan penyuluh perikanan memperkuat kerja sama antar pembudi daya ikan. Pembentukan kelompok pembudi daya ikan atau koperasi mendorong kolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan akses bantuan. Diskusi kelompok, pelatihan digitalisasi, manajemen keuangan, serta praktik budi daya menjadi ruang belajar bersama yang membangun solidaritas. Dinamika ini telah meningkatkan pertukaran pengetahuan, kerja sama dalam gotong royong, serta rasa kepemilikan terhadap program, meskipun efektivitasnya masih terbatas pada kelompok yang lebih aktif. Tantangan yang masih dihadapi antara lain perbedaan motivasi antar anggota, kurangnya fasilitator terlatih, dan dominasi sebagian anggota dalam kelompok.

Ruang lingkup proses pemberdayaan juga mulai diperluas oleh pemimpin program. Selain fokus pada teknis budi daya, program kini mencakup digitalisasi, manajemen usaha, penguatan kelembagaan, pengembangan pasar, serta pemberdayaan lintas sektor. Pelibatan perguruan tinggi, BUMDes, koperasi, dan kelompok pemuda menunjukkan upaya kolaboratif yang lebih luas. Namun, pemerataan manfaat masih menjadi tantangan, dengan beberapa kelompok dan wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau. Pemimpin diharapkan dapat memastikan keterlibatan semua lapisan, menyediakan forum komunikasi rutin, dan menyelaraskan ruang lingkup dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Para pembudi daya ikan melihat pemimpin program telah mendorong partisipasi aktif, memperluas pengaruh dan kendali, memfasilitasi dinamika

kelompok, serta memperluas ruang lingkup kolaborasi. Meskipun upaya ini terlihat signifikan, pelaksanaan di lapangan masih bervariasi dan memerlukan penguatan. Kesenambungan, keterlibatan menyeluruh, dan penguatan kapasitas lokal menjadi kunci agar program Desa Perikanan Cerdas dapat memberi dampak nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas.

Para pemimpin daerah menegaskan pentingnya partisipasi luas dan aktif, serta distribusi pengaruh dan kendali yang merata. Mereka menekankan keterbukaan, inklusivitas, dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi untuk membangun kemandirian dan keberlanjutan pembudi daya ikan. Kepemimpinan yang proaktif dalam memfasilitasi diskusi, menjaga kekompakan, dan mendorong inovasi terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan program Desa Perikanan Cerdas. Pendekatan ini memberikan ruang bagi lahirnya ide baru, penguatan ekosistem kolaboratif, dan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan kolaborasi pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas, terdapat tiga aktor utama yang memiliki peran strategis dalam fungsi kepemimpinan. Ketiga aktor tersebut adalah Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) sebagai inisiator program di tingkat pusat, Bupati Banyumas sebagai pemegang otoritas tertinggi di tingkat pemerintah daerah, serta Kepala Desa Panembangan sebagai pemimpin pemerintahan di lokasi program.

Kepala BRSDMKP memiliki peran sentral sebagai penggagas Program Desa Perikanan Cerdas, yang diwujudkan melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Kepala BRSDMKP berhasil membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak melalui perjanjian kerja sama, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koperasi dan UKM, serta PT Telekomunikasi.

Kepala BRSDMKP juga mendorong keterlibatan sektor perbankan, khususnya PT Bank Negara Indonesia, untuk memfasilitasi akses permodalan bagi pembudi daya ikan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Selain itu, Kepala BRSDMKP menggerakkan unit-unit kerja teknis terkait, seperti Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP), serta Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP), guna mendukung keberhasilan program.

Bupati Banyumas, sebagai pemegang otoritas tertinggi di tingkat kabupaten, menunjukkan dukungan yang kuat terhadap implementasi Desa Perikanan Cerdas. Bentuk dukungan tersebut antara lain diwujudkan dengan pembentukan forum lintas pemangku kepentingan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan sinergi program. Lebih lanjut, Bupati Banyumas juga menggerakkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna memperkuat implementasi program. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengaspalan jalan di sekitar kawasan mina padi, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM melaksanakan pelatihan kewirausahaan, pengolahan produk perikanan, serta manajemen koperasi, sementara Dinas Pertanian mendorong peningkatan pola tanam padi dari dua kali menjadi tiga kali setahun melalui introduksi varietas padi unggul baru.

Sementara itu, Kepala Desa Panembangan menampilkan gaya kepemimpinan yang bersifat fasilitatif. Hal ini ditunjukkan dengan keterbukaannya terhadap berbagai program yang masuk, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Kepemimpinan fasilitatif tersebut tercermin dalam peran Kepala Desa sebagai pendukung dan penghubung yang memfasilitasi interaksi antar-aktor, mendorong komunikasi yang efektif, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi. Kepala Desa tidak mengambil posisi sebagai pengarah utama ataupun pengambil keputusan tunggal, melainkan

berperan dalam memperkuat proses kerja kolektif dan penyelesaian masalah bersama.

Kepemimpinan memiliki peran krusial dalam kolaborasi, karena pemimpin dapat memengaruhi cara berbagai pihak bekerja sama, berkomunikasi, dan mencapai tujuan bersama. Beberapa peran utama kepemimpinan dalam konteks kolaborasi meliputi: menetapkan visi dan arah, membangun kepercayaan antar pihak, memfasilitasi komunikasi, mengelola konflik, memberikan motivasi dan dukungan, melakukan koordinasi dan integrasi, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, serta mendorong adaptasi dan inovasi.

Pemimpin bertanggung jawab untuk mengartikulasikan visi dan arah kolaborasi. Mereka harus menetapkan tujuan yang jelas dan memastikan semua pihak memahami dan berkomitmen terhadap visi tersebut. Visi yang kuat membantu mengarahkan upaya kolaboratif dan memotivasi semua pihak untuk bekerja menuju tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif membangun kepercayaan di antara para anggota tim atau organisasi yang terlibat dalam kolaborasi. Kepercayaan adalah dasar untuk kerjasama yang sukses, karena memungkinkan anggota untuk merasa nyaman berbagi informasi, ide, dan sumber daya.

Pemimpin perlu memastikan bahwa komunikasi antar pihak berlangsung dengan baik. Menciptakan saluran komunikasi yang efektif, mengatasi hambatan komunikasi, dan mendorong dialog terbuka untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Dalam kolaborasi, konflik mungkin muncul karena perbedaan pandangan, prioritas, atau kepentingan. Pemimpin harus mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana agar kolaborasi tetap produktif dan harmonis.

Pemimpin harus memotivasi anggota kolaborasi untuk tetap bersemangat dan berkomitmen. Ini termasuk memberikan dukungan moral, mengakui prestasi, dan memastikan bahwa setiap anggota merasa dihargai dan diperhatikan. Pemimpin berperan dalam mengkoordinasikan aktivitas dan memastikan bahwa berbagai elemen dari kolaborasi terintegrasi dengan baik. Mereka harus

memastikan bahwa semua pihak bekerja dalam harmoni dan bahwa upaya mereka saling melengkapi.

Pemimpin seringkali terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi seluruh kolaborasi. Mereka harus membuat keputusan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan memajukan tujuan bersama. Ketika tantangan atau hambatan muncul, pemimpin harus memimpin dalam mencari solusi. Ini melibatkan kreativitas, ketahanan, dan kemampuan untuk memikirkan alternatif yang dapat mengatasi masalah dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada kolaborasi.

Kepemimpinan yang baik harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dan mendorong inovasi. Dalam kolaborasi, perubahan situasi atau kebutuhan baru mungkin muncul, dan pemimpin harus mampu menyesuaikan strategi dan pendekatan untuk mengatasi tantangan baru. Dengan memainkan peran-peran ini, pemimpin dapat memastikan bahwa kolaborasi berjalan dengan efektif, produktif, dan berorientasi pada hasil. Kepemimpinan yang baik tidak hanya memfasilitasi kerja sama tetapi juga meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang sukses dalam upaya bersama.

Kepemimpinan yang dibangun dalam proses kolaborasi pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan berkarakter fasilitatif. Karakter tersebut diantaranya masing-masing aktor mampu untuk mendengarkan, empati, menciptakan lingkungan positif, memfasilitasi diskusi dan kolaborasi, menyelesaikan konflik, mendorong pengembangan dan pertumbuhan, dan mengelola sumber daya dan proses.

Pemimpin fasilitatif melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan proses pemecahan masalah. Mereka mendorong kontribusi dan ide dari semua pihak, memastikan bahwa setiap suara didengar. Pemimpin fasilitatif memiliki keterampilan mendengarkan yang baik. Mereka aktif mendengarkan pandangan dan kekhawatiran anggota tim untuk memahami kebutuhan dan perspektif mereka. Pemimpin ini menunjukkan empati dengan memahami dan menghargai perasaan serta pandangan anggota tim. Membantu membangun

hubungan yang kuat dan kepercayaan di antara anggota. Mereka bekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, yang mendorong kolaborasi, keterbukaan, dan saling menghargai. Pemimpin fasilitatif memfasilitasi diskusi kelompok, membantu anggota tim berkomunikasi dengan jelas, dan mengarahkan dialog untuk mencapai kesepakatan atau solusi bersama. Mereka berperan dalam membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, memastikan bahwa perbedaan pendapat diatasi dengan baik dan tidak mengganggu kerja sama tim. Pemimpin ini berfokus pada pengembangan keterampilan dan potensi anggota tim, memberikan umpan balik yang membangun, dan mendukung pertumbuhan individu dan kelompok. Mereka memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan bahwa proses kerja diatur untuk mendukung kolaborasi yang efektif.

Dengan pendekatan fasilitatif, pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga sebagai penghubung dan pendukung, membantu tim bekerja secara sinergis dan efektif. Gaya kepemimpinan ini sering diterapkan dalam konteks tim yang kompleks atau proyek kolaboratif di mana keterlibatan dan kontribusi dari semua pihak sangat penting.

a. Kepala Badan

Kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas, diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) pada tahun 2022 dengan nomenklatur masih Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Kepala BRSDMKP mengembangkan suatu konsep pembangunan desa dengan karakteristik masyarakat yang bermata pencaharian utama di subsektor perikanan melalui program Desa Perikanan Cerdas. Konsep tersebut berorientasi pada empat pilar utama, yaitu ekonomi tumbuh, masyarakat bekerja, lingkungan lestari, dan berbasis digital. Program ini kemudian ditetapkan sebagai program unggulan BRSDMKP.

Kepala BRSDMKP, sebagai inisiator, berperan penting dalam mempercepat penyusunan petunjuk pelaksanaan, mendorong unit kerja sebagai pelaksana program, serta membangun jejaring kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Proses penyusunan petunjuk pelaksanaan dimonitor secara periodik setiap minggu, sehingga tim penyusun dapat bekerja secara optimal. Selain itu, Kepala BRSDMKP secara langsung melakukan kunjungan lapangan ke Desa Panembangan untuk bertemu dengan Bupati Banyumas, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait (Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata), kepala desa dan aparatur desa, penyuluh perikanan wilayah kerja Kabupaten Banyumas, serta pembudi daya ikan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan identifikasi permasalahan, kebutuhan, serta menyerap aspirasi masyarakat pembudi daya ikan. Hasil kunjungan lapangan ini menjadi dasar dalam menetapkan pembagian tugas antar-unit kerja di lingkungan BRSDMKP, unit kerja eselon I KKP yang relevan, serta kementerian/lembaga mitra di luar KKP.

Sebagai penggerak utama, Kepala BRSDMKP berhasil memobilisasi seluruh unit kerja internal BRSDMKP, menjalin kerja sama dengan unit kerja eselon I lingkup KKP, serta membangun kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain maupun sektor bisnis. Unit kerja lingkup BRSDMKP yang berperan aktif antara lain: Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi, Balai Riset Budi Daya Ikan Hias Depok, Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor, serta Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Sementara itu, unit kerja eselon I KKP yang diajak berkolaborasi meliputi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan

dan Perikanan, serta Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).

Kolaborasi eksternal juga dijalin dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), Direktorat Jenderal Kewirausahaan (Kementerian Koperasi dan UKM), serta PT Telekomunikasi Indonesia. Faktor pendorong terbangunnya jejaring kolaborasi antara lain kewenangan formal Kepala BRSDMKP, kedekatan personal dengan pejabat kunci di kementerian/lembaga dan sektor swasta, serta pengalaman kerja sama sebelumnya. Misalnya, kerja sama dengan Kementerian Desa PDTT dan PT Telkom didasari oleh hubungan personal, sedangkan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dilandasi pengalaman kolaborasi pada tahun 2017.

Dalam menjajaki kemitraan dengan aktor eksternal, Kepala BRSDMKP secara langsung mengunjungi calon mitra bersama staf teknis yang nantinya akan bertindak sebagai pelaksana program. Pendekatan ini menumbuhkan rasa dihargai pada pihak mitra, sehingga meningkatkan kesediaan mereka untuk bekerja sama. Adapun koordinasi dengan unit kerja eselon I KKP (Direktorat Pakan dan Obat–DJPB, Direktorat Usaha dan Investasi–DJPDSPKP, serta BLU LPMUKP) dilakukan melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP). Hal ini dimungkinkan karena Puslatluh KP membawahi penyuluh perikanan di seluruh Indonesia yang selama ini telah mendampingi program prioritas KKP. Dengan demikian, ketika terdapat permintaan kolaborasi dalam pemberdayaan pembudi daya ikan di Desa Panembangan, ketiga unit kerja tersebut menyatakan kesediaan untuk mendukung pelaksanaan program.

Inisiasi program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Desa Panembangan oleh Kepala BRSDMKP menunjukkan peran kepemimpinan transformasional yang ditandai dengan kemampuan mengembangkan visi, mendorong perubahan, dan menggerakkan aktor-aktor lintas sektor. Menurut Bass (1990), kepemimpinan transformasional ditandai dengan inspirasi visi bersama,

stimulasi intelektual, serta perhatian individual terhadap pengikut. Hal tersebut tercermin dalam upaya Kepala BRSDMKP membangun konsep Desa Perikanan Cerdas dengan empat pilar pembangunan, yaitu ekonomi tumbuh, masyarakat bekerja, lingkungan lestari, dan berbasis digital yang kemudian dikomunikasikan secara konsisten kepada unit kerja internal, eselon I KKP, serta mitra eksternal.

Selain itu, kemampuan Kepala BRSDMKP dalam mempercepat penyusunan petunjuk pelaksanaan dan memonitor progres secara periodik dapat dipandang sebagai bentuk kepemimpinan berorientasi pada kinerja (*performance-oriented leadership*). Model kepemimpinan ini menekankan pada pencapaian target melalui pengawasan, arahan yang jelas, dan koordinasi intensif (Yukl, 2013). Dengan demikian, kepemimpinan yang ditampilkan bukan hanya transformasional, tetapi juga memiliki dimensi transaksional melalui penggunaan kewenangan formal untuk menggerakkan unit kerja internal BRSDMKP.

Keberhasilan Kepala BRSDMKP membangun jejaring kerja sama dengan berbagai aktor lintas sektor sejalan dengan konsep *governance network* (Rhodes, 1996). Dalam *governance network*, keberhasilan program tidak lagi ditentukan oleh satu organisasi tunggal, melainkan oleh kemampuan pemimpin untuk mengorkestrasi aktor-aktor dengan kepentingan berbeda melalui mekanisme koordinasi, pertukaran sumber daya, dan penciptaan nilai bersama. Kolaborasi BRSDMKP dengan Pemerintah Daerah Banyumas, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, PT Telekomunikasi, dan sektor perbankan (BNI) menunjukkan implementasi nyata dari prinsip *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yakni keterlibatan berbagai aktor secara partisipatif, pembangunan kepercayaan, dan pencapaian hasil melalui kesepakatan bersama.

Faktor kedekatan personal antara Kepala BRSDMKP dengan pejabat di kementerian/lembaga lain serta pengalaman kerja sama sebelumnya mengonfirmasi pandangan Emerson dan Nabatchi (2015) mengenai pentingnya kapital sosial dalam kolaborasi. Modal sosial berupa jaringan, kepercayaan, dan pengalaman kolaborasi terdahulu terbukti mempercepat pembentukan komitmen

kolektif. Sementara itu, pemanfaatan kewenangan formal Kepala BRSDMKP untuk menggerakkan unit kerja internal menggambarkan adanya kombinasi antara otoritas hierarkis dan modal relasional dalam membangun jejaring kolaborasi.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala BRSDMKP dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Desa Panembangan bersifat hibrid, yaitu memadukan kepemimpinan transformasional, transaksional, serta kepemimpinan jaringan (*network leadership*). Model kepemimpinan hibrid tersebut menjadi prasyarat bagi efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam implementasi program Desa Perikanan Cerdas, yang secara konseptual juga merefleksikan praktik *collaborative governance* di tingkat lokal.

b. Kepala Desa

Desa Panembangan memiliki tanah bengkok seluas 37,8 Ha, yang meliputi sawah, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, dan kuburan. Dari total luas tersebut, lahan pertanian mencakup 32,6 Ha yang terdiri atas hamparan sawah dan kolam ikan. Tanah bengkok digunakan untuk kepala desa dan aparatur desa seperti sekretaris desa, kepala dusun, kepala seksi, kepala urusan, petugas pengairan, dan petugas urusan kematian, seluas 25,8 Ha. Sisanya, seluas 6,8 Ha, merupakan tanah Suksara, yaitu lahan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki jasa bagi desa atau diperoleh melalui undian. Penentuan penerima tanah Suksara dilakukan oleh Kepala Desa, dengan hak pemanfaatan selama satu tahun, dan pada tahun berikutnya dialokasikan kembali kepada masyarakat lain melalui mekanisme yang sama.

Pada praktiknya, tanah bengkok yang menjadi hak kepala desa dan aparatur desa juga digarap oleh masyarakat untuk ditanami padi (sawah), tanaman sayuran (kebun) dan ikan (kolam) dengan sistem sewa atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian, kepala desa memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengarahkan dan menggerakkan masyarakat, karena masyarakat sangat bergantung pada kebijakan kepala desa, terutama terkait pemanfaatan tanah bengkok.

Kepala Desa merupakan salah satu aktor kunci dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Masyarakat desa cenderung lebih patuh dan responsif terhadap arahan kepala desa dibandingkan dengan pihak luar desa, meskipun pihak luar memiliki jabatan dan pengaruh di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan:

“Kepala Desanya harus kita pegang, bagaimana dia mendukung, mengkoordinir, melaksanakan, dan menggerakkan masyarakat, khususnya pembudi daya ikan. Kalau Kepala Desanya sudah bisa kita pegang, maka kita akan dengan mudah memasukkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat perikanan”.

Kepala Desa Panembangan, Bapak Untung Sanyoto merupakan Guru yang mengajukan pensiun dini untuk maju sebagai calon Kepala Desa. Pada tahun 2019 terpilih sebagai Kepala Desa. Dengan berbekal pengalaman sebagai Guru, Kepala Desa Panembangan sangat “ngemong” masyarakat dan terbuka terhadap program pembangunan yang masuk pada wilayah kekuasaannya, selama untuk memajukan masyarakat Desa. Hal tersebut terbukti pada tahun 2021, Desa Panembangan terpilih menjadi lokasi percontohan Budi daya Ikan Nila Sistem Mina Padi dengan luas 25 Ha, program pembangunan perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah senilai 2 milyar rupiah. Seperti yang disampaikan oleh Koordinator penyuluh perikanan Banyumas:

“Pak Untung Sunyoto sebagai Kepala Desa Panembangan sangat *welcome* terhadap berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan perikanan untuk masyarakat. Orangnya sangat komunikatif, selalu mencari peluang berbagai program pemerintah untuk kemajuan Desa, disegani masyarakat, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Desa”.

Kepala Desa Panembangan memiliki inisiatif dalam memajukan desanya dengan cara yang positif dan konstruktif, aktif mencari peluang dan ide untuk memajukan desanya, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Selalu memperhatikan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat desa dan segera mencari solusi yang tepat. Berkomunikasi secara terbuka dengan warganya, mendengarkan masukan, dan memberikan informasi yang diperlukan. Kepala desa

sering mengadakan pertemuan atau forum untuk berbicara langsung dengan masyarakat secara berkala dan rutin.

Kepala Desa Panembangan secara aktif membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program-program desa. Kepala desa tidak takut mencoba metode baru atau inovatif dalam menyelesaikan masalah atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kepala desa mengelola anggaran dan sumber daya desa dengan bijak dan transparan, memastikan bahwa semua program dan proyek berjalan sesuai rencana.

Kepala desa berusaha meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat desa, baik melalui pelatihan, pendidikan, atau program pengembangan kapasitas lainnya. Secara rutin memantau dan mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Kepemilikan tanah bengkok di Desa Panembangan menjadi faktor penting yang memperkuat posisi kepala desa sebagai aktor kunci dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya pembudi daya ikan. Tanah bengkok seluas 37,8 hektare terdiri atas lahan pertanian, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, dan lahan pemakaman. Dari total luas tersebut, 32,6 hektare digunakan untuk lahan pertanian berupa sawah dan kolam ikan. Sebagian besar, yakni 25,8 hektare, diperuntukkan bagi kepala desa dan aparatur desa, sedangkan sisanya 6,8 hektare merupakan tanah suksara, yaitu lahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berjasa bagi desa atau melalui mekanisme undian yang ditetapkan oleh kepala desa.

Dalam praktiknya, pemanfaatan tanah bengkok sering kali dilakukan melalui mekanisme sewa atau bagi hasil antara aparatur desa dan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan relasi ketergantungan masyarakat terhadap kepala desa, yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dan distribusi akses atas tanah bengkok. Temuan ini sejalan dengan konsep *local power structure* sebagaimana dikemukakan oleh Agrawal dan Ribot (1999), di mana penguasaan

atas sumber daya lokal, termasuk tanah, memperkuat otoritas dan legitimasi politik kepala desa. Dengan demikian, kepala desa bukan hanya memiliki otoritas administratif, tetapi juga otoritas substantif dalam memengaruhi perilaku dan partisipasi masyarakat desa.

Posisi kepala desa sebagai aktor sentral dalam kolaborasi pemberdayaan masyarakat juga ditekankan oleh pernyataan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, yang menyatakan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh dukungan kepala desa. Hal ini konsisten dengan teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), yang menekankan pentingnya kehadiran pemimpin lokal yang kredibel untuk menjembatani aktor eksternal dengan komunitas.

Kepemimpinan Kepala Desa Panembangan, Untung Sanyoto, dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan fasilitatif sekaligus kepemimpinan partisipatif. Berbekal latar belakang sebagai guru, ia menunjukkan gaya kepemimpinan yang “ngemong” (mengayomi), komunikatif, dan terbuka terhadap masuknya program pembangunan. Rekam jejaknya menunjukkan keberhasilan menarik investasi program perikanan berskala besar, seperti program budi daya ikan nila sistem mina padi seluas 25 hektare senilai 2 miliar rupiah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Hal ini memperkuat kredibilitasnya di hadapan masyarakat maupun pemangku kepentingan eksternal.

Secara konseptual, praktik kepemimpinan yang ditunjukkan Kepala Desa Panembangan mencerminkan kombinasi antara:

- (1) *Transformational leadership* (Bass, 1990), melalui visinya untuk memajukan desa dan kemampuannya menginspirasi partisipasi masyarakat.
- (2) *Facilitative leadership* (Chrislip & Larson, 1994), melalui kemampuannya menciptakan ruang dialog, mendengar aspirasi, serta membangun komunikasi dua arah secara rutin dengan masyarakat.

(3) *Network leadership* (Crosby & Bryson, 2005), melalui perannya dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi non-pemerintah.

Dengan memadukan ketiga tipe kepemimpinan tersebut, Kepala Desa Panembangan mampu menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi kolaborasi lintas sektor. Faktor legitimasi sosial, kepemilikan sumber daya strategis berupa tanah bengkok, serta gaya kepemimpinan yang inklusif menjadikannya sebagai aktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi program Desa Perikanan Cerdas.

c. Penyuluh Perikanan

Keberadaan tenaga pendamping dalam sebuah program sangat penting karena mereka berperan krusial dalam memastikan keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program. Di Desa Panembangan, tenaga pendamping program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan terdiri atas penyuluh perikanan dan petugas penyuluh koperasi lapangan.

Penyuluh perikanan adalah pejabat fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan di sektor perikanan. Penyuluhan perikanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha di sektor perikanan, dengan tujuan mendorong mereka untuk mampu dan bersedia mengorganisir diri dalam mengakses informasi terkait pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Melalui penyuluhan perikanan ini, diharapkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

Tugas penyuluh perikanan meliputi penumbuhan dan pendampingan kelompok, peningkatan kelas kelompok, pembentukan gabungan kelompok (gapokan), pembinaan korporasi, pembinaan usaha mikro dan kecil di sektor kelautan dan perikanan, pembinaan koperasi kelautan dan perikanan, fasilitasi akses permodalan dan pasar, pendampingan akses informasi dan teknologi,

sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran fungsi lingkungan, pendampingan bantuan pemerintah, serta pengumpulan dan pembaruan data.

Sementara itu, petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) merupakan pegawai pemerintah di bawah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja tahunan sebagai tenaga non-PNS. Tugas PPKL meliputi:

1. Pendampingan kepada koperasi binaan: Memberikan bimbingan kepada koperasi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Inventarisasi potensi wilayah kerja: Mengidentifikasi potensi yang ada di wilayah kerjanya untuk pengembangan koperasi.
3. Pendampingan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT): Membantu koperasi dalam menyelenggarakan RAT dengan baik.
4. Inventarisasi calon koperasi modern: Mengumpulkan data tentang calon koperasi yang berpotensi untuk dibina.
5. Penyuluhan perkoperasian: Memberikan edukasi tentang koperasi kepada kelompok masyarakat yang akan bergabung atau mendirikan koperasi, bekerja sama dengan instansi terkait.
6. Pendataan koperasi: Mengumpulkan data tentang koperasi di wilayah kerjanya untuk mendukung Online Data System (ODS).
7. Penyebarluasan informasi dan edukasi: Menyampaikan informasi, motivasi, dan edukasi tentang perkoperasian kepada koperasi dan masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan.

Jumlah Penyuluh perikanan yang mendampingi program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Desa Panembangan sejumlah 11 orang. Mereka memiliki tugas spesifik mendampingi setiap segmen usaha yang dilakukan oleh pembudi daya ikan beserta keluarganya, yaitu pembenihan ikan nila, pendederan ikan nila, pembesaran ikan nila sistem mina padi, budi daya ikan hias, pembuatan pakan mandiri (pelet), budi daya *maggot*, pengolahan aneka jenis produk berbahan baku ikan, legalisasi koperasi Mina Satya Panembangan, akses

pembiayaan, digitalisasi usaha, rintisan desa wisata, dan rintisan pasar ikan. Sedangkan jumlah PPKL yang mendampingi 1 orang untuk mendampingi Koperasi Mina Satya Panembangan.

Keberadaan penyuluh perikanan di lapangan merupakan kondisi awal yang ideal dan menjadi salah satu faktor pendorong terpilihnya lokasi tersebut dalam program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Penyuluh perikanan dapat memberikan pendampingan yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, atau permasalahan yang dihadapi oleh pembudi daya ikan secara terus menerus. Penyuluh perikanan juga menjadi fasilitator setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan, seperti sosialisasi akses pembiayaan usaha oleh PT Bank Negara Indonesia, pelatihan teknis budi daya ikan (BPPP Tegal), pelatihan pasca panen hasil perikanan (Pemdes Panembangan), pelatihan pembuatan pakan ikan (BPPP Tegal), pelatihan kewirausahaan diversifikasi olahan ikan (Dinas Koperasi UKM Banyumas), pelatihan digital marketing dan *innovation class* oleh PT Telekomunikasi, dan bimbingan teknis manajemen operasi.

Penyuluh perikanan sebagai motivator, membantu memotivasi pembudi daya ikan, memberikan dorongan moral, dan membimbing mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyuluh perikanan membantu memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Penyuluh perikanan mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan, memberikan umpan balik yang berharga tentang bagaimana program berjalan dan apa yang perlu diperbaiki, sehingga program dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Penyuluh perikanan juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Panembangan, Dinas Perikanan Peternakan Banyumas, BLU BPPP Tegal, dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bahwa semua aspek kebutuhan peserta program terpenuhi. Penyuluh perikanan membantu dalam aspek administratif, seperti dokumentasi, pencatatan kemajuan, dan pelaporan. Ini membantu dalam memastikan bahwa semua komponen program dikelola dengan baik. Penyuluh perikanan juga membantu dalam

mengelola sumber daya yang tersedia, seperti alat bantu atau materi pelatihan, agar dapat digunakan secara efektif dalam mendukung tujuan program.

Penyuluh perikanan menjadi fasilitator dalam menjalin hubungan yang positif dan membangun kepercayaan antara pemerintah yang memiliki program dengan pembudi daya ikan. Penyuluh perikanan mampu membangun hubungan yang positif dengan peserta program, yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman. Dengan adanya tenaga pendamping, peserta program merasa lebih didukung dan diperhatikan, yang dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan mereka terhadap program.

Penyuluh perikanan terlibat dalam memberikan pelatihan atau pengembangan keterampilan kepada peserta program, yang dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Tenaga pendamping dapat menyesuaikan metode dan strategi pelatihan berdasarkan kemajuan dan kebutuhan peserta, memastikan pendekatan yang lebih efektif.

Penyuluh perikanan menyediakan solusi dan respon cepat. Ketika terjadi masalah atau hambatan, tenaga pendamping dapat segera memberikan solusi atau bantuan untuk mengatasi situasi tersebut. Mereka mampu beradaptasi dengan perubahan situasi atau kebutuhan peserta, memastikan program tetap relevan dan efektif. Keberadaan tenaga pendamping, dengan keterampilan dan komitmen mereka, dapat menjadi faktor kunci dalam kesuksesan program. Mereka tidak hanya membantu dalam implementasi dan pelaksanaan program tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Keberadaan tenaga pendamping merupakan elemen strategis dalam memastikan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Desa Panembangan, terdapat dua aktor utama pendamping, yaitu penyuluh perikanan dan petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL), yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator perubahan sosial-ekonomi bagi kelompok pembudi daya ikan.

Penyuluh perikanan sebagai pejabat fungsional, memiliki mandat formal untuk melaksanakan kegiatan penyuluh perikanan melalui proses pembelajaran

bagi pelaku utama dan pelaku usaha sektor perikanan. Fungsi ini sejalan dengan konsep *capacity building* (Eade, 1997), di mana pendampingan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelembagaan agar mampu mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar secara berkelanjutan. Tugas-tugas penyuluh perikanan, mulai dari penumbuhan kelompok, fasilitasi akses permodalan, pembinaan koperasi, hingga peningkatan kesadaran lingkungan, menunjukkan adanya pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis produksi, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan keberlanjutan ekologi.

Jumlah penyuluh perikanan yang relatif banyak (11 orang) untuk mendampingi berbagai segmen usaha mulai dari pembenihan, pendederan, pembesaran sistem mina padi, budi daya ikan hias, pembuatan pakan mandiri, hingga rintisan desa wisata dan pasar ikan menunjukkan adanya strategi *specialized facilitation*. Setiap penyuluh perikanan berfokus pada domain spesifik, sehingga memungkinkan terjadinya pembelajaran yang lebih intensif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bentuk nyata dari teori *adaptive extension* (Röling & Wagemakers, 1998), di mana penyuluh perikanan menyesuaikan metode dan strategi berdasarkan dinamika lokal.

Selain itu, keberadaan PPKL melengkapi fungsi pendampingan dengan memberikan dukungan pada aspek kelembagaan ekonomi melalui koperasi. Tugas PPKL, seperti mendampingi penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT), melakukan inventarisasi potensi koperasi, serta memberikan penyuluhan perkoperasian, merupakan wujud nyata dari penguatan kelembagaan kolektif masyarakat. Hal ini penting karena koperasi menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat posisi tawar pembudi daya ikan dalam rantai nilai perikanan. Dengan demikian, keberadaan PPKL mendukung integrasi antara dimensi produksi dan kelembagaan ekonomi desa.

Fungsi penyuluh perikanan sebagai fasilitator kolaborasi juga terlihat dalam berbagai kegiatan lintas aktor, seperti sosialisasi akses pembiayaan (PT BNI), pelatihan teknis (BPPP Tegal), diversifikasi produk olahan ikan (Dinas Koperasi dan UKM Banyumas), hingga digital marketing (PT Telekomunikasi).

Keberhasilan integrasi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa penyuluh perikanan berperan sebagai *boundary spanner* (Williams, 2002), yaitu aktor yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat desa.

Selain fungsi teknis, penyuluh perikanan memainkan peran psikososial sebagai motivator yang memberikan dorongan moral, membangun kepercayaan, serta menciptakan lingkungan kondusif bagi partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori *facilitative leadership* (Chrislip & Larson, 1994), di mana pendamping berperan bukan sebagai pengambil keputusan tunggal, melainkan sebagai pihak yang membantu proses kolaborasi dan penguatan kapasitas lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan tenaga pendamping di Desa Panembangan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program Desa Perikanan Cerdas. Melalui kombinasi peran teknis, kelembagaan, kolaboratif, dan motivasional, tenaga pendamping memastikan program tidak hanya terimplementasi sesuai rencana, tetapi juga berkelanjutan, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Hasil (*Outcomes*)

Pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas telah memberikan dampak sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Dampak Kegiatan Pemberdayaan

No	Uraian	Dampak
1	Pendapatan pembudi daya ikan	Naik dari Rp 600.000 – Rp 1.300.000 menjadi Rp 1.200.000 – Rp 2.500.000 per bulan
2	Nilai Kesejahteraan Pelaku Usaha	Naik dari 53,46 menjadi 101
3	Penggunaan lahan desa	Adanya Peraturan Desa tentang Pengelolaan Lahan Bengkok
4	Usaha Padi (Mina Padi)	Peningkatan Produktivitas Padi dari 0,6 Kg/m ² menjadi 0,9 Kg/m ²
		Musim tanam padi menjadi 3 kali/tahun dari 2 kali/tahun

5	Usaha Ikan (Mina Padi)	Peningkatan Produktivitas Ikan 0,5Kg/m ² dari 0,1 Kg/m ² dengan penggunaan pakan mandiri dan komersil dari sebelumnya hanya komersil
6	Pakan	Produksi pakan mandiri berupa pelet 2,2 ton (20,7 juta rupiah)/minggu
		Produksi magot 500 kg (3 juta rupiah)/bulan
		Produksi magot kering 50 kg (3,5 juta rupiah)/minggu
		Kolam budi daya cacing sutra 2x5 m, 4.800 liter/tahun atau senilai 48 juta rupiah/thn
7	Pembenihan	Dihasilkan 35.000 ekor benih nila/siklus (3,5 juta rupiah)
		Menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik
8	Pembesaran Ikan di Kolam	4 komoditas ikan konsumsi gurame, nila, lele, bawal
		Menerapkan Cara Budi daya Ikan yang Baik
9	Ikan Hias	15 komoditas ikan hias, Nilai produksi 24,3 juta/bulan (Koi, Channa, Koki, Komet, Platty, Manfish, Tiger Barb/Ikan Sumatera, Lobster Air Tawar, Louhan, Blue Elektrik)
10	Pengolahan Ikan	Sertifikasi PIRT dan Halal
		Peningkatan kemasan dan branding
		Pemasaran digital 70 % (Hasil penjualan 18 juta rupiah/bulan)
		zero waste dan adanya SOP setiap produk olahan
11	Pasar Ikan	Beroperasi tiap hari, display ikan konsumsi, olahan dan benih
		Penjualan 40 kg/hari (12 juta rupiah)
12	Kelembagaan usaha	Legalisasi koperasi Mina Satya Panembangan
		10 Pokdakan
		4 Poklahsar
		1 Pokdarwis
		3 Gapokkan

13	Wisata	Keuntungan bersih Rp 10 juta rupiah per bulan (parkir dan penjualan pakan ikan)
		25 orang tenaga kerja terlibat
14	Permodalan	500 juta oleh Koperasi Mina Satya Panembangan dari BLU LPMUKP
		1,75 Milyar oleh pembudi daya ikan dari Bank BNI
15	Pendidikan	4 orang anak pelaku usaha kuliah di satuan Pendidikan Ke;autan dan Perikanan

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Pelaksanaan program pembangunan di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, melalui Program Desa Perikanan Cerdas yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama mitra kolaborasi dengan pendekatan paradigma pembangunan *people-centered*, telah memberikan dampak positif bagi pembudi daya ikan. Dampak tersebut meliputi peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan, serta penyerapan tenaga kerja.

a. Peningkatan Produktivitas Usaha

Masyarakat Desa Panembangan memiliki dua kegiatan usaha utama, yaitu budi daya padi di sawah dengan budi daya ikan. Budi daya ikan di sawah (mina padi) mencakup lahan seluas 25 Ha, sementara budi daya ikan di kolam dilakukan di lahan seluas 5 Ha. Sistem mina padi difokuskan pada pembesaran ikan konsumsi, sedangkan budi daya ikan di kolam mencakup seluruh siklus, mulai dari pembenihan, pendederan, hingga pembesaran ikan konsumsi. Kegiatan mina padi juga memunculkan usaha sampingan berupa mina eduwisata, sementara budi daya ikan kolam mendorong terbentuknya kelompok pengolahan dan pemasaran produk olahan ikan yang umumnya dijalankan oleh istri-istri pembudi daya ikan.

Budi daya padi dilakukan sebanyak dua kali masa tanam per tahun, dengan setiap siklus memerlukan waktu sekitar empat bulan mulai dari pengolahan lahan hingga panen. Akibatnya, lahan sawah mengalami *idle* selama kurang lebih empat bulan per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh kepercayaan sebagian petani bahwa

penggunaan lahan secara terus-menerus dapat menurunkan hasil panen atau memicu serangan hama dan bencana.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah yang *idle*, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas untuk memberikan penyadartahuan mengenai pentingnya optimalisasi penggunaan lahan. Salah satunya dilakukan melalui penggunaan benih padi varietas baru IR 400 dan demonstrasi budi daya padi bersama ikan (mina padi) selama tiga musim tanam dalam satu tahun. Hasilnya, produksi padi meningkat dari 0,6 kg/m² menjadi 0,9 kg/m², sedangkan produksi ikan meningkat dari 0,1 kg/m² menjadi 0,5 kg/m². Peningkatan produksi ini juga diiringi dengan penurunan penggunaan pupuk pada padi dan pengurangan pakan komersil pada budi daya ikan.

Peningkatan produksi juga terjadi pada segmen pembenihan. Dihasilkan 35.000 ekor benih nila per siklus kegiatan yang berasal dari 150 ekor induk betina. Satu siklus usaha pembenihan membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Selain itu, pakan yang selama ini menjadi salah satu permasalahan pembudi daya ikan telah mampu diproduksi sendiri. Dalam waktu 1 minggu, produksi pakan mandiri berupa pelet sejumlah 2,2 ton dengan nilai dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah.

Kegiatan usaha budi daya ikan sistem mina padi telah memberikan *multiplier effect*, salah satunya adalah mina eduwisata. Banyak sekolah di Kabupaten Banyumas yang melakukan kegiatan *outing class* ke kawasan mina padi Desa Panembangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan berupa pengenalan dunia pertanian dan perikanan, menanam padi, memberi makan ikan, menangkap ikan, dan berfoto ria pada *boat* yang tersedia dengan *background* keindahan alam. Kegiatan mina eduwisata telah memberikan keuntungan bersih sebesar sepuluh juta rupiah per bulan dari biaya parkir dan penjualan pakan ikan.

b. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pola tanam, produktivitas padi dan ikan, produksi pakan mandiri, serta hadirnya *mina eduwisata* secara langsung telah meningkatkan

pendapatan pembudi daya ikan. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pembudi daya ikan *mina padi*, pendapatan mereka meningkat dua kali lipat, dari semula sekitar Rp 600.000–Rp 1.300.000 per bulan menjadi Rp 1.200.000–Rp 2.500.000 per bulan.

Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh berkurangnya biaya operasional, seperti harga pakan dan benih, efisiensi penggunaan pakan, serta tambahan penghasilan dari *mina eduwisata*. Benih dan pakan yang digunakan berasal dari hasil usaha pembenihan oleh sesama pembudi daya ikan di Desa Panembangan, serta pakan yang diproduksi secara mandiri, sehingga harganya lebih murah dibandingkan benih dan pakan komersial dari luar daerah.

Selain itu, sistem *mina padi* memungkinkan penggunaan pakan yang lebih efisien dibandingkan budi daya ikan di kolam, karena ikan memperoleh makanan dari tanaman dan serangga di sekitar padi. Sebaliknya, padi mendapatkan pupuk alami dari kotoran ikan, menciptakan hubungan simbiotik yang saling menguntungkan antara tanaman dan ikan.

Meskipun telah terjadi peningkatan pendapatan, tetapi apabila dibandingkan dengan nilai Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Banyumas sebesar Rp 2.195.690,- masih terdapat pekerjaan rumah agar semua pembudi daya ikan memiliki pendapatan minimal sesuai UMR atau di atas UMR. Beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan adalah memberdayakan istri pembudi daya ikan untuk membuat aneka olahan berbahan baku ikan, melakukan perluasan usaha *mina padi*, atau meningkatkan padat tebar usaha *mina padi*.

c. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja terjadi melalui kegiatan *mina eduwisata*. Menurut penuturan ketua kelompok sadar wisata, setidaknya 25 orang terlibat sebagai tenaga kerja, yang meliputi penjaga lahan parkir, penjual makanan ikan, pemandu wisata (*tour guide*), serta fotografer.

Pelaksanaan program Desa Perikanan Cerdas di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, telah menghasilkan berbagai

dampak positif dalam aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan. Berikut adalah ringkasan *outcomes* dari implementasi program tersebut:

a. Peningkatan Ekonomi dan Diversifikasi Usaha

Program Desa Perikanan Cerdas telah mendorong peningkatan produksi ikan nila melalui budi daya mina padi. Kelompok Pokdakan Berkah Randu Alas, misalnya, mengelola 21 kolam budi daya ikan nila dengan luas 2.260 m², menghasilkan produk ikan yang kontinyu dan memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Selain itu, desa ini juga mengembangkan produk olahan ikan seperti abon, kripik kulit ikan, dan stik tulang ikan, yang meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

b. Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi

Desa Panembangan memiliki 9 kelompok pembudi daya ikan dan 4 kelompok pengolah serta pemasar ikan. Kerja sama antara kelompok-kelompok ini dan dukungan dari pemerintah daerah serta penyuluh perikanan telah memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendorong kolaborasi dalam pengelolaan usaha perikanan secara terpadu.

c. Integrasi dengan Sektor Pariwisata dan Agrowisata

Agrowisata berbasis mina padi di Desa Panembangan telah menjadi daya tarik wisata edukasi yang mendukung program Desa Perikanan Cerdas. Meskipun luas area mina padi mengalami penurunan dari 25 hektar menjadi 11 hektar, sektor ini tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan promosi desa sebagai destinasi wisata perikanan dan pertanian.

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Program Desa Perikanan Cerdas telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, mencakup bidang budi daya ikan, pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran digital. Peningkatan kompetensi ini mendorong masyarakat untuk lebih mampu mengelola usaha perikanan secara mandiri dan berkelanjutan.

Meskipun telah mencatat berbagai keberhasilan, program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan melalui Desa Perikanan Cerdas menghadapi

beberapa tantangan, seperti berkurangnya luas lahan mina padi dan kebutuhan untuk memperluas area agrowisata. Untuk pengembangan lebih lanjut, direkomendasikan peningkatan infrastruktur, diversifikasi produk, serta penguatan pemasaran digital agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Secara keseluruhan, implementasi Desa Perikanan Cerdas di Desa Panembangan memberikan dampak positif signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, serta pengembangan sektor perikanan dan pariwisata. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan memperluas dampak, diperlukan kerja sama dalam mengatasi tantangan yang ada serta optimalisasi potensi yang tersedia.

Berdasarkan temuan lapangan, Program Desa Perikanan Cerdas merupakan contoh praktik *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Menurut Yang (2017), terdapat empat tipe kolaborasi, yakni: (1) pemerintah kuat dengan partisipan non-pemerintah kuat, (2) pemerintah kuat dengan partisipan non-pemerintah lemah, (3) pemerintah lemah dengan partisipan non-pemerintah kuat, dan (4) pemerintah lemah dengan partisipan non-pemerintah lemah.

Berdasarkan pelaksanaan kolaborasi di Desa Panembangan, jenis kolaborasi yang terjadi termasuk tipe 1, yakni pemerintah kuat dengan partisipan non-pemerintah yang kuat. Hal ini tercermin dari dominannya peran pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun desa, sedangkan peran non-pemerintah yang kuat ditunjukkan oleh Bank Negara Indonesia dan PT Telekom. Sementara itu, kontribusi akademisi relatif terbatas dan lebih banyak menyentuh aspek *mina eduwisata* serta kelompok pengolah dan pemasaran ikan, yang merupakan usaha tambahan dari kegiatan pembudi daya ikan.

Program *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan sangat cocok dipelopori oleh pemerintah. Karena pemerintah memiliki tugas untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat keberhasilannya akan lebih besar

dibandingkan tanpa keterlibatan pemerintah. Kelompok kolaboratif yang disponsori pemerintah dapat mempengaruhi koordinasi jaringan.

Sebagai ilustrasi, Hong dan Jungmin Ryu (2019) menunjukkan bahwa proyek *crowdfunding* yang melibatkan pemerintah cenderung memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dan menarik dana lebih besar dibandingkan proyek serupa tanpa keterlibatan pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan *crowdfunding* untuk membiayai bersama proyek-proyek publik bersama warga, guna mengatasi tantangan kompleks abad ke-21.

Peran dominan pemerintah dalam konteks pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Desa Panembangan dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. UPT pelatihan dan penyuluh perikanan menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan.

Masyarakat pembudi daya ikan dilatih dan disuluh untuk menguasai berbagai keterampilan usaha agar mampu mengelola potensi sumber daya alam di desa. Contohnya, dilakukan kegiatan demonstrasi dan percontohan seperti budi daya ikan sistem *mina padi*, budi daya ikan hias, pembuatan pakan ikan, serta pengolahan produk perikanan. Setelah memperoleh pengetahuan dan keterampilan tersebut, para pembudi daya ikan kemudian berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk memperoleh bantuan pemerintah berupa benih ikan dan mesin pakan mandiri.

Sementara itu, peran kementerian lain seperti Kementerian Koperasi dan UKM maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, meskipun telah menjalin perjanjian kerja sama, implementasi konkrit di lapangan relatif terbatas. Bentuk kolaborasi yang terlihat lebih banyak berupa pendampingan koperasi oleh tenaga pendamping lapangan dan supervisi penggunaan dana desa, yang tidak sebanding dengan proses penandatanganan

kerja sama. Pembinaan koperasi sektor perikanan juga menjadi bagian dari tugas penyuluh perikanan.

Komitmen pemerintah daerah dan pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan wajib di luar pelayanan dasar yang menjadi urusan konkuren. Meskipun APBD relatif kecil, dukungan Pemda Banyumas terlihat nyata melalui perbaikan jalan di kawasan usaha mina padi dan pelatihan diversifikasi olahan. Pemerintah Desa Panembangan juga mengalokasikan dana desa untuk pelatihan pembuatan pakan ikan, diversifikasi olahan ikan, dan pembangunan caren permanen.

Di sektor bisnis, Bank BNI dan PT Telkom memegang peran penting. Bank BNI menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 1,75 miliar dan dana CSR senilai Rp 354.736.000. Dana ini digunakan untuk pembangunan gerbang, gazebo, dan *tenant street* food pedagang, yang dimanfaatkan oleh pembudi daya ikan untuk pertemuan kelompok, diskusi, dan penjualan produk olahan ikan.

Akademisi lebih berperan dalam pengembangan mina eduwisata dan penguatan pemasaran produk olahan ikan. Bukan pada pemecahan permasalahan utama yang dihadapi oleh pembudi daya ikan. Sehingga perannya menjadi kurang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan.

C. Model Pengembangan *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Banyumas

Dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, pendekatan pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari kerangka *collaborative governance*. Kompleksitas persoalan yang dihadapi pembudi daya ikan mulai dari keterbatasan akses modal, teknologi, pasar, hingga kerentanan sosial dan lingkungan menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat ditangani oleh satu aktor secara tunggal. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat

memerlukan tata kelola kolaboratif yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan, sumber daya, dan kapasitas aktor secara sinergis dan berkelanjutan.

Collaborative governance menempatkan masyarakat, dalam hal ini pembudi daya ikan, bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor kunci dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan manusia yang menekankan perluasan kapasitas dan pilihan manusia, serta prinsip pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Melalui mekanisme dialog deliberatif, pembangunan kepercayaan, dan pembelajaran bersama, *collaborative governance* menciptakan ruang bagi penguatan *power within*, *power with*, dan *power to* masyarakat pembudi daya ikan, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang lebih seimbang dalam proses pembangunan.

Pendekatan *pentaheliks* memperkuat praktik *collaborative governance* dengan menghadirkan lima aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis/swasta, komunitas pembudi daya ikan, dan media, dalam satu ekosistem kolaborasi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penjamin regulasi, akademisi sebagai penghasil dan penerjemah pengetahuan, sektor usaha sebagai penggerak ekonomi dan akses pasar, masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, serta media sebagai sarana diseminasi informasi dan penguatan legitimasi publik. Sinergi antarpihak ini memungkinkan proses pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada penguatan kapasitas kolektif dan kelembagaan masyarakat pembudi daya ikan.

Melalui *collaborative governance* berbasis *pentaheliks*, pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan diarahkan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih struktural dan berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan, pengembangan ekonomi, akses terhadap sumber daya, serta penguatan jaringan sosial tidak lagi dilakukan secara parsial dan sektoral, melainkan terintegrasi dalam satu proses kolaboratif. Dengan demikian, pemberdayaan tidak berhenti pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi berkembang menjadi proses transformasi sosial yang

mendorong kemandirian, keberlanjutan usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudi daya ikan secara inklusif.

Namun demikian, efektivitas *collaborative governance* dan pendekatan *pentaheliks* sangat ditentukan oleh kejelasan peran aktor, mekanisme koordinasi, serta kualitas kepemimpinan fasilitatif. Tanpa desain kolaborasi yang jelas dan pembagian peran yang proporsional, keterlibatan banyak aktor justru berpotensi menimbulkan fragmentasi program dan inefisiensi, sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kolaboratif menjadi prasyarat utama agar pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan benar-benar mampu menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan perikanan budi daya.

Perkembangan paradigma administrasi publik menunjukkan bahwa setiap pendekatan lahir sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma sebelumnya. *Old Public Administration* menekankan stabilitas dan kepatuhan birokratis, tetapi kurang adaptif terhadap dinamika sosial. *New Public Management* berhasil memperkenalkan efisiensi dan orientasi kinerja, namun cenderung mereduksi warga negara menjadi pelanggan layanan. *New Public Service* kemudian mengoreksi kelemahan tersebut dengan menempatkan nilai-nilai demokrasi dan kewargaan sebagai inti administrasi publik. Meskipun demikian, baik NPM maupun NPS masih relatif terbatas dalam menjawab kompleksitas persoalan publik yang melibatkan banyak aktor lintas sektor.

Dalam konteks tersebut, *New Public Governance* (NPG) dipandang sebagai paradigma yang paling relevan untuk menjelaskan tata kelola publik kontemporer. NPG menekankan bahwa penyelenggaraan urusan publik berlangsung dalam jejaring aktor yang saling bergantung, melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Pemerintah tidak lagi bertindak sebagai pengendali tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang membangun ruang kolaborasi, kepercayaan, dan koordinasi. Pendekatan ini

sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menempatkan pengambilan keputusan bersama sebagai inti proses kebijakan.

Novelty disertasi ini terletak pada upaya mengintegrasikan paradigma *New Public Governance* dengan pendekatan partisipatif berbasis pengetahuan lokal dalam konteks pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung memisahkan pembahasan tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat, disertasi ini memposisikan pengetahuan lokal pembudi daya ikan sebagai elemen strategis dalam jejaring *governance*. Dengan demikian, *collaborative governance* tidak hanya dipahami sebagai mekanisme koordinasi antar aktor formal, tetapi juga sebagai proses pembelajaran sosial yang mengakui dan memanfaatkan kapasitas pengetahuan masyarakat lokal.

Melalui kerangka ini, disertasi diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan konseptual *New Public Governance* dalam konteks pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan masyarakat pembudi daya ikan sebagai mitra strategis dalam tata kelola kolaboratif.

Berdasarkan sintesis paradigma administrasi publik dan kerangka *New Public Governance*, disertasi ini merumuskan proposisi penelitian sebagai berikut:

1. **Proposisi 1 (P1):** Semakin inklusif proses *collaborative governance* dalam sektor perikanan budi daya, semakin kuat pengakuan dan pemanfaatan pengetahuan lokal pembudi daya ikan dalam perumusan kebijakan.
2. **Proposisi 2 (P2):** Kepercayaan (*trust*) dan komitmen antar aktor (pemerintah, pembudi daya ikan, swasta, dan aktor pendukung) berperan sebagai prasyarat utama efektivitas *collaborative governance* dalam kerangka *New Public Governance*.

3. **Proposisi 3 (P3):** Integrasi pendekatan partisipatif berbasis pengetahuan lokal dalam jejaring *governance* meningkatkan kualitas kebijakan perikanan budi daya yang adaptif dan berkelanjutan.
4. **Proposisi 4 (P4):** Peran pemerintah sebagai fasilitator kolaborasi (bukan pengendali tunggal) memperkuat kapasitas kolektif aktor lokal dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Penelitian ini dibangun dengan mengintegrasikan paradigma *New Public Governance*, konsep *collaborative governance*, dan pendekatan partisipatif berbasis pengetahuan lokal. Dalam kerangka ini, kompleksitas persoalan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan dipahami sebagai isu publik yang memerlukan keterlibatan multipihak dalam jejaring tata kelola kolaboratif.

Secara konseptual, *New Public Governance* berfungsi sebagai payung paradigma yang menjelaskan konteks tata kelola publik kontemporer berbasis jejaring. Di dalamnya, *collaborative governance* berperan sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan bersama, sementara pengetahuan lokal pembudi daya ikan diposisikan sebagai sumber daya strategis yang memperkaya proses kolaborasi dan kualitas kebijakan.

Hasil yang diharapkan dari interaksi ketiga elemen tersebut adalah kebijakan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Gambar 4. 8 Pendekatan Konseptual dalam Menemukan Kebaharuan (Novelty)



Sumber: Diolah Penulis (2025)

Model Pengembangan *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Banyumas disusun dengan merujuk pada kerangka konseptual *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Model ini digunakan sebagai alat analisis sekaligus kerangka pengembangan untuk menjelaskan bagaimana kolaborasi antar-pemangku kepentingan dapat diperbaiki agar lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan. Secara khusus, model ini dirancang untuk mengoreksi kelemahan praktik kolaborasi yang selama ini masih bersifat administratif dan proyek-oriented, menguatkan posisi pembudi

daya ikan sebagai subjek utama kolaborasi, serta menempatkan kolaborasi sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar rangkaian kegiatan program. Model pengembangan ini terdiri atas empat komponen utama sebagaimana dirumuskan oleh Ansell dan Gash, yang diperkuat dengan kejelasan aktor kolaborator dan orientasi tujuan pada kesejahteraan.

Komponen pertama adalah *starting conditions* atau kondisi awal kolaborasi, yang menggambarkan situasi sebelum proses kolaboratif berlangsung. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa kondisi awal kolaborasi sangat dipengaruhi oleh ketimpangan sumber daya dan kekuasaan antaraktor (*power-resource asymmetries*), pengalaman kerja sama atau konflik sebelumnya, serta tingkat kepercayaan yang telah terbentuk. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas, kondisi awal menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas dan akses informasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pembudi daya ikan. Pembudi daya ikan umumnya berada pada posisi dengan akses terbatas terhadap teknologi, permodalan, dan pasar, sehingga partisipasinya dalam kolaborasi cenderung lemah dan hubungan kolaboratif sebelumnya bersifat top-down. Oleh karena itu, model ini menekankan penguatan *starting conditions* melalui pemetaan aktor Pentaheliks beserta kepentingan dan ketimpangan sumber daya yang ada, serta penguatan kapasitas awal pembudi daya ikan melalui pelatihan teknis, manajerial, dan organisasi, peningkatan literasi kebijakan dan hak partisipasi, serta penguatan kelompok sebagai *collective actor*. Strategi ini bertujuan untuk menyeimbangkan posisi tawar aktor sebelum kolaborasi berjalan dan membangun kepercayaan awal sebagai prasyarat keberhasilan proses kolaboratif selanjutnya.

Komponen kedua adalah *institutional design* atau desain kelembagaan kolaborasi, yang merujuk pada aturan main, struktur kelembagaan, dan mekanisme formal yang mengatur proses kolaborasi. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kolaborasi yang belum terlembagakan secara jelas, tidak adanya aturan main yang mengikat, serta forum kolaborasi yang bersifat ad hoc dan bergantung pada proyek. Menurut Ansell dan Gash (2008), desain kelembagaan

yang inklusif, transparan, dan memiliki kejelasan prosedural sangat menentukan kualitas partisipasi dan legitimasi kolaborasi. Tanpa desain kelembagaan yang jelas, kolaborasi berisiko menjadi forum simbolik tanpa daya ikat. Oleh karena itu, model ini mengusulkan pembentukan forum kolaborasi perikanan budi daya Kabupaten Banyumas yang memiliki dasar hukum, misalnya melalui keputusan kepala daerah, dengan komposisi aktor yang proporsional. Forum ini dilengkapi dengan aturan main yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing aktor, mekanisme pengambilan keputusan bersama, serta skema pembagian manfaat dan risiko. Selain itu, desain kelembagaan kolaborasi diintegrasikan dengan program pembangunan perikanan budi daya yang telah ada, seperti kampung budi daya tematik, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan program Makan Bergizi Gratis, guna menjamin keberlanjutan dan kepastian kolaborasi.

Komponen ketiga adalah *facilitative leadership* atau kepemimpinan fasilitatif. Permasalahan yang masih muncul adalah dominannya peran pemerintah sebagai pelaksana program, dengan peran mediator dan fasilitator yang belum optimal. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa kepemimpinan dalam *collaborative governance* bukan bersifat komando, melainkan fasilitatif, yakni kepemimpinan yang mampu memediasi konflik, membangun kepercayaan, dan memastikan keterlibatan aktor secara inklusif. Dalam model ini, pemerintah daerah direposisi dari *program implementer* menjadi *collaboration enabler*. Pemimpin kolaborasi diharapkan mampu menjembatani perbedaan kepentingan, mendorong dialog yang setara, serta menjamin keterlibatan kelompok kecil dan rentan. Peran akademisi dan pendamping diperkuat sebagai *neutral facilitator* yang menghubungkan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan lokal. Penguatan kepemimpinan fasilitatif ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan komitmen jangka panjang para aktor kolaborasi.

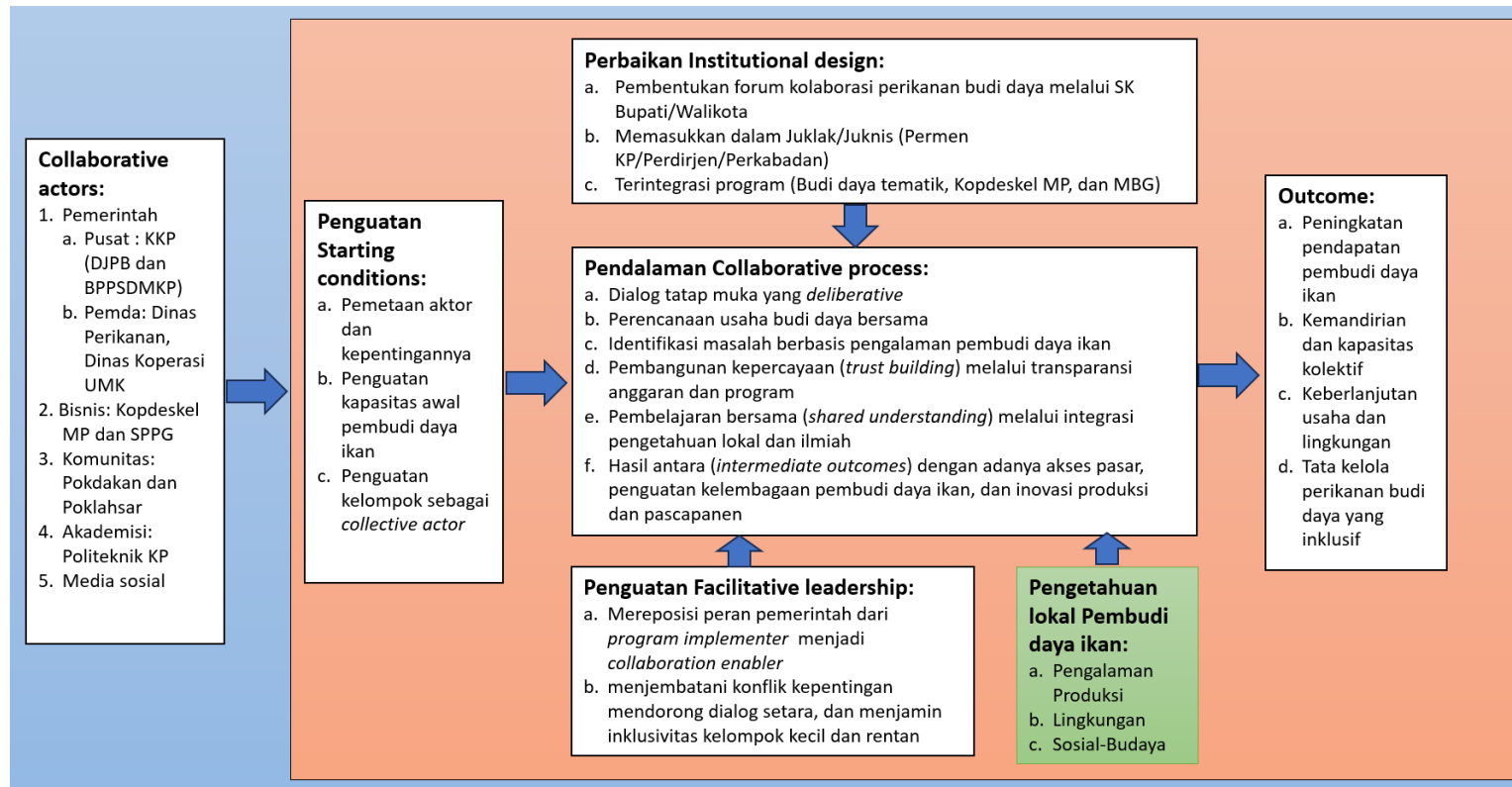
Komponen keempat adalah *collaborative process*, yang merupakan inti dari *collaborative governance*. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa proses kolaboratif bersifat iteratif dan mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pembentukan pemahaman bersama, serta

capaian antara (*intermediate outcomes*). Dalam praktik di Banyumas, permasalahan yang muncul adalah forum kolaborasi yang masih didominasi sosialisasi satu arah dan partisipasi yang belum memengaruhi pengambilan keputusan. Model ini menekankan pendalaman proses kolaboratif melalui dialog deliberatif, perencanaan usaha budi daya secara bersama, dan identifikasi masalah berbasis pengalaman pembudi daya ikan. Pembangunan kepercayaan dilakukan melalui transparansi program dan anggaran serta evaluasi bersama secara periodik. Pembelajaran bersama (*shared understanding*) dikembangkan melalui integrasi pengetahuan lokal pembudi daya ikan dengan pengetahuan ilmiah dan inovasi teknologi yang kontekstual. Proses ini diharapkan menghasilkan capaian antara berupa peningkatan akses pasar, penguatan kelembagaan pembudi daya ikan, serta inovasi produksi dan pascapanen, sehingga kolaborasi berkembang menjadi proses *co-creation* kebijakan dan program.

Keempat komponen tersebut dirangkai dalam bentuk siklus untuk menegaskan bahwa *collaborative governance* merupakan proses berkelanjutan, bukan tahapan linear. Outcome akhir yang diharapkan dari siklus kolaborasi ini adalah peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan, penguatan kapasitas dan kemandirian kolektif, keberlanjutan usaha dan lingkungan, serta terwujudnya tata kelola perikanan budi daya yang inklusif. Hasil ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan oleh para aktor, khususnya kelompok yang selama ini termarjinalkan.

Dengan demikian, model pengembangan ini mentransformasikan kolaborasi dari sekadar koordinasi administratif menjadi *collaborative governance* yang bersifat transformatif, dengan pembudi daya ikan sebagai pusat, aktor kolaborasi sebagai mesin sinergi, dan kesejahteraan sebagai tujuan akhir. Model ini tidak hanya merefleksikan kerangka teoretis Ansell dan Gash, tetapi juga mengadaptasikannya secara kontekstual untuk memperbaiki praktik *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas.

Gambar 4. 9 Model Pengembangan *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Banyumas



Agar *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan menjadi efektif dan efisien cukup dengan melibatkan aktor yang mampu mengatasi permasalahan pembudi daya ikan. Aktor-aktor tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis BRSDMKP yang menangani pelatihan dan penyuluhan perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang memberikan Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, bisnis atau swasta (Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Pemberdayaan pembudi daya ikan tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi multi-aktor yang terintegrasi. Model *Pentaheliks* menekankan kolaborasi antara lima aktor utama: pemerintah, akademisi, bisnis/swasta, komunitas pembudi daya ikan, dan media. Dengan pendekatan *collaborative governance*, model ini bertujuan menciptakan keputusan dan praktik yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka *collaborative governance* berbasis pentaheliks, pemerintah—baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa—memegang peran strategis sebagai penyedia regulasi, insentif, pembiayaan, serta pengawasan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, pemerintah bertanggung jawab menyusun kebijakan dan program pemberdayaan yang berbasis data dan kebutuhan lokal, menyediakan fasilitas pelatihan serta bantuan teknis, serta memastikan kepatuhan terhadap standar budi daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Peran ini menempatkan pemerintah tidak semata sebagai pelaksana program, melainkan sebagai fasilitator dan penjamin keberlanjutan kolaborasi.

Akademisi, khususnya lembaga pendidikan dan vokasi perikanan seperti Politeknik Kelautan dan Perikanan, berkontribusi melalui pengembangan pengetahuan, inovasi teknologi, dan evaluasi program. Peran akademisi mencakup pengembangan teknologi budi daya yang efisien dan ramah lingkungan, penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara kolaboratif bersama pembudi daya ikan. Dengan

demikian, akademisi berfungsi sebagai penghubung antara pengetahuan ilmiah dan praktik lokal di lapangan.

Pelaku usaha atau industri berperan penting dalam memperkuat rantai nilai perikanan budi daya. Melalui keterlibatan koperasi desa/kelurahan dan unit pengolahan atau pemasaran, sektor swasta menyediakan akses pasar dan investasi bagi produk perikanan, mendukung ketersediaan sarana produksi dan teknologi, serta mendorong penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berbasis kemitraan. Peran ini memungkinkan pemberdayaan pembudi daya ikan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga berdampak pada peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan ekonomi.

Masyarakat, khususnya pembudi daya ikan, ditempatkan sebagai pusat dari seluruh proses kolaboratif. Pembudi daya ikan berperan aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, terlibat dalam pelatihan, kelompok belajar, dan praktik manajemen bersama, serta berkontribusi melalui pengetahuan lokal yang penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Posisi ini menegaskan bahwa pembudi daya ikan bukan sekadar penerima manfaat, melainkan aktor utama yang menentukan arah dan keberhasilan pemberdayaan.

Sementara itu, media dan komunitas informasi berfungsi sebagai fasilitator komunikasi dan advokasi publik dalam ekosistem kolaborasi. Peran media mencakup penyebarluasan informasi mengenai program, inovasi, dan praktik baik, mendorong transparansi dan akuntabilitas antaraktor, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara unsur pentaheliks. Kehadiran media memperkuat legitimasi publik sekaligus memperluas dampak pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan.

Proses kolaboratif dalam model *pentaheliks* dilaksanakan melalui tahapan yang saling berkaitan dan bersifat siklik. Tahap awal dimulai dengan *agenda setting*, yaitu identifikasi bersama terhadap permasalahan dan peluang pemberdayaan pembudi daya ikan melalui forum multiaktor yang melibatkan seluruh unsur pentaheliks. Pada tahap ini, berbagai kepentingan, kebutuhan, dan potensi lokal didiskusikan secara terbuka sebagai dasar penyusunan arah

kebijakan dan program. Tahap selanjutnya adalah *co-creation of policy and program*, di mana seluruh aktor secara kolaboratif merancang kebijakan, strategi, dan rencana aksi yang berbasis bukti ilmiah serta kebutuhan nyata pembudi daya ikan di tingkat lokal.

Tahap implementasi dan fasilitasi menjadi wujud konkret dari kolaborasi yang telah dirancang. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penjamin keberlanjutan program, akademisi memberikan pendampingan teknis dan dukungan pengetahuan, pelaku usaha menyediakan akses terhadap sumber daya dan pasar, masyarakat pembudi daya ikan melaksanakan program secara aktif, sementara media berperan dalam penyebarluasan informasi serta penguatan advokasi publik. Selanjutnya, proses *monitoring and evaluation* dilakukan secara kolaboratif untuk memastikan ketercapaian tujuan, transparansi pelaksanaan, serta kemampuan program untuk beradaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Hasil dari proses pemantauan dan evaluasi tersebut kemudian dimanfaatkan dalam tahap *learning and feedback loop*, yang memungkinkan terjadinya pembelajaran bersama dan perbaikan berkelanjutan. Mekanisme umpan balik ini memperkuat hubungan dan kepercayaan antarpemangku kepentingan, sekaligus menjaga keberlangsungan kolaborasi dalam jangka panjang. Melalui proses kolaboratif yang terintegrasi tersebut, model *pentaheliks* diharapkan mampu menghasilkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pembudi daya ikan, mendorong produktivitas dan inovasi budi daya, memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, serta membentuk jaringan kolaboratif yang kuat dan resilien antaraktor pembangunan.

Tabel 4. 15 Perbandingan Kondisi Eksisting dengan Model Ideal

Komponen	Kondisi Eksisting	Model Ideal (Perbaikan)
Starting Conditions	Ketimpangan kapasitas, <i>trust</i> rendah	Peningkatan literasi, pelatihan, dan <i>trust-building</i>
Institutional Design	Forum <i>ad hoc</i> , proyek	Forum kolaborasi formal (SK), SOP & aturan main
Facilitative Leadership	Pemerintah dominan	Pemerintah sebagai fasilitator & mediator
Collaborative Process	Sosialisasi satu arah	Dialog deliberatif, <i>co-creation</i>
Peran aktor	Parsial & tidak sinergis	Peran jelas & saling melengkapi
Outcome	Koordinasi terbatas	Kesejahteraan & keberlanjutan

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Implementasi model *Collaborative Governance Pentaheliks* dalam pemberdayaan pembudi daya ikan menuntut adanya integrasi peran lima aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis/swasta, komunitas pembudi daya ikan, serta media. Strategi implementasi dirancang dengan menekankan sinergi, partisipasi, dan keberlanjutan agar pemberdayaan tidak hanya menghasilkan peningkatan produktivitas, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan lokal.

Pertama, pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus penyedia sumber daya. Strategi implementasinya dilakukan dengan menyusun kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, membentuk forum koordinasi multi-aktor di tingkat desa hingga kabupaten, serta menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan. Dengan demikian, pemerintah menjadi motor penggerak yang memastikan arah pemberdayaan selaras dengan kepentingan keberlanjutan ekosistem perikanan.

Kedua, akademisi dan lembaga riset berfungsi sebagai penyedia pengetahuan, inovasi, dan pendamping teknis. Strategi implementasi dilakukan melalui riset terapan mengenai teknologi budi daya ramah lingkungan, penyusunan modul pelatihan berbasis bukti, serta monitoring dan evaluasi

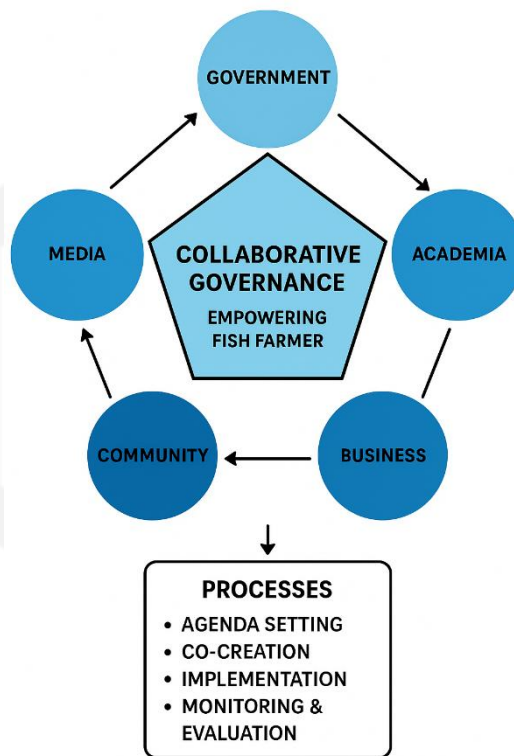
partisipatif. Peran akademisi tidak hanya menciptakan inovasi, tetapi juga memastikan transfer pengetahuan kepada pembudi daya ikan agar dapat meningkatkan keterampilan dan efisiensi usaha mereka.

Ketiga, pelaku usaha menjadi mitra strategis dalam membuka akses pasar, penyediaan input produksi, dan investasi. Implementasinya dapat dilakukan dengan membangun pola kemitraan bisnis yang adil, memperluas akses distribusi produk, serta memberikan jaminan pasar dengan harga yang kompetitif. Dengan keterlibatan pelaku usaha, pembudi daya ikan memperoleh kepastian rantai pasok dan pemasaran yang lebih stabil.

Keempat, masyarakat khususnya pembudi daya ikan menjadi aktor inti dari proses pemberdayaan. Strategi implementasi diarahkan untuk memperkuat peran pembudi daya ikan dalam pengambilan keputusan lokal, mendorong adopsi teknologi dan praktik budi daya berkelanjutan, serta mengembangkan kelembagaan ekonomi perikanan yang mandiri. Dengan penguatan kapasitas kolektif, pembudi daya ikan tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif, melainkan sebagai subjek aktif dalam tata kelola perikanan.

Kelima, media dan komunitas berperan sebagai fasilitator komunikasi, advokasi, serta penyebar informasi. Strateginya mencakup penyebarluasan inovasi, promosi praktik baik (best practices), kampanye transparansi, serta membangun jejaring komunikasi antar-pemangku kepentingan. Dengan demikian, media dan komunitas membantu menciptakan opini publik yang positif serta memastikan adanya kontrol sosial terhadap jalannya program pemberdayaan.

Gambar 4. 10 Model Kolaboratif *Pentaheliks*



Secara keseluruhan, strategi implementasi ini dilakukan melalui lima tahapan proses kolaboratif: (1) agenda setting, di mana semua aktor merumuskan masalah dan kebutuhan bersama; (2) co-creation of policy and program, yaitu perancangan program secara partisipatif; (3) implementation, di mana peran helix dijalankan sesuai kapasitas masing-masing; (4) monitoring and evaluation, untuk memastikan efektivitas dan transparansi; serta (5) learning and feedback loop, sebagai mekanisme pembelajaran bersama dan perbaikan berkelanjutan.

Dengan strategi implementasi berbasis kolaborasi ini, pemberdayaan pembudi daya ikan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun kemandirian, keadilan akses, dan tata kelola perikanan yang berkelanjutan.

Tabel 4. 16 Strategi Implementasi *Collaborative Governance Pentaelix*

Aktor (Helix)	Peran Strategis	Strategi Implementasi	Indikator Keberhasilan (Output & Outcome)
Pemerintah	Regulator, fasilitator, penyedia sumber daya	- Menyusun kebijakan adaptif dan partisipatif.	Output: Dokumen regulasi, program bantuan, forum koordinasi.
		- Menyediakan bantuan sarana, prasarana, dan akses pembiayaan.	Outcome: Tata kelola budi daya lebih partisipatif, peningkatan akses sumber daya bagi pembudi daya ikan.
		- Membentuk forum koordinasi multi-aktor di tingkat lokal.	
Akademisi	Inovator, penyedia pengetahuan, evaluator	- Melakukan riset terapan teknologi ramah lingkungan.	Output: Publikasi ilmiah, modul pelatihan, laporan evaluasi.
		- Memberikan pendampingan teknis berbasis riset.	Outcome: Adopsi inovasi budi daya, peningkatan kapasitas teknis pembudi daya ikan, kebijakan berbasis bukti.
		- Melakukan monitoring dan evaluasi kolaboratif.	
Bisnis/Swasta	Mitra pasar, penyedia input produksi, investor	- Membuka akses rantai pasok dan pemasaran.	Output: Kontrak kemitraan, distribusi input produksi, akses pasar.

		- Menyediakan sarana produksi dan teknologi.	Outcome: Peningkatan pendapatan pembudi daya ikan, stabilitas harga, akses pasar berkelanjutan.
		- Membangun pola kemitraan bisnis yang adil.	
Komunitas pembudi daya ikan	Subjek utama, pelaksana budi daya, pemilik kearifan lokal	- Aktif dalam pengambilan keputusan lokal.	Output: Partisipasi dalam forum desa, kelompok/kelembagaan ekonomi, adopsi teknologi.
		- Menerapkan teknologi dan praktik berkelanjutan.	Outcome: Kemandirian pembudi daya ikan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan lokal.
		- Berkolaborasi dalam kelembagaan ekonomi perikanan.	
Media	Fasilitator komunikasi, advokasi, edukasi publik	- Menyebarkan informasi inovasi & praktik baik.	Output: Publikasi media, kampanye edukasi, laporan advokasi.
		- Mendorong transparansi dan akuntabilitas.	Outcome: Peningkatan kesadaran publik, transparansi program, komunikasi antar-aktor yang lebih kuat.
		- Menjadi jembatan komunikasi antar-aktor.	

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan dilakukan pada Desa sentra dan/atau potensi perikanan budi daya. Desa sentra dan/atau potensi perikanan budi daya adalah suatu desa dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya berupa pembudi daya ikan, baik di darat, pesisir, maupun laut.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pembudi daya ikan skala kecil adalah mahalny harga pakan ikan (pelet), mencapai 70-80 % dari biaya produksi, ketersediaan induk atau benih unggul, kompetensi pembudi daya ikan rendah, serangan penyakit, kelembagaan usaha belum *bankable*, akses permodalan, diversifikasi usaha, dan digitalisasi usaha. Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menginisiatif adanya praktik *collaborative governance* dengan melibatkan beberapa stakeholder untuk menjadi fasilitator dalam memecahkan permasalahan pembudi daya ikan tersebut.

Dalam pelaksanaan kolaborasi pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, aktor yang dilibatkan berasal dari dua kelompok utama. Dari internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Badan Layanan Umum Lembaga Penyedia Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, aktor eksternal mencakup sektor perbankan dan perusahaan telekomunikasi sebagai mitra strategis dalam mendukung akses permodalan, teknologi, dan informasi bagi para pembudi daya ikan.

Kegiatan kolaborasi harus ada yang menginisiatif, penulis menyarankan yang menjadi inisiator adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Selanjutnya dibuat petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam petunjuk teknis tersebut diatur mengenai ruang lingkup kegiatan, tahapan kegiatan, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi. Guna mengikat pihak eksternal, dibuat perjanjian kerja sama yang memuat rencana aksi dari masing-masing aktor.

Pemberdayaan menekankan pada upaya agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Untuk itu, kegiatan awal yang dilakukan adalah memampukan pembudi daya ikan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan perikanan.

Setelah pembudi daya ikan terampil melakukan kegiatan usaha, selanjutnya dibantu melalui Bantuan Pemerintah. Bantuan tersebut dapat berupa benih, induk, pakan mandiri atau sarana dan prasarana produksi lainnya. Dengan demikian, bantuan pemerintah yang diberikan merupakan barang yang memang dibutuhkan, sehingga pembudi daya ikan dapat memanfaatkannya dengan optimal.

Pembudi daya ikan difasilitasi dalam penguatan kelembagaannya, baik berupa kelompok maupun koperasi. Dengan berkelompok, Pembudi daya ikan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan saat melakukan kegiatan usaha secara individu. Misalnya, dalam pembelian sarana produksi ataupun dalam pemasaran hasil. Kemudian untuk kegiatan pembinaan dan pendampingan juga menjadi lebih mudah.

Untuk pengembangan usaha dan meningkatkan skala produksi, pembudi daya ikan membutuhkan bantuan modal. BLU LPMU KP dapat melakukan fasilitasi akses permodalan baik kepada individu Pembudi daya ikan ataupun melalui kelompok/koperasi. Selain itu, pihak perbankan juga dapat menawarkan Kredit Usaha Rakyat.

Indonesia merupakan negara berkembang menuju negara maju. Mengacu pada teori Rostow tentang lima tahapan pembangunan, Indonesia dapat digolongkan berada pada tahap bergerak ke kedewasaan. Indonesia telah melakukan lepas landas dari negara berkembang menuju negara maju. Hal tersebut dicirikan dengan terjadinya komersialisasi usaha, kegiatan usaha sektor pertanian termasuk perikanan yang berorientasi pada pasar, dan pengembangan komoditas yang dibudi dayakan merupakan komoditas utama untuk keperluan ekspor.

Guna menuju era modernisasi dan ekspansi pasar dalam jumlah besar, diperlukan sentuhan digitalisasi. Baik dalam kegiatan proses produksi maupun dalam pemasaran hasil. Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP dapat menggandeng *startup* e-fishery dalam hal pemberian makan ikan secara otomatis atau pihak perusahaan telekomunikasi untuk menyediakan akses jaringan dan internet.

Teori modal manusia (*human capital*) menjelaskan adanya hubungan positif antara pendidikan, keterampilan, dan pendapatan individu. Semakin tinggi pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin besar potensi pendapatannya. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek:

1. Pendidikan dan Keterampilan: Pendidikan formal dan pelatihan meningkatkan kompetensi individu, yang menjadi bentuk investasi dalam modal manusia. Keterampilan ini membuat individu lebih kompetitif di pasar kerja.
2. Pendapatan: Individu yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih tinggi cenderung memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih tinggi karena permintaan terhadap tenaga kerja terampil lebih besar.
3. Produktivitas: Pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
4. Inovasi dan Daya Saing: Peningkatan keterampilan dan pengetahuan tidak hanya meningkatkan pendapatan pribadi tetapi juga mendorong inovasi dan pengembangan bidang kerja, sehingga meningkatkan daya saing.
5. Siklus Umpan Balik Positif: Pendapatan yang meningkat memungkinkan individu berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan, menciptakan siklus peningkatan kualitas hidup dan kapasitas ekonomi yang berkelanjutan.

Secara garis besar, teori *human capital* menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas, baik pada tingkat individu maupun bagi pertumbuhan ekonomi

secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekrutmen anak-anak dari komunitas pembudi daya ikan agar menempuh pendidikan di satuan pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui program ini, diharapkan akan tercipta proses regenerasi pembudi daya ikan yang berkelanjutan, sehingga pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka dapat terus ditingkatkan dari generasi ke generasi.

Model *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan dapat diterapkan melalui pendekatan spasial dan tematik pada desa sentra atau potensi perikanan budi daya dengan syarat: 1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memiliki komitmen untuk bersama-sama membangun masyarakat, khususnya pembudi daya ikan; 2) Terdapat penyuluh perikanan yang kompeten untuk mendampingi pembudi daya ikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Komitmen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa terlihat dari penyediaan anggaran, sarana-prasarana, serta fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Sementara itu, peran penyuluh perikanan sangat strategis sebagai ujung tombak Kementerian Kelautan dan Perikanan di lapangan, sehingga mereka berfungsi sebagai manajer dalam proses pemberdayaan masyarakat.

1. Roadmap Impementasi *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Pembudi Daya Ikan

Roadmap kebijakan ini disusun untuk memberikan arah implementatif selama periode 3–5 tahun dalam memperkuat praktik *collaborative governance* pada sektor perikanan budi daya di Indonesia. Roadmap ini bersifat bertahap (*phased approach*) dan menekankan penguatan aktor, kelembagaan, serta keberlanjutan kolaborasi.

a. Tahap I (Tahun 1): Konsolidasi dan Penataan Dasar Kolaborasi

- 1) Tujuan utama: membangun fondasi tata kelola kolaboratif dan menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan.
- 2) Arah kebijakan:

- a) Penegasan peran pemerintah sebagai fasilitator kolaborasi, bukan hanya regulator dan pelaksana program.
 - b) Pemetaan aktor kolaborasi perikanan budi daya di tingkat pusat, daerah, dan lokal (pembudi daya ikan, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan desa).
 - c) Penataan mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.
- 3) Agenda strategis:
- a) Penyusunan pedoman nasional *collaborative governance* perikanan budi daya.
 - b) Pembentukan forum dialog multi-aktor di tingkat daerah sentra budi daya.
 - c) Penguatan peran penyuluh perikanan sebagai penghubung antar aktor.
- 4) Output kunci:
- a) Peta aktor dan jejaring kolaborasi.
 - b) Forum kolaborasi perikanan budi daya di tingkat daerah.
 - c) Pedoman kebijakan kolaboratif.
- b. Tahap II (Tahun 2–3): Penguatan Kapasitas dan Implementasi Kolaboratif
- 1) Tujuan utama: meningkatkan kapasitas aktor dan mulai mengimplementasikan kolaborasi secara lebih setara dan terstruktur.
 - 2) Arah kebijakan:
 - a) Penguatan kelembagaan pembudi daya ikan sebagai aktor kunci dalam kolaborasi.
 - b) Pengembangan kemitraan pemerintah–swasta yang inklusif dan berkeadilan.
 - c) Integrasi perguruan tinggi dan lembaga riset dalam program pembangunan perikanan budi daya.
 - 3) Agenda strategis:
 - a) Program peningkatan kapasitas manajerial, teknis, dan kewirausahaan pembudi daya ikan.

- b) Implementasi pedoman kemitraan budi daya (inti-plasma, offtaker, CSR) berbasis prinsip keadilan.
- c) Pengembangan program pendampingan desa perikanan budi daya berbasis riset dan inovasi.
- 4) Output kunci:
 - a) Kelembagaan pembudi daya ikan yang lebih kuat dan mandiri.
 - b) Model kemitraan pemerintah–swasta yang lebih seimbang.
 - c) Transfer teknologi dan inovasi yang terintegrasi dengan kebutuhan lokal.
- c. Tahap III (Tahun 4–5): Institusionalisasi dan Keberlanjutan Kolaborasi
 - 1) Tujuan utama: menginstitusionalisasikan praktik *collaborative governance* agar berkelanjutan dan berdampak luas.
 - 2) Arah kebijakan:
 - a) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kolaboratif.
 - b) Integrasi kolaborasi perikanan budi daya ke dalam kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang.
 - c) Penguatan jejaring regional dan internasional.
 - 3) Agenda strategis:
 - a) Pengembangan indikator kinerja kolaborasi (proses dan hasil).
 - b) Pelibatan aktor nonpemerintah dalam evaluasi kebijakan dan program.
 - c) Penguatan sistem informasi digital untuk transparansi, akuntabilitas, dan pembelajaran bersama.
 - 4) Output kunci:
 - a) Sistem monitoring dan evaluasi kolaboratif yang berjalan.
 - b) Praktik kolaborasi yang terlembaga dalam regulasi dan perencanaan.
 - c) Replikasi praktik baik di berbagai wilayah perikanan budi daya.

Tabel 4. 17 Matrik *Roadmap* Kebijakan (3-5 Tahun)

Tahap & Tahun	Aktor Utama	Program Prioritas	Output Kebijakan	Indikator Keberhasilan
Tahap I (Tahun 1) Konsolidasi	KKP, Pemda, Pokdakan, Swasta/Bisnis, Perguruan Tinggi	Penyusunan pedoman <i>collaborative governance</i> ; pembentukan forum multi-aktor; pemetaan aktor	Pedoman nasional CG; forum kolaborasi daerah; peta jejaring aktor	Forum aktif; keterlibatan multi-aktor; kesepakatan peran
Tahap II (Tahun 2–3) Implementasi	KKP, Pemda, Swasta/Bisnis, Pokdakan, Perguruan Tinggi	Penguatan kelembagaan pembudi daya ikan; kemitraan inklusif; pendampingan berbasis riset	Model kemitraan adil; Pokdakan mandiri; transfer teknologi	Keseimbangan kemitraan; peningkatan kapasitas & produksi
Tahap III (Tahun 4–5) Institusionalisasi	KKP, Bappenas, Pemda, Swasta, LSM	Monitoring evaluasi kolaboratif; digitalisasi data; replikasi praktik baik	Sistem M&E CG; kebijakan terlembaga; replikasi nasional	Keberlanjutan program; kebijakan jangka panjang

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Roadmap kebijakan ini disusun berdasarkan temuan empiris, antara lain:

- Domikasi peran pemerintah dan lemahnya posisi tawar pembudi daya ikan, dijawab melalui penguatan kelembagaan pembudi daya ikan dan pergeseran peran pemerintah menjadi fasilitator.
- Kolaborasi yang masih *top-down* dan tidak berkelanjutan, dijawab melalui tahapan konsolidasi, implementasi, dan institusionalisasi kolaborasi.
- Minimnya integrasi perguruan tinggi dan riset, dijawab melalui penempatan kampus sebagai simpul pengetahuan dalam tahap implementasi.
- Ketiadaan indikator kinerja kolaborasi, dijawab melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kolaboratif.

2. Penyesuaian Roadmap Kebijakan dengan RPJMN dan RPJMD

Roadmap kebijakan ini disusun selaras dengan RPJMN dan RPJMD, dengan fokus pada penguatan mekanisme *collaborative governance* sebagai prasyarat keberhasilan implementasi program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Penyesuaian roadmap dengan RPJMN dan RPJMD dilakukan bukan pada level program, melainkan pada level tata kelola, sehingga roadmap ini bersifat komplementer dan adaptif.

a. Keterkaitan dengan RPJMN

Roadmap ini selaras dengan arah kebijakan RPJMN, khususnya pada agenda:

- 1) Penguatan ketahanan pangan nasional, melalui peningkatan produksi dan keberlanjutan perikanan budi daya.
- 2) Pembangunan ekonomi biru, dengan menekankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan efisiensi sumber daya.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan perdesaan, dengan menempatkan pembudi daya ikan sebagai aktor sentral.

Dalam konteks RPJMN, roadmap ini berfungsi sebagai instrumen penguatan proses, yakni memperbaiki mekanisme kolaborasi antar aktor dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan.

b. Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pada tingkat daerah, roadmap ini relevan dengan prioritas RPJMD, antara lain:

- 1) Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah.
- 2) Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat perdesaan.
- 3) Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif dan kolaboratif.

Roadmap dapat diintegrasikan ke dalam RPJMD melalui:

- 1) Penjabaran program pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan sebagai program lintas perangkat daerah.

- 2) Penyelarasan indikator roadmap dengan indikator kinerja utama (IKU) daerah.
- 3) Penempatan forum kolaborasi pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan sebagai bagian dari mekanisme perencanaan partisipatif daerah.

c. Matriks Penyesuaian Roadmap dengan RPJMN/RPJMD

No	Elemen Roadmap	Arah Kebijakan RPJMN	Prioritas RPJMD Daerah	Bentuk Penyesuaian
1	Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator	Reformasi birokrasi & tata kelola	Penguatan kapasitas perangkat daerah	Penataan peran OPD dan koordinasi lintas sektor
2	Penguatan kelembagaan pembudi daya ikan	Pemberdayaan masyarakat	Penguatan ekonomi local	Dukungan kelembagaan Pokdakan & koperasi
3	Kemitraan inklusif pemerintah– swasta	Peningkatan nilai tambah	Investasi daerah	Pedoman kemitraan & insentif usaha
4	Integrasi riset & inovasi	Penguatan iptek & SDM	Inovasi daerah	Kolaborasi kampus–daerah
5	Monitoring & evaluasi kolaboratif	Akuntabilitas kinerja	Tata kelola partisipatif	Indikator kinerja kolaborasi

Sumber: Diolah Penulis (2025)

d. Implikasi Penyesuaian Kebijakan

Dengan penyesuaian ini, roadmap kebijakan:

- 1) Mendukung pencapaian target RPJMN dan RPJMD secara substansial.
- 2) Memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan implementasi sesuai konteks lokal.
- 3) Memperkuat kesinambungan kebijakan lintas periode perencanaan.

D. Validasi Model

Tahap awal proses validasi model dilakukan melalui penyajian awal model pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan kepada para pemangku kepentingan dalam forum Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD). FGD ini

melibatkan perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah desa di Kabupaten Banyumas, akademisi, sektor bisnis perikanan, pembudi daya ikan, serta media. Penyajian model bertujuan untuk membangun pemahaman bersama (*shared understanding*) mengenai kerangka model yang dikembangkan, termasuk tujuan, komponen utama, peran masing-masing aktor, serta mekanisme kolaborasi yang dirancang dalam konteks pengembangan perikanan budi daya di Kabupaten Banyumas.

Dalam penyajian tersebut, penulis menjelaskan latar belakang penyusunan model yang didasarkan pada kondisi empiris pembudi daya ikan di Banyumas, seperti dominannya skala usaha kecil, ketergantungan pada dukungan pemerintah, serta keterbatasan akses terhadap teknologi, permodalan dan pasar. Model disampaikan secara visual dan naratif agar mudah dipahami oleh seluruh peserta FGD, khususnya pembudi daya ikan. Tahap ini juga dimanfaatkan sebagai ruang klarifikasi awal, di mana peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait konsep, asumsi dasar, dan alur kolaborasi antar-aktor dalam model. Hasil dari tahap ini menunjukkan bahwa seluruh peserta FGD memiliki pemahaman yang relatif seragam terhadap model yang dikembangkan, sehingga proses validasi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Validasi model pengembangan *collaborative governance* dilakukan untuk memastikan bahwa model yang disusun memiliki validitas teoretis, empirik, dan kebijakan, sehingga layak digunakan sebagai kerangka analisis dan rekomendasi dalam disertasi. Proses validasi bertujuan menilai kesesuaian model dengan teori utama (Ansell & Gash, 2008), relevansi dengan konteks empiris Kabupaten Banyumas, serta keterterapan model dalam praktik kebijakan pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan.

Pendekatan validasi yang digunakan adalah *expert judgment* dan *stakeholder validation*, yang lazim digunakan dalam penelitian kebijakan dan pengembangan model tata kelola publik. Validator terdiri atas akademisi, praktisi kebijakan, dan perwakilan pemangku kepentingan sektor perikanan.

Kriteria validitas model pengembangan *collaborative governance* ditetapkan sebagai berikut:

1. Validitas Konseptual: sejauh mana model konsisten dengan teori *collaborative governance* Ansell & Gash (2008).
2. Validitas Substantif: kesesuaian substansi model dengan permasalahan pemberdayaan pembudi daya ikan.
3. Validitas Kontekstual: relevansi model dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan Kabupaten Banyumas.
4. Validitas Operasional: kejelasan tahapan, aktor, dan mekanisme implementasi model.
5. Validitas Kebijakan: potensi model untuk diimplementasikan dalam kebijakan dan program pemerintah daerah.

Model dinyatakan valid apabila memenuhi seluruh kriteria dengan kategori minimal "baik" berdasarkan penilaian validator.

Tahap kedua difokuskan pada penilaian kesesuaian model pemberdayaan dengan kondisi empiris pengembangan perikanan budi daya di Kabupaten Banyumas. Pada tahap ini, diskusi diarahkan untuk menggali pandangan dan pengalaman masing-masing aktor terkait relevansi model dengan realitas lapangan. Pembudi daya ikan menyampaikan bahwa model telah mencerminkan kebutuhan utama mereka, khususnya terkait pendampingan teknis, akses permodalan, serta dukungan pemasaran hasil budi daya. Model dinilai sejalan dengan kondisi kelompok pembudi daya ikan di Banyumas yang masih membutuhkan penguatan kapasitas dan kelembagaan.

Perwakilan pemerintah daerah menilai bahwa model yang dikembangkan memiliki kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Banyumas, terutama dalam mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah melihat model ini berpotensi menjadi kerangka kerja kolaboratif yang dapat mendukung efektivitas program pemberdayaan pembudi daya ikan yang telah berjalan. Sementara itu, akademisi menilai bahwa model telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pemberdayaan

masyarakat dan kolaborasi multipihak secara konseptual, meskipun tetap diperlukan penyesuaian pada aspek implementasi agar lebih adaptif terhadap dinamika lokal.

Dari sisi sektor bisnis dan media, model dinilai relevan karena membuka ruang kemitraan yang lebih jelas dan terstruktur. Sektor bisnis melihat peluang penguatan rantai nilai perikanan budi daya, sedangkan media menilai model tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi diseminasi informasi, promosi produk, dan edukasi publik terkait perikanan budi daya di Banyumas. Secara keseluruhan, hasil diskusi pada tahap ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan kondisi empiris di Kabupaten Banyumas, sehingga layak untuk dilanjutkan ke tahap evaluasi peran dan penyempurnaan model.

Tabel 4. 18 Hasil Validasi Model Pengembangan *Collaborative Governance*

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Penilaian Validator	Keterangan
1	Validitas Konseptual	Kesesuaian dengan Ansell & Gash	Sangat Baik	Selaras dengan kerangka teori utama
2	Validitas Substantif	Relevansi dengan isu pembudi daya ikan	Baik	Perlu penegasan konteks local
3	Validitas Kontekstual	Kesesuaian dengan kondisi Banyumas	Baik	Sudah kontekstual namun perlu contoh empiris
4	Validitas Operasional	Kejelasan tahapan & peran aktor	Cukup	Perlu perincian peran actor
5	Validitas Kebijakan	Keterterapan dalam kebijakan daerah	Baik	Dapat diintegrasikan dengan program daerah

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Tahap berikutnya difokuskan pada identifikasi potensi kelemahan dan tantangan implementasi model. Peserta FGD mengemukakan sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan koordinasi lintas sektor, perbedaan kepentingan antar-aktor, serta keterbatasan kapasitas pembudi daya ikan dalam mengakses teknologi dan informasi. Media juga menyoroti tantangan dalam penyampaian informasi yang berkelanjutan dan konsisten kepada masyarakat. Identifikasi ini menjadi dasar penting untuk melakukan penyempurnaan model agar lebih adaptif terhadap dinamika lapangan.

Berdasarkan proses validasi, masukan utama dari para validator dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Model perlu mempertegas keterkaitan langsung dengan teori Ansell & Gash, terutama pada komponen *collaborative process*.
2. Perlu penambahan contoh empiris lokal yang menggambarkan kondisi pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas.
3. Peran masing-masing aktor Pentaheliks perlu dirinci agar tidak bersifat normatif.
4. Mekanisme evaluasi dan umpan balik kolaborasi perlu diperjelas untuk menegaskan sifat siklikal model.

Berdasarkan hasil diskusi, peserta FGD secara bersama-sama merumuskan rekomendasi penyempurnaan model. Rekomendasi tersebut meliputi penguatan mekanisme koordinasi antar-aktor, penegasan peran penyuluh perikanan sebagai penghubung lapangan, serta pemanfaatan media secara lebih optimal dalam mendukung edukasi, promosi, dan pemasaran produk perikanan budi daya. Rekomendasi ini menunjukkan adanya proses pembelajaran bersama (*shared learning*) di antara para pemangku kepentingan.

Tabel 4. 19 Revisi Model Pengembangan *Collaborative Governance*

No	Masukan Validator	Revisi yang Dilakukan	Dampak terhadap Model
1	Keterkaitan teori belum eksplisit	Penegasan terminologi Ansell & Gash	Model lebih kuat secara teoretis
2	Kurang konteks lokal	Penambahan konteks Banyumas	Model lebih kontekstual
3	Peran aktor belum jelas	Perincian peran Pentaheliks	Model lebih operasional
4	Evaluasi belum terlihat	Penambahan siklus evaluasi	Model bersifat adaptif

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Revisi yang dilakukan berdasarkan masukan validator memberikan beberapa dampak positif terhadap kualitas model. Pertama, model menjadi lebih teoretis konsisten, karena terminologi dan struktur secara eksplisit mengacu pada kerangka Ansell & Gash (2008). Kedua, model menjadi lebih empirik dan kontekstual, karena disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Banyumas dan kondisi pembudi daya ikan. Ketiga, model menjadi lebih operasional dan aplikatif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan.

Tahap akhir dari proses validasi adalah penegasan terhadap validitas dan kelayakan model. Model yang telah disempurnakan dinilai telah memenuhi aspek kesesuaian konseptual dan kelayakan implementasi. Para peserta FGD menyepakati bahwa model pemberdayaan yang dikembangkan dapat diterapkan sebagai acuan kolaborasi multipihak dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Dengan demikian, proses validasi melalui FGD menghasilkan model yang tidak hanya tervalidasi secara akademik, tetapi juga memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan utama

Berdasarkan hasil validasi dan revisi, dapat disimpulkan bahwa model pengembangan *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas telah memenuhi kriteria validitas konseptual, substantif, kontekstual, operasional, dan kebijakan. Dengan demikian,

model ini dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai kerangka analisis dan dasar perumusan rekomendasi kebijakan dalam disertasi.

P
S
J

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang disusun pada Bab 1 (satu) dan hasil analisis yang telah dijelaskan pada Bab 4 (empat), maka kesimpulan penelitian Disertasi ini adalah:

1. Berdasarkan analisis konseptual dan temuan empiris pada pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya praktik *collaborative governance* disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, kelembagaan, dan proses yang saling terkait. Kolaborasi yang berlangsung masih cenderung bersifat formal-administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kolaborasi yang setara, partisipatif, dan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan dalam kerangka Ansell dan Gash (2008).
 - a. Pertama, faktor kondisi awal (*starting conditions*) menjadi penyebab utama. Ketimpangan sumber daya, kekuasaan, pengetahuan, dan akses informasi antaraktor khususnya antara pemerintah dan masyarakat pembudi daya ikan menyebabkan posisi tawar masyarakat relatif lemah. Selain itu, pengalaman kolaborasi sebelumnya yang terbatas dan minimnya kepercayaan (*trust*) antar aktor menghambat terbentuknya komitmen bersama. Kondisi ini membuat partisipasi pembudi daya ikan cenderung bersifat pasif dan belum berkembang menjadi kemitraan yang sejajar.
 - b. Kedua, dari aspek desain kelembagaan, belum terdapat mekanisme kolaborasi yang jelas dan terintegrasi. Kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktor *Pentaheliks* seperti akademisi, dunia usaha, dan media, masih berlangsung secara parsial dan berbasis proyek. Ketiadaan aturan main yang mengatur peran, tanggung jawab, serta mekanisme pengambilan keputusan bersama menyebabkan kolaborasi tidak

berkelanjutan dan sangat bergantung pada inisiatif aktor tertentu, terutama pemerintah.

- c. Ketiga, faktor kepemimpinan fasilitatif juga belum berjalan optimal. Peran pemerintah masih dominan sebagai pelaksana program, bukan sebagai fasilitator kolaborasi. Kepemimpinan yang seharusnya mampu menjembatani kepentingan, membangun kepercayaan, dan mendorong dialog inklusif belum sepenuhnya terwujud. Akibatnya, ruang deliberasi yang memungkinkan masyarakat pembudi daya ikan menyampaikan aspirasi dan pengetahuan lokal secara setara masih terbatas.
- d. Keempat, dari sisi proses kolaboratif, tahapan dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan, dan pembelajaran bersama (*shared understanding*) belum berlangsung secara konsisten. Forum-forum partisipatif yang ada lebih berfungsi sebagai sarana sosialisasi kebijakan dibandingkan ruang perumusan bersama. Hal ini menyebabkan hasil kolaborasi belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat pembudi daya ikan.

2. Model pengembangan *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas menekankan penguatan kondisi awal, desain kelembagaan yang jelas, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif yang deliberative serta menghargai partisipatif dan pengetahuan lokal pembudi daya ikan. Melalui integrasi aktor *Pentaheliks* dan reposisi pembudi daya ikan sebagai subjek kolaborasi, model ini diharapkan mampu mendorong kolaborasi yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudi daya ikan.

B. Saran

1. Untuk memperkuat *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, rekomendasi ini ditujukan untuk menjawab permasalahan koordinasi, ketimpangan kapasitas aktor, serta keberlanjutan kelembagaan dalam praktik kolaborasi yang telah berjalan, yaitu:

a. Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator kolaborasi

Pemerintah perlu menggeser peran dominannya dari sekadar regulator dan pelaksana program menjadi **fasilitator kolaborasi** antar pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Penyusunan kebijakan yang mendorong keterlibatan aktif pembudi daya ikan, sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan program perikanan budi daya.
- 2) Penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan (pusat–provinsi–kabupaten–desa) agar kebijakan lebih sinkron dan adaptif terhadap kondisi lokal.
- 3) Penyediaan ruang dialog formal dan berkelanjutan sebagai sarana membangun kepercayaan dan pemahaman bersama.

b. Penguatan kelembagaan pembudi daya ikan sebagai aktor kunci

Keberhasilan *collaborative governance* sangat ditentukan oleh kapasitas aktor lokal. Oleh karena itu, kebijakan perlu diarahkan pada:

- 1) Penguatan kelembagaan kelompok pembudi daya ikan, koperasi, dan kelembagaan desa agar memiliki posisi tawar yang lebih seimbang dalam kolaborasi.
- 2) Peningkatan kapasitas manajerial, teknis, dan kewirausahaan pembudi daya ikan melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan berbasis kebutuhan.
- 3) Pengakuan dan integrasi pengetahuan lokal pembudi daya ikan dalam perumusan kebijakan dan inovasi teknologi budi daya.
- 4) Pengembangan Kemitraan Pemerintah–Swasta yang Inklusif dan Berkeadilan

Kemitraan dengan sektor swasta perlu dirancang secara lebih inklusif untuk menghindari relasi yang asimetris. Rekomendasi kebijakan meliputi:

- 1) Penyusunan pedoman kemitraan perikanan budi daya yang menjamin keadilan bagi pembudi daya ikan, termasuk transparansi harga, pembagian risiko, dan akses pasar.
 - 2) Insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil.
 - 3) Pengawasan dan evaluasi kemitraan secara berkala untuk memastikan tujuan publik tetap tercapai.
- c. Integrasi perguruan tinggi dan lembaga riset dalam sistem kolaborasi
- Perguruan tinggi dan lembaga riset perlu ditempatkan sebagai simpul pengetahuan dalam *collaborative governance*. Kebijakan yang direkomendasikan antara lain:
- 1) Integrasi hasil riset dan inovasi teknologi ke dalam program pemerintah daerah dan nasional secara sistematis.
 - 2) Penguatan skema kolaborasi riset terapan yang melibatkan pembudi daya ikan dan sektor swasta sejak tahap perencanaan.
 - 3) Dukungan kebijakan bagi program pendampingan berbasis riset di desa-desa perikanan budi daya.
- d. Penguatan sistem koordinasi, monitoring, dan evaluasi kolaboratif
- Untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif, antara lain:
- 1) Pengembangan indikator kinerja kolaborasi yang tidak hanya mengukur output produksi, tetapi juga kualitas proses kolaboratif (kepercayaan, partisipasi, dan komitmen aktor).
 - 2) Pelibatan pembudi daya ikan dan aktor nonpemerintah dalam evaluasi kebijakan dan program perikanan budi daya.
 - 3) Pemanfaatan sistem informasi digital sebagai sarana berbagi data, transparansi, dan akuntabilitas.
- e. Penciptaan lingkungan kebijakan yang mendukung keberlanjutan
- Rekomendasi terakhir menekankan pentingnya konsistensi kebijakan jangka panjang, antara lain:

- 1) Penyelarasan kebijakan perikanan budi daya dengan agenda pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan ekonomi biru.
 - 2) Kepastian regulasi dan dukungan anggaran yang berkelanjutan untuk program kolaboratif.
 - 3) Penguatan jejaring regional dan internasional sebagai sarana pembelajaran dan pertukaran praktik terbaik.
2. Untuk meningkatkan efektivitas model *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan, semua aktor wajib dilibatkan mulai dari tahapan identifikasi permasalahan, penyusunan regulasi dan rencana aksi sampai tahap implementasi;
 3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran (mixed-method) untuk mengukur secara lebih sistematis efektivitas model *collaborative governance* terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat pembudi daya ikan, serta dapat menyusun indikator keberhasilan yang lebih komprehensif, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, untuk menilai dampak kolaborasi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aber et. al. 2011. *Empowering Settings and Voices for Social Change*. *International Social Work*. 56(1): 103 – 108
- Adiprayoga, S. N., & Samiaji, J. 2021. *Opportunities and Strategies for the Blue Economy through the Empowerment of Sumatera Coastal Communities in Supporting the Realization of the National Food Security*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 934(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/934/1/012039>
- Adiwijaya, et. al. 2021. Empowerment of Riverside Communities in Sustainable Environmental Management (Study in Petuk Katimpun Village, Jekan Raya District, Palangka Raya City). *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 8(4), 374–385. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v8i4.174>
- Agrawal, A., & Ribot, J. C. (1999). Accountability in decentralization: A framework with South Asian and West African cases. *The Journal of Developing Areas*, 33(4), 473–502.
- Al Arif, A., & Karim, M. S. 2022. *Marine Fisheries Act 2020 of Bangladesh: A Missed Opportunity for Sustainability and Collaborative Governance*. *International Journal of Marine and Coastal Law*, 37(2), 337–349. <https://doi.org/10.1163/15718085-bja10075>
- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Ansell, C., & Gash, A. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, et. al. 2020. *Understanding inclusion in collaborative governance: a mixed methods approach*. *Policy and Society*, 39(4), 570–591. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726>
- Arantes, V. et al. 2020. *Coping with waste: A government-NGO collaborative governance approach in Shanghai*. *Journal of Environmental Management*, 259, 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109653>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.

- Astuti, R.S dan Hardi Warsono, A.R. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Astuti, Z., Sukmana, O., & Hidayat, A. (2020). Model kolaborasi penta helix dalam pengembangan pembangunan berbasis inovasi daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 123–136.
- Astuti, Z., Sukmana, O., & Hidayat, A. (2020). *Kolaborasi penta helix dalam pembangunan dan inovasi daerah*. Malang: CV IRDH.
- Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bass, B. M. (1990). *Bass & Stogdill's handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications* (3rd ed.). Free Press.
- Batory, A., & Svensson, S. 2019. *The fuzzy concept of collaborative governance : A systematic review of the state of the art*. 13(2), 28–39. <https://doi.org/10.2478/cejpp-2019-0008>
- Bene, C. 2004. *Empowerment reform, yes but empowerment of whom? Fisheries decentralization reforms in developing countries: a critical assessment with specific reference to poverty reduction*. Aquatic Resources, Culture and Development, 1(1), 35. <https://doi.org/10.1079/arc20047>
- Booher, D. E., & Innes, J. E. 2002. *Network power in collaborative planning*. Journal of Planning Education and Research, 21(3), 221–236. <https://doi.org/10.1177/0739456X0202100301>
- Bovaird, T. (2007). Beyond engagement and participation: User and community co-production of public services. *Public Administration Review*, 67(5), 846–860.
- Bovaird, T and Löffler E (ed). 2009. *Public Management and Governance*, London: Routledge
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). ‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3–4), 201–234.

- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple helix, quadruple helix and quintuple helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41–69.
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and development in Latin America*. University of California Press.
- Chambers, R. (1992). *Rural appraisal: Rapid, relaxed and participatory*. IDS Discussion Paper No. 311. Brighton, UK: Institute of Development Studies.
- Chambers, R. (1994a). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
- Chambers, R. (1994b). Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90030-2)
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. London, UK: Intermediate Technology Publications.
- Chambers, R., Pacey, A., & Thrupp, L. A. (Eds.). (1989). *Farmer first: Farmer innovation and agricultural research*. London, UK: Intermediate Technology Publications.
- Chrislip, D. D., & Larson, C. E. (1994). *Collaborative leadership: How citizens and civic leaders can make a difference*. Jossey-Bass.
- Crosby, B. C., & Bryson, J. M. (2005). *Leadership for the common good: Tackling public problems in a shared-power world* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). New York, NY: Routledge.
- Dewandaru, B., Rahmadi, A. N., & Sudjiono, S. (2021). *Improving small and medium business innovation knowledge transfer through Triple Helix agents*. *Balance: Jurnal Ekonomi*, 17(2), 196–204. <https://doi.org/10.26618/jeb.v17i2.6519>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.

- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Eade, D. (1997). *Capacity-building: An approach to people-centred development*. Oxfam.
- Etzioni, A. (1967). Mixed-scanning: A “third” approach to decision-making. *Public Administration Review*, 27(5), 385–392.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and ‘Mode 2’ to a triple helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- FAO. (2018). *The state of world fisheries and aquaculture 2018: Meeting the sustainable development goals*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2020). *The state of world fisheries and aquaculture 2020: Sustainability in action*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2022). *WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE*.
- FAO. (2024). *WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE*.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.
- Friedman, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Hong dan Jungmin Ryu. 2019. *Crowdfunding public projects: Collaborative governance for achieving citizen co-funding of public goods*. Government Information Quarterly Volume 36, Issue 1 <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.11.009>
- Hua, G., Xuan, Y., Wong, J., Shen, Y., & Xia, J. (2024). Aquaculture species diversification in China. *Aquaculture and Fisheries*, 9(2), 206–217. <https://doi.org/10.1016/j.aaf.2022.12.001>
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: Model & strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Bandung: Humaniora.

- Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). *Kebijakan pembangunan perikanan budi daya berkelanjutan*. KKP RI.
- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Pearson.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.
- Lasswell, H. D. (1956). *The decision process: Seven categories of functional analysis*. University of Maryland Press.
- Lindblom, C. E. (1959). The science of "muddling through." *Public Administration Review*, 19(2), 79–88.
- Manam, V. K., & Quraishi, M. A. (2024). *Comprehensive review on Indian major carps : An integrated approach to pond cultivation , nutrition , and health management for sustainable aquaculture*. 12(1), 1–12.
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. London: Sage Publications.
- Newton R., et. al. (2021). Intensification , regulation and diversi fication : The changing face of inland aquaculture in China. *Ambio*, 50(9), 1739–1756. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01503-3>
- Nguyen, T. A. T., & Curtis M. Jolly. (2020). Global value chain and food safety and quality standards of Vietnam pangasius exports. *Aquaculture Reports*, 16(November 2019), 100256. <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2019.100256>
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. London, UK: Routledge.

- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579.
- Pigou, A. C. (1920). *The economics of welfare*. London: Macmillan.
- Pramono, T. B., Junaidi, T., Setyawan, A. C., Prayogo, N. A., Hilmi, E., Syakuri, H., Wijayanti, N., Widyasunu, P., Undiono, U., & Sumaryadi, M. Y. (2023). Problematika dan Tantangan Pengembangan Industri Akuakultur di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam Mewujudkan Smart Fisheries Villages. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 5, 157–163. <https://doi.org/10.30595/pspfs.v5i.717>
- Pretty, J. N., Guijt, I., Scoones, I., & Thompson, J. (1995). *Participatory learning and action: A trainer's guide*. London, UK: International Institute for Environment and Development.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Röling, N. G., & Wagemakers, M. A. E. (Eds.). (1998). *Facilitating sustainable agriculture: Participatory learning and adaptive management in times of environmental uncertainty*. Cambridge University Press.
- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. Cambridge University Press.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Sabatier, P. A. (1998). The advocacy coalition framework: Revisions and relevance for Europe. *Journal of European Public Policy*, 5(1), 98–130.
- Scott, T. A. (2021). *Graph Models : Do Government-Sponsored Collaborative Groups*. 44(2), 215–244. <https://doi.org/10.1111/psj.12118.Analyzing>
- Seers, D. (1969). The meaning of development. *International Development Review*, 11(4), 2–6.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sianipar, C. P. M., Dowaki, K., Yudoko, G., & Adhiutama, A. (2013). Designing policy for sustainable development of marine ecotourism: A hybrid MCDM approach. *Ocean & Coastal Management*, 82, 17–29.

- Streeten, P., Burki, S. J., ul Haq, M., Hicks, N., & Stewart, F. (1981). *First things first: Meeting basic human needs in developing countries*. Oxford University Press.
- Sudarmo. (2015). *Public policy and governance: Kolaborasi dan jaringan*. Gava Media.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston, MA: Pearson.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- United Nations Development Programme. (1990). *Human development report 1990*. New York: Oxford University Press.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2016). *Mainstreaming the SDGs into national development planning*. United Nations Development Programme.
- WCED. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Williams, P. (2002). The competent boundary spanner. *Public Administration*, 80(1), 103–124. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00296>
- Weber, M. (1946). *From Max Weber: Essays in sociology* (H. H. Gerth & C. W. Mills, Eds.). New York, NY: Oxford University Press.
- Wilson, W. (1887). The study of administration. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197–222. <https://doi.org/10.2307/2139277>
- World Bank. (2000). *World development report 2000/2001: Attacking poverty*. Oxford University Press.
- Yang, K. (2017). *Collaborative governance*. In E. Berman, J. S. Bowman, J. P. West, & M. R. Van Wart (Eds.), *Public administration and management: Concepts and practices* (pp. 1–24). Routledge.
- Yin, R. K. (1994). *Case study research: Design and methods* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Yun, J. J., & Liu, Z. (2019). *Micro- and macro-dynamics of open innovation with a Quadruple-Helix model*. Sustainability, 11(12), 3301.
<https://doi.org/10.3390/su11123301>

Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Pearson Education.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budi Daya

Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

<https://worldpoverty.io/> diakses pada tanggal 10 November 2024

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html> diakses 10 November 2024

<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>

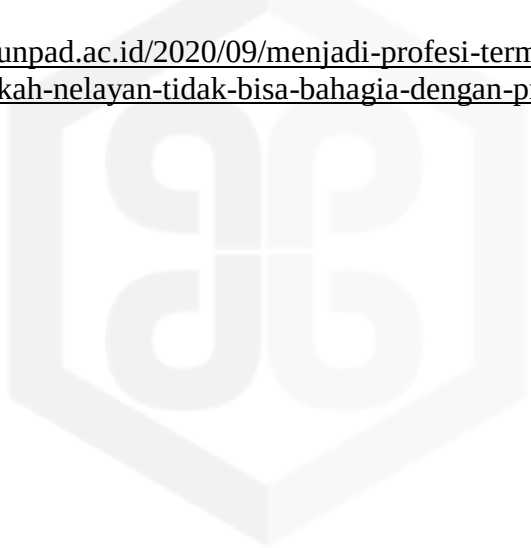
https://statistik.kkp.go.id/mobile/asset/book/Buku_KPDA_2024_050724_FINAL_FIX_FP_SP.pdf

<https://ppid.kemenkopmk.go.id/info-serta-merta/Data%20Kemiskinan%20dan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20di%20Indonesia.pdf> Data Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia.pdf

<https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE0NSMy/volume-produksi-perikanan-budi-daya-menurut-jenis-budi-daya-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>

<https://www.akurat.co/rill/1302019920/Nelayan-dan-Pembudi-Daya-Miskin-Jadi-Tantangan-Memperkuat-Industri-Maritim>

<https://www.unpad.ac.id/2020/09/menjadi-profesi-termiskin-di-indonesia-benarkah-nelayan-tidak-bisa-bahagia-dengan-profesinya/>



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A